



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025
NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.09/37/7/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. RPJMD berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Perencanaan jangka menengah hadir dalam bentuk instrumentasi yang lebih operasional dari perencanaan jangka panjang, serta menghubungkan pada agenda pembangunan setiap tahunnya.

RPJMD juga menjadi instrumen keterpaduan antara berbagai pendekatan perencanaan. RPJMD memadukan antara pendekatan politik dan teknokratik. Pendekatan teknokratik mengambil langkah sebagai kerangka awal pada perencanaan jangka menengah sebelum pendekatan politik dilakukan oleh calon kepala daerah. Dalam hal ini, perencanaan teknokratik tersusun lebih dahulu dan harus menjadi acuan bagi calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi dan program. Penggunaan dasar teknokratik pada perumusan visi, misi, dan program dari calon kepala daerah diharapkan mampu selaras dengan kebutuhan pembangunan dan mampu meningkatkan kinerja pembangunan.

Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan dinamis dan pesat. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah diraih, tetapi tidak luput juga dari permasalahan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan periode RPJMD sebelumnya. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara menjadikan kondisi tersebut di satu sisi menjadi peluang, tetapi di sisi lain menambah kompleksitas pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka menengah berupa Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam mempertahankan keberhasilan yang telah diraih, merespon isu strategis, dan sekaligus merespon pembangunan IKN dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berangkat dari hal tersebut, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 penting untuk disusun. Dokumen ini akan menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional dan akan memandu arah pembangunan Penajam Paser Utara untuk lima tahun ke depan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi.

Sebagai Daerah yang berbatasan langsung dan secara strategis menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi tantangan dan peluang pembangunan yang sangat signifikan dalam lima tahun ke depan. RPJMD 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan wilayah dalam konteks nasional dan global, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), pembangunan hijau (*green economy*), dan transformasi kelembagaan. Penyusunan RPJMD selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga berpedoman pada:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan pentingnya:
 - a. sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJPD;
 - b. integrasi dengan arah pembangunan kawasan IKN;
 - c. pelaksanaan pendekatan holistik: teknokratik, politis, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*;
 - d. integrasi substansi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, serta transformasi tata kelola pemerintahan digital dan inklusif.
2. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI 2024–2029, yang menjadi kerangka visi pembangunan nasional, yakni delapan agenda strategis negara yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah, yaitu:
 - a. peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif;
 - b. pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk ekonomi hijau dan ekonomi digital;
 - c. penguatan sistem hukum dan demokrasi, yang bersih dan berintegritas;
 - d. revolusi mental dan reformasi birokrasi, termasuk digitalisasi layanan;
 - e. penguatan ketahanan nasional, baik sosial, pangan, energi, maupun lingkungan;
 - f. percepatan pembangunan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
 - g. penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; dan
 - h. pengembangan budaya dan inovasi, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mitra strategis IKN dituntut untuk memosisikan diri bukan hanya sebagai “penyangga”, tetapi sebagai motor akseleratif pembangunan regional. Oleh karena itu, RPJMD ini menyusun strategi pembangunan yang responsif terhadap arah pembangunan kawasan IKN, termasuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan pemukiman yang layak, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia lokal serta peningkatan daya saing sektor unggulan daerah. Tantangan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara harus direspon dengan arah kinerja dan strategi pembangunan yang tepat untuk lima tahun ke depan. Pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045 yang memiliki tema pembangunan “Penguatan Fondasi Transformasi”. Periode pertama sebagai tahapan perkuatan fondasi sangat kritikal dan strategis untuk menentukan efektivitas pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang dalam rangka mencapai visi “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 54.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	6
1.3.1 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029	7
1.3.2 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	8
1.3.3 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Penajam Paser Utara	8
1.3.4 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	9
1.3.5 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara	10
1.3.6 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RIPJPID Kabupaten Penajam Paser Utara	11
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.4.1 Maksud	12
1.4.2 Tujuan.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	15
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	15
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	16
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	20
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	28
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	31
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	38

2.1.6	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	43
2.1.7	Demografi.....	61
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	76
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	77
2.2.2	Kesehatan untuk Semua.....	88
2.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	93
2.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	99
2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	100
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	104
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	111
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	111
2.3.2	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	112
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	125
2.3.4	Transformasi Digital	127
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	130
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	132
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	144
2.3.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.....	144
2.3.7.2	Tingkat Inflasi	145
2.4	Aspek Pelayanan Umum	146
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	147
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	151
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	157
2.4.4	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	157
2.5	Gambaran Keuangan Daerah.....	168
2.5.1	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024.....	168
2.5.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030.....	216
2.6	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.....	245
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	245
2.6.2	Isu Strategis.....	260

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	292
3.1 Visi dan Misi.....	293
3.1.1 Visi	293
3.1.2 Misi	295
3.1.3 Keterkaitan Visi dan Misi.....	300
3.1.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD terhadap RPMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN	301
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	304
3.3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	308
3.3.1 Penahapan Pembangunan RPJMD	309
3.3.2 Arah Kebijakan	342
3.3.3 Program Prioritas Daerah.....	356
3.3.4 Arah Pembangunan Kewilayahan	379
3.3.5 Dukungan Program Strategis Nasional	419
3.3.6 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025- 2029 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	420
3.3.7 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025- 2029 Terhadap Program Kerja Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	426
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	429
4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	429
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	557
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.....	557
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	558
BAB V PENUTUP	590

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Kecamatan	17
Tabel 2. 2 Perubahan luas wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara	18
Tabel 2. 3 Produksi Padi Kabupaten Penajam Paser Utara	25
Tabel 2. 4 Luas Area Status Daya Dukung Penyedia Air	28
Tabel 2. 5 Luas Area Status Daya Dukung Pangan	29
Tabel 2. 6 Produksi, Penjualan, dan Pemakaian Listrik pada PLN Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	34
Tabel 2. 7 Kapasitas Embung di Kabupaten Penajam Paser Utara	35
Tabel 2. 8 Luas Bendungan Kabupaten Penajam Paser Utara	35
Tabel 2. 9 Luas Cekungan Air Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara	36
Tabel 2. 10 Cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara	40
Tabel 2. 11 Penanganan Sampah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 2. 12 Bank Sampah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.....	42
Tabel 2. 13 Kejadian Bencana Tanah Longsor dari Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 2. 14 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara	46
Tabel 2. 15 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara	48
Tabel 2. 16 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara	49
Tabel 2. 17 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara	49
Tabel 2. 18 Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	51
Tabel 2. 19 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	56
Tabel 2. 20 Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara	56
Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Terkait Peningkatan Kapasitas Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara	60

Tabel 2. 22 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	65
Tabel 2. 23 Kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2024	66
Tabel 2. 24 Proyeksi Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara per Kecamatan Tahun 2025-2029.....	70
Tabel 2. 25 Proyeksi komposisi umur penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara per Kecamatan Tahun 2025-2029.....	72
Tabel 2. 26 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	78
Tabel 2. 27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara	87
Tabel 2. 28 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2023.....	102
Tabel 2. 29 Kluster pembentuk indeks perlindungan anak Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.....	105
Tabel 2. 30 Data Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024	115
Tabel 2. 31 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 – 2024.....	122
Tabel 2. 32 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024.....	126
Tabel 2. 33 Banyaknya Arus Lalu Lintas Transportasi Laut/Sungai di Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	134
Tabel 2. 34 Banyaknya Penumpang Transportasi Laut/Sungai di Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	134
Tabel 2. 35 Pelabuhan sungai danau, pelabuhan penyeberangan, dan terminal umum....	138
Tabel 2. 36 Banyaknya Penumpang Speed Boat dan Kapal Kelotok di Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024.....	138
Tabel 2. 37 Banyaknya Kendaraan Penumpang Umum yang Berangkat dan Tiba Melalui Terminal Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024	140
Tabel 2. 38 Jumlah <i>backlog</i> perumahan dan rumah tidak layak huni	141
Tabel 2. 39 Status desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	142
Tabel 2. 40 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.....	157

Tabel 2. 41 Capaian kinerja indikator makro pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	158
Tabel 2. 42 Capaian indikator kinerja kunci pemerintah daerah	158
Tabel 2. 43 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	170
Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	176
Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	178
Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	179
Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	181
Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	183
Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	184
Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	186
Tabel 2. 51 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	188
Tabel 2. 52 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	189
Tabel 2. 53 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Antar Daerah, 2020-2024 (Rp. Miliar)	190
Tabel 2. 54 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	191
Tabel 2. 55 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	192
Tabel 2. 56 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	193

Tabel 2. 57 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	195
Tabel 2. 58 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	196
Tabel 2. 59 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	197
Tabel 2. 60 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	200
Tabel 2. 61 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	202
Tabel 2. 62 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	203
Tabel 2. 63 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)	204
Tabel 2. 64 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	206
Tabel 2. 65 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030	217
Tabel 2. 66 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030.....	221
Tabel 2. 67 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030	229
Tabel 2. 68 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030	237
Tabel 2. 69 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030	241
Tabel 2. 70 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor.....	246
Tabel 2. 71 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.....	250
Tabel 2. 72 Telaah Isu Strategis Internasional	261
Tabel 2. 73 Arah Kebijakan Periode Pertama RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	265
Tabel 2. 74 Penentuan isu strategis RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	283

Tabel 3. 1 Penyandingan Visi dan Misi RPJMD Penajam Paser Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN Tahun 2025-2029.....	302
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.....	305
Tabel 3. 3 Penyelarasan Target Makro RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029	308
Tabel 3. 4 Penyelarasan tujuan, sasaran dan strategi RPJMD.....	317
Tabel 3. 5 Penyelarasan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	343
Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	357
Tabel 3. 7 Rincian Program Unggulan (Janji Politik) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.....	371
Tabel 3. 8 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	380
Tabel 3. 9 Indikasi program utama RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara.....	385
Tabel 3. 10 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	420
Tabel 3. 11 Penyelarasan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	424
Tabel 3. 12 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	426
 Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.....	 430
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Penajam Paser Utara.....	557
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.....	559
Tabel 4. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2030	564

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD	3
Gambar 1. 2 Hubungan antar dokumen RPJMD terhadap dokumen lainnya	7
Gambar 2. 1 Letak Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	16
Gambar 2. 2 Letak dan Posisi Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	19
Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara	21
Gambar 2. 4 Peta Sebaran Hasil Identifikasi KBKT 1.1 (a); KBKT 1.3 (b); KBKT 1.4 (c); KBKT 2.3 (d); KBKT 3 (e); dan KBKT 4.1 (f)	23
Gambar 2. 5 Luas Tanam dan Produksi Karet Tahun 2020-2024	26
Gambar 2. 6 Luas Tanam dan Produksi Kelapa Tahun 2020-2024	26
Gambar 2. 7 Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2020-2024	27
Gambar 2. 8 Peta Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Penajam Paser Utara	29
Gambar 2. 9 Peta Status Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara	30
Gambar 2. 10 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023 ..	32
Gambar 2. 11 Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara	33
Gambar 2. 12 Cakupan Layanan air minum perpipaan	37
Gambar 2. 13 Capaian IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	39
Gambar 2. 14 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	44
Gambar 2. 15 Peta Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara	47
Gambar 2. 16 Peta Risiko Karhutla di Kabupaten Penajam Paser Utara	50
Gambar 2. 17 Peta Risiko Banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara	53
Gambar 2. 18 Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara	55
Gambar 2. 19 Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2024	57
Gambar 2. 20 Histori Kejadian ENSO Tahun 1990 – 2024	58

Gambar 2. 21 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	59
Gambar 2. 22 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024.....	62
Gambar 2. 23 Piramida Penduduk Tahun 2024	63
Gambar 2. 24 Proyeksi jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023 .	68
Gambar 2. 25 Proyeksi jumlah penduduk usia lanjut (ribu jiwa) Tahun 2025-2029.....	76
Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	77
Gambar 2. 27 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	80
Gambar 2. 28 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	81
Gambar 2. 29 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan PDB per Kapita Indonesia (Juta Rupiah)	82
Gambar 2. 30 PDRB per Kapita, Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara	83
Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)	84
Gambar 2. 32 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	84
Gambar 2. 33 Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024	86
Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	87
Gambar 2. 35 Usia harapan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024	89
Gambar 2. 36 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	91
Gambar 2. 37 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	92
Gambar 2. 38 Prevalensi Stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2024.....	93

Gambar 2. 39 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	94
Gambar 2. 40 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024	95
Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2024	97
Gambar 2. 42 Indeks Masyarakat Digital Indonesia <i>Sumber: Komdigi, 2025</i>	98
Gambar 2. 43 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Penajam Paser Utara	100
Gambar 2. 44 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	101
Gambar 2. 45 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.....	103
Gambar 2. 46 Indeks perlindungan anak Kabupaten Penajam Paser Utara.....	105
Gambar 2. 47 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2023	107
Gambar 2. 48 Indeks ketimpangan gender Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.....	109
Gambar 2. 49 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022	110
Gambar 2. 50 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara	112
Gambar 2. 51 Rasio PDRB Industri Pengolahan	113
Gambar 2. 52 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	114
Gambar 2. 53 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	119
Gambar 2. 54 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	120
Gambar 2. 55 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.....	128
Gambar 2. 56 Subindeks Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023	128
Gambar 2. 57 Persentase penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	129

Gambar 2. 58 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	130
Gambar 2. 59 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	131
Gambar 2. 60 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2024.....	133
Gambar 2. 61 Persentase desa mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024 ..	142
Gambar 2. 62 Rasio pajak terhadap PDRB.....	144
Gambar 2. 63 Inflasi Tahunan (Y-to-Y) Kabupaten Penajam Paser Utara	145
Gambar 2. 64 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2020 - 2023	148
Gambar 2. 65 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	149
Gambar 2. 66 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024 ...	150
Gambar 2. 67 Nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	151
Gambar 2. 68 Indeks Demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023.....	152
Gambar 2. 69 Kejadian gangguan Kantibmas / pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023.....	153
Gambar 2. 70 Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)/Pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023	154
Gambar 2. 71 Penyelesaian penegakan Perda di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024	155
Gambar 2. 72 Capaian aksi HAM di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024.....	156
Gambar 2. 73 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	171
Gambar 2. 74 Surplus/Defisit Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	172
Gambar 2. 75 Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	174
Gambar 2. 76 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024..	175
Gambar 2. 77 Proporsi komponen PAD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	177

Gambar 2. 78 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	186
Gambar 2. 79 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	198
Gambar 2. 80 Proporsi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	198
Gambar 2. 81 Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	201
Gambar 2. 82 Rasio Likuiditas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	210
Gambar 2. 83 Rasio Solvabilitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.....	213
Gambar 2. 84 Rasio Aktivitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024	215
Gambar 2. 85 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Penajam Paser Utara 2026-2030 (Rp. Miliar)	224
Gambar 2. 86 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara 2026-2030 (Rp. Miliar).....	230
Gambar 2. 87 Isu nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	262
Gambar 2. 88 Isu regional Kalimantan dalam RPJMN Tahun 2025-2029	264
Gambar 2. 89 Capaian indikator TPB Kabupaten Penajam Paser Utara.....	281
 Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029	 301
Gambar 3. 2 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan tahapan pembangunan IKN	310
Gambar 3. 3 Peta Highlights Indikasi Kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara	384
Gambar 3. 4 Rencana struktur ruang Kabupaten Penajam Paser Utara	416
Gambar 3. 5 Rencana pola ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.....	417
Gambar 3. 6 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara.....	418

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan. Latar belakang mencakup terkait gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029. Sub bab dasar hukum memuat berbagai payung hukum yang relevan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga dokumen RPJMD nantinya dapat tersusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. Sub bab terkait hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya memuat tentang sinkronisasi dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya, secara vertikal maupun horizontal, serta terhadap dokumen sektoral lain yang berkaitan, dengan harapan dokumen RPJMD dapat memberikan dukungan terhadap implementasi agenda pembangunan di level nasional, provinsi dan juga sebagai dokumen yang diacu dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Maksud dan tujuan memuat terkait output yang nantinya dihasilkan dari penyusunan RPJMD, yakni sebagai penerjemahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang sekaligus sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 5 tahun kedepan. Adapun sistematika penulisan mencakup substansi yang perlu dimuat dengan mengacu pada regulasi yang berlaku terkait penyusunan dokumen RPJMD. Berikut disajikan dari setiap muatan sub babnya.

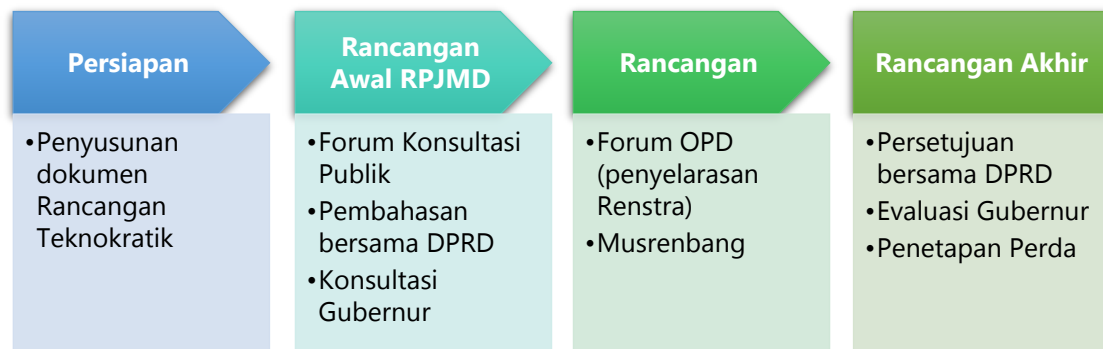
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara telah melewati proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Kepala Daerah yang terpilih dan telah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu yakni, H. Mudyat Noor, S.Hut sebagai Bupati dan Abdul Waris Muin sebagai Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode pembangunan Tahun 2025-2030 diharuskan merumuskan visi, misi dan program unggulan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan sebagai wujud kesinambungan dari perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerjemahan visi, misi dan program unggulan, dalam pelaksanaannya diterjemahkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahapan ini, diharapkan telah terbangun sinergi antara pendekatan perencanaan secara teknokratik dengan politik, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Dokumen RPJMD memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menerjemahkan visi, misi, dan program unggulan Kepala Daerah. Rumusan

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pilihan program pembangunan di dalam RPJMD harus memiliki pijakan yang kuat berbasis kebutuhan pembangunan daerah. Analisis kebutuhan tersebut diperoleh hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah dan perumusan isu-isu strategis secara komprehensif. Rumusan permasalahan dan isu strategis sendiri merupakan hasil analisis data capaian kinerja pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Salah satu metode yang digunakan untuk merumuskan isu strategis yang ada dalam dokumen ini adalah analisis pohon masalah. Berikut merupakan rangkaian seluruh proses penyusunan dokumen RPJMD hingga ditetapkan menjadi Perda:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD

Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan pembuka dari rangkaian proses penyusunan RPJMD yang sekaligus dielaborasikan dengan berbagai pendekatan perencanaan. Rancangan teknokratik RPJMD akan dipadukan dengan pendekatan perencanaan lainnya, yaitu pendekatan politik melalui penyesuaian visi-misi kepala daerah terpilih dan pembahasan bersama DPRD, pendekatan partisipatif dengan mengakomodasi aspirasi berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai media antara lain melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas melalui kesesuaian antar level perencanaan mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa.

Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan dinamis dan pesat. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah diraih, tetapi tidak luput juga dari permasalahan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan periode RPJMD sebelumnya. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara menjadikan kondisi tersebut di satu sisi menjadi peluang, tetapi di sisi lain menambah kompleksitas pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka menengah berupa Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam mempertahankan keberhasilan yang telah diraih, merespon isu strategis, dan sekaligus merespon pembangunan IKN dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berangkat dari hal tersebut, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 penting untuk disusun. Dokumen tersebut menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional dan akan memandu arah pembangunan Penajam Paser Utara untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu, proses penyusunan RPJMD harus berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadikan dalam penyusunan dokumen RPJMD juga mempertimbangkan berbagai dokumen seperti RTRW, KLHS RPJPD, dan dokumen sektoral lain untuk memperkuat kontekstual daerah. Selain itu, dokumen RPJMD juga dengan mudah diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam dokumen turunannya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

1.2 Dasar Hukum

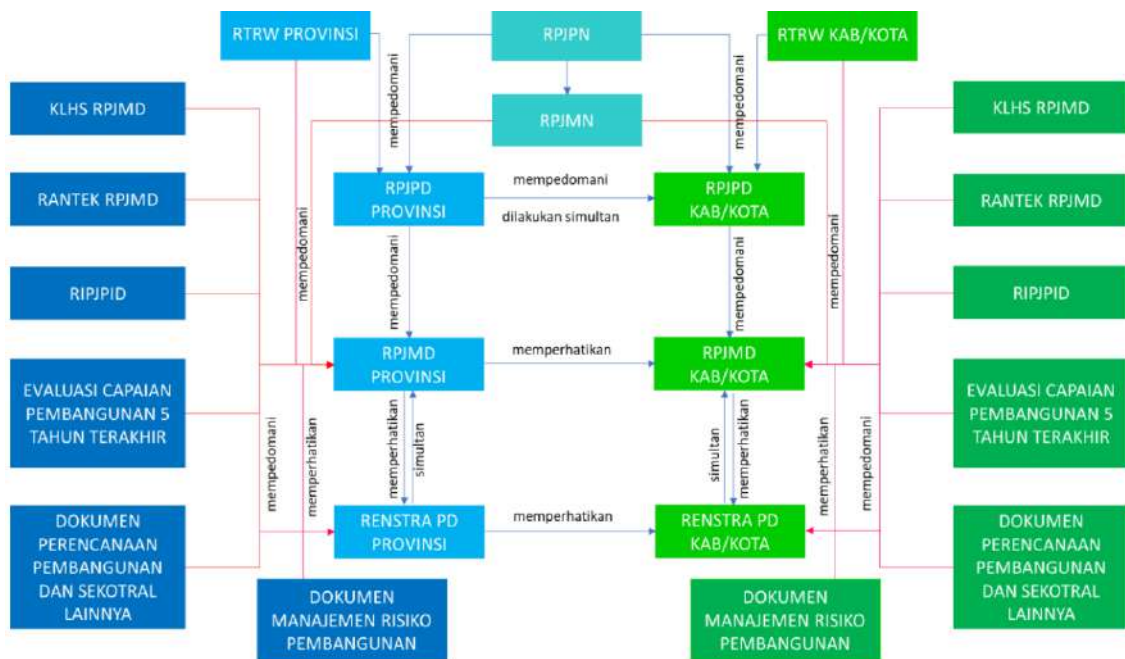
RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 6; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur : 64.09 / 18 / 6 / 2024).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2029 bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). SPPN di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memiliki definisi berupa satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam rangka membangun keselarasan dengan RPJMN dan secara substansi memuat semua bidang pembangunan, maka penyusunan RPJMD perlu menelaah muatan RPJMN, RTRW, dan berbagai perencanaan sektoral lain yang beririsan. Telaah RPJMN diperlukan agar isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan indikator kinerja nasional dapat dijabarkan ke dalam RPJMD. Telaah RTRW diperlukan agar pembangunan jangka menengah dapat sesuai dengan tujuan dan kebijakan tata ruang. Telaah rencana sektoral diperlukan karena RPJMD berperan sebagai ruang integrasi bagi berbagai perencanaan sektoral. Berikut disajikan terkait hubungan antar dokumen secara vertikal maupun horizontal, dalam mendukung penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 1. 2 Hubungan antar dokumen RPJMD terhadap dokumen lainnya

Sumber: Olah, 2025

1.3.1 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029

Penyusunan RPJMD memiliki waktu yang bersamaan dengan penyusunan RPJMN. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. Pembangunan jangka menengah daerah dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah yang juga memberikan dukungan terhadap implementasi rencana pembangunan nasional. Berbagai muatan RPJMN yang ditelaah dan diacu yaitu isu strategis jangka menengah nasional, tema pembangunan Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Timur, target kinerja makro serta intervensi arah pembangunan yang akan dijalankan.

Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki visi pembangunan jangka panjang yakni sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung perwujudan tema pembangunan Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan

Timur. Pulau Kalimantan memiliki tema pembangunan berupa “Superhub Ekonomi Nusantara”, yang mana secara lebih spesifik, di dalam RPJMN disebutkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi bagian dari daerah yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara harus membangun keterkaitan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan kinerja dan agenda pembangunan yang akan dijalankan oleh Provinsi Kalimantan Timur akan ditopang oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa substansi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditelaah dan diacu, yaitu identifikasi kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara di dalam konteks pembangunan provinsi, isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan periode pertama. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran penting untuk mewujudkan tema pembangunan Pulau Kalimantan berupa “Superhub Ekonomi Nusantara”, serta tema Provinsi Kalimantan Timur “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia”.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Penajam Paser Utara

Penyusunan dokumen RPJMD mengacu pada substansi dokumen RPJPD sebagai penjabaran tahap pertama perencanaan jangka panjang. RPJMD periode 2025-2029 merupakan tahapan pertama untuk memulai agenda transformasi pembangunan dalam mencapai visi rencana pembangunan jangka panjang yakni “Penajam Paser Utara Sejahtera 2045: Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Tahapan pertama RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tema pembangunan berupa “Penguatan Fondasi Transformasi”.

Substansi RPJPD yang ditelaah dan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD antara lain isu-isu strategis jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, *game changers*, arah kebijakan periode pertama dan sasaran pokok. Telaah tersebut diharapkan mampu merumuskan isu strategis jangka menengah yang sekaligus dapat merespon isu jangka panjang. Lebih lanjut lagi, isu strategis tersebut yang nantinya menjadi modal dalam merumuskan visi, misi dan program unggulan kepala daerah, sekaligus sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama dari pembangunan jangka panjang.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) memuat kerangka sistem penataan ruang yang terdiri atas pola ruang yang membagi fungsi peruntukan ruang dan struktur ruang sebagai penentu lokasi pusat pertumbuhan beserta jaringan penopangnya. Sistem penataan ruang berupaya mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan keterkaitan atau hubungan keruangan daerah yang bertumpu pada keberlanjutan sumber daya alam. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki periode RTRW tahun 2013-2033 yang beririsan dengan periode pembangunan dalam RPJMD tahun 2025-2029. Keselarasan antara RPJMD dengan RTRW menitikberatkan pada aspek kesesuaian pemanfaatan ruang di masa depan, mengingat pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat sangat dinamis dengan kehadiran pembangunan IKN Nusantara.

Tujuan penataan ruang yang dimuat dalam RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara adalah " Mewujudkan Daerah sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang berbasis pertanian, industri, perikanan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan." Dengan demikian, perumusan program dalam RPJMD memperhatikan alokasi peruntukan ruang pada pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata dengan titik tumpu kesatuan tata lingkungan keberlanjutan. Harmonisasi antara RPJMD dengan RTRW diharapkan dapat menjamin terlaksananya integrasi,

kesinambungan, dan sinergi pembangunan daerah secara menyeluruh. Adapun kebijakan penataan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi:

1. Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
2. Pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi yang berwawasan lingkungan;
3. Pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis;
4. Pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan keseimbangan ekologis dan sosial budaya lingkungan sekitar;
5. Pengembangan pengaturan risiko pada kawasan rawan bencana;
6. Pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan;
7. Pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara selaras dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk didalamnya memuat pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. KLHS RPJMD menggunakan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) daerah untuk mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan sesuai dengan target TPB/SDGs nasional menuju tahun 2030 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Prinsip dasar KLHS RPJMD menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 menitikberatkan pada kajian sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam pengarusutamaan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada isu strategis dan permasalahan TPB di tingkat daerah. Telaah dan Integrasi KLHS

RPJMD ke dalam dokumen RPJMD mencakup hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Penajam Paser Utara, rumusan isu-isu strategis dan alternatif skenario pembangunan. Penelaahan dan integrasi ini ditujukan dalam rangka mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sekaligus sebagai modal pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah jangka menengah. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi saat ini dan generasi mendatang.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RIPJPID Kabupaten Penajam Paser Utara

Pembangunan daerah harus disertai dengan perencanaan yang didasarkan pada hasil riset dan inovasi. Riset dan inovasi yang menjadi dasar perencanaan juga harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi agar proses perencanaan hingga evaluasi dapat tetap terarah, terukur, dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Hasil riset dan inovasi tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, dengan harapan dapat memberikan kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa tantangan perlu untuk menjadi perhatian dalam mengembangkan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya mencakup:

- a. Keberadaan IKN (Kompetisi Kerja)
- b. Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Keterampilan, dan Keahlian)
- c. Sumber Daya Finansial
- d. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
- e. Hilirisasi Industri

- f. Kelembagaan dan Kolaborasi
- g. Rendahnya Adopsi Inovasi
- h. Regulasi dan Kebijakan
- i. Basis Data Riset

Berdasarkan hasil kajian, juga telah dirumuskan peta jalan riset dan inovasi daerah, yang difokuskan pada transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur dan konektivitas, ketahanan kebencanaan, dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dalam periode pembangunan tahun 2025-2029. Dengan demikian, RIPJPID Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi dokumen yang penting dan strategis untuk dipertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 yaitu bagian dari dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun guna menerjemahkan visi misi dan program prioritas kepala daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen yang menerjemahkan Visi, Misi dan Program kepala daerah;
2. Tersedianya dokumen yang menjadi landasan awal bagi penyusunan kerangka pendanaan dan arah kebijakan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.
3. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJMD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Daerah	Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat: a. Aspek geografi dan demografi; b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; c. Aspek Daya Saing Daerah; d. Aspek Pelayanan Umum. Subbab Gambaran Keuangan Daerah, memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis daerah.
Bab 3 Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan	Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Bab	Muatan
Daerah	Prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
Bab 4 Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Subbab Program Perangkat Daerah memuat: - Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan - Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat: - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan - Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
Bab 5 Penutup	Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Analisis dilakukan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024 serta dilengkapi dengan data pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, bab ini juga menyajikan gambaran kemampuan fiskal daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir dan disertai dengan proyeksi kemampuan fiskal dalam lima tahun yang mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja dan gambaran keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, lebih lanjut lagi, dirumsukan permasalahan dan isu strategis yang perlu untuk direspon dalam periode pembangunan lima tahun mendatang, yang sekaligus sebagai periode pembangunan pertama dari agenda pembangunan jangka panjang.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

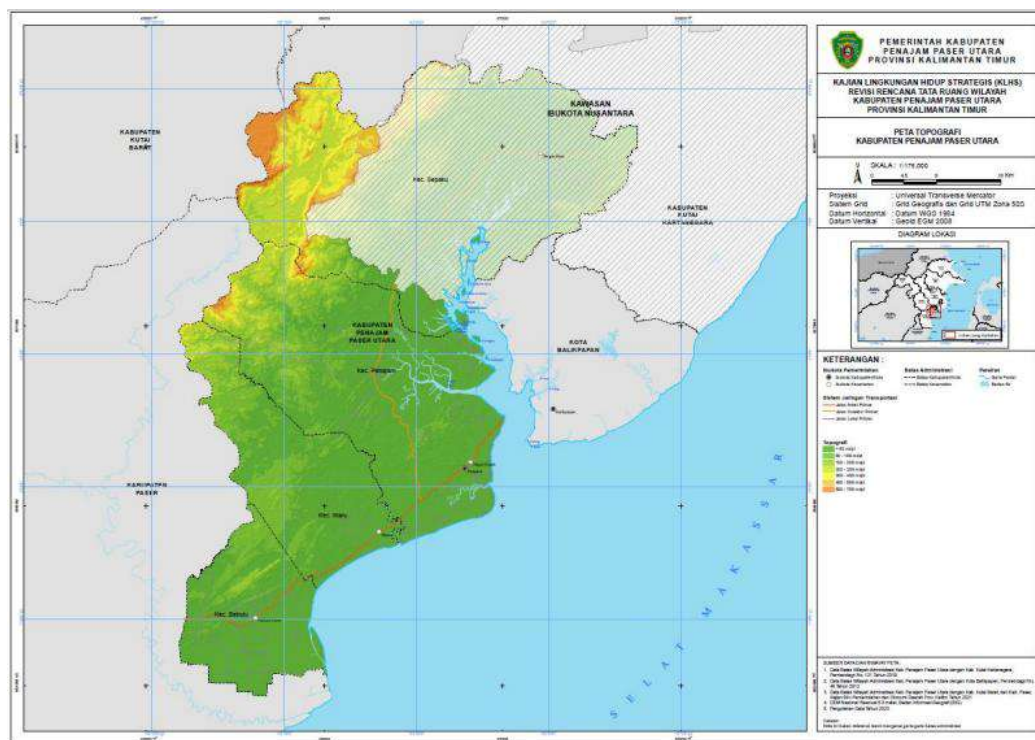
Aspek geografi merujuk pada distribusi dan interaksi keruangan dari fenomena fisik, sosial, dan ekonomi, yang mempengaruhi bagaimana potensi dan permasalahan daerah. Identifikasi terhadap faktor fisik geografis seperti letak dan lokasi, ketahanan air dan pangan, daya dukung lingkungan, sampai kebencanaan penting untuk dilakukan sebagai basis untuk merencanakan pembangunan daerah. Pemanfaatan potensi daerah berhubungan erat dengan aspek kependudukan terutama untuk menaksir sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Karakteristik kependudukan yang dinamis

diidentifikasi dari faktor distribusi, struktur, dan komposisi. Aspek geografi dan demografi Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan secara komprehensif pada sub bab ini dengan didasarkan pada data seri yang relevan.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk pada tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak pada posisi absolut $00^{\circ} 48'29'' - 01^{\circ} 36'37''$ LS dan $116^{\circ}19'30'' - 116^{\circ} 56'35''$ BT. Posisi tersebut diterjemahkan pada letak geografis dengan asosiasi terhadap wilayah administrasi berikut ini:

- Timur : Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- Barat : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser
- Utara : Kawasan IKN Nusantara dan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Selatan : Kabupaten Paser dan Selat Makassar



Gambar 2. 1 Letak Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi wilayah seluas 3.333,06 km² dengan terdiri dari empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Sepaku, dan Kecamatan Penajam sebagai ibukota Kabupaten. Karakteristik fisik Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikelompokkan menjadi topografi dataran bergelombang dan tipologi pesisir. Secara morfologis, wilayah daratan mencakup area 3.060,82 km² dan wilayah perairan diperkirakan mencapai 272,24 km².

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pulau
	Darat	Perairan	Total	Persentase (%)		
Sepaku	1.172,36	-	1.172,36	35,17	15	16
Penajam	1.036,70	170,67	1.207,37	36,22	23	6
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,98	12	-
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62	4	-
Kabupaten Penajam Paser Utara	3.060,82	272,24	3.333,06	100,00	54	22

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka

Distribusi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara detail terdiri dari 30 desa dan 24 kelurahan. Kecamatan dengan cakupan wilayah terluas adalah Kecamatan Penajam dengan luasan 36,22 persen dari total luas wilayah. Kecamatan Sepaku juga meliputi wilayah yang luas dengan proporsi 35,17 persen. Sebagian wilayah Kecamatan Sepaku telah berganti menjadi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Cakupan wilayahnya dituangkan dalam Peta Deliniasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dalam Lampiran 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Desa/kelurahan yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara adalah Desa Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Argomulyo, Sukomulyo dan Semoi Dua, Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit

Raya. Lebih lanjut, terkait transformasi cakupan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 2 Perubahan luas wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Kecamatan	Jumlah Desa / kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	
		Semula	Menjadi
Penajam	4 Desa / 19 Kelurahan	120.767	111.060,42
Waru	3 Desa / 1 Kelurahan	55.388	55.582,67
Babulu	12 Desa / 0 kelurahan	39.946	39.853,97
Sepaku	11 Desa / 4 Kelurahan	117.236	24.661,53
Total	30 Desa / 24 Kelurahan	333.306,00	231.158,59

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2044

Kabupaten Penajam Paser Utara secara relatif berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut (mdpl). Tataan topografi terdiri dari topografi datar, bergelombang, dan berbukit bergelombang. Topografi datar dengan ketinggian relatif 0 – 15 mdpl dan kelerengan kurang dari 8 derajat. Umumnya wilayah ini berada di sepanjang aliran sungai dan kawasan pesisir yang dibentuk melalui pengendapan material oleh aliran air dan energi gelombang laut. Topografi bergelombang relatif pada ketinggian 15 – 75 mdpl dan kelerengan 8 – 16 derajat. Wilayah bergelombang merupakan transisi antara topografi landai dengan topografi berbukit bergelombang. Wilayah utara relatif bertopografi perbukitan karena didominasi oleh batuan lunak yang dikenai tenaga struktural, bentukan bukit antiklinal dan lembah sinklinal memanjang mudah ditemui.



Gambar 2. 2 Letak dan Posisi Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Olah Data, 2025

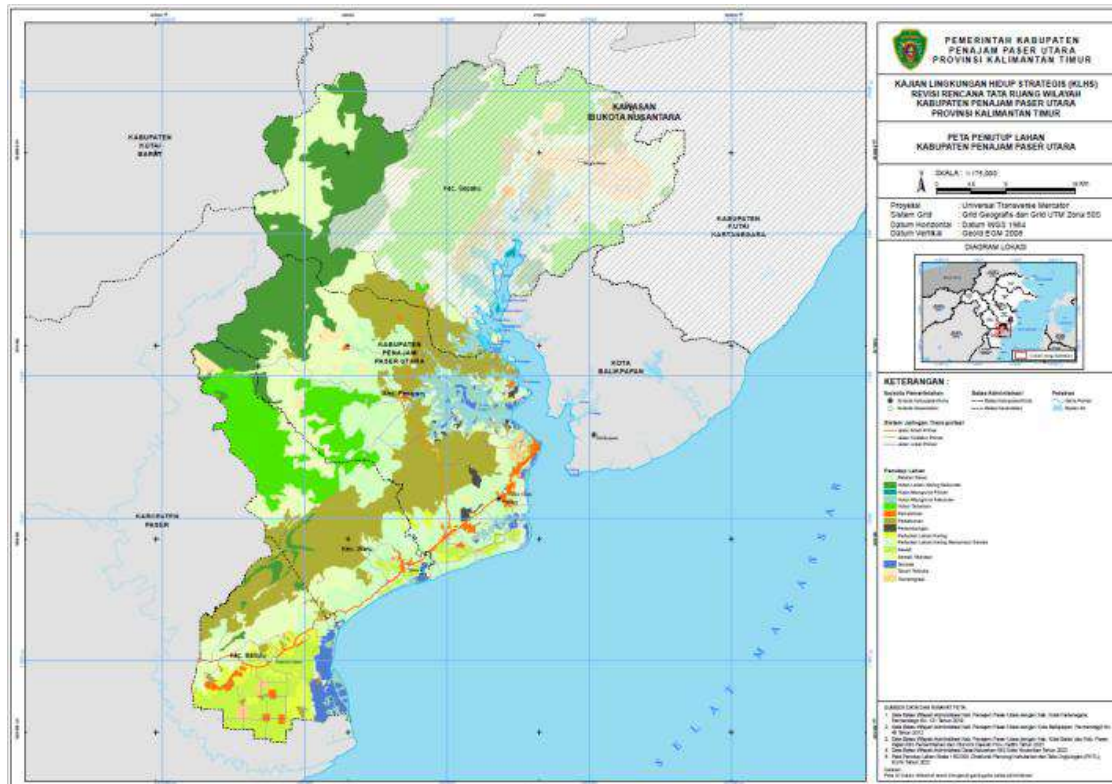
Posisi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran secara keruangan dengan daerah di sekitarnya baik pada skala provinsi maupun regional. Peran strategis utama Kabupaten Penajam Paser Utara adalah menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan regional Kalimantan melalui konektivitas koridor Trans-Kalimantan. Jalan Trans-Kalimantan segmen Kademan-Penajam dan segmen Silkar merupakan akses darat utama yang membuka akses pergerakan orang dan barang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Konektivitas darat semakin terbuka lebar setelah dibangunnya Jembatan Pulau Balang yang memangkas waktu tempuh Balikpapan – Penajam Paser Utara dan sebaliknya. Selain akses darat, posisi wilayah pada Teluk Balikpapan dan Selat Makassar merupakan akses nasional sebagai simpul konektivitas Pulau Kalimantan di sisi timur. Posisi ini diperkuat dengan sarana transportasi laut diantaranya Pelabuhan Penyeberangan Ferry Penajam-Balikpapan, Dermaga Logistik IKN, dan Dermaga Cita Sabut. Simpul konektivitas Kalimantan akan

semakin diperkuat dengan rencana pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara. Bandara ini akan menjadi gerbang utama menuju ibu kota negara dengan jangkauan konektivitas nasional dan internasional. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan arus pergerakan dan mempercepat integrasi ekonomi Kalimantan secara regional dengan pusat-pusat industri nasional dan global.

Peran strategis dari aspek ekologis di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah ekosistem tutupan tegakan hutan terestrial dan hutan mangrove bagi Provinsi Kalimantan Timur. Tegakan hutan saat ini memiliki nilai ekonomi melalui skema pembiayaan kredit karbon. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil menerima insentif kredit karbon dari kerjasama dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), World Bank, melalui perjanjian Emission Reductions Payment Agreement (ERPA). FCPF merupakan kerjasama global yang berfokus pada reduksi emisi sektor lahan (FOLU), dengan kata lain Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan dana sebagai kompensasi melestarikan hutan. Luasan tutupan hutan dan mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi aktor penting untuk mereduksi emisi sebagaimana fungsi lingkungannya sebagai penyerap dan penyimpan karbon.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam didefinisikan sebagai material yang diperoleh dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Potensi sumber daya alam Kabupaten Penajam Paser Utara diidentifikasi melalui pendekatan geografi melalui data-data sektoral dan keanekaragaman hayati.



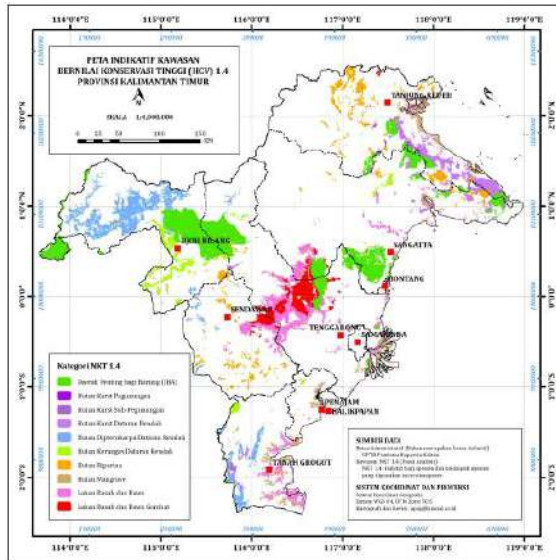
Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

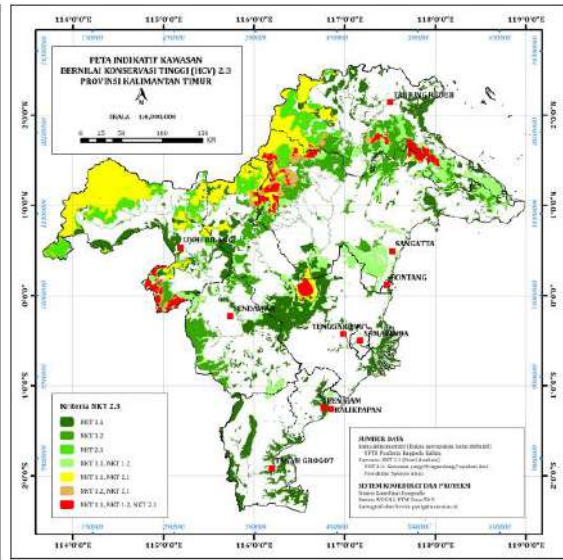
Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luasan tutupan tegakan hutan terestrial dan mangrove yang luas dengan kapasitas regulator karbon yang sangat baik dari fungsi simpanan dan serapan. Hamparan ekosistem mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi 37.738,91 Ha dengan rincian 16.529,38 Ha di Kecamatan Penajam dan 21.209,53 Ha di Kecamatan Sepaku. Sementara itu, tutupan tegakan hutan Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi 239.005,82 hektar atau 35,99 persen dari luas wilayah. Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia membuka peluang besar bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendapatkan dana kredit karbon dari sektor lahan (FOLU) termasuk *blue carbon* dari ekosistem mangrove. Kapasitas simpanan dan serapan karbon hutan mangrove ditaksir mencapai sepuluh kali lebih tinggi dari hutan terestrial. Potensi ini diperkirakan pada setiap 1 hektar ekosistem mangrove akan menyerap (*carbon sink*) 6 – 8 ton CO₂e. Sedangkan potensi serapan karbon dari hutan terestrial mencapai 1,8-2,8 ton CO₂e. Dana kredit karbon dari ekosistem mangrove ditaksir

Selain potensi ekonomi, ekosistem mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan elemen kunci dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan stabilitas hidrologi pesisir. Upaya konservasi mangrove dapat dikembangkan secara beriringan dengan ekowisata maupun silvofishery untuk menopang perekonomian masyarakat lokal. Ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara telah ada di beberapa lokasi seperti Wisata Kampung Baru Mangrove, Wisata Hutan Mangrove Lati Tuo, dan Desa Wisata Mentawir.

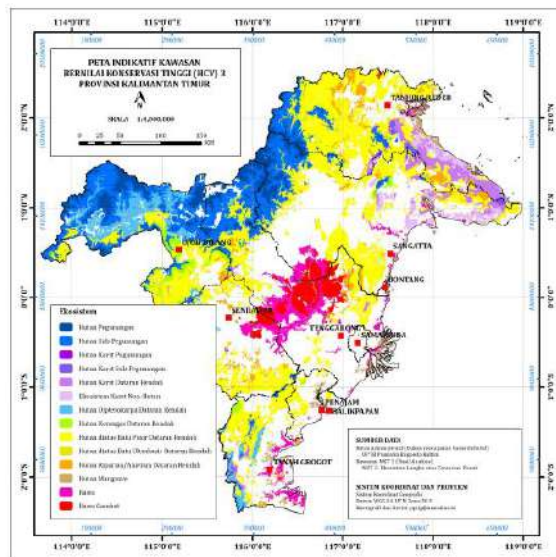




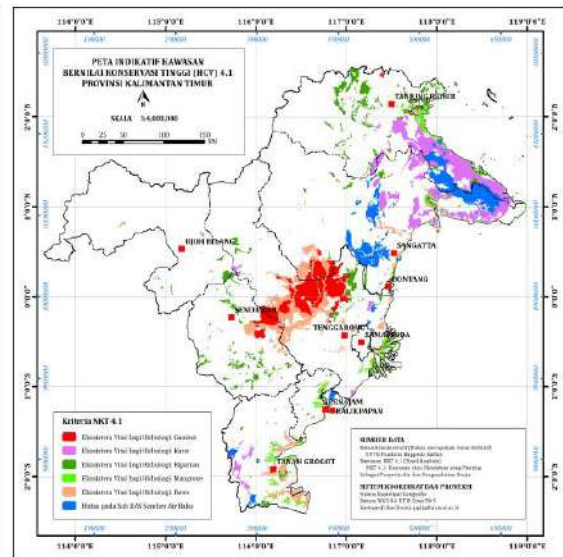
(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 2. 4 Peta Sebaran Hasil Identifikasi KBKT 1.1 (a); KBKT 1.3 (b); KBKT 1.4 (c); KBKT 2.3 (d); KBKT 3 (e); dan KBKT 4.1 (f)

Sumber: Dokumen Identifikasi Kawasan Bernilai Tinggi pada Skala Bentang Lahan di Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Potensi dari nilai ekologis Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk keanekaragaman hayati sebagai bagian dari heterogenitas ekologi Pulau Kalimantan. Berdasarkan kajian Identifikasi Kawasan Bernilai Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, terdapat enam jenis Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

KBKT 1.1 merupakan kawasan dengan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan kawasan konservasi. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki empat fungsi konservasi dari kategori KBKT 1.1 diantaranya yaitu kawasan lindung (KL) hutan mangrove, KL Rawa/lahan basah, KL hutan kerangas, dan KL Air. Jenis vegetasi mangrove yang berhasil diinventarisir di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi Api-api (*Avicennia Alba*), Bakau Gundul (*Rhizophora Meuronata*), Bakau Kacangan (*Rhizophora Opiculata*), Dungun (*Hiriteria spp.*), Nipah (*Nypa Fruticans*), Tancang (*Bruguiera Gymnorrizha*), Tanjan (*Mezzetia Parviflora*), Nyirih (*Xyclocarpus Granatum Koen*), Nyuruh (*Ceriph Tagal*), Beringin (*Ficus spp.*), dan Gogen (*Soneratia spp.*). KL Lahan basan dan KL hutan mangrove memiliki fungsi sebagai habitat kunci bagi satwa dilindungi seperti bekantan, dugong, rangkong, lumba-lumba hidung botol, dan penyu hijau.

Penilaian terhadap kategori KBKT 1.3 berhasil mengidentifikasi habitat kunci bagi primata, karnivora, dan buaya yang merupakan spesies terancam yang penyebarannya terbatas dan dilindungi. Sedangkan KBKT 1.4 menunjukkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kawasan persinggahan sementara bagi spesies migran. Ekosistem yang dimaksud meliputi hutan karst dataran rendah, hutan kerangas dataran rendah, dan hutan mangrove. Kemudian kriteria KBKT 4.1 menunjukkan bahwa ekosistem mangrove pada kawasan Teluk Balikpapan menyediakan fungsi lindung dengan perannya sebagai *coastal green belt* dan mengatur tatanan hidrologis pesisir.

Selain mengidentifikasi kawasan bernilai ekologis, KBKT 3 menyajikan ekosistem yang terancam punah di Kabupaten Penajam Paser Utara, diantaranya yaitu ekosistem hutan mangrove, ekosistem rawa, ekosistem karst dataran rendah, dan ekosistem hutan diatas batu pasir dataran rendah. Tantangan dalam melestarikan ekosistem ini adalah status kawasan yang tergolong sebagai kawasan APL, sehingga perubahan tutupan lahan mudah terjadi. Menurut laporan

BRGM sekitar 316 hektar ekosistem penting di kawasan APL rentan mengalami perubahan tutupan lahan.

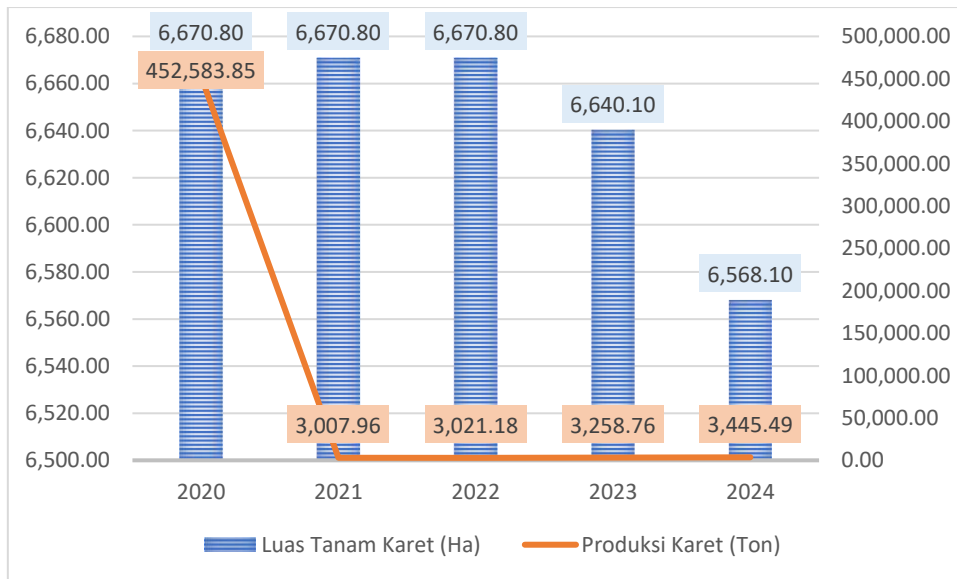
Potensi sektoral Kabupten Penajam Paser Utara berupa sumber daya perikanan, bahan pangan, dan perkebunan. Dari sektor perikanan darat diperkirakan memiliki potensi hingga 16.829,65 ton dan perikanan tambak mencapai 10.063,65 ton. Lokasi dengan potensi perikanan darat sangat tinggi ada di Kelurahan Mentawir, Pulau Balang, muara Sungai Riko dan Kelurahan Maridan. Memanfaatkan potensi yang besar ini, Pemerintah Daerah mengembangkan Kampung Perikanan Budidaya Air Tawar dengan komoditas utama ikan patin di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 yang mengatur Kampung Perikanan Budidaya Air Tawar. Terdapat 14 kelompok pembudidaya dengan total 164 pembudidaya yang terdaftar. Kegiatan budidaya terbagi menjadi tiga segmen yakni pembesaran ikan, pembenihan, dan pakan mandiri.

Tabel 2. 3 Produksi Padi Kabupaten Penajam Paser Utara

Deskripsi	2021	2022	2023	2024
Produksi Padi GKG1 (Ton)	42.130,12	45.160,69	45.100,57	48.133,90
Produksi Beras (Ton)	24.505,74	26.268,52	26.233,57	27.997,96

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

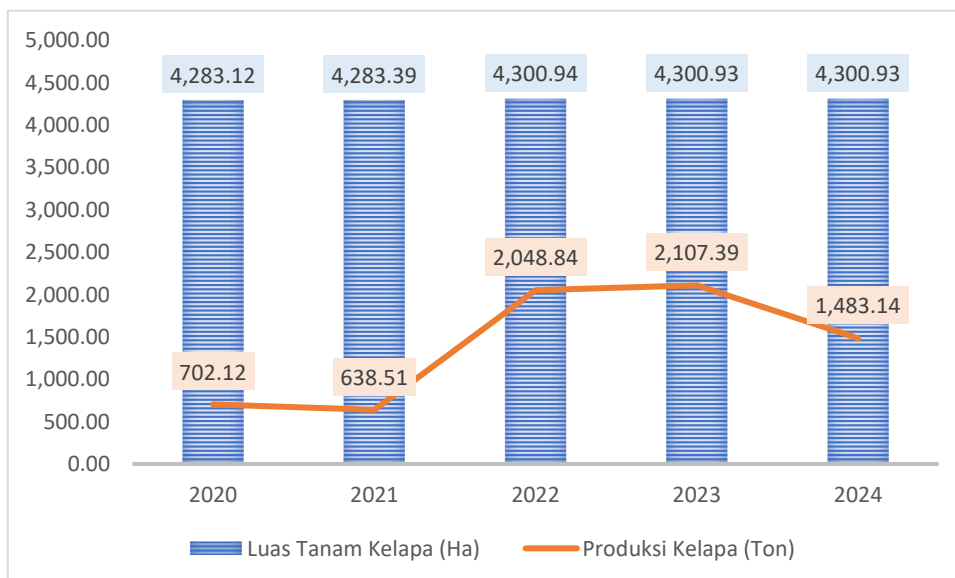
Potensi pangan lokal dari komoditas padi sawah cukup menjanjikan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Produksi padi dapat meningkat dari produksi tahun 2021, yaitu mencapai 48.133,90 ton pada tahun 2024. Produksi beras lokal turut meningkat dari produksi tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan program intensifikasi berhasil meningkatkan produktivitas lahan sawah secara signifikan. Kendala utama bagi pengembangan pertanian sawah di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah belum meluasnya akses saluran irigasi, sementara pada musim kemarau sebagian besar sawah tidak dapat dikelola secara optimal.



Gambar 2. 5 Luas Tanam dan Produksi Karet Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

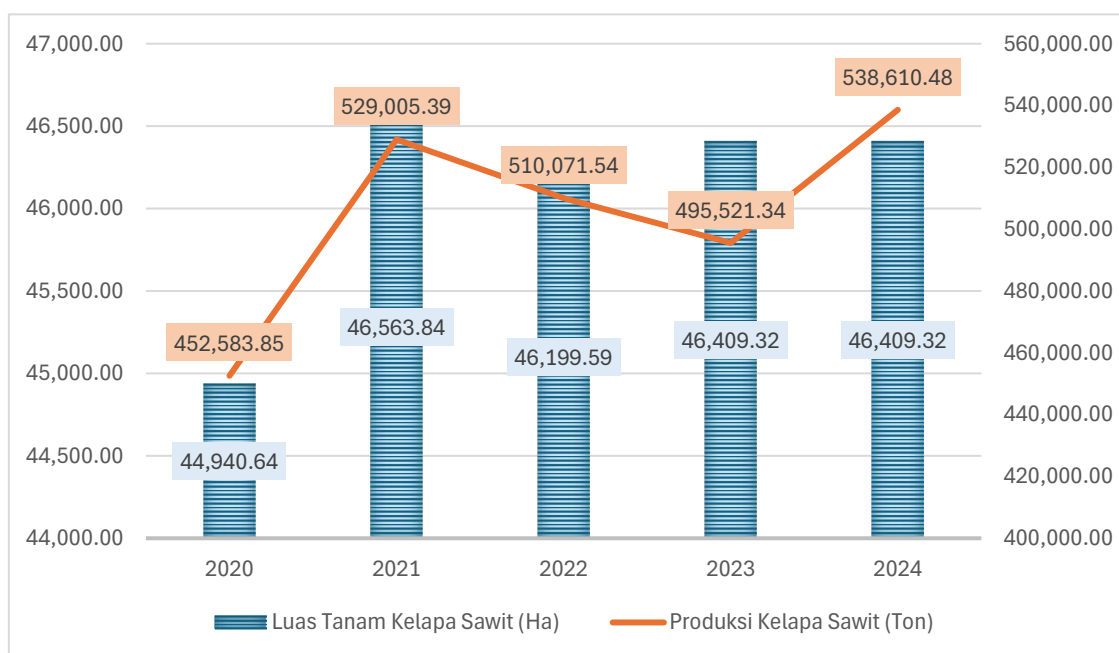
Produksi karet turun sangat drastis pada tahun 2021 hingga minus 99,34 persen. Sedangkan luas tanam karet menunjukkan bahwa komoditas ini juga telah mengalami penurunan luasan perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 6 Luas Tanam dan Produksi Kelapa Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Tren positif ditunjukkan oleh luas tanam dan produksi komoditas kelapa dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Luas tanam bertambah 17,55 hektar pada tahun 2022 dan berhasil mendorong peningkatan produksi. Produksi kelapa kembali menurun menjadi 1.483,14 ton pada tahun 2024 dengan luas tanam yang sama.



Gambar 2. 7 Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Sektor perkebunan menunjukkan produksi yang menjanjikan pada komoditas kelapa sawit. Luas tanam kelapa sawit mencapai 46 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Produksi tertinggi mencapai 529 ribu ton pada tahun 2021 dengan adanya perluasan lahan tanam mencapai 3,61 persen. Kondisi tersebut terus meningkat mencapai 538.610,48 Ton. Hal ini menunjukkan potensi kelapa sawit yang besar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perlu untuk semakin diimbangi dengan intensifikasi tanam yang optimal. Disamping meningkatkan luas lahan tanam, pemeliharaan tanaman harus lebih ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau berbasis perkebunan.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

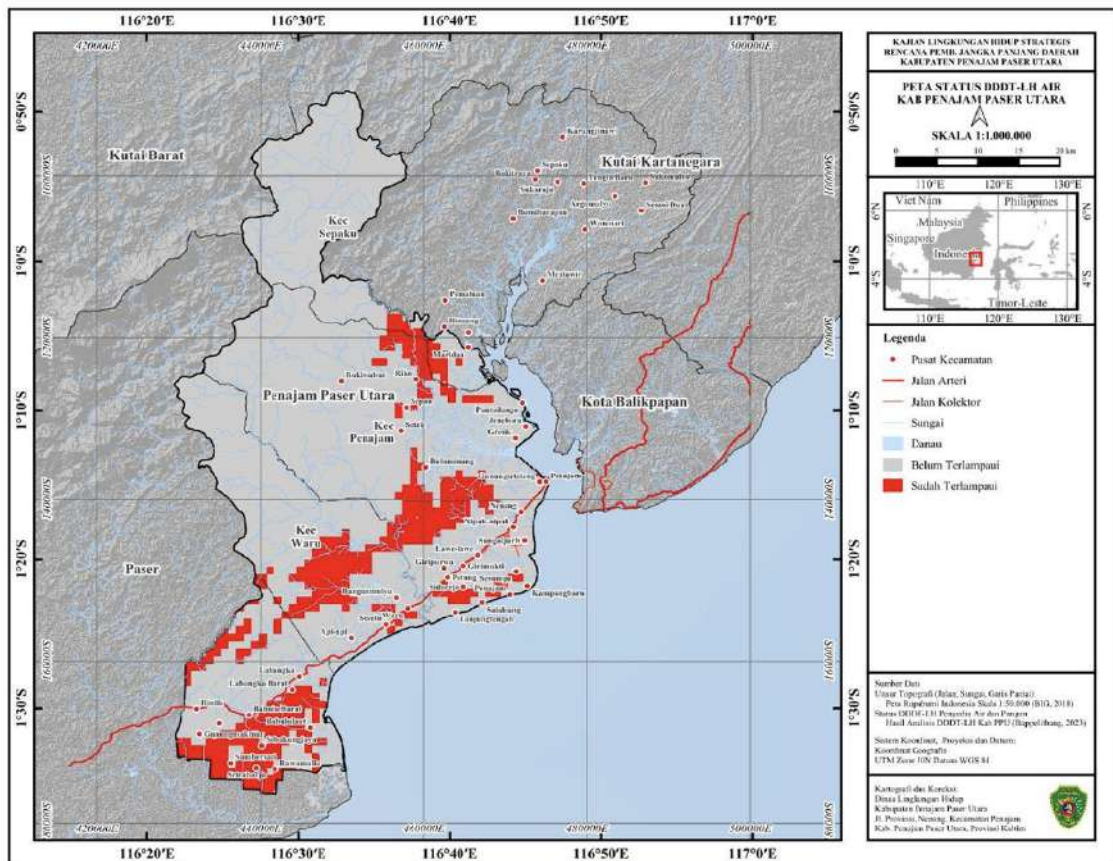
Komponen lingkungan hidup saling berinteraksi menciptakan seperangkat fungsi dalam menghasilkan sumber daya untuk kebutuhan manusia. Ukuran kuantitas fungsi tersebut direpresentasikan sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penilaian terhadap DDDTLH memiliki andil penting untuk mencegah pendayagunaan sumber daya alam yang melampaui ambang daya dukungnya. Berikut ini merupakan hasil penilaian DDDTLH penyedia pangan dan air di Kabupaten Penajam Paser Utara dari hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Tabel 2. 4 Luas Area Status Daya Dukung Penyedia Air

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
Babulu	20.364,13	12.992,41	33.356,54
Penajam	76.448,90	12.063,83	88.512,73
Sepaku	34.416,18	1.800,65	36.216,83
Waru	37.116,64	7.821,13	44.937,77
Kabupaten Penajam Paser Utara	168.345,85	34.678,02	203.023,87

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Secara akumulatif, daya dukung penyedia air Kabupaten Penajam Paser Utara berstatus surplus yang menandakan kebutuhan terhadap sumber daya air belum melampaui ketersediannya. Hasil penilaian menurut sistem grid menunjukkan 163 ribu hektar area di Kabupaten Penajam Paser Utara masih berstatus surplus, namun terdapat sekitar 17,08 persen wilayahnya yang mengalami defisit daya dukung air. Defisiensi terbesar tercatat pada Kecamatan Babulu dengan proporsi 6,40 persen yang mengalami defisit. Proporsi area terkecil yang mengalami defisit daya dukung air ditunjukkan oleh Kecamatan Sepaku yaitu sekitar 0,89 persen dari total luas wilayah.



Gambar 2. 8 Peta Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

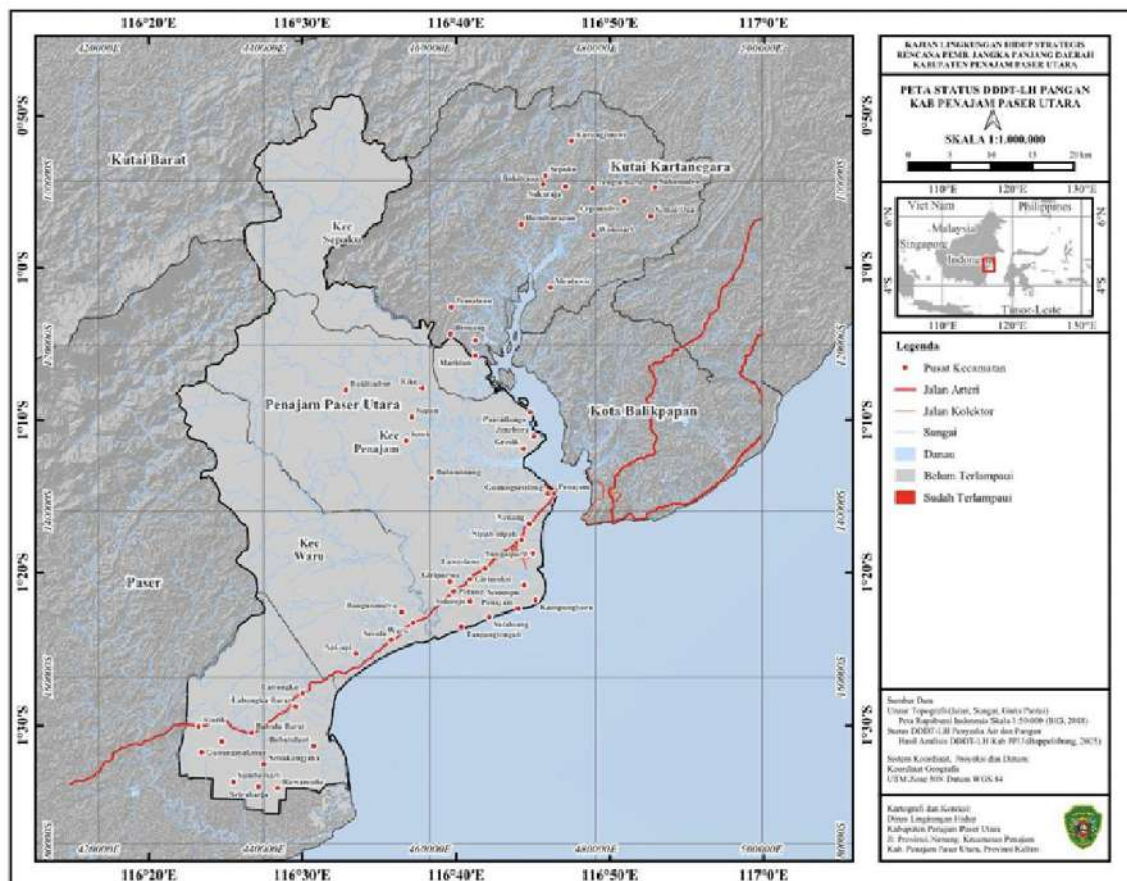
Distribusi daya dukung air secara keruangan menegaskan adanya defisiensi daya dukung air cukup luas pada area dengan penggunaan lahan pertanian dan perkebunan pada Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku.

Tabel 2. 5 Luas Area Status Daya Dukung Pangan

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
Babulu	33.356,54	0,00	33.356,54
Penajam	88.512,74	0,00	88.512,74
Sepaku	36.216,83	0,00	36.216,83
Waru	44.937,77	0,00	44.937,77
Kabupaten Penajam Paser Utara	203.023,88	0,00	203.023,88

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Status daya dukung pangan terkategori pada status Surplus atau mewakili sebuah kondisi kebutuhan pangan yang belum melebihi kuantitas ketersediannya. Penilaian daya dukung pangan merujuk pada komoditas beras domestik. Produksi GHG Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dan berhasil mencapai produksi terbesar ketiga pada skala provinsi pada tahun 2023. Sehingga status daya dukung pangan Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi area yang sangat luas yaitu 203 ribu hektar dengan proporsi terbesar dimiliki oleh Kecamatan Penajam yakni 43,60 persen.



Gambar 2. 9 Peta Status Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Penilaian daya dukung dengan pendekatan spasial sangat membantu dalam memberikan intervensi pengelolaan sumber daya yang tepat kedepannya. Lokus yang ditunjukkan secara detail oleh area grid menjadi indikasi untuk merumuskan program implementatif dan tepat sasaran. Dengan demikian,

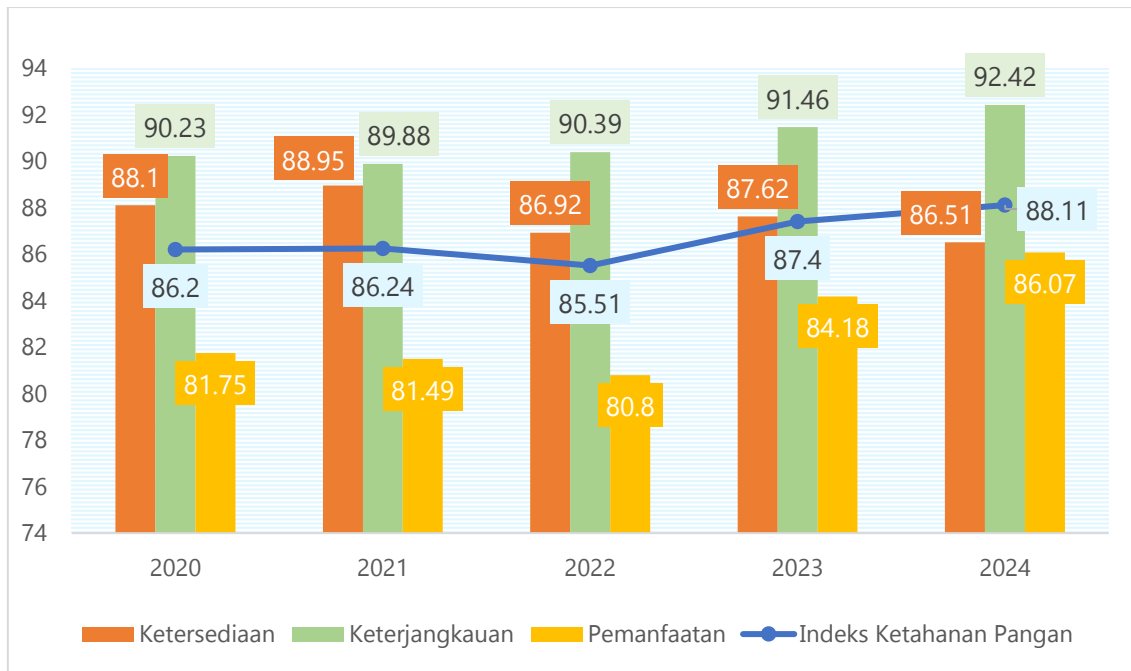
diharapkan pengelolaan sumber daya air dan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjaga keberlanjutan ketersediannya.

2.1.4 Berketananan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Bagian ini menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.1 Ketahanan Pangan

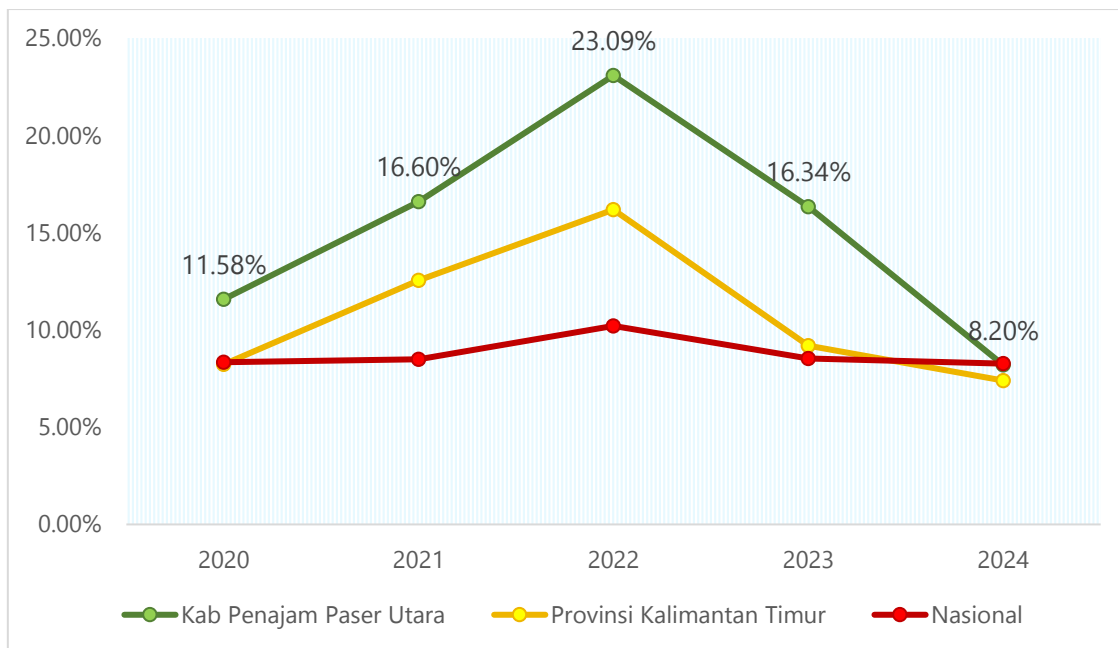
Kebutuhan pangan menduduki peran esensial dalam keberlangsungan kehidupan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber pangan diperkirakan akan terus melonjak. Merujuk pada penggunaan lahan eksisting, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas lahan pertanian sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup luas dalam menyediakan sumber pangan daerah. Disamping itu, kapasitas lahan dan jasa lingkungan setiap daerah akan saling berbeda dalam menyokong pertumbuhan tanaman pertanian baik dari faktor iklim, tanah, pengairan, dan topografi. Melalui indeks ketahanan pangan (IKP), pemerintah mengukur tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang diwakilkan dalam bentuk nilai. Berikut ini merupakan tren IKP pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang diukur oleh Badan Pangan Nasional.



Gambar 2. 10 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Catatan histori data menunjukkan tren nilai IKP bersifat fluktuatif dengan lonjakan nilai tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu meningkat 1,94 poin. Penurunan nilai IKP dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan 0,73 poin, kemudian terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 sebesar 88,11. Penurunan nilai IKP dipengaruhi oleh adanya pemrosotan nilai ketersediaan Kategori IKP sebesar 2,03 poin di tahun 2022. Ketahanan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2024 tergolong pada kategori Sangat Tahan (>75,68). Tingkat pemanfaatan pangan di tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan cukup baik menjadi 86,07 setelah mengalami penurunan selama 3 tahun sebelumnya. Namun, tren nilai komponen ketersediaan terus mengalami penurunan dari nilai paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 88,95 menjadi 86,51 pada tahun 2024. Ketersediaan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara tentu saja dipengaruhi dengan kondisi daya dukung lahan pangan yang tersedia, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan produktivitas hasil pertanian.



Gambar 2. 11 Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2021-2025

Selaras dengan penurunan indeks ketahanan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022, prevalensi ketidacukupan pangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 prevalensi ketidacukupan pangan kembali menurun sampai angka 8,20 persen bahkan lebih kecil dibandingkan angka pada tahun 2020. Kenaikan tersebut selaras dengan kenaikan ketahanan pangan pada tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan kecukupan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin membaik, dengan nilai yang hampir sama dengan capaian provinsi dan nasional.

2.1.4.2 Ketenagalistrikan

Energi listrik berperan vital bagi berlangsungnya kegiatan masyarakat, termasuk untuk menunjang kegiatan perekonomian, penerangan, hingga pelayanan jaringan internet. Ketahanan energi listrik merupakan sebuah kondisi tercukupinya ketersediaan, terjangkau akses, dan pemerataan energi. Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN Wilayah VI cabang Balikpapan terdiri dari 3 ranting. Ranting Petung melayani Penajam, Long Ikis, Long Kali, dan

Maridan. Ranting Sepaku melayani Sepaku dan Semol sedangkan ranting Jenebora melayani Jenebora, Pantai Lango dan Gersik. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam ranting Petung dan ranting Sepaku.

Tabel 2. 6 Produksi, Penjualan, dan Pemakaian Listrik pada PLN Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (Kwh)	N/A	124.548.924	132.444.432	145.788.295	132.826.396
Penjualan (Kwh)	108.730.314	110.949.530	117.882.022	130.117.959	123.648.724
Banyaknya Pelanggan	50.091	53.653	57.178	57.937	56.038
Kapasitas Tersambung (Va)	63.693.350	70.096.200	78.433.400	9.740.027	83.952.000

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2025

Catatan data produksi energi listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara oleh PLN mencapai 132.826.396 kWh pada tahun 2024, dengan persentase penjualan mencapai 93,09 persen dari total produksi. Catatan ketenagalistrikan pada tahun 2023 dan 2024 telah mengecualikan Kecamatan Sepaku dalam perhitungan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Kebutuhan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, kapasitas listrik yang tersambung telah mencapai 83.952.000 Va pada tahun 2024.

2.1.4.3 Akses Air Bersih

Kebutuhan air diperkirakan akan terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perluasan pengelolaan lahan, dan industrialisasi. Kecukupan kebutuhan air bergantung pada suplai air baku baik dari sumber air permukaan dan air tanah. Kecukupan kebutuhan air penting untuk dipenuhi untuk kebutuhan kesehatan, sanitasi, bahan pokok industri, dan pengairan lahan. Untuk itu, ketahanan air perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan sistem hidrologis dalam mencukupi kebutuhan daerah. Ketahanan air di Kabupaten Penajam Paser Utara diidentifikasi melalui kapasitas suplai air permukaan dan cekungan air tanah (CAT).

Tabel 2. 7 Kapasitas Embung di Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Embung	Desa/Kelurahan	Luas dan Kapasitas Tampung		
		Ha	M ³	Fungsi
Batu Pengrusut	Babulu Darat	17,65	440.000	Irigasi
Gentong Gendis	Gunung Makmur	50	500.000	Irigasi
Blok A	Gunung Intan	20	200.000	Irigasi
Blok U	Gunung Intan	15	100.000	Irigasi
Labangka I	Labangka	12	75.000	Irigasi
Labangka II	Labangka	5	35.000	Irigasi
Api-api	Api-api	5	30.000	Irigasi
Sesulu	Sesulu	5	30.000	Air Bersih
Waduk/Lapangan	Sloloang	25	200.000	Irigasi
Nipah-nipah	Nipah-nipah	12	100.000	Irigasi
Bukit Raya	Bukit Raya	15	150.000	Air Minum
Suka Raja	Suka Raja	10	100.000	Air Minum
Sotek	Sotek	15	300.000	Air Minum
Pemaluan	Pemaluan	7	12.000	Air Minum
ITCI	Maridan	5	8.000	Air Minum
IHM	Bumi Harapan	3	7.500.000	Air Minum
Karang Jinawi	Karang Jinawa	2	6.000	Air Minum

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Embung atau waduk di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 17 dengan berbagai fungsi untuk air bersih, air minum, dan irigasi. Embung terluas tercatat pada Gentong Gendis di Desa Gunung Makmur dengan kapasitas tampung 500.000 m³ pada lahan seluas 50 hektar. Kapasitas tampungan yang relatif besar juga dimiliki oleh Batu Pengrusut di Desa Babulu Darat dengan kapasitas 440.000 m³ pada lahan 17,65 hektar.

Tabel 2. 8 Luas Bendungan Kabupaten Penajam Paser Utara

Bendungan	Kecamatan	Luas (Ha)
Waduk Babulu Barat	Babulu	27,94
Bendungan Lawe-lawe	Waru	233,21
DAM Korindo	Waru	8,01
Bendungan Waru	Penajam	8,01

Bendungan	Kecamatan	Luas (Ha)
Waduk PT. ITCI	Sepaku	11,83
Waduk PT. ITCI	Sepaku	76,44
Waduk PT. ITCI	Sepaku	14,93
Waduk Turen	Sepaku	10,13

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Beberapa bendungan di Kabupaten Penajam Paser Utara dimanfaatkan untuk penampungan air baku dan penyediaan air bersih secara luas. Cakupan Bendungan Lawe-lawe merupakan terluas di Penajam Paser Utara, dengan luas 233,21 hektar diperkirakan mampu menampung air 6,5 juta m³ dengan perkiraan kapasitas tampungan hingga 500 liter/detik. Bendungan Lawe-lawe dilengkapi dengan infrastruktur pengelolaan air bersih dengan daya tampung 3.000 m³ dan kapasitas produksi air bersih mencapai 300 liter/detik. Waduk PT. ITCI juga merupakan sumber penyuplai air baku di Kecamatan Sepaku, terletak di dalam wilayah konsesi PT. ITCI. Diperkirakan bendungan ini mampu melayani kebutuhan air bersih bagi 3 juta penduduk.

Beberapa waduk di Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi tantangan penurunan kualitas dan kapasitas tampung yang dipengaruhi oleh kegiatan disekitarnya. Sebagaimana yang terjadi pada Waduk Sesulu yang dimanfaatkan juga sebagai budidaya ikan kramba dan aktivitas sanitasi dengan limbah yang dibuang langsung ke badan air. Selain pencemaran, kapasitas tampung Waduk Sesulu menurun karena adanya pendangkalan oleh adanya proses eutrofik tanaman air yang semakin meluas. Merespon hal tersebut, upaya normalisasi fungsi waduk perlu digerakan untuk mengembalikan fungsi waduk, begitu pula dengan penguatan pola hidup bersih masyarakat sekitar.

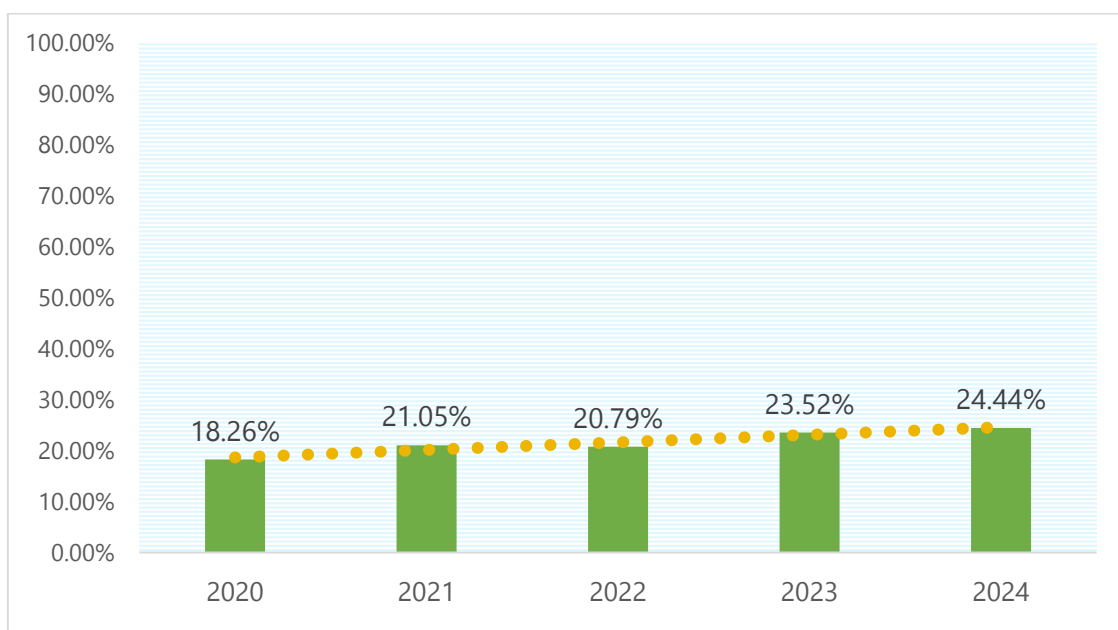
Tabel 2. 9 Luas Cekungan Air Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Keterangan
CAT Loahaur	3.197,97	CAT dalam Kabupaten/Kota
CAT Samarinda-Bontang	57.084,99	CAT Lintas Kabupaten/Kota

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Keterangan
CAT Sebakung	17.727,49	CAT Lintas Kabupaten/Kota
Total	293.797,25	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Selain air permukaan, suplai air baku disediakan oleh CAT yang termasuk dalam administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat tiga jenis CAT dengan 2 CAT merupakan lintas kabupaten/kota yaitu CAT Samarinda-Bontang dan CAT Sebakung, serta CAT dalam kabupaten/kota yaitu CAT Loahaur. Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara juga digambarkan dengan adanya pelayanan air minum untuk masyarakat dengan jaringan perpipaan maupun non perpipaan, selain itu juga digambarkan dengan layanan jaringan irigasi yang digunakan untuk pengairan lahan pertanian. Pelayanan air minum perpipaan diwujudkan dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.



Gambar 2. 12 Cakupan Layanan air minum perpipaan

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Cakupan pelayanan air minum perpipaan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 24,44 persen. Selain masyarakat yang

dapat mengakses air minum dari jaringan perpipaan, mayoritas masyarakat masih memanfaatkan air bersih yang berasal dari sumur, leding, maupun sumber lain. Berdasarkan hasil sensus Regsosek BPS Tahun 2022, diketahui bahwa sebagian besar atau sebanyak 41 persen rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan air yang bersumber dari sumur bor untuk keperluan mandi dan mencuci. Sebagian rumah tangga lainnya juga banyak yang menggunakan air leding atau air sungai/danau/air hujan atau sumber air permukaan lain untuk keperluan mencuci dan mandi, yaitu sebanyak 16 persen rumah tangga. Sumber mata air tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih mudah didapatkan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan air sumur bor yang dapat digunakan kapanpun tanpa harus takut pelayanan air bersih terganggu karena pemeliharaan dan alasan lainnya.

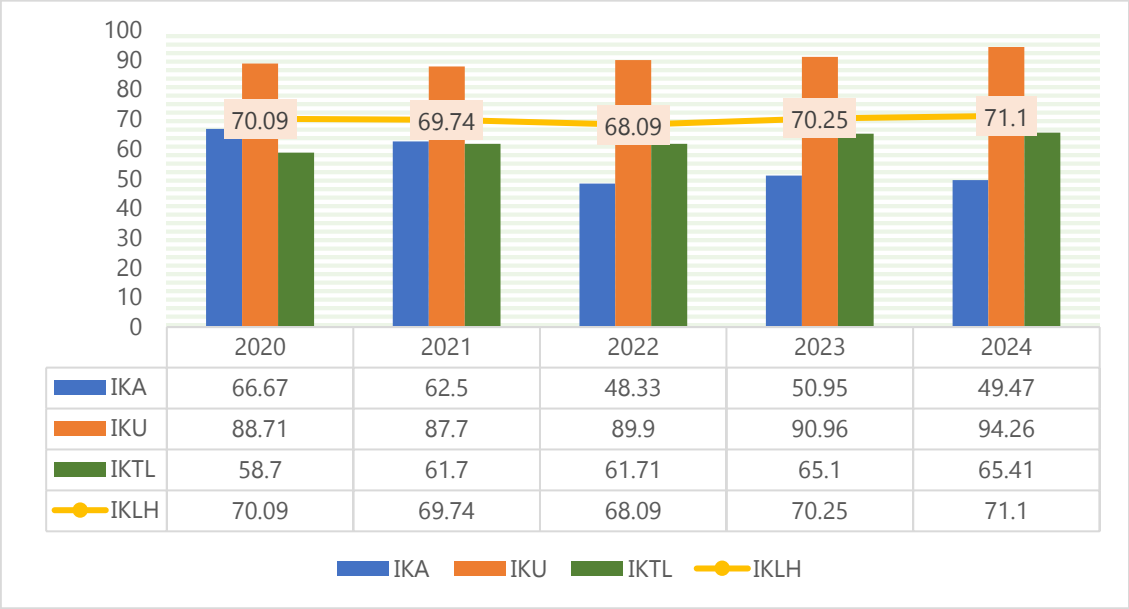
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Bagian ini menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara kontinyu dapat mempengaruhi pergeseran kualitas komponen lingkungan hidup. Sementara itu, lingkungan hidup yang berkualitas dapat menyediakan fungsi maupun jasa lingkungan yang jauh lebih baik bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, penurunan kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran, polusi, dan deforestasi akan memberikan dampak buruk bagi manusia seperti udara kotor dan sumber air mengering. Untuk itu, dilakukan penilaian kualitas lingkungan hidup untuk mengetahui kemampuan lingkungan dalam menyediakan fungsinya.

2.1.5.1 Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan ukuran yang menyatakan kualitas lingkungan hidup pada periode waktu tertentu, berdasarkan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Setiap komponen

diberikan bobot tertimbang disesuaikan dengan tingkat pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan. Perkembangan nilai IKLH beserta komponennya di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2. 13 Capaian IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Akumulasi hasil dari perhitungan setiap komponen IKLH menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 berpredikat Baik dengan capaian 71,11 dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Lonjakan capaian IKLH di tahun 2023 sebesar 2,16 poin dibandingkan tahun 2022, mengindikasikan membaiknya kualitas komponen lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya, IKLH kembali mengalami peningkatan sebesar 0,85 point pada tahun 2024.

Capaian setiap komponen menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian IKU relatif lebih tinggi dibandingkan capaian IKA dan IKTL. Secara spesifik, IKU tertinggi dicapai pada tahun 2024 dengan peningkatan 3,3 poin dibandingkan capaian di tahun 2023. Kualitas udara Kabupaten Penajam Paser Utara berkategori baik karena didukung oleh tutupan lahan hijau yang masih luas serta sumber polusi yang rendah. Kualitas air mengalami tren penurunan setiap tahunnya,

penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu 14,17 poin dan menjadikan IKA pada tahun 2022 tergolong kategori Kurang. Namun capaian IKA bergerak naik 2,62 poin di tahun 2023, mengindikasikan upaya pengelolaan lingkungan berhasil memperbaiki kualitas air permukaan, walaupun kembali menurun pada tahun 2024. Kualitas air menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya, pencemaran air bersumber dari limbah domestik yang belum terkelola sesuai prosedur keamanan lingkungan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan perlu ditingkatkan sebagai upaya preventif meluasnya pencemaran air sungai oleh limbah domestik.

2.1.5.2 Akses Sanitasi

Akses terhadap sanitasi layak menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui sanitasi yang layak diharapkan dapat memutus siklus penyakit dan mengurangi potensi pencemaran air. Sebagian besar (91%) rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki fasilitas BAB pribadi atau milik sendiri. Tercatat masih ada 9% rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB komunal. Di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini banyak yang masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) dan yang menggunakan septic tank tidak layak yang menyebar merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Tabel 2. 10 Cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Layanan Sanitasi	Rumah tangga (KK)	Persentase (%)
1.	Buang air besar sembarangan (BABS) dan yang menggunakan septic tank tidak layak	16.894	38,20
2.	Sistem setempat (on site)	22.581	51,10
3.	Jamban bersama Kecamatan Babulu	1.583	3,58
4.	Jamban bersama Kecamatan Penajam	2.771	6,30
5.	Jamban bersama Kecamatan Sepaku	389	0,90

Sumber: RP3KP Kabupaten Penajam Paser Utara

Jamban bersama yang dimaksud adalah jamban sharing (istilah dalam STBM), yaitu masyarakat yang menggunakan jamban dengan menumpang ke saudara atau tetangga rumahnya. Pada saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di TPA Buluminung, Kecamatan Penajam. Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair langsung ke saluran drainase/lingkungan.

Sistem sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat tiga permasalahan pengolahan air limbah, yaitu sistem sanitasi pengelolaan air limbah secara langsung atau praktek buang air besar sembarangan (BABS), sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik penggunaan septic tank tidak layak, dan SPALD-Setempat. Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memiliki pengolahan lumpur tinja (IPLT) sesuai teknis namun belum beroperasi dan sudah memiliki mobil layanan sedot tinja milik Pemda sebanyak 1 unit. Akan tetapi mobil layanan sedot tinja ini hanya melayani fasilitas umum seperti perkantoran dan rumah sakit saja.

2.1.5.3 Pengelolaan Persampahan

Aktivitas manusia menghasilkan buangan dalam bentuk padatan dan cairan yang sudah tidak dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Nilai guna dari hasil buangan sampah dan limbah umumnya sudah berkurang karena perubahan komposisi fisik dan kimiawi. Sampah dan limbah yang terkumpul berpeluang besar merusak lingkungan dari cemaran bahan kimiawi, untuk itu dalam pengelolaannya dibutuhkan penanganan yang tepat.

Tabel 2. 11 Penanganan Sampah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Pengelolaan Sampah	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	70,04	62,49	82,59	65,87	88,37

Pengelolaan Sampah	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (Ton)	9.975,83	1.457,59	1.677,36	1.300,76	4.354,51
Volume sampah (Ton)	39.890,00	33.766,52	34.478,00	35.324,00	36.877,23

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Volume sampah yang terkumpul di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 hingga mencapai 36.877,23 ton di tahun 2024. Sampah tertangani pada tahun 2024 telah menajapai 88,37 persen atau sekitar 4.354,51 ton. Upaya pengelolaan sampah terus dilakukan, namun masih terdapat timbunan sampah yang tidak dapat diolah, perlu upaya lain untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 12 Bank Sampah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Jumlah Penabung	Omset (Rp)	Wilayah Pelayanan	Status
Bank Sampah Induk	15.625	160	56.000.000	Kabupaten Penajam Paser Utara	Aktif
Bank Sampah TPA	2.097	60	18.635.000	TPA Buluminung	Aktif

Sumber: Dokumen IKPLHD Kabupaten Penajam Paser Utara

Pengelolaan sampah melauai upaya daur ulang mencapai 5,14 persen di tahun 2023, capaian ini meningkat 1,37 juta ton dibanding tahun 2022. Lonjakan jumlah sampah yang dilakukan daur ulang meningkat secara perlahan selama tahun 2021 sampai 2022. Namun demikian, jumlah sampah yang didaur ulang di tahun 2020 tercatat sebagai jumlah terbesar yaitu melonjak 84 persen, kemudian menurun sebesar 85,86 persen di tahun 2021. Sampah yang tidak didaur ulang akan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) untuk mendapatkan tindakan pengelolaan. Terbatasnya lahan dan daya tampung TPA belum diiringi dengan daur ulang sampah yang optimal, dikhawatirkan jika daya tampung mencapai

maksimal maka sampah tidak terkelola dengan baik. Untuk itu, upaya minimalisasi penggunaan barang sekali pakai dan daur ulang sampah perlu dioptimalkan. Terdapat setidaknya dua bank sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih berstatus aktif yaitu Bank Sampah Induk dan Bank Sampah TPA Buluminung.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

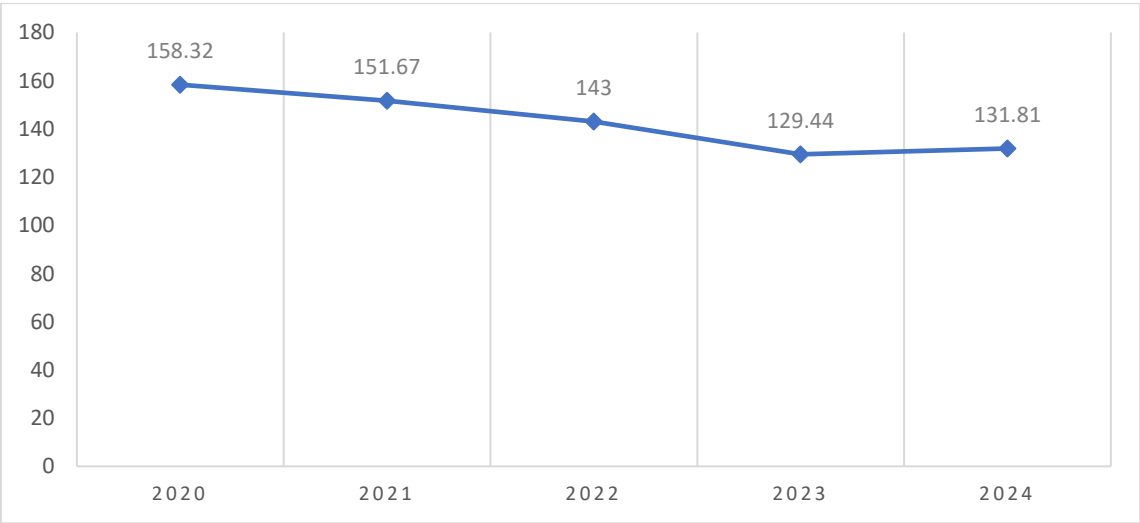
Sub bab ini menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Bencana dimaknai sebagai suatu peristiwa baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, maupun kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat digambarkan melalui data seperti Indeks Risiko Bencana, Penurunan Intensitas GRK, serta Indeks Ketahanan Daerah yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana.

Kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2022 yang tertuang pada Perbup Penajam Paser Utara No. 25 Tahun 2021 adalah kawasan rawan tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, banjir, dan tanah longsor.

2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam atau sosial yang mengancam kehidupan manusia serta menimbulkan kerugian material, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Bahaya bencana alam selalu melekat pada suatu wilayah sebagai akibat dari karakteristik fisik dan keruangan wilayah. Dewasa ini, ancaman bencana semakin meningkat terutama

bencana hidrometeorologis sebagai implikasi dari krisis iklim global yang tengah berlanjut. Bahaya bencana dapat ditekan untuk menurunkan tingkat risiko kerugian dan korban jiwa melalui penguatan kapasitas daerah baik dari aspek kapasitas kelembagaan, infrastruktur, pengetahuan masyarakat, dan daya dukung lingkungan hidup. Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh BNPB mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bahaya bencana dan kerentanan bencana. Berikut ini merupakan catatan data IRB Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 14 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara

IRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Penurunan IRB yang cukup besar terjadi pada tahun 2023 dengan persentase penurunan mencapai 13,56 persen dari capaian tahun 2022. Namun, indeks risiko bencana mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024. Artinya, risiko bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peluang lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023. Meningkatnya risiko bencana tersebut, diantaranya dapat disebabkan dari tingkat bahaya bencana dari daratan dan laut, maupun kerentanan masyarakat yang masih cukup tinggi untuk menghadapi ancaman bahaya serta pergeseran dinamika krisis iklim. Analisis penghitungan risiko kerugian akibat bencana alam

telah tercantum dalam geoportal inarisk, sebagaimana yang dijabarkan berikut ini.

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Daerah rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar berada di wilayah utara, meliputi Kecamatan Sepaku dan sebagian Kecamatan Penajam. Hal ini disebabkan kondisi geografis, yaitu topografi wilayah yang cenderung berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan yang cukup bervariasi. Kondisi ini cenderung menimbulkan potensi pergerakan tanah apalagi jika ditambah dengan kondisi curah hujan dengan intensitas tinggi. Wilayah yang diperkirakan memiliki kerawanan bencana tanah longsor seluas lebih kurang 8.400 ha yang meliputi area Kelurahan Lawe-Lawe, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Buluminung (Muan), Desa Bumi Harapan, Desa Api-Api, Desa Telemow, Desa Binuang, Desa Sesulu dan Desa Mentawir.

Berdasarkan data yang dirangkum dari DIBI, bencana tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terjadi dari tahun 2020-2024 sebanyak 16 kali kejadian dengan memberi dampak jumlah korban dan merusak bangunan fisik. Rincian data tersebut tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13 Kejadian Bencana Tanah Longsor dari Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Babulu	0	0	0	0	2
Waru	0	0	0	0	0
Penajam	0	0	1	2	2
Sepaku	1	4	2	1	1

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Penajam Paser Utara	1	4	3	3	5

Sumber: Diolah dari data DIBI (2023)

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2025, luas bahaya dan kelas bahaya yang terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan berada pada kelas sedang di mana hanya Kecamatan Waru yang berada pada kelas rendah.

Tabel 2. 14 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Babulu	7.022	5.569	39	12.631	Sedang
Penajam	9.583	28.199	122	37.904	Sedang
Sepaku	25.129	48.871	108	6.508	Sedang
Waru	11.944	9.005	11	2.096	Rendah
Total	53.678	91.644	280	60.139	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Penajam Paser Utara 2021-2025

Risiko bencana tanah longsor di tiap kecamatan yang ada di kabupaten ini berdasarkan data inaRISK dan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 15 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Luas Resiko (Ha)	Jumlah Penduduk Terpapar	Risiko Kerugian		
			Fisik (Milyar Rupiah)	Ekonomi (Milyar Rupiah)	Kerusakan Lingkungan (Ha)
Babulu	0	110	168	4.681	537
Waru	2.660	781	2.800	41.699	825
Penajam	8.286	369	930	20.366	2.829
Sepaku	16.342	2.116	4.320	85.440	7.338
Penajam Paser Utara	27.288	3.376	8.218	152.186	11.529

Sumber: InaRISK

Risiko kerugian bencana longsor mencapai 152.186 milyar rupiah dengan jumlah penduduk terpapar diperkirakan mencapai 3.376 jiwa. Distribusi keruangan menunjukkan Kecamatan Sepaku merupakan daerah dengan risiko kehilangan korban jiwa dan kerugian terbesar karena cakupan area berisiko cukup luas mencapai 16.342 hektar atau sekitar 59,88 persen dari luas wilayah yang berisiko longsor. Hal ini merupakan implikasi dari karakteristik wilayah Sepaku berupa perbukitan dengan lereng terjal dan curam pada sisi bagian barat.

2. Kawasan Rawan Kebakaran

Kebakaran juga merupakan salah satu bencana yang berpotensi muncul di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di beberapa lokasi seperti di Kelurahan Penajam dan Kelurahan Petung, terdapat konsentrasi pemukiman padat penduduk yang merupakan salah satu kondisi rawan bencana kebakaran. Menurut data Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2024 kejadian kebakaran di area pemukiman penduduk berjumlah 25 kejadian yang mengakibatkan terbakarnya rumah/hunian maupun bangunan lainnya. Sementara itu untuk kasus kebakaran hutan/lahan pada tahun 2024 terjadi sebanyak 19 kejadian. Sedangkan berdasarkan data yang dirangkum, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten ini yang terjadi sepanjang tahun 2013 hingga 2024 sebanyak 183 kali.

Tabel 2. 16 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun	Kejadian
2020	9
2021	1
2022	N/A
2023	117
2024	19
Total	183

Sumber: Diolah dari BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2025, potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan berada pada kelas tinggi. Hal ini berkaitan dengan tingkat curah hujan di Penajam Paser Utara dan penutup lahan yang masih didominasi oleh hutan dengan dominasi persebaran jenis tanah gambut. Selain itu kekeringan yang berkepanjangan dan pembukaan lahan oleh manusia untuk peruntukan tertentu juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah sebaran kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan jenis tanah dan jumlah titik api (*hot spot*).

Tabel 2. 17 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Babulu	790	18.661	8.491	27.941	Tinggi
Penajam	21.053	64.946	12.398	98.397	Tinggi
Sepaku	11.499	54.845	7.578	73.922	Sedang
Waru	437	40.032	13.822	5.429	Sedang
Total	33.779	178.484	42.289	205.689	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Penajam Paser Utara 2021-2025

ekonomi sebesar 1.160.147 (dalam milyar rupiah dan risiko kerugian lingkungan sebesar 13.456 ha).

3. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya berada di wilayah sekitar sungai. Area ini memiliki potensi tersebut karena secara geografis, jika curah hujan meningkat maka akan ada kenaikan volume debit sungai sehingga akan meluap ke area daratan sekitarnya. Selain itu, beberapa area memiliki potensi genangan akibat topografinya yang rendah dengan belum terdukung oleh sistem aliran pembuangan/drainase yang baik. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat di Desa Sebakung Jaya, Desa Sri Raharja, Desa Sumber Sari, Desa Rawa Mulya, Desa Labangka, Desa Bukit Subur, Kelurahan Petung (Tunan), Kelurahan Riko, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Pemaluan, Desa Sukaraja.

Banjir di wilayah Penajam Paser Utara secara umum tergolong ke dalam dua jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai dan banjir genangan dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Seperti halnya kota-kota lain, masalah DAS dan drainase menjadi persoalan utama penyebab banjir. Banjir biasa terjadi ketika berada di puncak musim hujan. penambahan volume air limpasan dari hulu menjadi faktor utama luapan air sungai yang menyebabkan banjir. Berdasarkan data yang dirangkum dari BPBD, bencana banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 93 kali. Rincian data tersebut tersaji pada tabel di bawah ini.

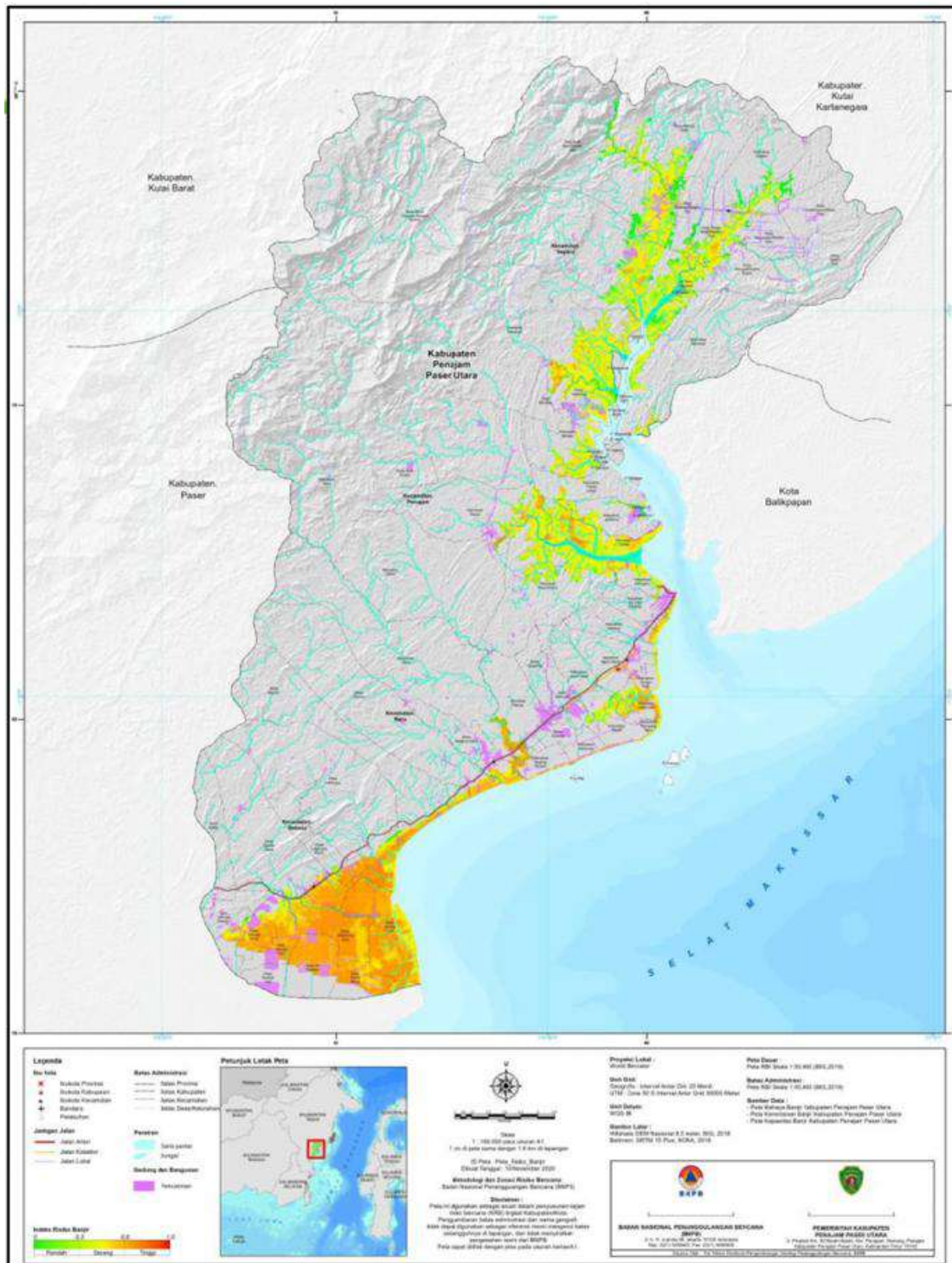
Tabel 2. 18 Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Babulu	2	1	4	1	5
Waru	2	5	4	32	1
Penajam	5	8	8	13	6
Sepaku	3	7	9		4

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total	12	21	25	19	16

Sumber: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2025, satu kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki klasifikasi bahaya yang tinggi. Klasifikasi ini dilihat dari luas bahaya yang terdampak di masing-masing kecamatan. Secara spasial terlihat bahwa bahaya banjir yang tinggi berasosiasi dengan sungai yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 17 Peta Risiko Banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KRB Kabupaten Penajam Paser Utara 2021-2025 (BPBD Penajam Paser Utara)

4. Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem

Berdasarkan kejadian yang dirangkum dari DIBI, bencana cuaca ekstrem berupa angin puting beliung cukup sering terjadi di Kabupaten Penajam Paser

Utara. Dari data tersebut bencana puting beliung di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2025 tercatat sebanyak 41 kali kejadian dengan jumlah korban terdampak sebanyak 129 orang dan merusak 39 bangunan fisik. Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2025, potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan tutupan lahan terbuka dan dataran landai. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem yang tinggi di hampir seluruh kecamatan, dengan total luas 262.334 ha atau 75,58% dari total luas wilayah.

Tabel 2. 19 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Babulu	5.494	10.864	23.576	39.935	Tinggi
Penajam	9.646	48.104	36.415	94.166	Tinggi
Sepaku	19.496	47.299	11.131	77.926	Tinggi
Waru	8.196	35.117	6.995	50.307	Sedang
Total	42.832	141.384	78.117	262.334	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Penajam Paser Utara

Sementara risiko bencana cuaca ekstrem di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan data inaRISK tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara

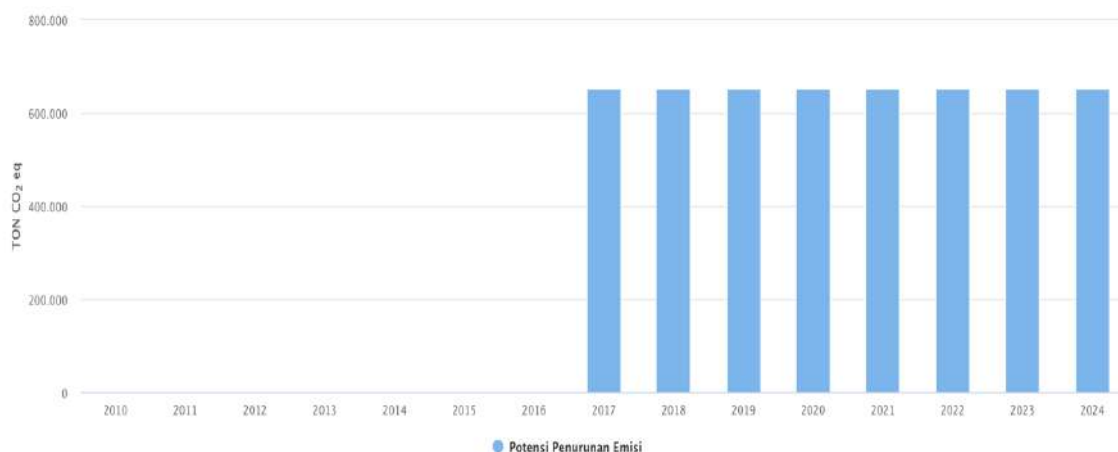
Tingkat Risiko	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)	Jiwa Terpapar	Risiko Kerugian	
				Fisik (Rp, Milyar)	Ekonomi (Rp, Milyar)
Sedang hingga tinggi	Babulu	16,272	35,368	362,600	120,226
	Waru	10,890	16,391	131,846	61,567
	Penajam	24,635	86,018	762,151	127,505
	Sepaku	11,873	28,381	194,855	53,658
Total		63,670	166,158	1,451,452	362,956

Sumber: Diolah dari data inaRISK

2.1.6.2 Penurunan Intensitas GRK

Perubahan iklim merupakan fenomena bergesernya pola atau siklus iklim global karena dampak dari meningkatnya suhu permukaan bumi oleh aktivitas industrialisasi. Lonjakan suhu permukaan bumi global berkaitan dengan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) pada atmosfer bumi yang terlalu berlebihan. GRK merangkap energi sinar matahari yang dilepaskan oleh permukaan bumi untuk tetap berada bagian troposfer bumi. Melalui dokumen Komitmen Indonesia (Enhanced NDC), Indonesia berambisi untuk mencegah berlangsungnya kenaikan suhu global dengan berkomitmen menurunkan 31,89 persen konsentrasi GRK secara bertahap sejalan dengan target Long-term

Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) menuju *net-zero emission* pada tahun 2060. Oleh karenanya, pemantauan GRK terus diperkuat pemerintah di tingkat nasional dan daerah.



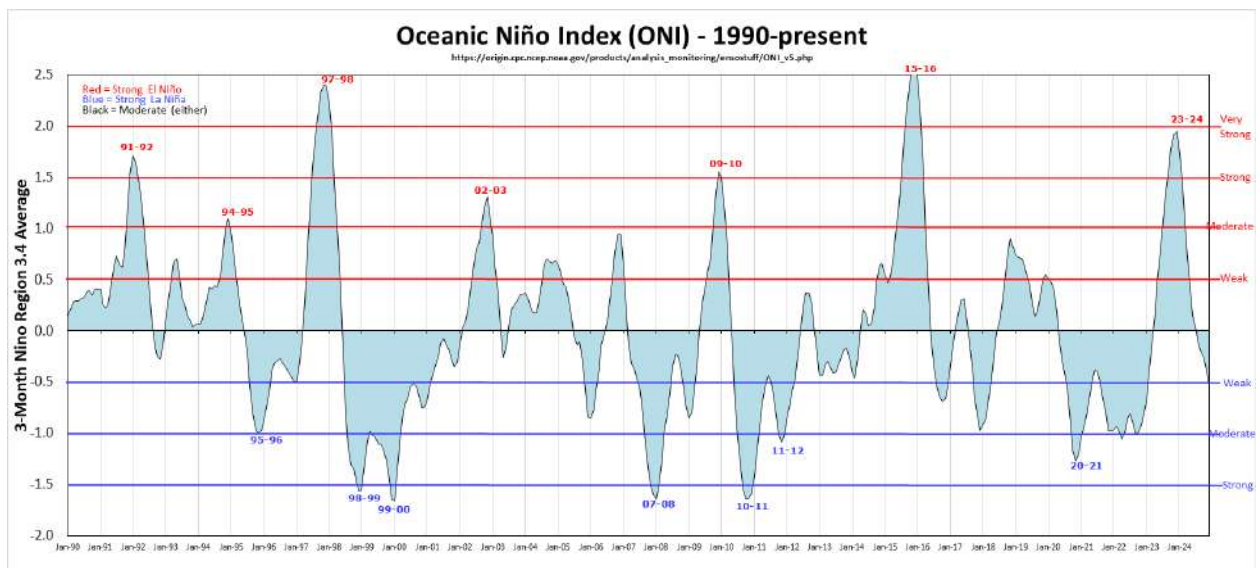
Gambar 2. 19 Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2024

Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/>

Histori capaian potensi penurunan emisi GRK Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan terdapat potensi penurunan emisi sampai 653.034,7978 tCO₂e (setara ton CO₂) pada tahun 2024. Potensi ini setara dengan kontribusi 1,78 persen terhadap capaian penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi penurunan emisi tersebut didukung oleh hamparan hutan tropis dan ekosistem mangrove, sebagai ekosistem kunci dalam penyerapan karbon. Upaya peningkatan potensi penurunan emisi GRK harus diupayakan secara progresif untuk melindungi ekosistem penting yang berperan dalam penyerapan GRK tersebut. Hal ini mengingat ancaman krisis iklim berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan penghidupan.

Selain memantau GRK, pola dan tren variabilitas iklim tetap perlu dilakukan, mengingat Pulau Kalimantan dalam kawasan Indonesia berada diantara pengaruh siklus El-Nino Ocean Oscilation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), dan pergerakan arus udara Monsun Barat dan Monsun Timur. Ketiga siklus

pergerakan udara tersebut berdampak signifikan terhadap pola curah hujan dan kekeringan di Indonesia.



Gambar 2. 20 Histori Kejadian ENSO Tahun 1990 – 2024

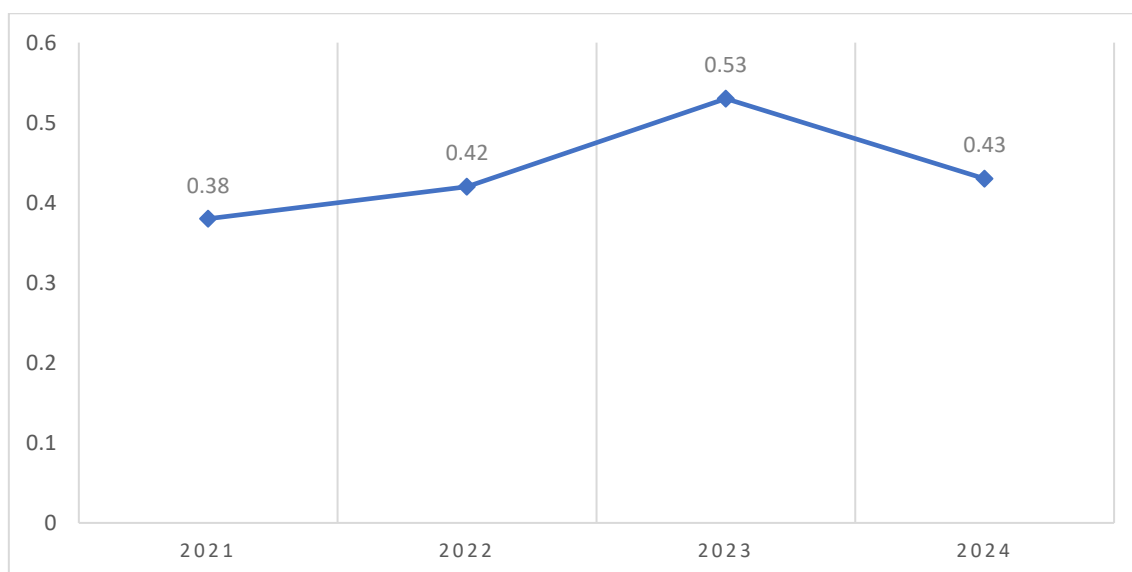
Sumber: <https://ggweather.com/enso/oni.htm>

Siklus ENSO memunculkan dua fenomena iklim yaitu El-Nino dan La-Nina. El-Nino akan menyebabkan kawasan Indonesia mengalami musim kering yang lebih panjang dan buruk dibandingkan pada saat kondisi normal, sebaliknya La-Nina menimbulkan curah hujan yang tinggi dengan frekuensi yang lebih lama. Menurut Indeks ENSO (ONI), intensitas El-Nino sangat kuat terjadi pada tahun 2015, relatif mempengaruhi curah hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menurun menjadi 1.773 mm/tahun. Curah hujan tahunan pada kondisi normal diperkirakan 150 – 200 mm/bulan atau 2.300 – 2.800 mm/tahun (BMKG, 2023), artinya intensitas curah hujan masih tergolong Tinggi. Peristiwa El-Nino berintensitas kuat berulang pada tahun 2023, menyebabkan beberapa sumber air seperti embung dan penampungan air baku lainnya mengalami penyusutan cukup signifikan, sehingga BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan. Kekeringan di Penajam Paser Utara pada tahun 2023 menurunkan produksi pertanian dan kerentanan kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Fenomena yang terus berulang ini

membutuhkan respon dalam upaya antisipasinya, konservasi secara berkelanjutan menjadi kunci preventif kelangkaan air.

2.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Dalam rangka menghadapi ancaman bahaya bencana, kapasitas daerah perlu diperkuat untuk meminimalisasi dampak bencana yang ditimbulkan. Tingkat kapasitas daerah diukur menggunakan indeks ketahanan daerah (IKD) yang berfokus pada 7 prioritas dalam penghitungannya, termasuk aspek kelembagaan, kajian, teknologi, dan sistem pemulihan terstruktur. Semakin tinggi nilai pada setiap indeks prioritas akan berimplikasi terhadap tinggi rendahnya ketahanan daerah. Berikut ini merupakan capaian pada setiap indeks prioritas dan hasil kompositnya yaitu IKD.



Gambar 2. 21 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Indeks ketahanan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 memperoleh skor 0,43 atau berkategori sedang. Artinya kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan telah berjalan secara baik, namun masih memerlukan upaya tambahan untuk mengoptimalkan capaian fokus prioritas ketahanan daerah. Indeks prioritas menunjukkan fokus prioritas peningkatan

efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana bernilai sangat rendah yaitu 0,29. Menandakan upaya mitigasi dan pencegahan bencana masih belum optimal pelaksanaannya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Terkait Peningkatan Kapasitas Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana (%)	100%	63,59%	70%	22,75%	53%

Sumber: LKjIP Kabupaten Penajam Paser Utara

Kapasitas daerah dalam pengkajian risiko dan perencanaan terpadu menunjukkan indeks cukup tinggi yaitu 0,8 poin, artinya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki data dan informasi yang lengkap terkait karakteristik bencana di wilayahnya. Hal ini menjadi penting mengingat data tersebut menjadi tumpuan dalam perencanaan kebijakan kebencanaan termasuk lokasi, luasan, dan level risiko. Rekap capaian pada salah satu indikator kinerja sasaran 14 RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana, menunjukkan sejauh mana upaya peningkatan kapasitas Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilakukan. Capaian pada tahun 2019 berhasil merealisasikan program sebesar 100 persen, kemudian menurun menjadi 63,59 persen pada tahun 2020. Capaian kinerja kembali melonjak 6,41 persen di tahun 2021, namun realisasi di tahun 2022 merosot jauh yaitu 22,75 persen. Upaya perbaikan kapasitas terus dilakukan oleh pemerintah daerah hingga berhasil memulihkan capaian menjadi 53 persen di tahun 2023. Fluktuasi tersebut menandakan masih belum konsistensinya upaya daerah dalam meningkatkan kapasitasnya. Disamping itu, pemerintah berhasil membentuk 14 desa/kelurahan tahan bencana sebagai garda terdepan dalam menangani peristiwa kebencanaan. Terdapat beberapa upaya yang terus digerakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperbaiki kapasitas daerah diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kolaborasi antar sektor
2. Melibatkan *stakeholder* dengan memperhatikan aspek preventif, mitigas, dan kesiapsiagaan
3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimtek
4. Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam penanganan bencana
5. Meningkatkan keterlibatan Masyarakat
6. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan tahan bencana.

2.1.7 Demografi

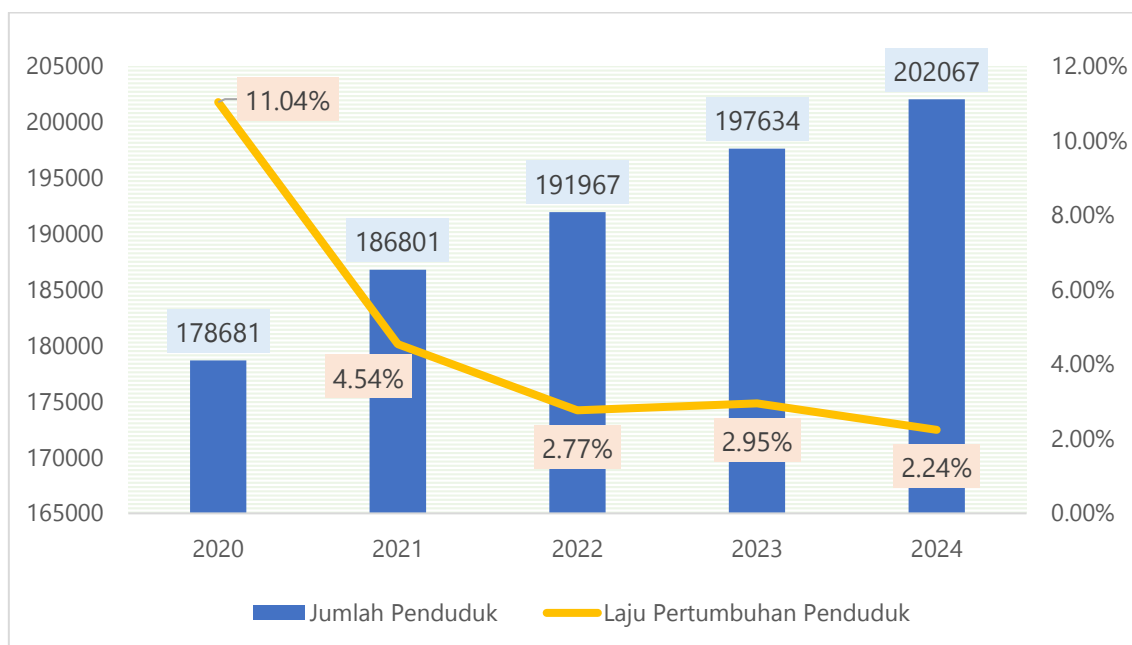
Demografi memiliki peran penting dalam perencanaan di suatu wilayah karena perubahan struktur penduduk secara langsung memengaruhi kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, serta tata guna lahan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, kepadatan, dan pola migrasi menentukan bagaimana suatu wilayah berkembang dan beradaptasi terhadap tantangan masa depan

Aspek demografi di Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat dinamis karena dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Demografi di Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup data terkait jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Data eksisting terkait demografi akan menjadi dasar pada proyeksi kependudukan selama lima tahun kedepan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Badan Pusat Statistik melalui laporan tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2024 menyebutkan bahwa terdapat 202.067 penduduk yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024. Data tersebut merupakan gabungan dari 104.765 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 97.302 lainnya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 11,57 persen dibandingkan pada tahun 2020 atau bertambah sebanyak

23.386 jiwa. Banyaknya jumlah penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh persentase laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 22 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024

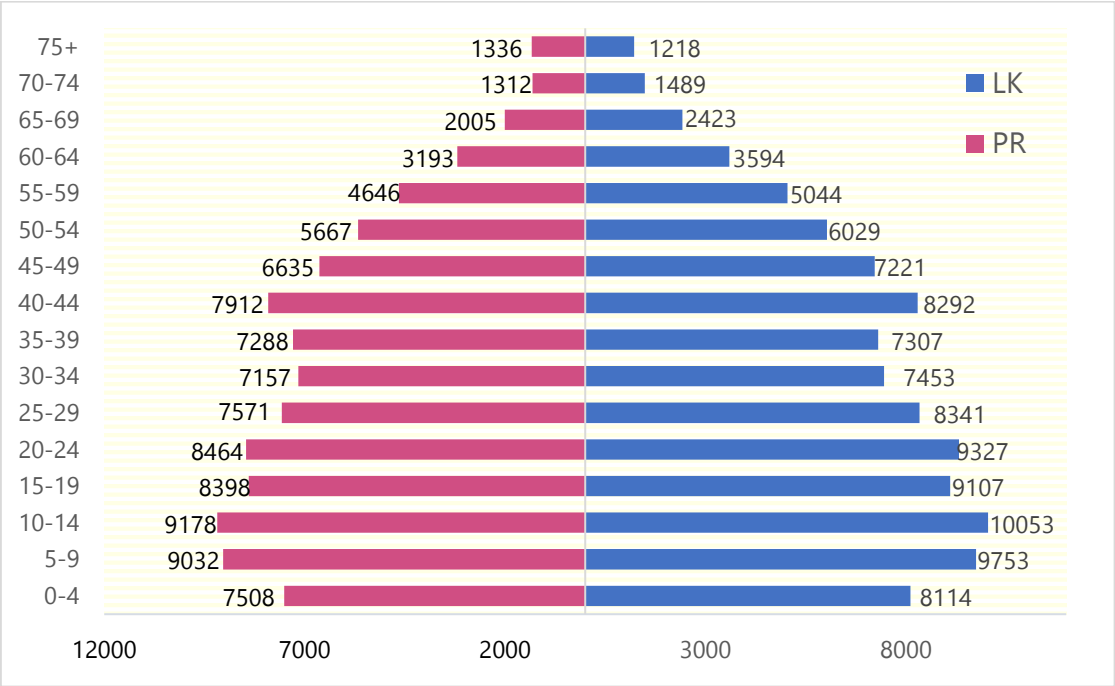
Sumber: BPS, 2025

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada tahun 2020 dan turut mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk pada akibat adanya pendataan ulang melalui sensus penduduk 10 tahunan. Adanya sensus penduduk pada tahun 2020 menyebabkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi hingga mencapai 11,04 persen. Hal itu mengindikasikan bahwa data kependudukan tahun sebelumnya menggunakan angka proyeksi dengan data dasar sensus penduduk tahun 2010 lebih kecil dibandingkan jumlah riil penduduk sebelum dilakukan sensus penduduk 2020. Implikasi lain dari pembaharuan data kependudukan

melalui sensus penduduk tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk yang lebih stabil pada tahun 2021 hingga 2024. Selain itu, adanya disrupsi pandemi Covid-19 juga turut andil dalam lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan sebelum sensus. Fluktuasi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 hingga 2024 akibat adanya rencana arus migrasi masuk di Ibukota Nusantara (IKN).

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu misalnya, secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Komposisi penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 2. 23 Piramida Penduduk Tahun 2024

Sumber: BPS, 2025

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 memiliki bentuk piramida stasioner. Bentuk piramida stasioner mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil antara kelompok usia produktif maupun non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni sebesar 68,61 persen dengan rincian 51,73 persen di antaranya laki-laki dan 48,27 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 26,54 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 3,58 persen. Usia produktif dianggap sebagai masa seorang individu memasuki usia kerja, yakni 15-64 tahun. Kelompok usia produktif yang lebih banyak dibandingkan non produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara sedang dalam fase bonus demografi, terutama ketika mempertimbangkan besaran rasio ketergantungan yang dimiliki. Data pada piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rasio ketergantungan sebesar 43,90 persen. Rasio ketergantungan yang masih berada di bawah angka 45 persen menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami bonus demografi pada tahun 2024. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara ke depannya

2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Perhitungan rasio penduduk berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Perbandingan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat perencanaan yang lebih terarah terkait subjek

kebijakan. Perbandingan jumlah penduduk dapat dilihat melalui data *sex ratio* yang menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. *Sex Ratio* dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan *Sex Ratio* dengan data awal tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 22 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	92.506	86.175	178.681	107,35
2021	96.701	90.100	186.801	107,33
2022	99.423	92.544	191.967	107,43
2023	101.869	95.765	197.634	106,37
2024	104.765	97.302	202.067	107,67

Sumber: BPS, 2025

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa *sex ratio* di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2020 hingga 2024. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2023, yakni selisih 1,06 poin dibandingkan data *sex ratio* pada tahun sebelumnya. Fluktuasi *sex ratio* di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah. *Sex ratio* dengan angka 107,67 menunjukkan bahwa terdapat 107 hingga 108 penduduk berjenis kelamin laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan

satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada rentang tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Babulu	399,45	92,04	91,78	94,89	97,33	99,94	101,62
2	Waru	553,88	37,22	35,80	36,57	37,27	37,85	38,66
3	Penajam	1.207,37	75,48	72,62	74,81	76,79	78,98	81,49
4	Sepaku	1.172,36	26,84	31,71	32,69	33,90	34,39	35,55
Kabupaten Penajam Paser Utara		3.333,06	52,57	54,41	56,04	57,59	58,97	60,63

Sumber: Disdukcapil, 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang fluktuatif pada tahun 2019 hingga 2024. Kecamatan Babulu merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni mencapai 101,62 pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 102 penduduk di tiap kilometer persegi pada tahun 2024 di Kecamatan Babulu. Pada sisi yang berlawanan, tingkat kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Sepaku yang hanya mencapai 34,98 persen dari tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Babulu. Perbedaan tingkat kepadatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda. Selain itu faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, politik juga dapat memengaruhi persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat

memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama terdiri dari suku Paser, yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya. Salah satu ritual adat yang paling dikenal adalah Pesta Belian Adat Paser Nondoi, yang telah dilaksanakan sejak 2011 dan menjadi salah satu ikon budaya daerah ini. Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, masyarakat adat Paser memiliki tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, pemerintah daerah dan masyarakat adat perlu untuk meningkatkan kolaborasi dalam melestarikan budaya lokal melalui berbagai kegiatan, termasuk pelibatan generasi muda dalam festival budaya dan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat adat Paser di Penajam Paser Utara terus dapat terus lestari.

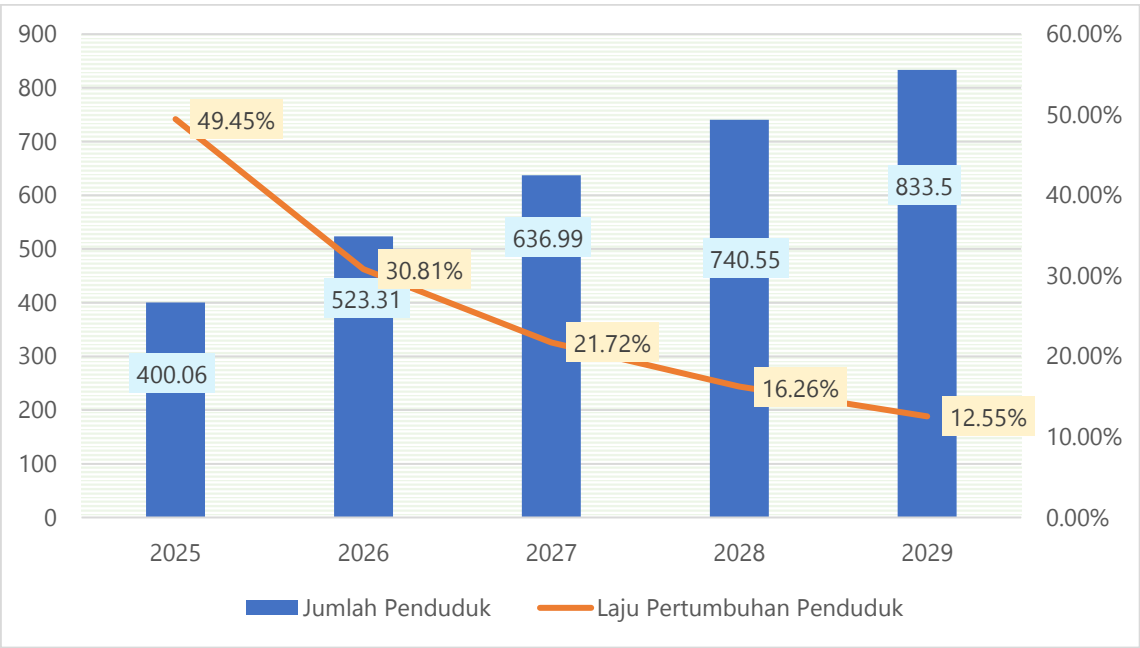
2.1.7.6 Proyeksi demografi

Proyeksi demografi berupaya untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Penajam Paser Utara. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Dinamika kependudukan perlu dianalisis dengan lebih mendalam sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Proyeksi demografi Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan data kependudukan tahun 2020 sebagai data dasar. Berikut merupakan hasil proyeksi

demografi Kabupaten Penajam Paser Utara pada aspek jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 24 Proyeksi jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023

Sumber: Olah, 2024

Hasil proyeksi kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 2025 hingga 2029. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang secara signifikan memiliki tren berbeda dengan laju pertumbuhan penduduk yang secara konsisten mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,16 persen. Penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan angka yang cukup tinggi tiap tahunnya dikarenakan adanya lonjakan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan adanya arus migrasi masuk akibat pemindahan ibukota dari Jakarta ke IKN. Migrasi tersebut diproyeksikan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk hingga sebesar 49,45 persen pada tahun 2025. Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan bertambah sebanyak 433,44 ribu jiwa selama periode 2025-2029. Arus migrasi masuk mendominasi peningkatan jumlah penduduk tersebut dan ditambah dengan pertumbuhan

penduduk alami yang tampak dari *total fertility rate* (TFR). Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur juga memproyeksikan bahwa TFR Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada angka 2,22. TFR tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kabupaten Penajam Paser Utara akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 2,22 merujuk rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara melahirkan dua orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyandang status sebagai salah satu penyangga IKN memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 24 Proyeksi Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara per Kecamatan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)									
			2025		2026		2027		2028		2029	
1	Babulu	399,45	81403	203,79	106521	266,67	129789	324,92	151095	378,26	170296	426,33
2	Waru	553,88	43151	77,91	56307	101,66	68365	123,43	79268	143,11	88991	160,67
3	Penajam	1.207,37	194536	161,12	254926	211,14	310692	257,33	361565	299,46	407341	337,38
4	Sepaku	1.172,36	80935	69,04	105537	90,02	128115	109,28	148592	126,75	166852	142,32
Kabupaten Penajam Paser Utara		3.333,06	400.025	120,02	523.291	157,00	636.961	191,10	740.520	222,17	833.480	250,06

Sumber: Olah, 2024

Hasil proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tersebar di empat kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Babulu. Tingkat kepadatan yang cukup tinggi hingga mencapai 203,79 jiwa pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 426,33 pada tahun 2029 akibat adanya arus migrasi pembangunan IKN. Selain itu faktor geografis juga memengaruhi tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Babulu, yakni sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil dibandingkan tiga kecamatan lainnya. Kecamatan Penajam menduduki posisi kedua karena menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu Kecamatan Penajam juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN sehingga mengakibatkan peningkatan hasil proyeksi jumlah penduduk dengan cukup signifikan

Pada dasarnya jumlah penduduk akan selalu mengalami peningkatan apabila pertumbuhan alami di wilayah tersebut tetap terjaga dan dari segi kewilayahan memiliki daya tarik lain yang memicu migrasi masuk. Kecamatan yang menjadi pusat perekonomian akan cenderung menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah wilayah tersebut selalu diminati masyarakat. Di satu sisi, daya tarik pusat suatu wilayah menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan, seperti area kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan mengalami lonjakan tingkat kepadatan penduduk akibat adanya IKN.

2. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk yang dapat menjadi dasar kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya adalah proyeksi penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif menjadi salah satu kriteria yang diproyeksi karena mampu memberikan gambaran penduduk yang masuk dalam usia kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penduduk usia kerja tersebut berada di antara usia 15-64

tahun. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan komposisi umur yang termasuk pula penduduk usia produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 25 Proyeksi komposisi umur penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara per Kecamatan Tahun 2025-2029

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	78,01	99,34	121,46	143,88	166,17
15-64	306,97	406,12	494,98	573,53	641,79
65+	15,08	17,85	20,55	23,14	25,54
Angka Ketergantungan	30,33%	28,86%	28,69%	29,12%	29,87%

Sumber: Olah data, 2024

Hasil proyeksi penduduk menunjukkan peningkatan dari segi jumlah di semua kelompok umur, termasuk pada kelompok usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan sebanyak 505,82 ribu jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 27,46 persen. Hasil proyeksi laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang mencapai rata-rata 27,46 persen dikarenakan adanya lonjakan laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai 55,36 persen pada tahun 2025 dan diproyeksikan terus mengalami penurunan hingga 11,90 persen pada tahun 2029. Hasil proyeksi yang demikian dikarenakan adanya kebijakan pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta ke IKN secara bertahap sejak tahun 2024. Pemindahan tersebut mempengaruhi besaran proyeksi migrasi masuk selama lima tahun mendatang dan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk usia non-produktif pada rentang usia 10-14 tahun pada tahun 2020-2025. Kelompok penduduk usia tersebut memasuki usia produktif dan ikut menyumbang proporsi dan jumlah penduduk usia produktif sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 70,05 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada. Apabila kuantitas tidak sejalan dengan kualitas, maka dapat berpotensi menghadirkan permasalahan kependudukan dan turunannya di masa yang akan datang di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usai tidak bekerja. Penduduk dapat dikategorikan masuk usia kerja ketika berada di rentang usia 15-64 tahun, sedangkan 0-14 tahun dianggap pra usia kerja dan 65 tahun ke atas pasca usia kerja. Pengelompokan tersebut juga menentukan cara perhitungan angka ketergantungan di suatu wilayah. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Hasil proyeksi angka ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2025 proyeksi menunjukkan angka ketergantungan sebesar 30,33 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 29,87 persen pada tahun 2029. Kebijakan pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta ke IKN mempengaruhi besaran angka ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara karena ikut terdampak migrasi masuk yang cukup besar, terutama disebabkan oleh pemindahan ASN didominasi oleh penduduk usia 30-39 tahun, yakni sebesar 34,5 persen. Angka ketergantungan yang sebesar 30,33 persen berarti diproyeksikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja akan menanggung 30 hingga 31 penduduk bukan angkatan kerja. Dari segi jumlah, tanggungan penduduk usia produktif pada tahun 2029 mengalami penurunan menjadi 29 hingga 30 penduduk usia non produktif per 100 penduduk usia produktif apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Kondisi tersebut juga diakibatkan oleh pemindahan bertahap ASN hingga 2029. Cukup stabilnya hasil

proyeksi angka ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan daerah. Hal tersebut dikarenakan beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung rendah dan dapat berfokus untuk mendorong produktivitas daerah.

Cukup stabilnya angka ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang masih memiliki rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan kelompok non produktif. Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 78,01 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 166,17 ribu jiwa pada tahun 2029. Hasil proyeksi yang demikian juga dipengaruhi oleh pemindahan ASN yang diasumsikan turut serta membawa anaknya ke IKN. Laju pertumbuhan penduduk kelompok usia 0-14 tahun memiliki tren yang serupa dengan kelompok usia produktif, yakni mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2030 dan perlahan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,65 persen. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk umur 0-14 tahun. Selain itu, tren serupa terjadi pada kelompok usia non produktif yang berusia di atas 65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,04 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2025 hingga 2029, yakni sebanyak 10,46 ribu jiwa. Selain karena migrasi masuk, peningkatan jumlah penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok usia tersebut.

4. Bonus Demografi

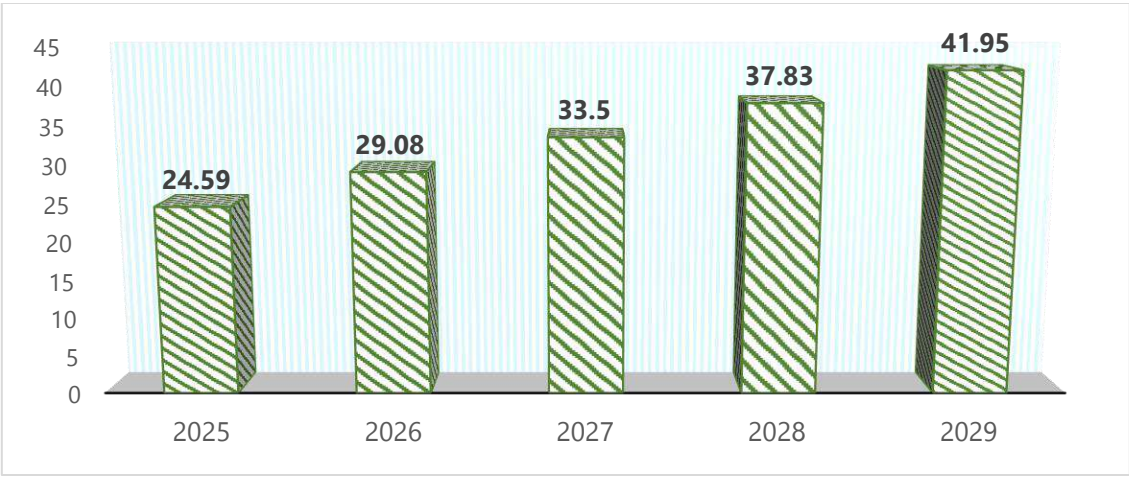
Bonus demografi dimaknai sebagai masa di mana penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60 persen. dari total jumlah penduduk. Proporsi tersebut dapat dilihat melalui hasil proyeksi komposisi penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Selain

dari aspek komposisi penduduk, ada atau tidaknya momentum bonus demografi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat melalui angka ketergantungan yang dimiliki. Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap mendapatkan bonus demografi apabila angka ketergantungannya di bawah 45 persen.

Data hasil proyeksi komposisi penduduk dan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara akan menghadapi fase bonus demografi pada periode yang sama. Kabupaten Penajam Paser Utara harus mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal karena bonus demografi pada tahun 2025-2029 dipengaruhi oleh banyaknya migrasi masuk. Kegagalan untuk mengoptimalkan bonus demografi pada periode tersebut berpotensi menghasilkan kompleksitas masalah di masa depan, seperti tingginya kesenjangan antar penduduk. Selain itu, angka ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup fluktuatif pada masa pemindahan ASN menunjukkan bahwa angka ketergantungan berpotensi membuat angka ketergantungan mengalami peningkatan saat proses pemindahan selesai. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama lima tahun ke depan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

5. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia lanjut di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025-2029.



Gambar 2. 25 Proyeksi jumlah penduduk usia lanjut (ribu jiwa) Tahun 2025-2029

Sumber: Olah, 2025

Hasil proyeksi penduduk usia lanjut yang berusia 60 tahun ke atas menunjukkan adanya tren peningkatan pada periode 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025 jumlah lansia diproyeksikan sebanyak 24,59 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 41,95 ribu jiwa pada tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 16 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri agar tidak menjadi beban bagi Kabupaten Penajam Paser Utara ketika penduduk tidak lagi berada di usia kerja.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

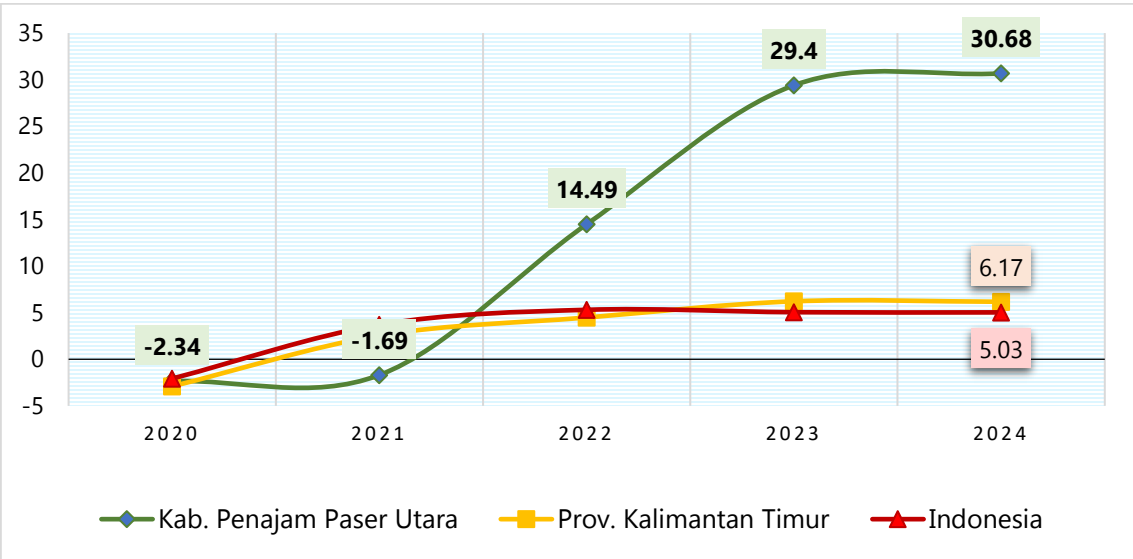
Subbab ini akan menguraikan komponen utama yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup data ekonomi makro yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Adapun aspek kesejahteraan sosial budaya berisi berbagai data makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial dan budaya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Bagian ini menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Adapun Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar. Aspek kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Indeks Gini, dan laju inflasi. Berikut disajikan uraian dari berbagai indikator tersebut sebagai gambaran dari kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk di daerah tersebut lebih tinggi daripada periode sebelumnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.



Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh melesat mencapai 30,68 persen pada tahun 2024, mendorong PDRB riil daerah mencapai 12,57 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga 2021 akibat pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas

perekonomian. Kondisi ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan nasional yang kembali tumbuh positif pada tahun 2021. Meskipun sempat berkontraksi dua tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara melesat hingga 14,49 persen atau naik 16,18 persen poin pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan terus melonjak hingga mencapai 30,68 persen pada tahun 2024. Angka tersebut lebih tinggi 24,51 persen poin dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan 25,65 persen poin dibandingkan nasional.

Tabel 2. 26 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.341,94	1.342,85	1.341,38	1.349,70	1.369,47	-0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	2.044,64	1.739,41	1.796,60	2.007,46	2.100,88	-0,08
C	Industri Pengolahan	967,79	945,45	947,86	949,46	964,30	-1,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,14	6,58	6,87	7,97	9,91	13,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,44	6,79	7,29	8,18	9,10	8,14
F	Konstruksi	706,10	884,06	1.678,10	3.540,33	6.154,02	61,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	611,23	635,47	672,45	714,36	783,21	5,37
H	Transportasi dan Pergudangan	110,30	113,32	122,11	133,94	146,75	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,14	29,89	32,29	35,24	41,69	6,72
J	Informasi dan Komunikasi	116,65	125,66	133,36	139,31	158,51	8,44
K	Jasa Keuangan	51,57	52,43	55,47	62,83	71,63	8,08
L	Real Estate	92,01	91,15	92,53	94,36	110,66	4,40
M,N	Jasa Perusahaan	1,10	1,12	1,17	1,24	1,39	4,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233,42	225,11	241,13	257,41	309,12	4,83
P	Jasa Pendidikan	227,85	234,59	242,28	251,16	263,49	3,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,55	2,66	2,84	3,22	12,43
R,S,T, U	Jasa Lainnya	56,15	56,28	60,02	63,43	72,85	4,79

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6.604,62	6.492,68	7.433,57	9.619,21	12.570,19	14,11

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya pada 3 tahun terakhir didorong oleh kinerja sektor konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) beserta infrastruktur pendukung. Kinerja sektor konstruksi tercatat tumbuh 61,62 persen per tahun dan menyumbang hingga 88,57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, kinerja sektor konstruksi pada tahun 2024 mulai menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun 2023 seiring dengan tercapainya target pembangunan IKN tahap I.

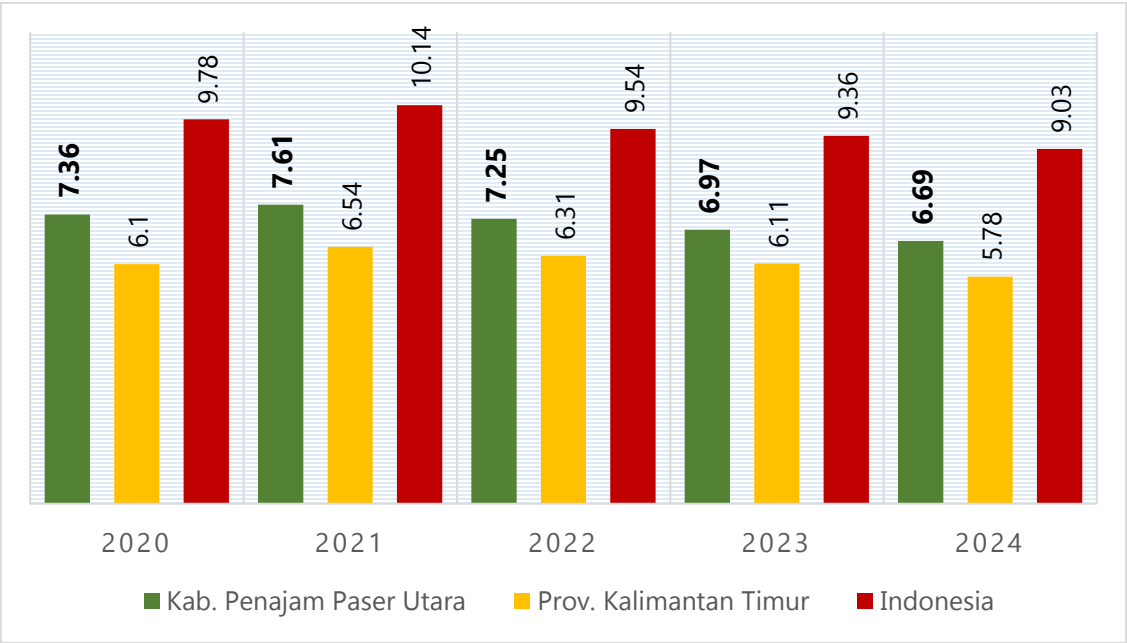
Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya digerakkan oleh sektor konstruksi tetapi juga didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua sektor tersebut merupakan penggerak utama perekonomian daerah sebelum agenda pembangunan IKN berjalan. Kinerja sektor pertambangan maupun pertanian menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi dan sempat berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020. Pertumbuhan sektor penggalian bahkan berkontraksi lebih dalam pada tahun 2021 (-14,93%), sedangkan sektor pertanian berkontraksi kembali pada tahun 2022 (-0,11%). Kinerja sektor penggalian kembali tumbuh positif pada tahun 2022 dan melesat pada tahun 2023 mencapai 11,74 persen yang didorong oleh aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya khususnya tanah dan pasir untuk kebutuhan pembangunan IKN dan melambat ke angka 4,65 persen pada tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian masih tertahan pada angka 0,62 persen pada tahun 2023 dan 1,46 persen pada tahun 2024.

Perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi dan fluktuasi pertumbuhan sektor penggalian dan pertanian mengindikasikan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara sangat bergantung pada proyek strategis nasional dan kondisi pasar di luar daerah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pembangunan ekonomi daerah ke depan karena adanya risiko perlambatan perekonomian daerah

seiring dengan termoderasinya progres pembangunan IKN dan kondisi pasar global yang tidak pasti. Peningkatan nilai tambah melalui agenda hilirisasi SDA perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yang tangguh.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin merupakan indikator yang digunakan untuk mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor tetapi yang paling umum dan mempengaruhi secara langsung adalah tingkat pendapatan dan harga barang pokok.



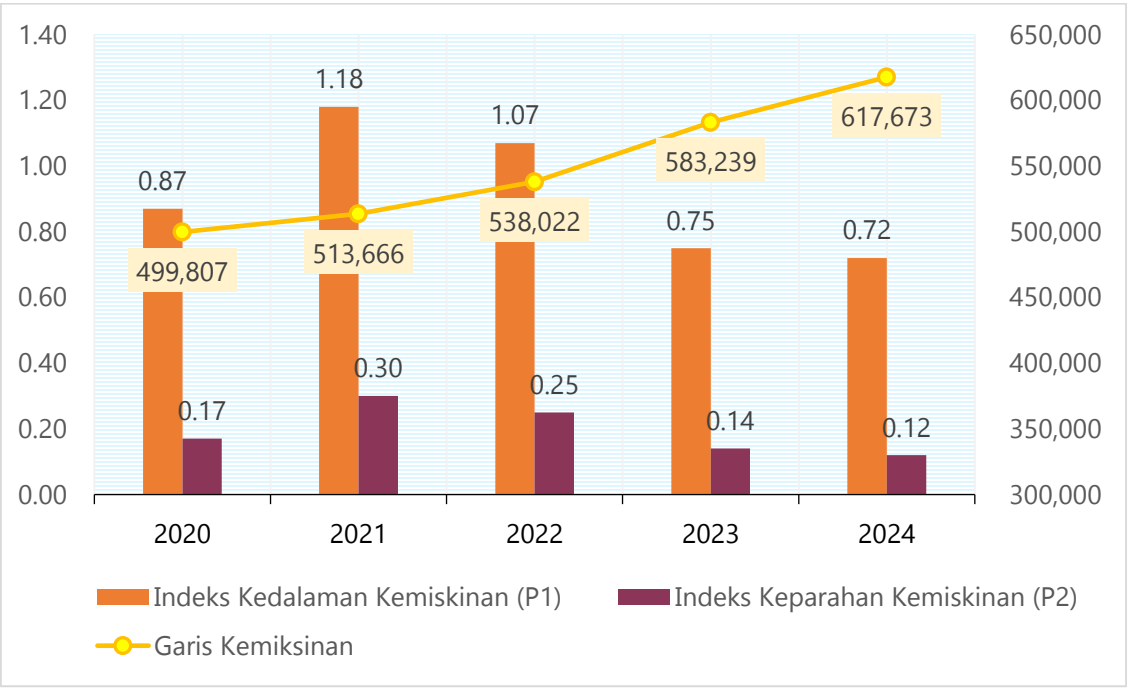
Gambar 2. 27 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara berada di angka 6,69 persen, lebih rendah 25,9 persen dibandingkan dengan nasional tetapi lebih tinggi 15,7 persen dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 2,3 persen per tahun pada periode 2020-2024. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan penurunan tingkat kemiskinan

di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan nasional dengan rata-rata sebesar 1,22 persen dan 1,91 persen per tahun.

Indikator lain yang turut digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu wilayah adalah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Kenaikan harga barang pemenuhan kebutuhan dasar wajar terjadi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pasar. Namun, kenaikan harga yang terlampau tinggi dan tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam kelompok miskin.



Gambar 2. 28 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

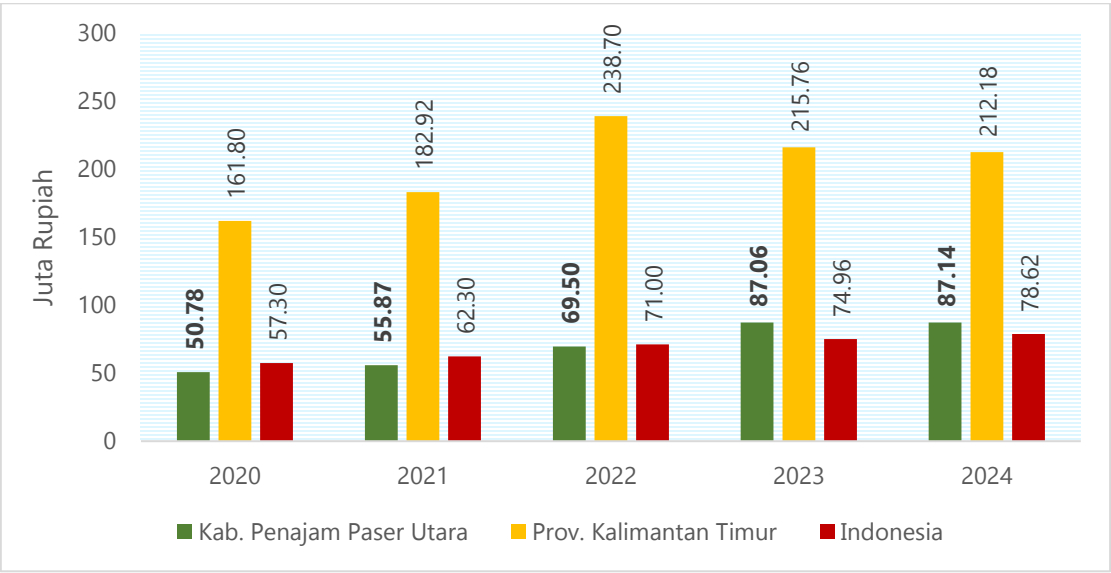
Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Pergerakan garis kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 5,46 persen per tahun. Namun demikian, jika dilihat dari pergerakan indeks kedalaman kemiskinan, kenaikan garis kemiskinan masih dalam rentang yang terkendali. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara justru menunjukkan penurunan begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menurun mencerminkan peluang penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar dan kesenjangan antar penduduk miskin semakin kecil. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan masyarakat, yang tercermin

dari peningkatan PDRB per kapita dan penurunan TPT, sehingga jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin turun.

2.2.1.3 PDRB per Kapita

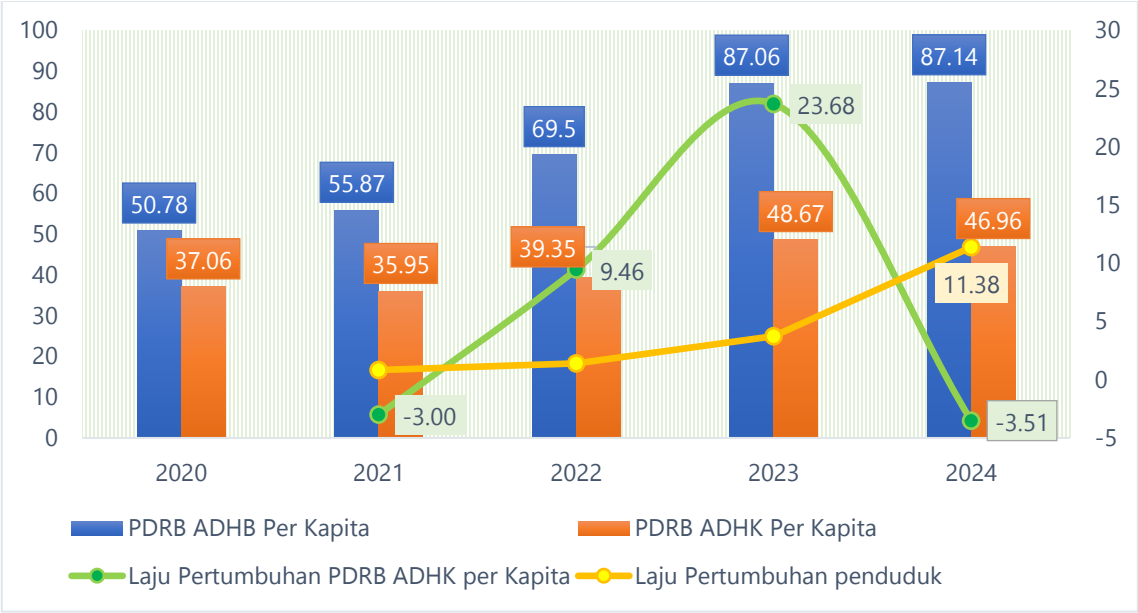
Tingkat produktivitas penduduk umumnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk tersebut. Semakin tinggi produktivitas penduduk maka semakin tinggi pula imbal hasil atas faktor produksi yang dimilikinya. PDRB per kapita digunakan sebagai indikator yang mengukur tingkat pendapatan rata-rata per penduduk. Tinggi rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.



Gambar 2. 29 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan PDB per Kapita Indonesia (Juta Rupiah)

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kenaikan yang cukup tinggi khususnya sejak pembangunan IKN berjalan. Kinerja sektor konstruksi yang begitu masif mendorong PDRB daerah meningkat tajam sehingga PDRB per kapita turut mengalami kenaikan. Pada tahun 2020-2022, PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan PDB per kapita nasional. Namun, ketika perekonomian daerah tahun 2023 tumbuh hingga 29,40 persen, PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara melonjak ke angka 87,06 juta rupiah, lebih tinggi 12,10 juta rupiah dibandingkan nasional. Tingginya kenaikan PDRB per kapita di Penajam Paser Utara sejak tahun 2023 masih belum mampu mengejar PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur.

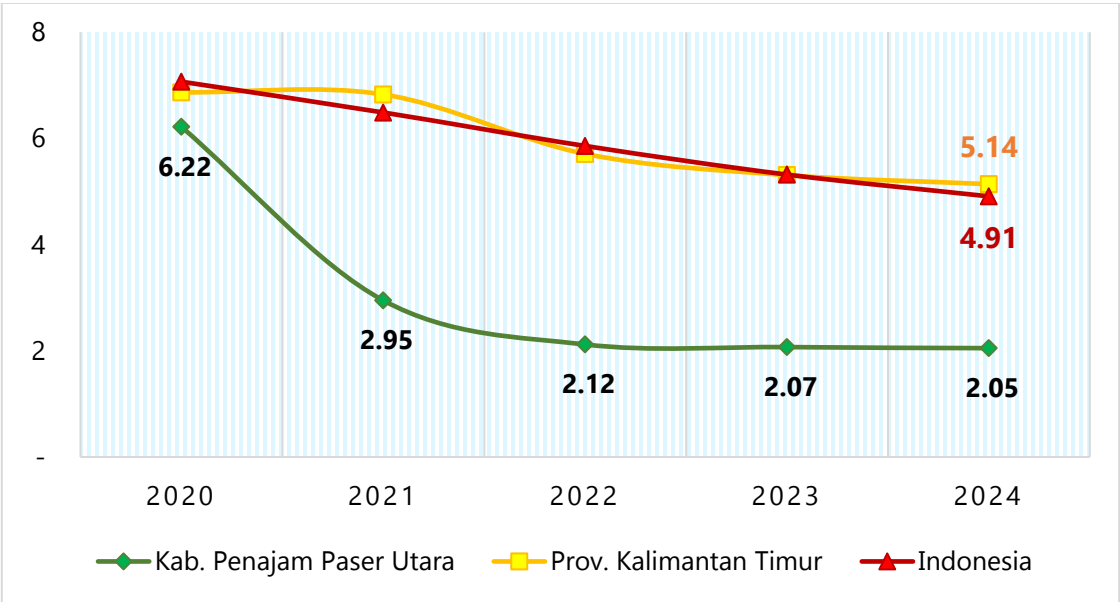


Gambar 2. 30 PDRB per Kapita, Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

PDRB nominal per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kenaikan sedangkan PDRB riil per kapita menunjukkan penurunan pada tahun 2024. Perekonomian daerah yang tumbuh tinggi pada tahun 2024 diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi sehingga menyebabkan PDRB riil per kapita turun 3,51 persen. Tingginya migrasi penduduk didorong oleh pembangunan IKN di mana terjadi perpindahan penduduk bagi para pekerja yang ditugaskan di IKN maupun bagi pencari kerja yang memiliki ekspektasi akan ketersediaan lapangan kerja baru di IKN. Apabila perpindahan penduduk terus terjadi dengan laju yang tinggi, maka dikhawatirkan akan adanya risiko penurunan nilai PDRB per kapita, terlebih jika pertumbuhan ekonomi melambat akibat termoderasinya pembangunan IKN.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

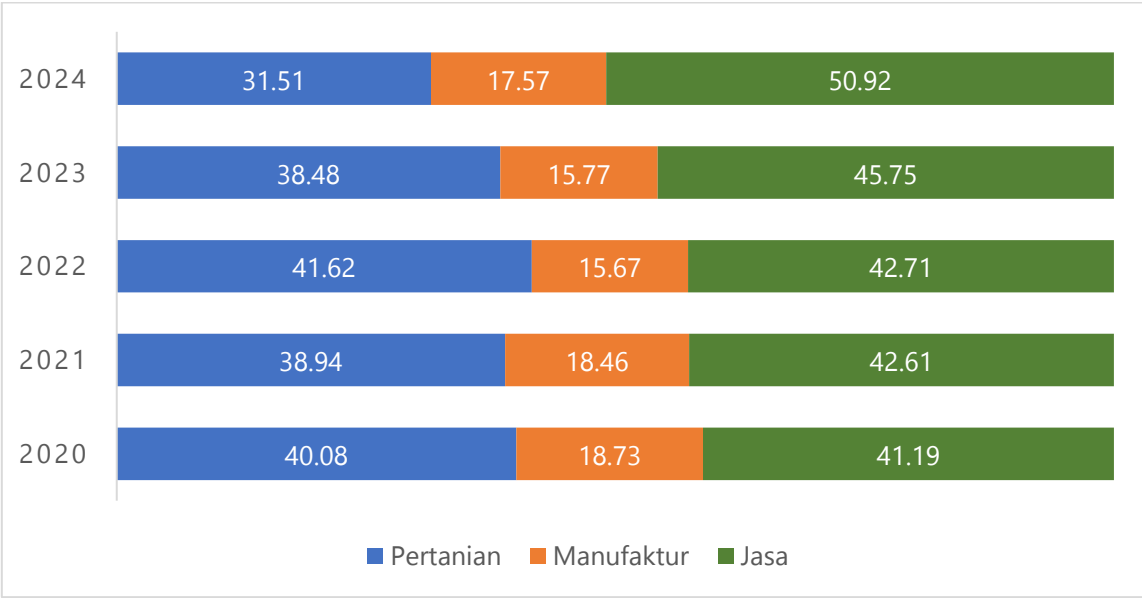
Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari sejumlah indikator seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT merupakan indikator yang mencerminkan rasio antara angkatan kerja yang menganggur terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Berikut adalah gambaran TPT di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. TPT Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah 60,12 persen dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan lebih rendah 58,25 persen dibandingkan nasional pada tahun 2024. Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 21,01 persen per tahun selama periode 2020-2024.



Gambar 2. 32 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Diolah dari BPS Kab. Penajam Paser Utara, 2025

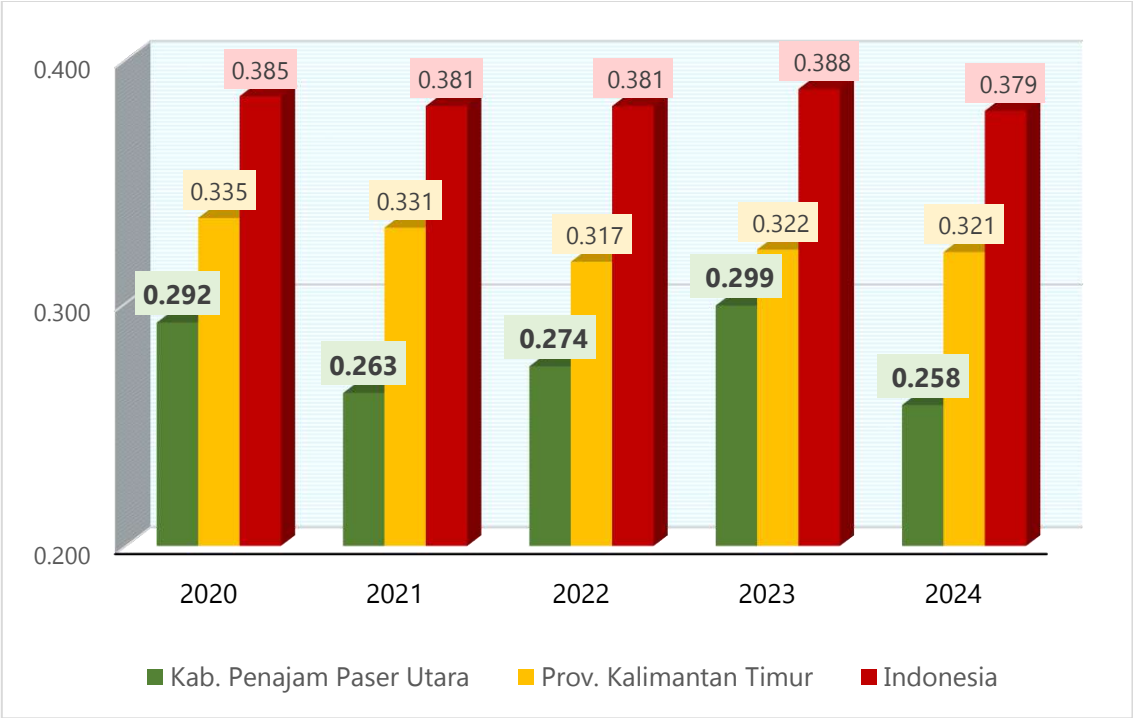
Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh tingginya pertumbuhan ekonomi daerah di mana seluruh lapangan

usaha menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Pembangunan IKN tidak hanya meningkatkan kinerja sektor konstruksi tetapi juga menggerakkan kinerja sektor ekonomi lainnya. Hal ini tercermin dari tingginya pertumbuhan sektor jasa, yang diikuti dengan naiknya serapan tenaga kerja di sektor jasa. Pada tahun 2024, persentase penduduk bekerja yang bekerja di sektor jasa mencapai 50,92 persen mengalami kenaikan sebesar 5,17 persen poin dibandingkan tahun 2023.

Persoalan tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan meskipun saat ini tingkat pengangguran daerah tergolong rendah. Kenaikan angkatan kerja yang berasal dari migrasi penduduk sebagai imbas dari perpindahan IKN dapat menjadi ancaman bagi penduduk lokal jika tidak dibekali dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Agenda peningkatan daya saing tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan wirausaha tetap perlu dijadikan prioritas pembangunan daerah guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini umumnya digunakan sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Penggunaan indeks gini sebagai salah satu indikator kesejahteraan ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu persoalan yang terjadi di berbagai wilayah sejalan dengan pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Indeks gini dengan nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan yang semakin sempurna di mana kelompok pendapatan tinggi memperoleh lebih banyak persentase pendapatan dari total pendapatan populasi.



Gambar 2. 33 Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024

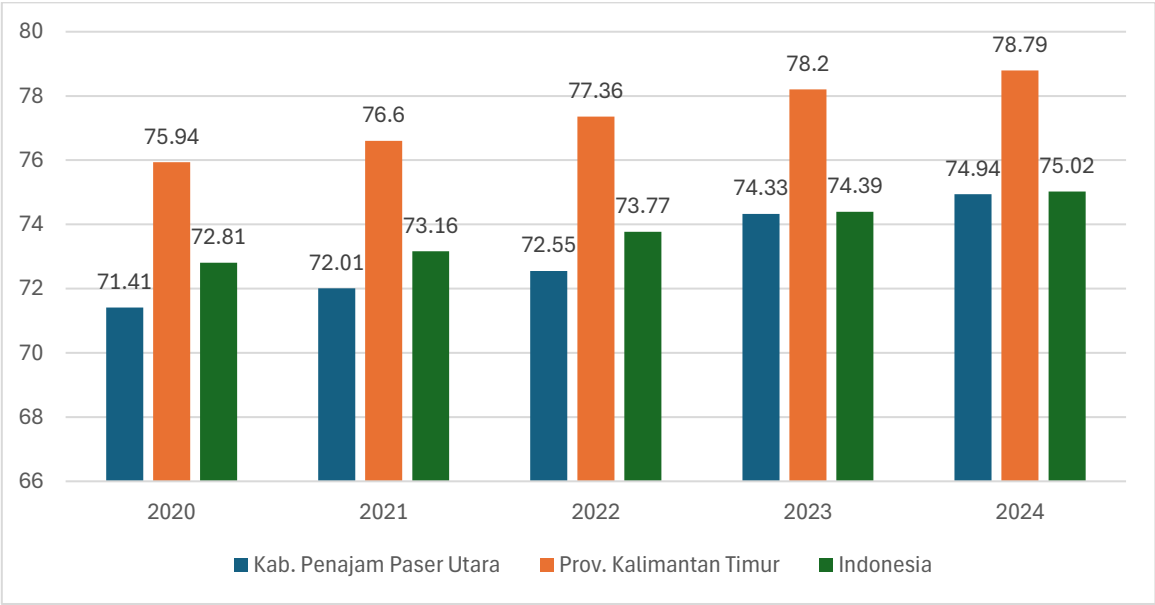
Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Indeks gini Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Pada tahun 2024, indeks gini Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,258 lebih rendah 24,42 persen dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan 46,90 persen dibandingkan nasional. Indeks gini Kabupaten Penajam Paser Utara bahkan merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun pergerakan nilai indeks gini menunjukkan fluktuasi, indeks gini daerah mengalami penurunan 2,58 persen per tahun dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024. Pada periode 2020-2024, indeks gini Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada kisaran angka 0,277 yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong rendah. Kondisi tersebut menandakan manfaat pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirasakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan manusia. Perhitungan IPM didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk mewakili ketiga dimensi tersebut digunakan sejumlah indikator yaitu Usia

Harapan Hidup (UHH) yang mewakili dimensi umur panjang dan sehat, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mewakili dimensi pengetahuan, dan pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak. Berikut ini adalah capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

IPM Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2024, IPM Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat 0,61 poin mencapai angka 74,94 pada tahun 2024. Angka tersebut masuk dalam kategori tinggi yang mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong baik. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Nasional maupun Provinsi KalimantanTimur. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki selisih 0,08 terhadap IPM Nasional dan 3,85 poin terhadap IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	71,41	71,68	71,71	71,83	74,03
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,56	12,57	12,7	12,86	12,87
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,28	8,36	8,51	8,53	8,57
Pengeluaran Riil per Kapita yang	11.231	11.651	11.890	12.517	13.100

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Disesuaikan (Ribu Rupiah)					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,41	72,01	72,55	74,33	74,94

Sumber: Diolah dari BPS Kalimantan Timur, 2025

Kenaikan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh kenaikan nilai seluruh komponen pembentuk IPM. Pada tahun 2020, usia harapan hidup penduduk yang lahir pada tahun tersebut mencapai 71,41 tahun dan meningkat menjadi 74,03 tahun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas kesehatan yang dapat memperpanjang harapan hidup. Kenaikan juga terjadi pada komponen harapan lama sekolah dari yang sebelumnya sebesar 12,56 tahun menjadi 12,87 tahun dan rata-rata lama sekolah dari yang sebelumnya 8,28 tahun menjadi 8,57 tahun pada periode yang sama. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pendidikan menjadi faktor pendorong kenaikan kedua komponen tersebut. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan juga mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen menyentuh Rp13.100.000,00 per kapita per tahun yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi.

IPM Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk ke dalam kategori tinggi masih memerlukan perhatian khusus karena masih berada jauh di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mengindikasikan agenda pembangunan manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu ditingkatkan dan diprioritaskan guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia baik di tingkat daerah maupun nasional.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

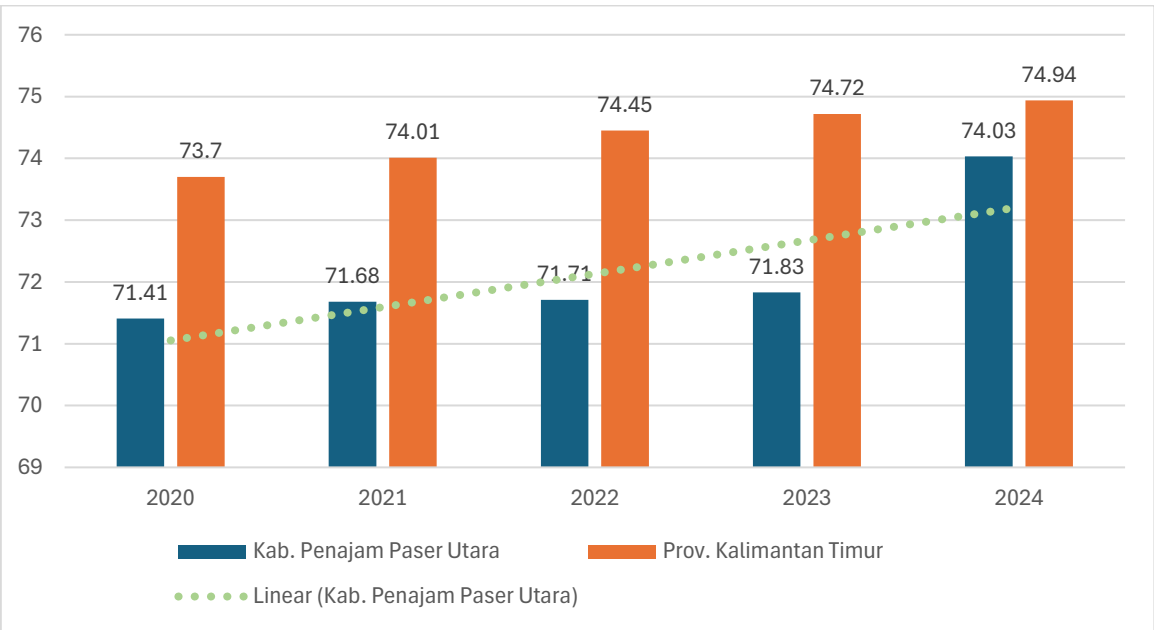
Bagian ini menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan ditempuh melalui upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Representasi dari hasil pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti, usia harapan

hidup (UHH), Indeks Keluarga Sehat yang diproksikan pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta Prevalensi Stunting. Secara lebih detail berikut capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Pembangunan di bidang kesehatan memiliki tujuan yang selaras dengan upaya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), yaitu memastikan kehidupan yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Secara umum, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai peningkatan di sektor kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH).

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator pada tingkat dampak yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. UHH memiliki keterkaitan erat dengan berbagai faktor, seperti pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, akses terhadap layanan dasar, serta tingkat pendidikan. Mengingat intervensi yang terdiri dari berbagai aspek, peningkatan UHH memerlukan kolaborasi dan kerjasama antar sektor. Berikut ini adalah capaian UHH di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 35 Usia harapan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

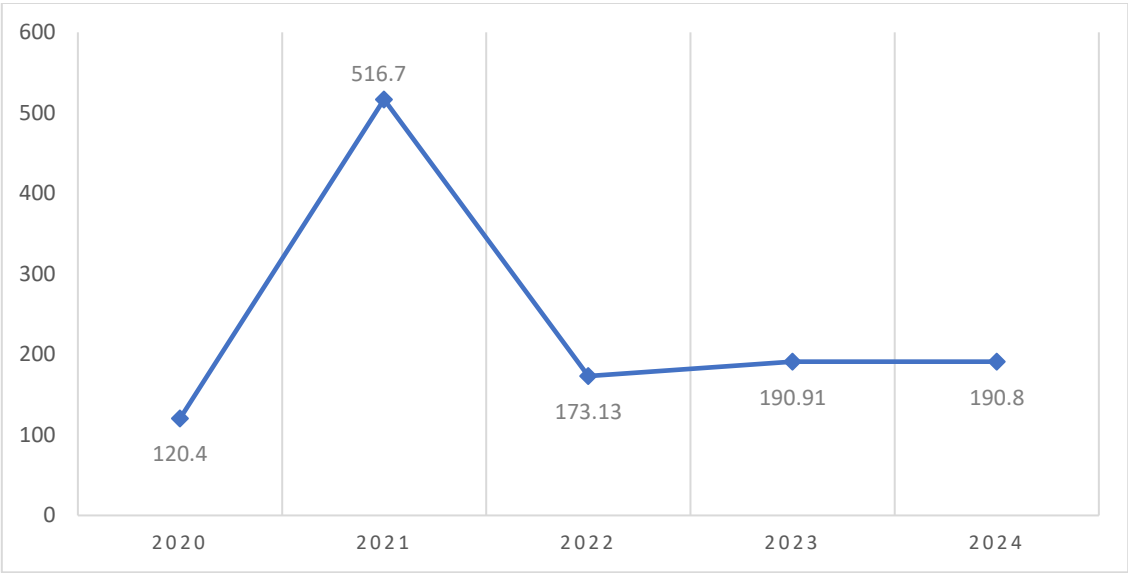
Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren peningkatan dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Selama lima tahun terakhir, UHH di wilayah tersebut meningkat sebesar 2,62 poin, mencapai angka 74,03 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang lahir pada tahun tersebut diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia 74,03 tahun. Kenaikan tren UHH ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Meskipun mengalami peningkatan, UHH Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, dengan selisih sebesar 0,91 poin. Upaya untuk semakin meningkatkan capaian UHH ini perlu didukung oleh berbagai upaya, termasuk perbaikan fasilitas layanan kesehatan dan penambahan tenaga medis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program, seperti pembinaan kesehatan keluarga, promosi kesehatan masyarakat, kampanye hidup bersih dan sehat yang melibatkan masyarakat dan sektor terkait, serta pemeriksaan dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.

2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indikator ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keluarga yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Kabupaten Penajam Paser Utara belum secara langsung melakukan pengukuran terhadap indikator ini, sehingga digunakan proksi berupa angka kemarian ibu dan angka kematian bayi, sebagai bagian dari komponen perhitungan indeks keluarga sehat.

Peningkatan kualitas ibu dan bayi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas kesehatan ibu dan bayi adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berikut adalah data kinerja AKI dan AKB di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam periode 2020-2024.



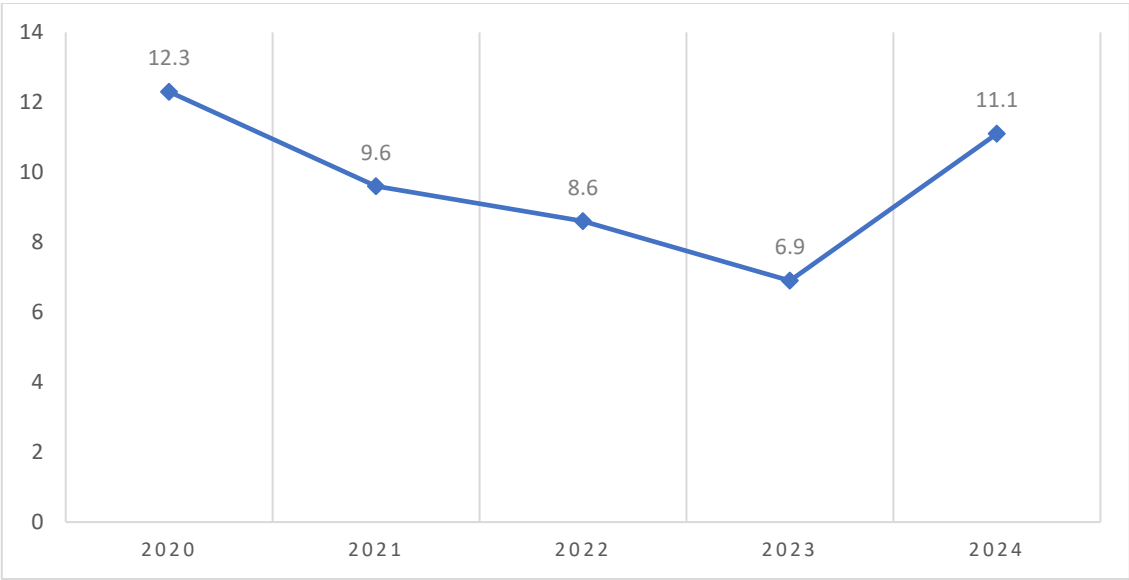
Gambar 2. 36 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan ibu hamil, kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan maternal (kesehatan ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas). Selama periode 2020-2024, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren cukup fluktuatif dan cenderung menurun.

Pada tahun 2021, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat sangat tinggi dibanding tahun-tahun yang lain. Pada tahun 2021 peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) didominasi oleh ibu hamil yang terpapar pandemi Covid-19. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 0 kasus kematian ibu.

Dalam rangka mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sedang melakukan upaya untuk menerapkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di enam puskesmas. Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Petung, Puskesmas Sotek, Puskesmas Maridan, Puskesmas Sepaku I, dan Puskesmas Sepaku II telah memiliki fasilitas PONED yang khusus dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi.



Gambar 2. 37 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

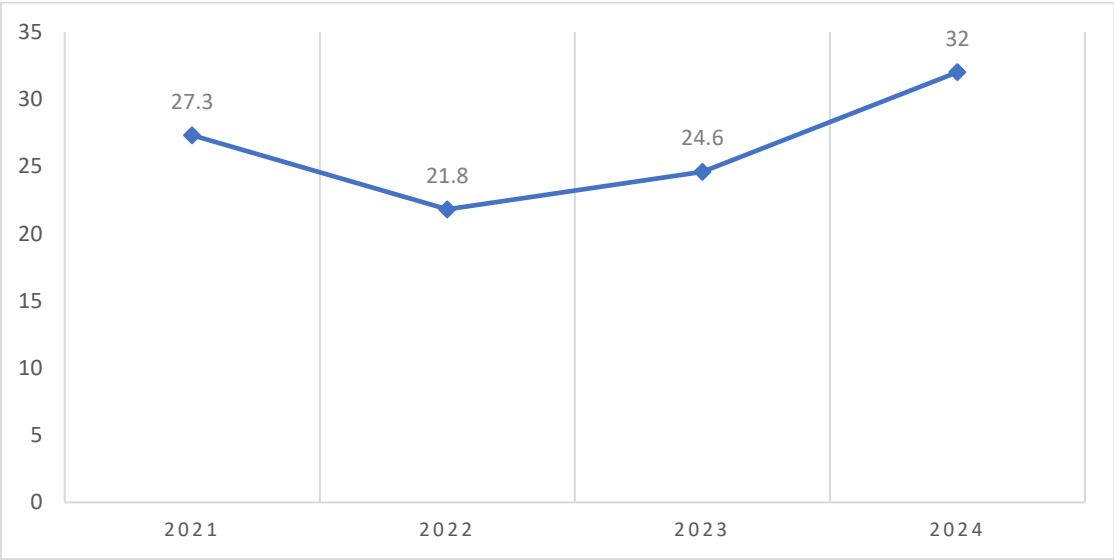
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) mengindikasikan kondisi lingkungan dan kesehatan orang tua bayi yang kurang baik, sehingga memicu terjadinya kematian. Selama periode 2020-2024, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren menurun pada empat tahun terakhir, dan kembali mengalami peningkatan 4,2 poin.

Namun demikian, Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Penajam Paser Utara berada dibawah target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 dengan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) tetap perlu dilakukan hingga mencapai 0 kasus. Secara umum, kematian ibu dan bayi disebabkan pendarahan, keracunan, hipertensi dan masyarakat merasa mampu melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga medis. Pada tahun tertentu seperti tahun 2020 kematian ibu dan bayi didominasi oleh pandemi Covid-19.

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Selain Umur Harapan Hidup (UHH), indikator kesehatan lain yang perlu mendapat perhatian adalah prevalensi stunting. Stunting merupakan isu prioritas dalam pembangunan nasional karena dampaknya tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan di

masa depan serta menurunkan daya tahan tubuh, sehingga lebih rentan terhadap penyakit kronis. Berikut ini adalah data mengenai prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 2021 hingga 2024.



Gambar 2. 38 Prevalensi Stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Selama periode 2021 hingga 2024, prevalensi stunting di Penajam Paser Utara mengalami tren yang fluktuatif. Prevalensi stunting terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 21,8 persen, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai angka 32 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan bayi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, kondisi ini juga masih jauh dari target nasional yaitu 14 persen pada tahun 2024. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting antara lain masih kurang optimalnya pemahaman dan edukasi mengenai dampak stunting, pola asuh, pola makan, serta keterbatasan akses terhadap gizi yang cukup dan lingkungan yang sehat akibat faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan fokus pada pencegahan sejak dini, dimulai dari remaja, calon pengantin, hingga ibu hamil. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, instansi terkait, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menekan angka stunting.

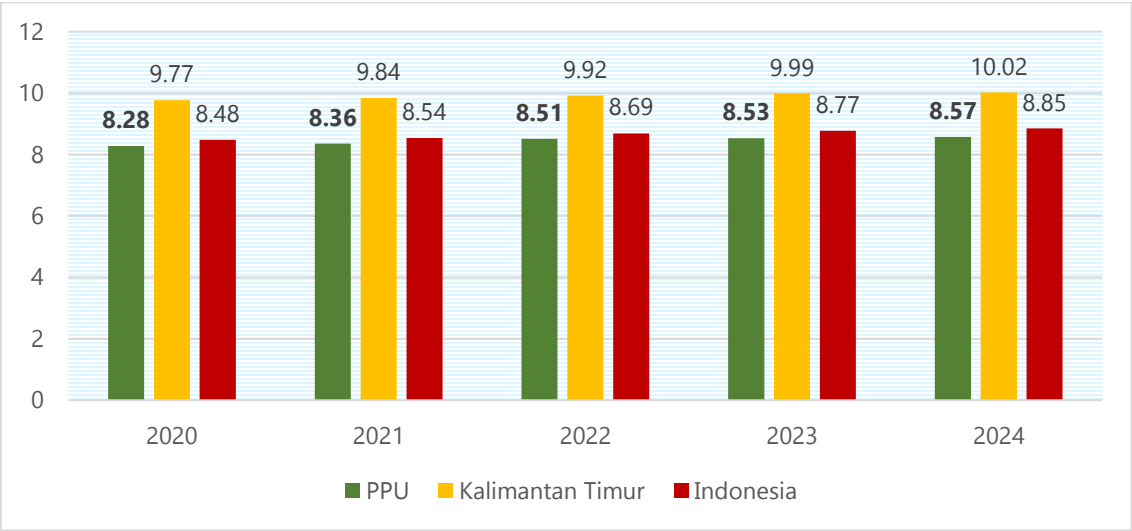
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumberdaya manusia. Artinya, kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor penentu

dari kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut lagi, bidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Hasil pembangunan pendidikan diantaranya dapat dilihat dari beberapa capaian indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dan Indeks Literasi Digital. Secara lebih detail berikut capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019 hingga 2024.



Gambar 2. 39 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

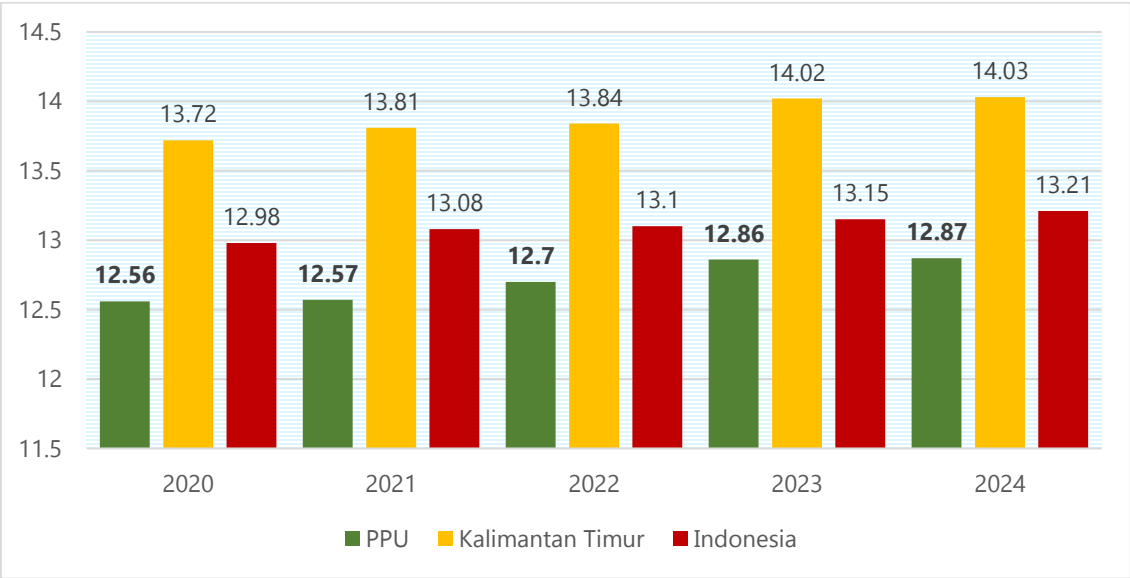
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang relatif meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,29 poin. Pada tahun 2024 RLS Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada angka 8,57. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat merasakan pendidikan formal selama 8,5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Upaya peningkatan pasrtisipasi

sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjadi perhatian. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir capaian RLS Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di bawah rata-rata RLS nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka dari itu, berbagai upaya percepatan menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Urusan pendidikan sendiri menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 hingga 2024.



Gambar 2. 40 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam periode lima tahun terakhir, capaian HLS Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,31 poin. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada angka 12,87 tahun atau setara kelas 3 SMA. Walaupun mengalami tren yang positif, capaian HLS Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di bawah capaian rata-rata HLS Provinsi Kalimantan Timur dan nasional yang mana pada tahun 2024 sudah berada pada angka 14,03 tahun atau setara dengan Diploma I dan 13,21 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA. Upaya untuk meningkatkan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terutama dalam merespon pembangunan Ibu Kota Negara yang secara tidak langsung akan membuat persaingan SDM semakin ketat.

2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

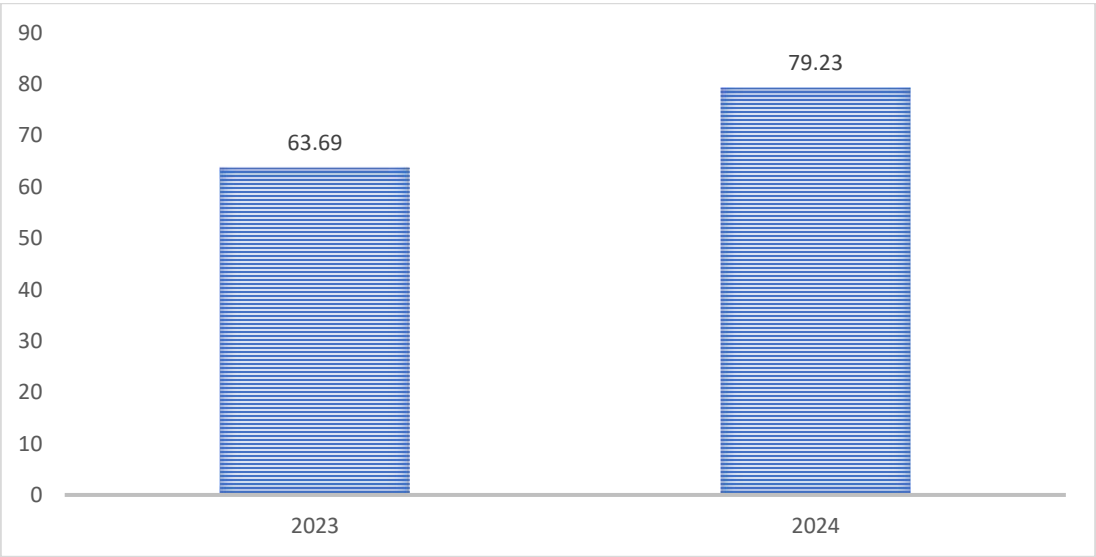
Angka literasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni 68,95 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan capaian yang sudah cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas literasi fungsional, yaitu kemampuan membaca yang diikuti dengan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Jumlah perpustakaan dan taman bacaan yang masih kurang optimal menjadi kendala dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka literasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni, melalui program pendidikan non-formal, penyediaan layanan perpustakaan keliling, serta pelatihan bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan guru berkualitas juga menjadi prioritas dalam mendukung capaian literasi yang lebih baik. Digitalisasi pendidikan, akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan, serta peningkatan peran komunitas dalam gerakan literasi juga dapat menjadi alternatif lain, untuk memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan informasi. Dengan demikian, capaian angka

literasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat semakin meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kabupaten Penajam Paser Utara Utama tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2024

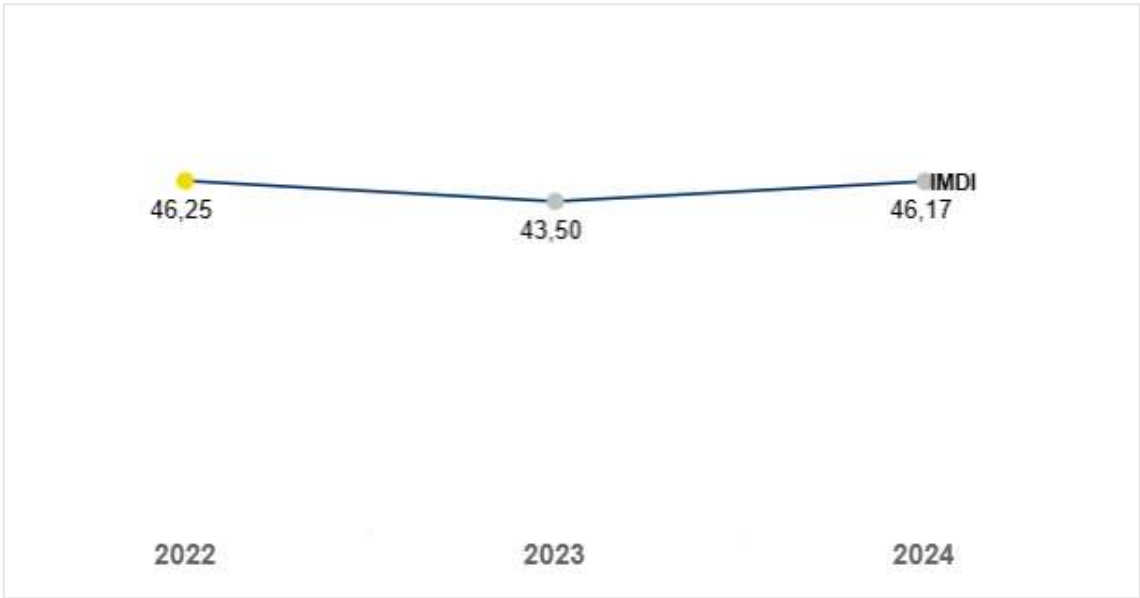
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

IPLM Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2023 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hal ini menjadi salah satu modal positif guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, diantaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.2.3.5 Indeks Literasi Digital

Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka indeks literasi digital digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Indeks ini mencerminkan sejauh mana seseorang dapat menggunakan perangkat digital, mengelola informasi secara online, berkomunikasi dengan aman, serta memahami etika dan risiko dalam dunia digital. Terlebih lagi, dalam hal ini Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk dapat mendukung kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep kota modern berbasis teknologi.



Gambar 2. 42 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Sumber: Komdigi, 2025

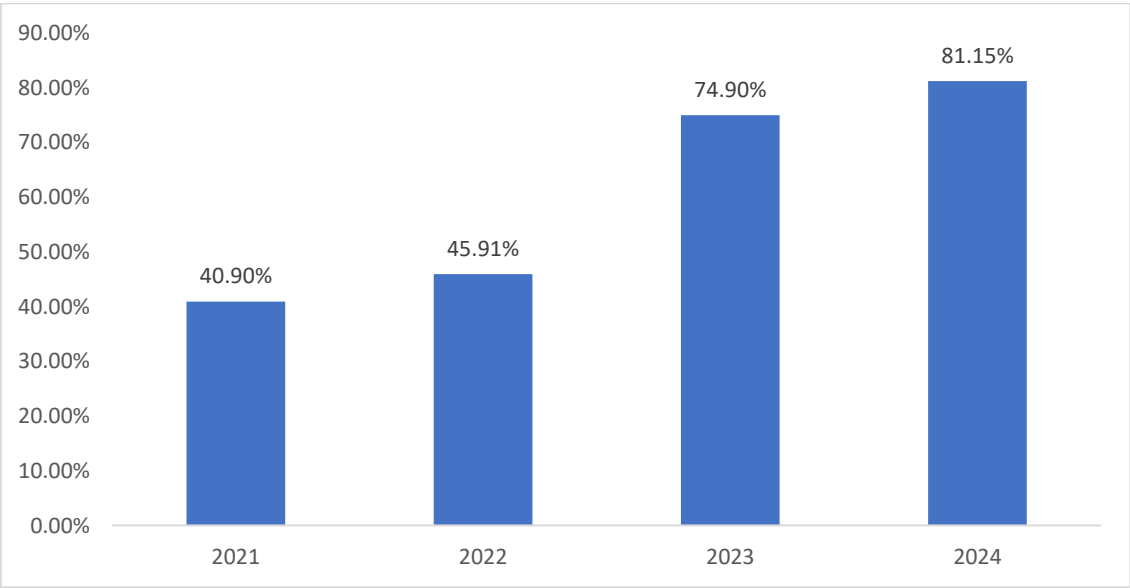
Proksi yang dapat digunakan dari indeks literasi digital ini diantaranya indeks masyarakat digital indonesia (IMDI), yang mana Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki capaian sebesar 46,17 hingga tahun 2024 dengan kategori cukup. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 2,670 poin, dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, semakin pesatnya transformasi

digital, peningkatan literasi digital di Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu untuk ditingkatkan. Penguasaan digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan pendekatan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko sosial, ekonomi, dan bencana. Pendekatan ini mengintegrasikan sistem perlindungan sosial dengan strategi kesiapsiagaan dan respons terhadap perubahan, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, atau bencana alam, sehingga mampu melindungi kelompok rentan secara lebih efektif.

Perlindungan sosial adaptif juga proaktif dalam mengantisipasi berbagai macam risiko, sehingga tidak hanya memberikan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara reaktif. Hal ini mencakup fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan, pemanfaatan data yang akurat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan. Perlindungan sosial yang adaptif berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat melalui capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



Gambar 2. 43 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Disnaker Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren yang semakin meningkat. Kondisi tersebut menggambarkan implementasi yang semakin optimal terhadap perlindungan sosial tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Capaian tersebut tentu masih perlu untuk dioptimalkan lagi, mengingat kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang aman dan sejahtera. Dengan cakupan yang komprehensif, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama serta perkembangan budaya yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kemajuan zaman. Beragama maslahat mencerminkan praktik keagamaan bersifat ritual dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian menumbuhkan sikap toleransi, kepedulian, serta keharmonisan antar individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Berkebudayaan maju menggambarkan dinamika kebudayaan yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya mencakup inovasi dalam seni, pendidikan, teknologi, serta tata kehidupan sosial yang tetap menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global.

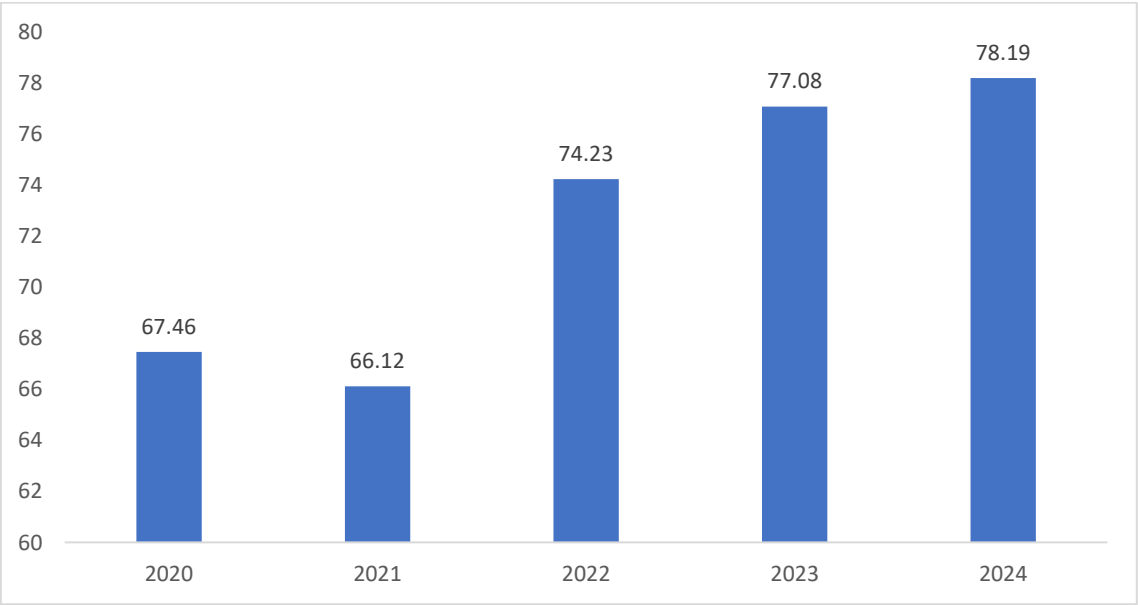
Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang terus berkembang menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, serta memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja

sama antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial.

Kerukunan merupakan salah satu isu penting di Indonesia karena memiliki corak multikultur. Corak multikultur memiliki kecenderungan untuk menjaga dan mempertahankan identitas masing-masing dan berpotensi menuai konflik. Kerukunan perlu dibangun agar tercipta masyarakat yang mampu hidup berdampingan dengan damai satu sama lain. Kerukunan tersebut salah satunya ada pada aspek keagamaan. Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi ideal di mana terciptanya kondisi sosial yang harmonis dan dinamis antar umat beragama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk menjalankan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama di suatu daerah dapat dilihat melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama.



Gambar 2. 44 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: *Kemenag, 2025*

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut menjadi penting, khususnya dalam pertimbangan penentuan kebijakan startegis terkait kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Indeks Kerukunan Umat Beragama memotret dinamika keagamaan aktual sekaligus mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik. Kekuatan kerukunan sebagai wujud

kolaboratif dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan, sehingga perlu saling menghormati, menguatkan, dan mengingatkan dalam berbagai aspek kehidupan.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut disajikan data terkait penyelenggaraan event kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024, sebagai proksi dari indikator pembangunan kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 28 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2023

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Event kebudayaan	N/A *(COVID)	N/A *(COVID)	N/A *(COVID)	3 Event	3 Event

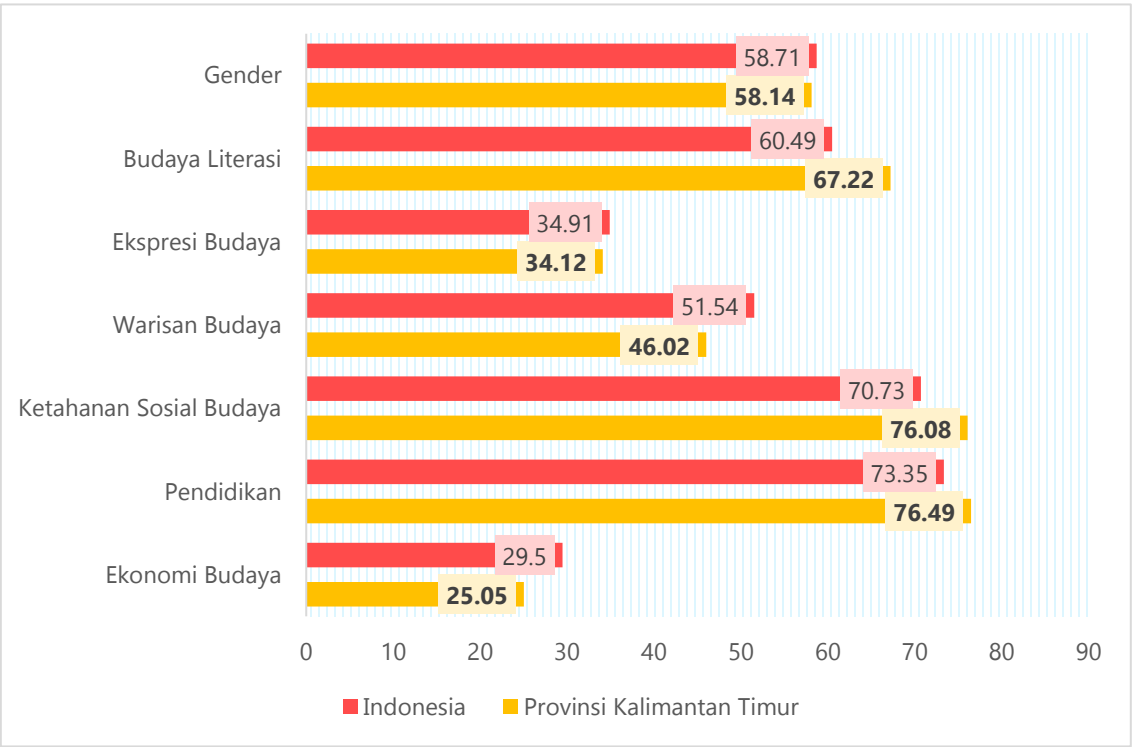
Sumber : Bappelitbangda, 2025

Adapun indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan sektor kebudayaan di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek, seperti upaya pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta kontribusi sektor budaya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Karena pengukuran IPK hanya dilakukan hingga tingkat provinsi.

Perkembangan IPK di Kalimantan Timur tentunya juga dipengaruhi oleh dukungan dari Kabupaten Penajam Paser Utara dalam berkontribusi mengembangkan kegiatan seni dan budaya serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Adapun tren perkembangan IPK

seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain revitalisasi warisan budaya lokal, termasuk seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, seperti bantuan bagi pelaku seni dan budaya. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital turut berkontribusi dalam mempromosikan budaya lokal dan menarik minat generasi muda dalam pelestarian budaya.

IPK disusun berdasarkan tujuh dimensi utama, yaitu gender, budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi budaya. Berikut adalah capaian ketujuh dimensi komposit IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023.



Gambar 2. 45 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Kemendikbud, 2024

Data yang dikeluarkan kemendikbud terkait capaian IPK menunjukkan bahwa sebagian dimensi IPK Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah nasional, seperti gender, ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya. Diagram batang di atas menggambarkan perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) antara Indonesia secara keseluruhan dan Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, Kalimantan Timur menunjukkan keunggulan dalam budaya literasi, ketahanan sosial budaya, dan pendidikan dibandingkan rata-rata nasional. Namun, tantangan masih ada dalam aspek warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi

budaya yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mendorong pembangunan kebudayaan yang lebih berkelanjutan.

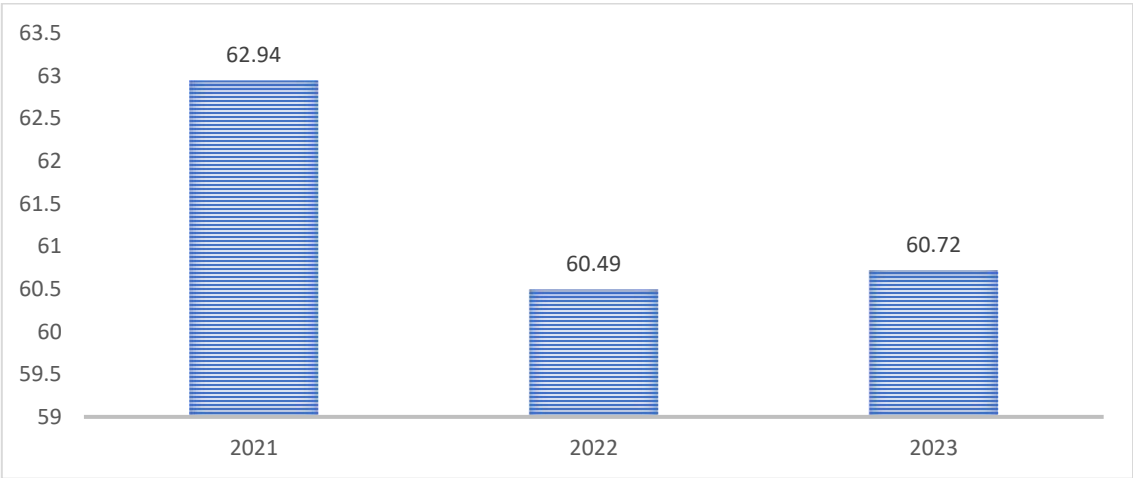
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keluarga yang berkualitas berperan sebagai lingkungan pertama dalam membentuk individu yang tangguh, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang baik. Sementara itu, kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Pada sisi lain masyarakat inklusif mencerminkan lingkungan sosial yang terbuka dan menerima keberagaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Penguatan pada ketiga aspek ini akan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dan lebih lanjut menjadi modal potensial pembangunan. Keberhasilan pembangunan dari ketiga aspek ini dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, serta Indeks Pembangunan Pemuda.

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait dalam mengembangkan perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks perlindungan anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai pembentuk indeks pemenuhan hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk indeks perlindungan anak (IPA). Nilai IPA berkisar 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur oleh

KemenPPPA bersama BPS. Namun, perhitungan IPA di Kabupaten Penajam Paser Utara baru ada hingga data termutakhir tahun 2023. Berikut capaian IPA Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 46 Indeks perlindungan anak Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Secara umum capaian indeks perlindungan anak (IPA) Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung mengalami penurunan, dibandingkan tahun 2021. Dengan demikian, upaya perlindungan anak melalui upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak masih perlu terus ditingkatkan. Berikut lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 29 Kluster pembentuk indeks perlindungan anak Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Komponen	Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Kluster 5 Perlindungan Khusus
1	Kabupaten Penajam Paser Utara	62,94	58,92	77,61	27,3	71,5
2	Provinsi Kalimantan Timur	45,42	81,33	78,81	31,11	80,23

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak (IPA) Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat 3 kluster yang memiliki capaian kurang optimal yakni kluster 1 hak sipil dan kebebasan sebesar 62,94, kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 58,92, dan klaster 4 pendidikan

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebesar 27,3. Kluster hak sipil dan kebebasan diukur dari lima indikator diantaranya tingkat kepemilikan akta, partisipasi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi, jumlah anak yang memanfaatkan taman bacaan, serta jumlah anak yang mengakses internet. Kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif diukur dari lima indikator yaitu jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, jumlah balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, jumlah anak yang tidak tinggal bersama orangtua, dan angka kesiapan sekolah. Sedangkan kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang tidak sekolah, jumlah anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan budaya, jumlah anak yang mengikuti kursus, jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, dan jumlah anak yang terlibat dalam pertunjukan seni.

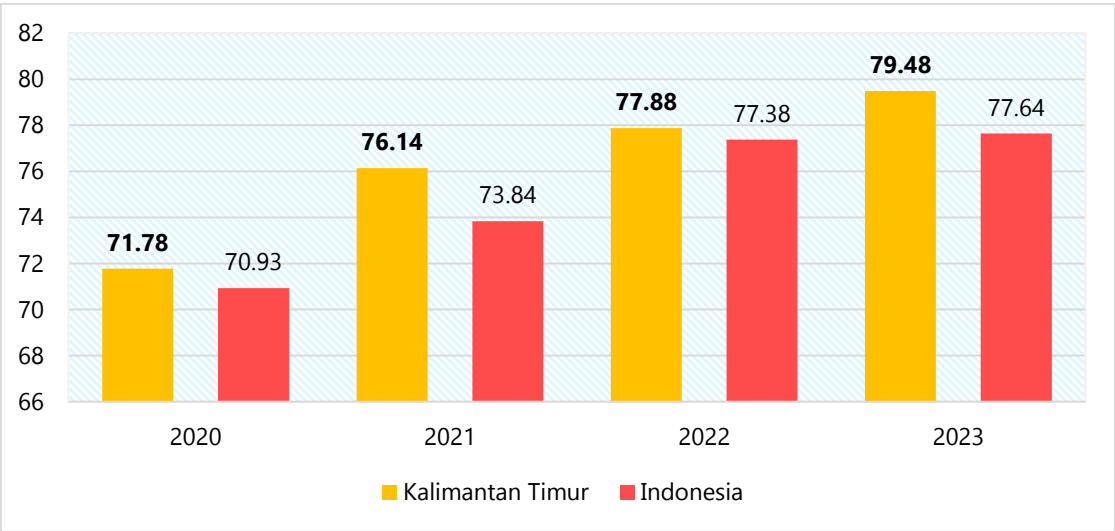
Dua kluster yang memiliki capaian cukup baik adalah kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan memiliki capaian 77,61 poin. dan kluster perlindungan khusus sebesar 71,5 poin. Kluster 3 diukur dari 9 indikator yaitu jumlah anak yang melahirkan di fasilitas kesehatan, balita stunting, anak yang mendapatkan ASI eksklusif, anak yang terpenuhi kebutuhan kalornya, anak yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak, anak yang merokok, serta anak yang mendapat imunisasi lengkap. Sedangkan kluster 5 perlindungan khusus diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang bekerja, rasio anak yang mengakses internet, rasio angka partisipasi sekolah, jumlah anak dibawah garis kemiskinan, dan jumlah anak yang terlantar. Dengan demikian, untuk meningkatkan upaya perlindungan anak maka pemenuhan aspek pada masing-masing kluster perlu lebih dioptimalkan pada periode pembangunan mendatang.

2.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menugaskan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan keluarga. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga guna mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Namun, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan sosial yang berpengaruh terhadap peran keluarga. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan

seperti kenakalan remaja, pernikahan usia dini, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Jika keluarga tidak berfungsi sebagai pengawas, pelindung, serta pembentuk nilai dan karakter, dampaknya dapat meluas ke aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mulai menerapkan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) sebagai alat ukur untuk menilai kualitas keluarga. Namun, saat ini pengukuran IKK masih terbatas pada tingkat provinsi dan belum mencakup kabupaten/kota. IKK dihitung berdasarkan lima dimensi utama dengan 25 indikator. Dimensi tersebut mencakup Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Sosial-Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Data yang diperoleh dari IKK dapat dijadikan referensi untuk merancang intervensi yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga di suatu daerah. berikut adalah kondisi kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dengan data termutakhir di tahun 2023.



Gambar 2. 47 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2023

Sumber: BPS, 2024

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) saat ini belum menyajikan data capaian berdasarkan kabupaten/kota, namun data di tingkat provinsi dapat digunakan sebagai acuan atau proxy bagi kabupate/kota untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga. Capaian IKK Provinsi Kalimantan Timur pda tahun 2020 hingga 2023 mneglamai tren yang meningkat, bahkan melebihi rata-rata nasional. Pada tahun 2023, IKK Provinsi Kalimantan Timur

mencapai angka 79,48 dan masuk dalam kategori pertama (rentang 75 ke atas), yang mencerminkan responsivitas gender serta pemenuhan hak anak yang sudah baik.

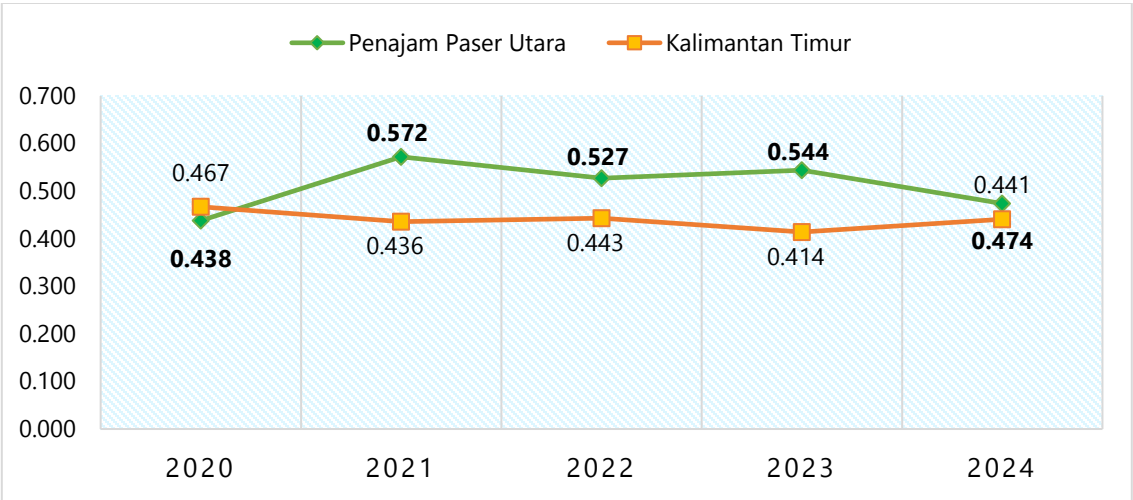
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan kualitas keluarga di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara di dalamnya, telah menunjukkan hasil yang cukup memadai. Namun, seiring berkembangnya zaman, diikuti dengan pesatnya pembangunan dan meningkatnya arus migrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara akibat pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), upaya peningkatan kualitas keluarga perlu terus menjadi prioritas. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memastikan pemenuhan seluruh dimensi dalam Indeks Kualitas Keluarga (IKK) secara komprehensif, terintegrasi, dan menyeluruh.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran IKG didasarkan pada tiga dimensi utama dan lima indikator. Ketiga dimensi tersebut mencakup kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Dimensi kesehatan reproduksi dinilai berdasarkan persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan serta persentase perempuan yang melahirkan sebelum usia 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari proporsi laki-laki dan perempuan berusia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan minimal tingkat SMA serta persentase laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota legislatif. Sementara itu, dimensi pasar tenaga kerja dinilai melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan.

IKG memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1 dengan sifat negatif, yang berarti semakin tinggi nilai IKG suatu daerah, semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Sebaliknya, semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender, yang menunjukkan peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 48 Indeks ketimpangan gender Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: BPS, 2025

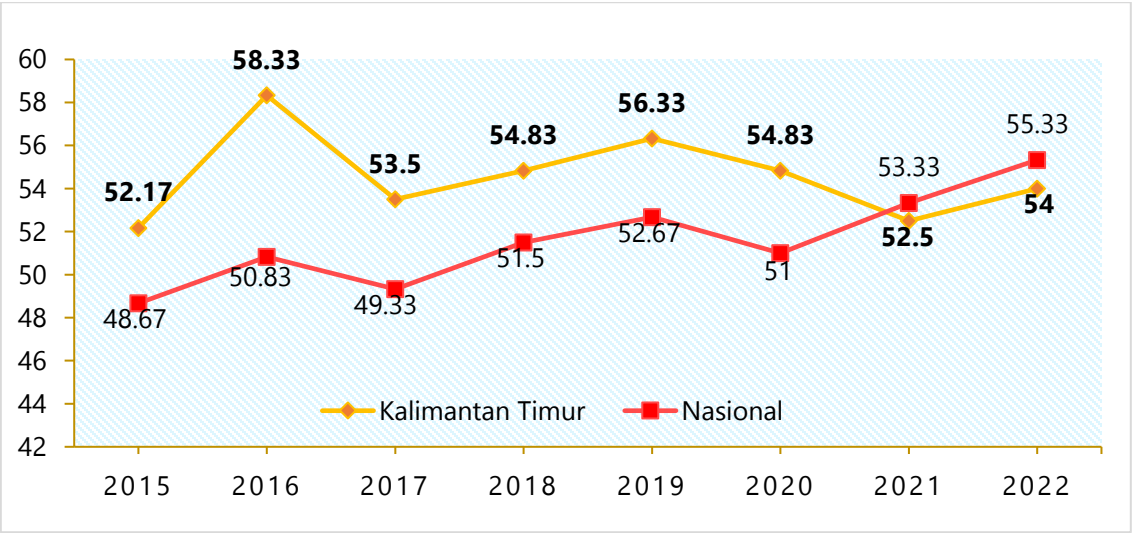
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang cukup fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum capaian IKG Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di atas capaian provinsi, kecuali pada tahun 2020. Rata-rata IKG Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun terakhir tercatat sebesar 0,511 poin, sementara rata-rata provinsi berada di angka 0,440 poin.

Capaian IKG yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih besar, atau tingkat kesetaraan gender di daerah tersebut belum optimal. Oleh karena itu, guna menekan angka ketimpangan gender, diperlukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek terkait gender, khususnya dalam dimensi kesehatan reproduksi, akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi dalam legislatif, serta keterlibatan dalam dunia kerja.

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam upaya mengembangkan bakat, potensi, dan minat yang dimiliki. Kondisi tersebut akan memberikan akses bagi pemuda untuk meningkatkan prestasi serta dapat berperan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Selain itu pembangunan kepemudaan juga berupaya untuk mengembangkan *softskill* dan *hardskill* pemuda, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Kemampuan yang dimiliki pemuda

tersebut salah satunya dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yakni sebuah instrumen yang memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 hingga data termutakhir tahun 2022.



Gambar 2. 49 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022

Sumber: Kemenpora, Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2022

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan *proxy* Provinsi Kalimantan Timur. Hasil capaian IPP Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2015 hingga 2022 dengan tren yang mengarah pada peningkatan, meskipun tidak signifikan. IPP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,83 poin lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015. Selain itu, capaian IPP di Kalimantan Timur 3,16 poin di atas capaian nasional pada tahun 2015, namun dalam perjalanannya selama 8 tahun, capaian IPP nasional bertumbuh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu mengakibatkan capaian IPP Provinsi Kalimantan Timur 1,33 poin lebih rendah dibandingkan nasional pada tahun 2022. Cenderung mengalami tren penurunan, yakni menjadi 5,33 poin di bawah capaian nasional. Fluktuasi capaian IPP di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh banyak hal, terutama ketika mengacu pada domain dasar yang menyusun IPP, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang memengaruhi capaian domain dasar penyusun

IPP, misalnya keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan capaian IPP perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kualitas pemuda menjadi krusial karena pembangunan bertumpu kepada pemuda selaku agen perubahan, terutama ketika melihat mengoptimalkan potensi dari bonus demografi di masa yang akan datang. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan capaian IPP adalah mengoptimalkan kinerja lima domain dasar penyusun IPP, salah satunya dapat melalui peningkatan jumlah organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, dan berkontribusi bagi masyarakat.

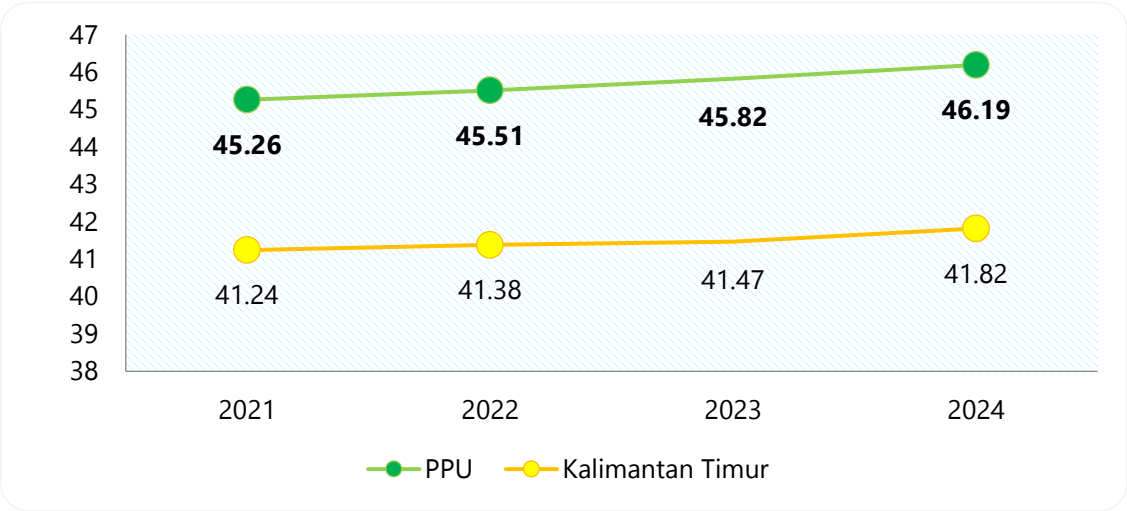
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan potensi yang perlu untuk dioptimalkan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadikan daerah memiliki posisi yang lebih kompetitif dibanding daerah di sekitarnya. Artinya, daya saing daerah menjadi modal yang penting dalam mendukung kemajuan daerah. Aspek daya saing daerah meliputi sumber daya manusia, ekosistem inovasi, kemampuan ekonomi, iklim berinvestasi, dan infrastruktur wilayah.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja pada aspek daya saing sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan capaian beberapa indikator makro meliputi urusan pendidikan hingga daya saing ketenagakerjaan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut

merupakan angka ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2021 hingga 2024.



Gambar 2. 50 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2024

Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Timur (2024)*

Rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang meningkat selama periode 2021 hingga 2024. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,93 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang dengan usia produktif memiliki tanggungan beban orang dengan usia non produktif yang meningkat setiap tahunnya. Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara konsisten berada di atas rata-rata rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, setiap 100 orang usia produktif di kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tanggungan sekitar 46 orang dengan usia non produktif. Upaya pemberdayaan bagi usia non produktif menjadi salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan guna mengurangi rasio ketergantungan di masa yang akan datang.

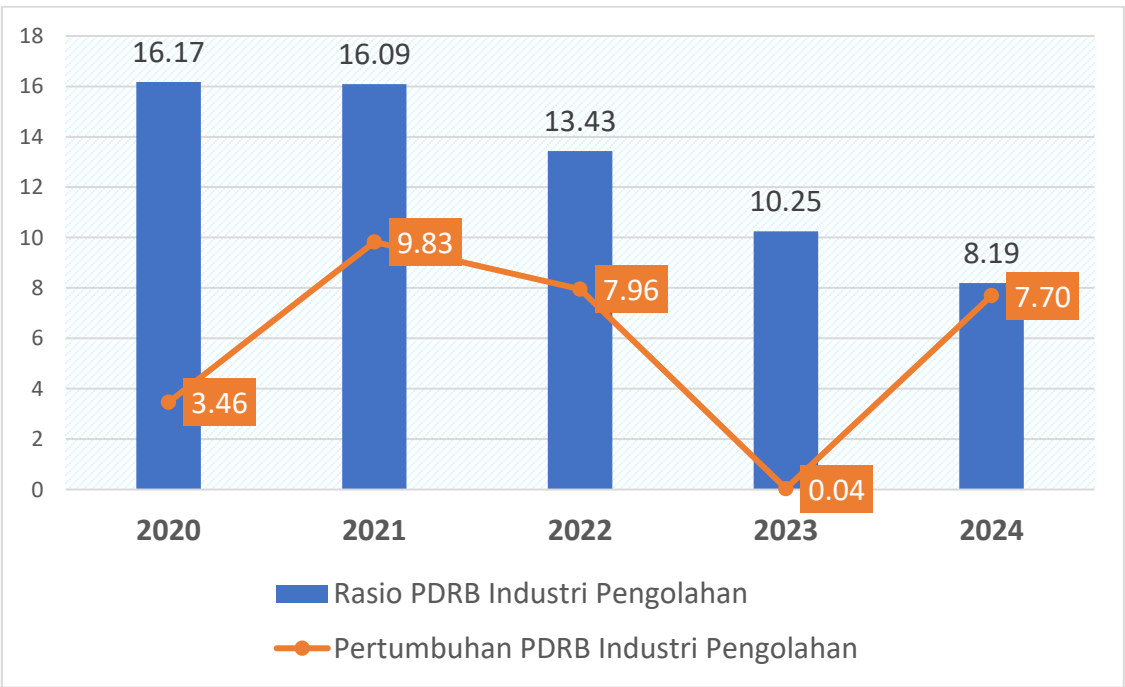
2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang IPTEK dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Agenda hilirisasi menjadi salah satu agenda besar guna meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah. Rasio PDRB industri pengolahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Rasio PDRB industri pengolahan yang semakin tinggi mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah semakin tinggi dan diharapkan dapat mendorong kenaikan PDRB daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap nilai total PDRB daerah. Kenaikan dan penurunan rasio tidak hanya ditentukan oleh kinerja dan harga komoditas sektor industri pengolahan tetapi juga dipengaruhi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor lainnya karena bersifat *zero sum game*.



**Gambar 2. 51 Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024**

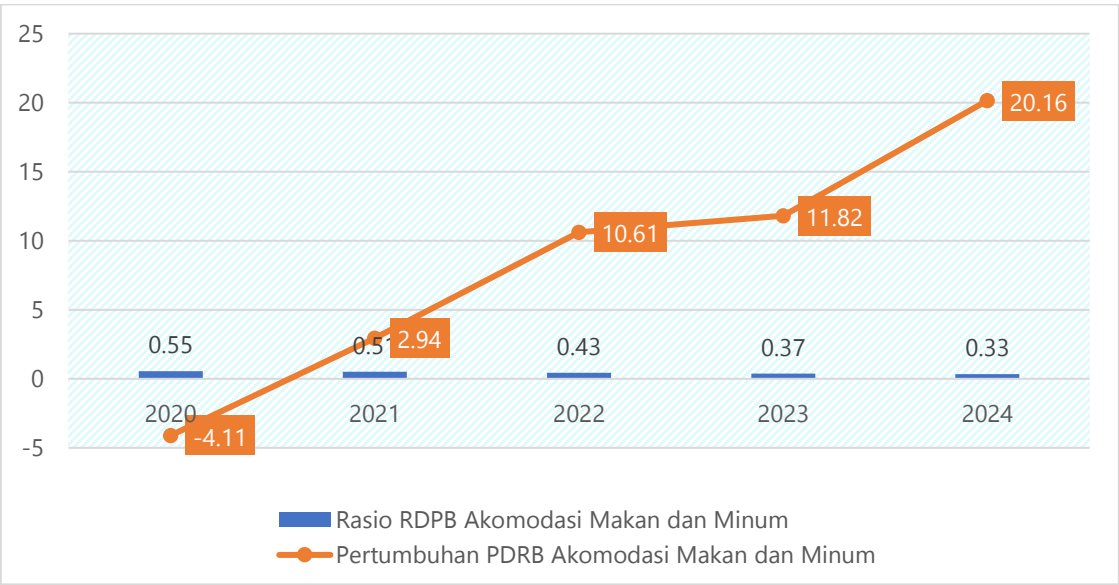
Sumber : BPS Penajam Paser Utara, 2025

Pertumbuhan PDRB industri pengolahan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 3,46 persen dengan distribusi PDRB sebesar 16,17 persen. Kemudian pertumbuhannya meningkat 6,37 persen pada tahun 2021 menjadi 9,83 setelah pandemi Covid-19. Akan tetapi, penurunan pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2023 sebesar 7,92 persen menjadi 0,04

persen. Penurunan pertumbuhan PDRB industri pengolahan ini disebabkan karena peningkatan yang sangat signifikan pada PDRB konstruksi sebesar 122,97 persen. PDRB industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 8,30 persen pada tahun 2024 namun masih lebih rendah dibandingkan dengan PDRB konstruksi. Rasio PDRB industri pengolahan masih lebih kecil dibandingkan dengan PDRB konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

PDRB akomodasi makan dan minum merupakan indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran nilai tambah yang dihasilkan melalui kegiatan pariwisata. Pemahaman pariwisata saat ini tidak hanya terbatas pada kegiatan rekreasi tetapi juga meliputi kegiatan perjalanan dengan tujuan bisnis dan pendidikan yang bersifat jangka pendek. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor akomodasi makan dan minum terhadap total PDRB daerah. Rasio ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan pariwisata terhadap perekonomian daerah.



Gambar 2. 52 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum di Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk dalam golong kecil yaitu dibawah satu persen pertahun. Rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio PDRB industri pengolahan. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum selama tahun 2020 hingga 2024 memiliki nilai kecil namun pada tahun yang sama pertumbuhannya meningkat. Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2024 sebesar 20,16 persen atau meningkat sebesar Rp12,83 miliar rupiah. Meskipun kontribusi terhadap PDRB relatif kecil, PDRB akomodasi makan dan minum memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pilah penting dalam perekonomian.

2.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep perpaduan inovasi, kreatifitas, budaya dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai tambah. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif diyakini dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing. Terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif yang perlu untuk didorong di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.

Tercatat hingga tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 344 pelaku ekonomi kreatif. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Penajam Paser Utara, berbagai upaya dapat dilakukan, mulai dari peningkatan pemahaman terkait ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan , hingga pemanfaatan teknologi. Dukungan konkret lainnya juga dapat dilakukan, seperti pemberian insentif, perlindungan hukum, dan fasilitasi akses pasar. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut data pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

Tabel 2. 30 Data Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

No	Sub Sektor	Data EKRAF
1	Aplikasi	3
2	Game Developer	1
3	Arsitektur	
4	Desain Interior	
5	Desain Komunikasi Visual	
6	Desain Produk	

7	Fashion	100
8	Film, Animasi, Video	1
9	Fotografi	
10	Kriya	71
11	Kuliner	163
12	Musik	
13	Penerbitan	5
14	Periklanan	
15	Seni Pertunjukan	
16	Seni Rupa	
17	TV Radio	
Total		344

Sumber: Bappelitbangda, 2025

2.3.2.3.1 Sub Sektor Kuliner

Subsektor kuliner menempati posisi strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024. Sebagai salah satu subsektor dengan partisipasi tertinggi, kuliner tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berperan penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui cita rasa khas dan produk olahan tradisional. Pelaku usaha kuliner di Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mulai dari usaha rumahan hingga UMKM yang terus berinovasi dalam penyajian dan pemasaran produk. Berbagai makanan khas seperti olahan laut, jajanan tradisional, serta minuman lokal mendapat tempat istimewa di hati masyarakat dan pengunjung, menjadikan kuliner sebagai identitas sekaligus daya tarik wisata. Dengan dukungan program pembinaan, festival makanan, serta pemanfaatan media digital untuk promosi, subsektor kuliner terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Potensi besar ini menunjukkan bahwa kuliner bukan sekadar soal rasa, tetapi juga merupakan kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif, subsektor kuliner diharapkan terus tumbuh sebagai ujung tombak ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Penajam Paser Utara.

2.3.2.3.2 Sub Sektor Fashion

Subsektor Fashio menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024. Dengan mengangkat kekayaan budaya lokal, seperti motif-motif khas daerah dan penggunaan bahan alami, pelaku fesyen di PPU mulai menciptakan karya-karya yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga memiliki daya saing di pasar lokal maupun regional. Perajin dan desainer lokal menunjukkan kreativitas melalui busana tradisional yang dikemas dalam gaya

modern, pakaian sehari-hari dengan sentuhan etnik, hingga aksesoris hasil kerajinan tangan. Produk-produk ini banyak ditampilkan dalam pameran, peragaan busana daerah, dan event ekonomi kreatif seperti PPU Fest, yang menjadi etalase penting untuk memperkenalkan potensi fesyen daerah kepada publik yang lebih luas. Pertumbuhan subsektor ini juga memberikan dampak ekonomi yang nyata, dengan terbukanya lapangan kerja bagi penjahit, pembatik, model, fotografer fesyen, hingga pelaku usaha online yang memasarkan produk fesyen lokal. Tidak hanya menciptakan tren baru, fesyen di Penajam Paser Utara juga menjadi media pelestarian identitas budaya daerah melalui desain yang otentik dan penuh makna. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas kreatif, dan pelaku UMKM, subsektor fesyen diharapkan terus tumbuh menjadi industri kreatif yang berkelanjutan mengangkat nama daerah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kreativitas dan budaya lokal.

2.3.2.3.3 Sub Sektor Kriya

Subsektor seperti kriya (kerajinan kayu, rotan, wastra) berkembang pesat berkat kreativitas dan ketersediaan material lokal. Sedangkan untuk beberapa produk unggulan mencakup ukiran kayu ulin (oleh UMKM seperti Suraa Arts) dan anyaman rotan yang diproduksi di sentra kerajinan seperti “Si Sekar Penyangga IKN” di Kelurahan Sepan dan Kerajinan wastra tradisional seperti batik tulis contohnya IKM Sekar Buen dan IKM Batik Bulau Sayang juga berkembang dan didukung melalui Desa Sentra Batik di Desa Bangun Mulya.

2.3.2.3.4 Sub Sektor Penerbitan

Subsektor penerbitan merupakan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang tengah didorong perkembangannya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun saat ini jumlah pelaku penerbitan masih terbatas, potensi besar terbuka melalui penguatan konten lokal, khususnya karya tulis yang mengangkat budaya, sejarah, dan kearifan masyarakat suku Paser. Melalui dukungan Komite Ekonomi Kreatif, festival budaya seperti PPU Fest, serta program digitalisasi dari pemerintah daerah, pelaku penerbitan memiliki peluang untuk memperluas distribusi dan jangkauan karya mereka, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sosialisasi perlindungan hak cipta juga turut mendorong profesionalisme dan keberlanjutan subsektor ini. Dengan penguatan kolaborasi, pelatihan, dan promosi, subsektor

penerbitan di PPU berpotensi menjadi medium penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

2.3.2.3.5 Sub Sektor Aplikasi

Subsektor aplikasi dalam ekonomi kreatif Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 mulai menunjukkan potensi meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai bagian dari industri kreatif berbasis teknologi, subsektor ini meliputi pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, game, serta solusi digital lainnya yang dapat mendukung berbagai sektor ekonomi dan layanan masyarakat. Meskipun partisipasi pelaku aplikasi di daerah ini tergolong rendah, usaha-usaha kreatif yang muncul mulai menandai langkah awal transformasi digital di Penajam Paser Utara. Dengan semakin berkembangnya akses internet dan literasi digital, subsektor aplikasi diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber inovasi dan penggerak ekonomi baru yang menjembatani kebutuhan masyarakat modern.

2.3.2.3.6 Sub Sektor Game Developer

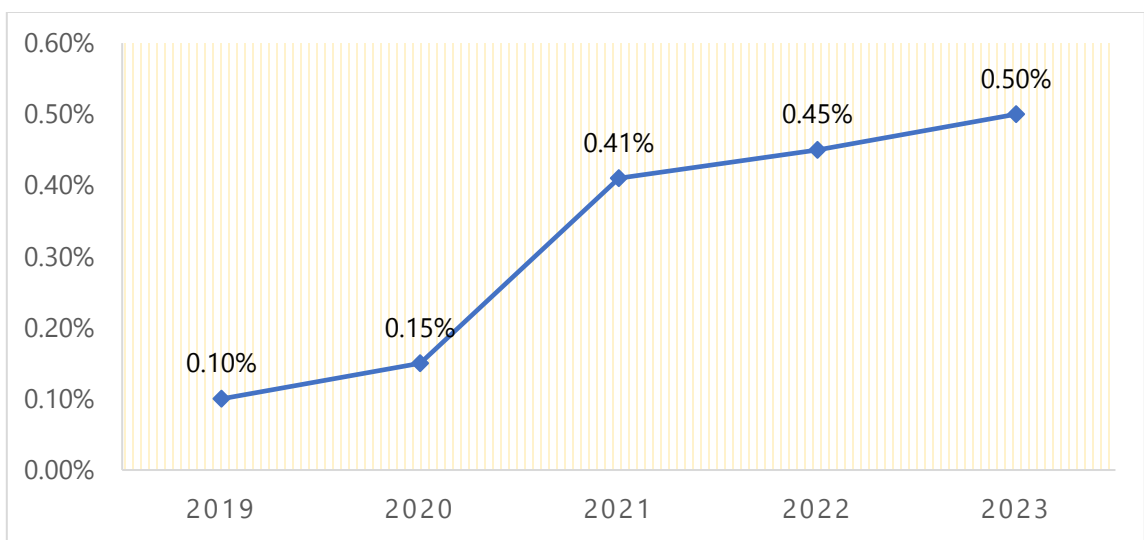
Sub-sektor Game Developer memiliki potensi strategis dalam menumbuhkan ekonomi kreatif di Kabupaten Penajam Paser Utara, meskipun saat ini belum dieksplorasi secara optimal. Dengan memanfaatkan momentum momentum lokal (event, digitalisasi, festival) dan memperkuat kapasitas serta perlindungan legal, PPU punya peluang unik untuk tumbuh menjadi “hub” game kreatif berbasis budaya lokal di kawasan IKN.

2.3.2.3.7 Sub Sektor Film, Animasi dan Vidio

Subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peluang strategis sebagai media ekspresi budaya dan promosi daerah. Dengan kekayaan lokal seperti cerita rakyat, adat Paser, dan keindahan alam, pelaku kreatif di bidang ini dapat menciptakan konten yang kuat secara visual dan naratif. Pemerintah daerah melalui Komite Ekonomi Kreatif serta dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mulai memfasilitasi ruang kreasi, seperti workshop, festival film lokal, dan pelatihan teknis. Program ini tidak hanya mendorong lahirnya sineas muda, tetapi juga membuka peluang usaha baru di bidang produksi, distribusi digital, dan konten kreatif berbasis media. Dengan kolaborasi lintas komunitas serta pemanfaatan platform digital, subsektor film, animasi, dan video di PPU berpotensi tumbuh sebagai ujung tombak promosi budaya sekaligus sumber ekonomi baru.

2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta program pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Peningkatan rasio kewirausahaan ini juga dipengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur dan investasi yang masuk ke wilayah ini, terutama dengan ditetapkannya sebagian wilayah PPU sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan ini membuka peluang besar bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun industri kreatif.



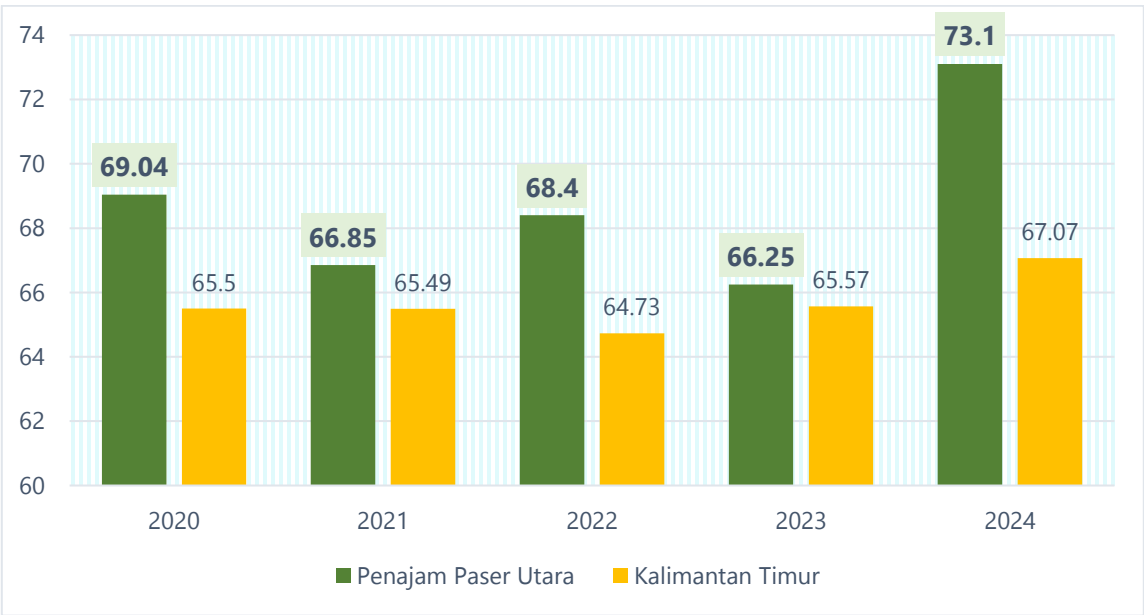
Gambar 2. 53 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sumber: KUKM Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Namun demikian, tantangan dalam peningkatan rasio kewirausahaan masih cukup besar. Beberapa kendala utama yang dihadapi pelaku usaha di PPU antara lain adalah akses terhadap modal usaha, rendahnya literasi keuangan, dan juga masih terbatasnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha mereka secara tradisional tanpa mengoptimalkan teknologi dalam pemasaran dan manajemen usaha. Oleh karena itu, program pendampingan yang lebih intensif, termasuk dalam bidang digitalisasi usaha, sangat dibutuhkan agar UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja. TPAK berfungsi sebagai salah satu indikator untuk menilai seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Variasi TPAK dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi.



Gambar 2. 54 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan kenaikan hingga 6,85 persen. Kondisi ini mengindikasikan keinginan penduduk usia kerja untuk masuk ke dalam pasar kerja terus meningkat, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun masih mencari pekerjaan. TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menjelaskan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar 73,1 persen yang berarti bahwa sekitar 73 penduduk angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Kenaikan TPAK ini menjelaskan bahwa potensi tenaga kerja yang tersedia untuk berkontribusi dalam produksi barang dan jasa di Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat.

2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana inovasi diterapkan di suatu daerah. Inovasi sendiri merupakan usaha untuk mengatasi masalah dengan pendekatan baru atau metode yang lebih efektif dan efisien. Proses inovasi sangat penting bagi produktivitas ekonomi daerah, karena dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan di masa depan.

Tabel 2. 31 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penajam Paser Utara	617	41,5	28,4	15,96	37,61
Predikat	Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif
Kalimantan Timur	51	44,19	50,17	49,23	61,74
Predikat	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Kemendagri, 2024 Diolah

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2020 hingga 2024. Indeks inovasi yang turun pada tahun 2022 dan 2023 kemudian naik pada tahun 2024 sebesar 21,65 poin menjadi 37,61 dengan predikat Inovatif. Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya iklim inovasi di daerah secara umum, baik inovasi yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hal ini dapat menjadi potensi untuk memanfaatkan inovasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendorong produktivitas ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara umum. Selama tahun 2020-2024 indeks inovasi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.2.7 Pariwisata

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara mulai menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung dan menikmati keindahan serta kekayaan budayanya. Destinasi wisata alam seperti Pantai Nipah-Nipah, Air Terjun Tembinus, dan Bukit Bangkirai menjadi daya tarik utama yang menawarkan keindahan alam yang masih asri dan alami. Selain itu, wisata budaya dan tradisi lokal juga turut memperkaya pengalaman wisatawan,

terutama melalui event-event tahunan seperti PPU Fest yang menampilkan seni pertunjukan, kuliner, dan produk ekonomi kreatif khas daerah. Berikut data kunjungan wisatawan di kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2. 31 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 – 2024

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN					
Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan manca negara (orang)	6	13	27	48	38
Wisatawan nusantara (orang)	20.488	105.119	132.956	467.119	497.438

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU, 2025

Peningkatan kunjungan wisata juga didukung oleh semakin membaiknya infrastruktur jalan, transportasi, serta promosi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata dan komunitas kreatif. Pengembangan homestay, layanan pemandu wisata, dan UMKM lokal pun turut menciptakan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Dengan terus ditingkatkannya kolaborasi lintas sektor, kunjungan wisata di Penajam Paser Utara pada tahun 2024 tidak hanya mencerminkan pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga menunjukkan komitmen daerah dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (RIPARKAB) periode 2022–2027, pemerintah daerah menetapkan arah strategis pengembangan sektor pariwisata. Dalam dokumen tersebut Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah, dikelompokkan dalam 3 (tiga) klaster:

- a. Klaster I dengan tema wisata bahari dan situs sejarah yang terletak di sepanjang kawasan pesisir Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Situs Meriam;
 - 2. Goa Persembunyian Tentara Jepang;
 - 3. Situs Pendaratan Pesawat Tempur Jepang;

4. Bangkai Kapal Tentara Jepang;
 5. Pulau Kwangan;
 6. Pantai Nipah-Nipah;
 7. Pantai Tanjung Jumlai;
 8. Pantai Saloloang;
 9. Pantai Sesumpu;
 10. Pantai Pejala;
 11. Pantai Corong;
 12. Pulau Balang;
 13. Mangrove Kampung Baru;
 14. Terumbu Karang Pulau Gusung;
 15. Situs Pengibaran Bendera Nenang;
 16. Kampung Adat Sepan.
- b. Klaster II dengan tema wisata kuliner dan edukasi yang berada di sepanjang jalan utama Sepaku hingga Babulu, yang terdiri dari:
1. Wisata Pendidikan Nursery;
 2. Sentra Penggemukan Sapi;
 3. Kawasan Wisata Kuliner Petung;
 4. Wisata Penangkaran Rusa;
 5. Waduk Babulu;
 6. WadukWam;
 7. Kampung Waru T\ra LogPond;
 8. Minapolitan Babulu Laut;
 9. Hutan Pinus Sesulu /Bumi Kemah;
 10. Agrowisata Api-Api;
 11. Kampung Batik;
 12. Kampung Adat Sesulu;
 13. Makam Aji Raden Dan Keluarga;
 14. Wisata Sawah Gunung Mulia;
 15. Pantai Gelora;
 16. Taman Rozeline;
 17. Taman Alun-alun Pemkab;
 18. Hutan Kota/ Bumi Kemah;

19. Rumah Adat Kuta Rakan Tatau.

c. Klaster III dengan tema wisata alam dan petualangan yang tersebar di Daerah, yang terdiri dari:

1. Gua Liang Pagar dan Gua Tolu liang;
2. Air Terjun Rimbawan;
3. Air Terjun Tembinus;
4. Ekowisata Mangrove Mentawir;
5. Wisata Hutan Bambu Mentawir;
6. Hutan Konservasi (Pohon Agathis);
7. Bumi Kemah Semoi II
8. Gua Tapak Raja.

Sedangkan untuk destinasi unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara:

1. Taman Rozeline
2. Rumah Adat Kuta Rakan Tatau
3. Penangkaran Rusa PEMKAB
4. Pantai Istana Amal
5. Pantai Sipakario, Nipah-nipah
6. Taman Alun-alun PEMKAB PPU
7. Ekowisata Mangrove Kampung Baru
8. Pantai Tanjung Jumlai
9. Pantai Corong dan Susur Sungai Tunan
10. Penangkaran Rusa Api-api
11. Pantai Gelora Api-api
12. Susur Sungai Longpon
13. Wahana Wisata Api-api
14. Wisata Sawah Gunung Mulia
15. Wahana OFA
16. Mangrove Labangka
17. Goa Tapak Raja Bukit Kariwaya
18. Susur Sungai Mentawir
19. Ekowisata Mangrove Mentawir
20. Jone Nusantara

Pada tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun reputasi sebagai kabupaten dengan desa-desa wisata yang terus berkembang. Tercatat setidaknya 3 desa wisata yang terbukti menjadi magnet bagi wisatawan. Masing-masing desa menawarkan nuansa unik: dari pantai, goa, ekowisata, budaya, hingga panorama alam edukatif. Keberadaannya turut memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal di era IKN. 3 Desa wisata tersebut adalah :

1. Desa Wisata Mentawir (Sesuai SK Bupati No. 556/266/2021)
Menonjol dengan kekayaan alam seperti hutan mangrove, Sungai Mentawir, Teluk Balikpapan, area jeram, serta budaya lokal (tarian ronggeng, cerita Demang, sirup mangrove, kerajinan bambu)
2. Desa Wisata Wonosari, Kecamatan Sepaku (sesuai SK Bupati No. 500.13.2.2/50/2024)
Menyediakan pengalaman wisata goa (Gua Batu Tapak Raja), wahana bermain seperti flying fox, dan suasana alam yang asri. Masuk dalam daftar 500 besar ADWI 2024
3. Kampung Wisata Nipah-Nipah, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam (Sesuai SK Bupati No. 500.9/241/2024)
Dihadirkan dengan daya tarik seperti Pantai Sipakario (Pantai Nipah-Nipah), Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, Taman Bunga Rozaline, serta Alun-alun Pemkab. Desa wisata Nipah-nipah berhasil meraih prestasi membanggakan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Pencapaiannya adalah berhasil masuk ke dalam 50 besar desa wisata terbaik dari lebih 6.000 desa wisata yang berpartisipasi di seluruh Indonesia.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah konsep perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor non-tambang adalah dua konsep yang saling terkait dalam menilai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun ada hubungan antara keduanya, PDRB sektor non-tambang tidak sepenuhnya dapat menggantikan indikator ekonomi hijau, karena pendekatan ekonomi hijau mencakup aspek lingkungan, sosial, dan efisiensi sumber daya yang

lebih komprehensif. Namun, mengingat bahwa indikator ekonomi hijau di tingkat kabupaten masih belum tersedia hingga saat ini, PDRB sektor non-tambang sering dijadikan sebagai proxy atau ukuran alternatif untuk menilai perkembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan menggunakan PDRB sektor non-tambang sebagai indikator sementara, diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang pergeseran ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel 2. 32 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,33	21,8	22,68	19,51	15,25	12,26
B. Pertambangan dan Penggalian	29,37	25,31	23,29	22,72	16,79	12,53
C. Industri Pengolahan	15,49	16,17	16,09	13,43	10,25	8,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06
F. Konstruksi	11,38	12,64	14,74	23,81	40,49	52,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,21	9,56	9,15	8,52	7,27	5,93
H. Transportasi dan Pergudangan	1,61	1,66	1,63	1,51	1,35	1,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,55	0,51	0,43	0,37	0,33
J. Informasi dan Komunikasi	1,33	1,45	1,41	1,16	0,93	0,79
K. Jasa Keuangan	0,81	0,86	0,82	0,72	0,64	0,54
L. Real Estate	1,21	1,29	1,22	0,98	0,78	0,69
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	3,68	3,49	3,04	2,48	2,31
P. Jasa Pendidikan	3,5	3,84	3,8	3,17	2,55	2,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,98	0,96	0,94	0,81	0,68	0,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Lapangan usaha yang mendominasi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor konstruksi sebesar 52,46 persen pada tahun 2024. Hal ini menjelaskan bahwa PDRB non pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih besar dibandingkan dengan sektor pertambangan. Besaran distribusi sektor pertambangan hampir sama besar dengan sektor pertanian, kehutanan, dan

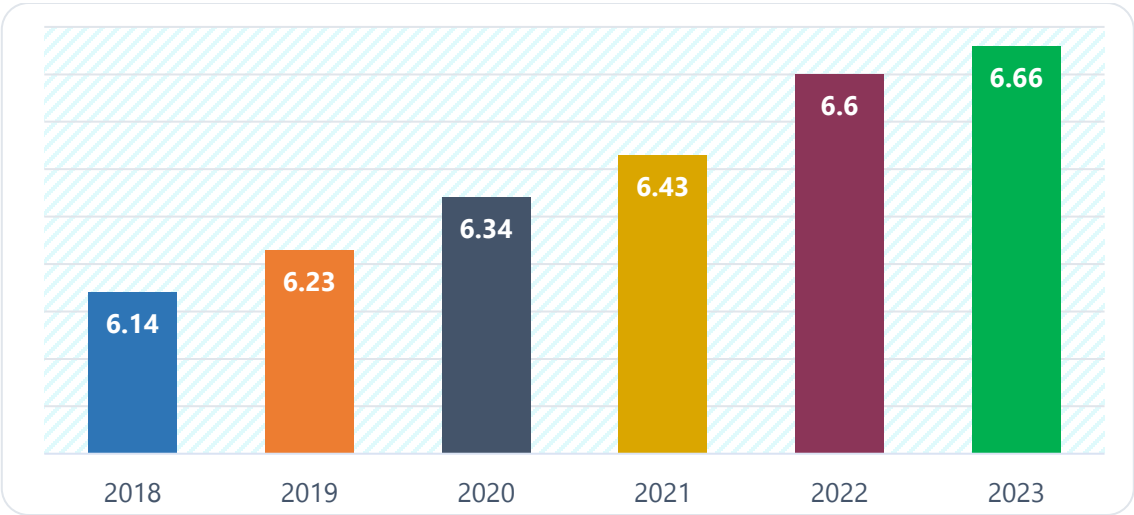
perikanan. Akan tetapi, distribusi PDRB sektor lain dapat ditingkatkan dengan dukungan kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia agar kontribusi PDRB di masing-masing sektor dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

2.3.4 Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Transformasi digital saat ini menjadi prasyarat dalam peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Penerapan teknologi digital mampu mendorong efisiensi dalam proses produksi, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat. Digitalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, sehingga analisis terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting untuk memahami tingkat digitalisasi di daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis IP-TIK sejak tahun 2015 sebagai ukuran standar pembangunan TIK di suatu wilayah. IP-TIK disusun berdasarkan 11 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. Indeks ini menggunakan skala 0-10, di mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin pesat, sedangkan nilai indeks yang rendah menunjukkan pembangunan TIK yang relatif masih lambat. IP-TIK bermanfaat untuk membandingkan pembangunan TIK antarwaktu maupun antarwilayah, serta mengukur kesenjangan digital dan potensi pembangunan TIK.

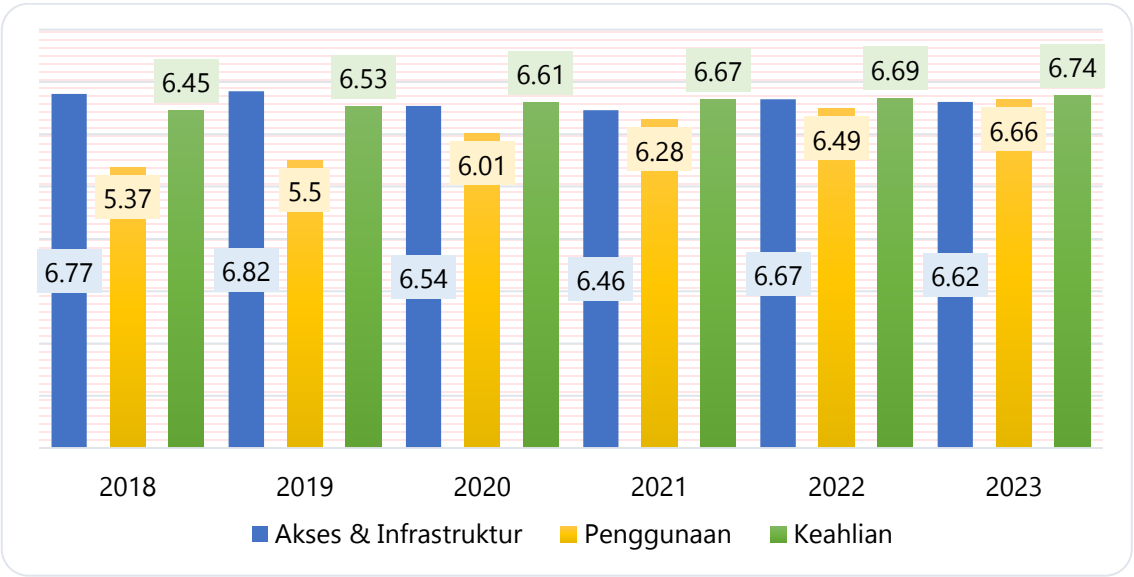
IP-TIK dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT-DI) sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK yang dapat diperbandingkan secara internasional. Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pembangunan TIK, tetapi juga sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan TIK, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah.



Gambar 2. 55 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023

Sumber: BPS (2024)

Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara, pengukuran IP-TIK saat ini masih menggunakan proksi data dari tingkat provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data pada tahun 2023, IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,66, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,60. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan penggunaan layanan TIK, serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pembangunan TIK di wilayah provinsi.



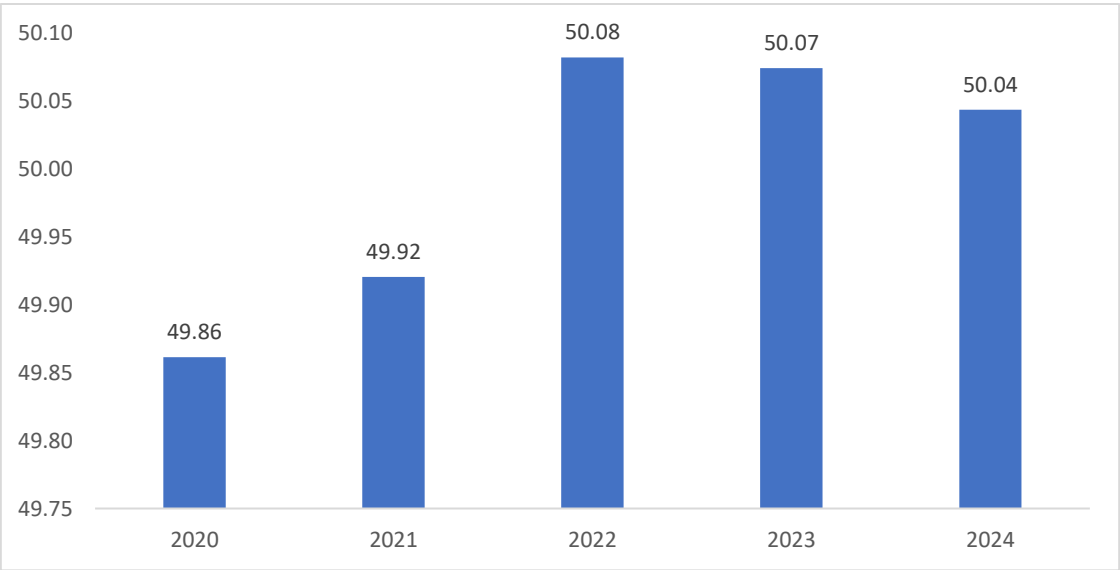
Gambar 2. 56 Subindeks Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023

Sumber: BPS (2024)

Jika dilihat dari subindeksnya, terjadi peningkatan pada ketiga aspek yang diukur. Subindeks Akses dan Infrastruktur mengalami sedikit penurunan dari 6,67 pada tahun 2022 menjadi 6,62 pada tahun 2023. Namun, subindeks Penggunaan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 6,49 pada tahun 2022 menjadi 6,66 pada tahun 2023. Sementara itu, subindeks Keahlian juga menunjukkan peningkatan dari 6,69 pada tahun 2022 menjadi 6,74 pada tahun 2023. Peningkatan nilai IP-TIK dan ketiga subindeks ini menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan TIK, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital di wilayah Kalimantan Timur.

Proksi lain untuk dapat menggambarkan perkembangan TIK di Kabupaten Penajam Paser Utara, digunakan juga persentase penduduk yang menggunakan internet. Indikator ini digunakan untuk mengukur penetrasi internet di suatu wilayah dan dapat memberikan informasi tentang tingkat digitalisasi dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Berikut disajikan data terkait persentase penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 57 Persentase penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Bappelitbangda, 2025

Penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024 secara umum terus mengalami peningkatan. Artinya, masyarakat semakin leluasa mengakses internet yang sekaligus menggambarkan cakupan jaringan internet di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin meluas. Meskipun demikian, penting untuk terus memperkuat pembangunan TIK di tingkat kabupaten agar kesenjangan digital antarwilayah dapat diminimalisir, sehingga manfaat

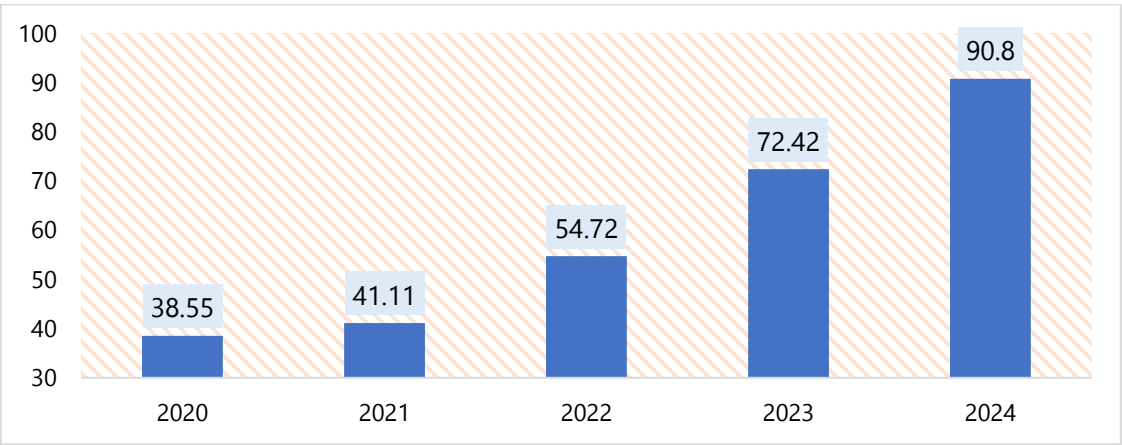
teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Bagian ini akan menganalisis hubungan antara perekonomian lokal dan perekonomian global dengan menggunakan data terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu elemen dalam PDRB yang dihitung berdasarkan pengeluaran yang mencerminkan nilai investasi yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi melalui pembelian barang modal dengan masa pakai lebih dari satu tahun. PMTB berfungsi sebagai indikator tingkat pengeluaran suatu daerah untuk reinvestasi guna mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Nilai PMTB yang tinggi menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana masyarakat cenderung menginvestasikan kembali hasil produksi ekonominya untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini juga mencerminkan kondisi pasar yang baik dan keterbukaan ekonomi lokal terhadap peluang pasar yang lebih luas. Berikut PMTB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024.



Gambar 2. 58 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

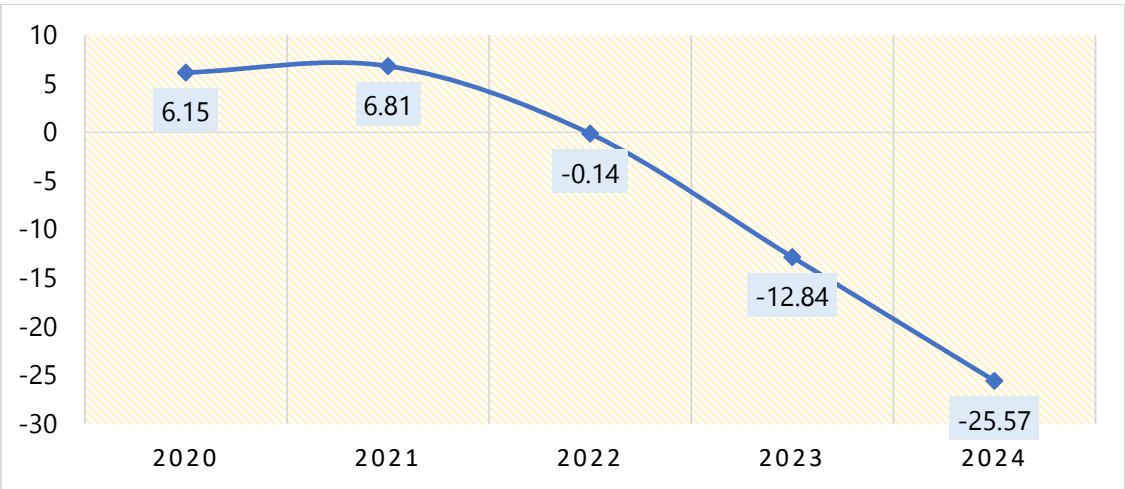
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif. Secara rata-rata pertumbuhan PMTB sebesar

35,41 selama tahun 2020 hingga 2024. Kontribusi PMTB terhadap PDRB mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Kontribusi PMTB terhadap PDRB secara rata-rata sebesar 59,52 persen dalam lima tahun terakhir. Peningkatan distribusi didukung peningkatan sektor konstruksi terkait penmindahan IKN. Dengan peningkatan PMTB ini diharapkan dapat meningkatkan investasi yang akan mendorong peningkatan lapangan kerja.

2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memainkan peran krusial dalam integrasi ekonomi domestik dan global, berfungsi sebagai jembatan antara pasar lokal dan internasional. Melalui ekspor, negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih rendah atau kualitas yang lebih baik dibandingkan negara lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri domestik. Dalam konteks integrasi ekonomi global, ekspor membantu negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, yang memungkinkan mereka untuk memperluas pasar bagi produk-produk domestik.



Gambar 2. 59 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Penajam Paser Utara, 2025

Distribusi ekspor barang dan jasa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024 memiliki tren negatif hingga 25,57 persen pada PDRB. Net Ekspor Barang dan Jasa sering kali mencatat nilai negatif dalam Produk Domestik Bruto (PDB) karena nilai impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya permintaan

domestik terhadap barang dan jasa asing yang sering kali lebih beragam dan berkualitas tinggi dibandingkan produk lokal. Defisit net ekspor mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi domestik dalam mencapai keseimbangan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memperhatikan keseimbangan antara produksi domestik dan ketergantungan pada impor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

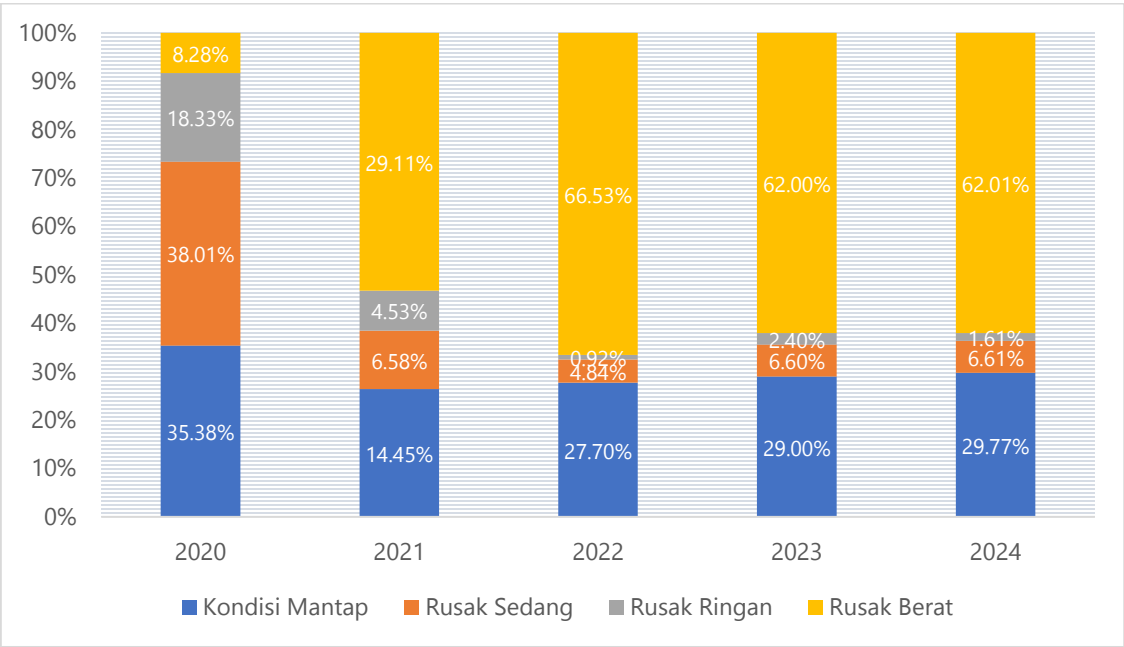
Bagian ini menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan.

2.3.6.1 Infrastruktur Daerah

Kondisi fasilitas/infrastruktur daerah digunakan untuk menjelaskan kondisi daya saing daerah dengan menampilkan kondisi infrastruktur, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan. Komponen indeks infrastruktur daerah digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah salah satunya dengan dukungan jaringan transportasi. Sistem transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh kondisi geografis yang memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Sehingga perlu adanya integrasi antara angkutan darat dengan angkutan laut serta angkutan penyeberangan. Perumusan rencana pengembangan sistem prasarana transportasi sesuai dalam dokumen perencanaan tata ruang, diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan akan mobilitas masyarakat maupun barang melalui penataan, pengaturan, dan pengembangan prasarana transportasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi terdiri atas pengembangan transportasi darat dan transportasi laut, sedangkan transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan kewenangannya terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Total panjang jalan pada tahun 2022 mencapai 1.391,30 Km, jumlah ini terus mengalami

peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Jalan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh jalan kewenangan kabupaten yakni mencapai 89,40% dari keseluruhan jalan terbangun.



Gambar 2. 60 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka, 2020-2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan mutu jalan, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak berat yang cukup besar, yakni mencapai 62,01 persen. Peningkatan jalan dalam kondisi rusak berat diikuti dengan menurunnya kondisi jalan dalam kondisi mantap, sedang, dan rusak ringan. Kondisi ini menunjukkan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masih tingginya ruas jalan dengan material kerikil dan tanah juga menunjukkan bahwa kualitas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang baik, sehingga aksesibilitas orang maupun barang cukup terhambat. Hal inilah yang harus menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan masyarakat dengan terus berupaya meningkatkan mutu jalan.

Selain jalur darat, jaringan laut dan sungai menjadi alternatif transportasi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kabupaten di sekitarnya. Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara yang banyak terdapat bukit dan aliran sungai, berimplikasi pada aksesibilitas menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus melalui jalur laut/sungai.

Sesuai dengan KepMen Perhubungan No. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai Pelabuhan Pengumpul di Kecamatan Penajam.

Tabel 2. 33 Banyaknya Arus Lalu Lintas Transportasi Laut/Sungai di Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Bulan	Speed Boat		Kapal Klotok		Kapal Ferry	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1.	Januari	1,263	913	1,101	1,342	2,907	2,908
2.	Pebruari	1,114	839	914	1,003	2,625	2,627
3.	Maret	1,244	769	1,001	1,102	2,874	2,875
4.	April	1,830	1,062	1,359	1,525	2,764	2,766
5.	Mei	1,347	1,021	1,151	1,283	2,883	2,886
6.	Juni	1,292	900	1,150	1,285	2,749	2,751
7.	Juli	1,279	973	1,206	1,243	2,784	2,691
8.	Agustus	1,115	816	960	850	2,765	2,770
9.	September	1,747	797	989	969	2,674	2,675
10.	Oktober	1,268	1,232	1,015	1,114	2,764	2,768
11.	Nopember	1,363	177	1,062	581	2,611	2,621
12.	Desember	1,595	908	1,327	3,116	2,740	2,750
JUMLAH		16,457	10,407	13,235	15,413	33,140	33,088

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka

Terdapat beberapa alternatif moda transportasi penyeberangan laut/sungai yang tersedia di Pelabuhan Pengumpul yang ada di Kecamatan Penajam, diantaranya Speed Boat, Kapal Klotok, Kapal Penumpang, dan Kapal Ferry. Jaringan jalan darat dari dan menuju Penajam Paser Utara melalui Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus memutar, sehingga alternatif menyeberang laut dan/ sungai menjadi pilihan yang lebih banyak diminati, namun kedepannya akan segera dibangun jembatan sehingga secara ekonomis dapat lebih terjangkau.

Tabel 2. 34 Banyaknya Penumpang Transportasi Laut/Sungai di Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Bulan	Penumpang Speed Boat		Penumpang Kapal Klotok		Penumpang Kapal Ferry	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1.	Januari	9,044	6,391	23,817	29,016	2,883	6,230
2.	Pebruari	8,008	6,013	19,333	23,857	2,217	4,865
3.	Maret	8,900	5,540	20,549	26,725	2,401	4,510
4.	April	13,066	7,970	30,140	20,297	5,611	10,205
5.	Mei	9,620	7,330	23,079	30,002	2,415	5,947
6.	Juni	9,328	6,662	25,077	30,202	2,021	6,793
7.	Juli	9,235	7,186	25,138	29,897	2,572	6,302
8.	Agustus	8,092	6,017	20,198	23,900	1,800	4,786

No	Bulan	Penumpang <i>Speed Boat</i>		Penumpang Kapal Klotok		Penumpang Kapal Ferry	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
9.	September	5,808	5,848	22,895	24,950	1,973	5,724
10.	Oktober	8,939	5,720	22,114	27,396	1,815	5,063
11.	Nopember	9,818	6,345	22,372	27,088	1,483	4,421
12.	Desember	12,933	7,788	29,033	32,120	2,158	6,358
JUMLAH		112,791	78,810	283,745	325,450	29,349	71,204

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka

Fasilitas transportasi penyeberangan dari dan menuju Kabupaten Penajam Paser Utara dilayani oleh Speed Boat dan juga Kapal Klotok, sedangkan transportasi laut jarak jauh terlayani dengan adanya Kapal Ferry. Masyarakat lebih banyak menggunakan Kapal Klotok untuk bepergian menuju Kabupaten Penajam Paser Utara, karena harganya yang lebih terjangkau untuk masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.6.2 Infrastruktur Perhubungan

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam konteks pembangunan nasional sebagai kawasan penyangga utama bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan berada di jalur lintas pesisir menjadikan PPU sebagai simpul penting dalam sistem konektivitas regional dan nasional. Peran ini menempatkan PPU pada titik krusial dalam upaya pengembangan infrastruktur perhubungan yang tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Kabupaten PPU dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang besar dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas antarwilayah, belum optimalnya kualitas dan kapasitas jaringan jalan, serta perlunya peningkatan efisiensi dan integrasi antar moda transportasi. Di sisi lain, peluang terbuka melalui dukungan

kebijakan nasional, alokasi anggaran pembangunan, dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mewujudkan sistem perhubungan yang modern dan adaptif.

Infrastruktur transportasi di Kabupaten PPU saat ini mencakup dua moda utama, yaitu moda darat dan moda laut. Moda darat terdiri dari jaringan jalan kabupaten, jalan provinsi, serta fasilitas terminal dan angkutan umum yang menjadi tulang punggung mobilitas lokal. Moda laut meliputi pelabuhan penyeberangan, pelabuhan umum, dan pelabuhan rakyat yang melayani distribusi barang dan penumpang antarwilayah pesisir dan lintas teluk. Kedua moda ini memiliki peran saling melengkapi dan menjadi bagian integral dalam mendukung konektivitas antara PPU dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, seperti Balikpapan, Samarinda, dan kawasan IKN.

Pengembangan sistem perhubungan di PPU juga didukung oleh berbagai inisiatif kelembagaan yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan transportasi. Program-program strategis seperti peningkatan status terminal Penajam menjadi terminal tipe B, pembangunan pelabuhan baru yang bebas sengketa lahan, pemasangan rambu lalu lintas, serta digitalisasi layanan pengaduan transportasi merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk menciptakan sistem transportasi yang responsif, aman, dan berdaya saing.

Dengan mempertimbangkan posisi strategisnya dalam mendukung pembangunan IKN dan transformasi wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan sistem perhubungan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, sinergi antara perencanaan teknis, kebijakan kelembagaan, investasi infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi masa depan.

2.3.6.3 Transportasi Laut

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai salah satu wilayah strategis di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan menjadi bagian dari kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), memiliki peran penting

dalam mendukung konektivitas maritim regional. Berdasarkan data tahun 2025, infrastruktur pelabuhan di wilayah ini terdiri dari tiga kategori utama: pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, dan terminal umum. Masing-masing kategori mencerminkan fungsi, pengelolaan, dan hirarki pelabuhan yang berbeda, sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam sistem transportasi laut.

1. Pelabuhan Sungai dan Danau: Pengumpan Lokal yang Menghubungkan Komunitas

Terdapat enam pelabuhan kecil yang beroperasi sebagai pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan-pelabuhan ini umumnya melayani trayek Penajam–Balikpapan, yang menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah. Pelabuhan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat dalam dokumen perencanaan nasional (RIPN) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Pelabuhan Speed Boat Penajam, Pelabuhan Maridan, Pelabuhan Jenebora, Pelabuhan Klotok Penajam, Pelabuhan Mentawir, dan Pantai Lango, Pelabuhan tersebut berfungsi aktif dalam melayani kebutuhan regional.

Pengelolaan pelabuhan-pelabuhan ini terbagi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dan pihak swasta atau perorangan. Hirarki pelabuhan dikategorikan sebagai pengumpan lokal, yang berarti pelabuhan tersebut berfungsi sebagai simpul awal dalam jaringan logistik dan transportasi laut, menghubungkan masyarakat pesisir dengan pelabuhan utama atau pusat ekonomi regional.

2. Pelabuhan Penyeberangan: Penghubung Regional yang Dikelola oleh BUMN

Pelabuhan Penyeberangan Penajam merupakan satu-satunya pelabuhan dalam kategori ini yang tercatat dalam RIPN dan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelabuhan ini melayani trayek Penajam–Balikpapan melalui pelabuhan Kariangau, yang menjadi jalur utama bagi kendaraan dan penumpang lintas Teluk Balikpapan. Dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry, pelabuhan ini memiliki hirarki sebagai pengumpan regional, menandakan peran strategisnya dalam mendukung mobilitas antarwilayah dan integrasi ekonomi lintas kabupaten/kota.

3. Terminal Umum: Pelabuhan Buluminung sebagai Simpul Logistik

Pelabuhan Buluminung merupakan satu-satunya pelabuhan dalam kategori terminal umum. Tercatat dalam RIPN sebagai pelabuhan pengumpan, pelabuhan ini dikelola bersama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Dinas Perhubungan Kabupaten PPU. Meskipun tidak memiliki trayek spesifik yang tercantum dalam dokumen, pelabuhan ini berfungsi sebagai terminal muatan curah basah dan kering (*shorebass*), yang berperan penting dalam mendukung aktivitas industri dan perdagangan di kawasan pesisir.

Tabel 2. 35 Pelabuhan sungai danau, pelabuhan penyeberangan, dan terminal umum

Pelabuhan Sungai Danau						
No	Data Pelabuhan RIPN	Data Pelabuhan Sesuai RTRW Kab/Kota	Usulan Pelabuhan	Trayek/Lintasan	Pengelola	Hirarki
1	Pelabuhan Speed Boat Penajam	Pelabuhan Speed Boat Penajam	-	Penajam - Balikpapan	Dishub Kab. Penajam Paser Utara	Pengumpan Lokal
2	Pelabuhan Klotok Penajam	-	-	Penajam - Balikpapan	Swasta/Perorangan	Pengumpan Lokal
3	Pelabuhan Maridan	Pelabuhan Maridan	-	Maridan - Balikpapan	Dishub Kab. Penajam Paser Utara	Pengumpan Lokal
4	Pelabuhan Mentawir	-	-	Mentawir - Balikpapan	Swasta/Perorangan	Pengumpan Lokal
5	Pelabuhan Pantai Lango	-	-	Pantai Lango - Balikpapan	Swasta/Perorangan	Pengumpan Lokal
6	Pelabuhan Jenebora	Pelabuhan Jenebora	-	Jenebora - Balikpapan	Swasta/Perorangan	Pengumpan Lokal

Pelabuhan Penyebrangan						
No	Data Pelabuhan RIPN	Data Pelabuhan Sesuai RTRW Kab/Kota	Usulan Pelabuhan	Trayek/Lintasan	Pengelola	Hirarki
1	Pelabuhan Penyeberangan Penajam	Pelabuhan Penyeberangan Penajam	-	Penajam - Balikpapan (Kariangau)	PT. ASDP	Pengumpan Regional

Terminal Umum						
No	Data Pelabuhan RIPN	Data Pelabuhan Sesuai RTRW Kab/Kota	Usulan Pelabuhan	Trayek/Lintasan	Pengelola	Hirarki
1	Pelabuhan Buluminung	Pelabuhan Pengumpan Penajam	-	-	KSOP dan Dishub Kab. Penajam Paser Utara	Pengumpan Shorebass (Curah Basah dan Curah Kering)

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. PPU

Tabel 2. 36 Banyaknya Penumpang Speed Boat dan Kapal Kelotok di Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Bulan	Penumpang Speed Boat Berangkat (Speed Boat Passenger Departure)	Penumpang Speed Boat Tiba (Speed Boat Passenger Arrival)	Penumpang Orang Kapal Klotok Berangkat (Traditional Ships Passenger Departure)	Penumpang Orang Kapal Klotok Tiba (Traditional Ships Passenger Arrival)
Januari	9.301	5.156	20.940	26.158
Februari	9.028	5.374	20.380	24.586
Maret	7.853	5.891	20.520	33.626
April	12.231	3.926	28.220	5.778
Mei	8.106	5.917	19.240	24.273
Juni	8.557	5.667	23.900	28.225
Juli	7.917	5.688	22.660	24.661
Agustus	7.255	5.997	18.466	21.487
September	7.655	5.623	18.660	24.332
Oktober	8.490	7.693	19.840	24.566
November	8.180	6.952	18.980	24.222
Desember	9.610	7.506	24.550	28.596
Jumlah/Total	104.183	71.390	256.356	290.510

Sumber: Dinas Perhubungan, Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah penumpang kapal tradisional jauh lebih besar dibandingkan penumpang *speed boat* sepanjang tahun. Pola fluktuasi terlihat, misalnya pada bulan Maret penumpang kapal tradisional yang tiba mencapai puncaknya dengan 33.626 orang, sedangkan penumpang *speed boat* relatif lebih stabil di kisaran 7.000–9.000 keberangkatan per bulan. Pada bulan April terjadi anomali karena penumpang kapal tradisional yang tiba sangat rendah (hanya 5.778), meskipun keberangkatan justru tinggi (28.220). Secara total, keberangkatan dan kedatangan kapal tradisional mencapai 546.866 penumpang, lebih dari empat kali lipat total penumpang speed boat. Hal ini menegaskan bahwa kapal tradisional masih menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat dibandingkan *speed boat*.

2.3.6.4 Transportasi Darat

Terminal Penajam, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan salah satu fasilitas transportasi darat yang memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah di kawasan pesisir Teluk Balikpapan. Sebagai terminal yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (AKDP), keberadaan Terminal Penajam tidak hanya menjadi titik transit bagi penumpang, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem transportasi regional yang menghubungkan Penajam dengan kota-kota lain di Kalimantan Timur.

Saat ini, Terminal Penajam beroperasi sebagai terminal AKDP dengan cakupan layanan yang mencakup angkutan umum lintas kabupaten dalam provinsi. Dalam rencana pengembangan jangka menengah, terminal ini direncanakan akan ditingkatkan statusnya menjadi terminal tipe B. Perubahan status ini menandakan peralihan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Perhubungan Provinsi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan transportasi publik di wilayah penyangga Ibu Kota Negara.

Sebagai bagian dari upaya revitalisasi, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk renovasi Terminal Penajam pada tahun 2024. Renovasi ini dirancang untuk mengatasi kondisi fisik terminal yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaklayakan, serta untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. Penataan fasilitas akan mencakup perbaikan bangunan, penyediaan ruang tunggu yang layak, penempatan petugas terminal, serta pengaturan zona kendaraan agar lebih tertib dan efisien.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah penumpang umum yang menggunakan Terminal Penajam pada tahun 2014 tercatat total penumpang berangkat dari terminal sejumlah 23.205 jiwa dan tiba di Terminal sejumlah 19.000 Jiwa. Data ini menjadi indikator penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan terminal, baik dari sisi kapasitas layanan maupun dari aspek perencanaan jangka panjang.

Tabel 2. 37 Banyaknya Kendaraan Penumpang Umum yang Berangkat dan Tiba Melalui Terminal Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Bulan	Kendaraan Berangkat	Kendaraan Tiba	Penumpang Berangkat	Penumpang Tiba
Januari	175	138	1.750	1.380
Februari	150	131	1.500	1.310
Maret	176	149	1.760	1.490
April	222	198	2.220	1.980
Mei	191	167	1.910	1.670
Juni	214	193	2.140	1.930
Juli	214	129	2.140	1.290
Agustus	190	143	1.900	1.430
September	197	112	1.970	1.120
Oktober	171	160	1.850	1.510
November	175	135	1.700	1.590
Desember	370	330	2.365	2.300
Jumlah/Total	2.445	1.985	23.205	19.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. PPU

Terminal Penajam merupakan aset strategis dalam sistem transportasi darat Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan rencana peningkatan status kelembagaan, alokasi anggaran renovasi, serta integrasi fungsi sosial-ekonomi, terminal ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi simpul transportasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara dan penguatan konektivitas regional, Terminal Penajam memiliki potensi besar untuk mendukung mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat integrasi antar wilayah.

2.3.6.5 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Kawasan Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 39,40 hektar berdasarkan SK. Bupati No. 593.33/212/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Kelurahan Penajam tersebar di 4 lokasi (Gang Buaya, Pasar Lama, Kerok Laut & Kayu Api) dan Kelurahan Maridan yang terletak di Tanjung Harapan. Selain adanya kawasan kumuh, kondisi perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjukkan dengan masih adanya backlog perumahan pada tahun 2024 sebanyak 2.096 unit. Selain itu, kondisi rumah tidak layak huni juga masih ditemukan sebanyak 1.820 unit pada tahun 2024.

Tabel 2. 38 Jumlah *backlog* perumahan dan rumah tidak layak huni

No	Permasalahan Perumahan	Jumlah Unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tidak Layak Huni	2.091	2.556	2.616	1.820	1.820
2	Backlog Perumahan	10.290	14.198	21.960	21.960	2.096

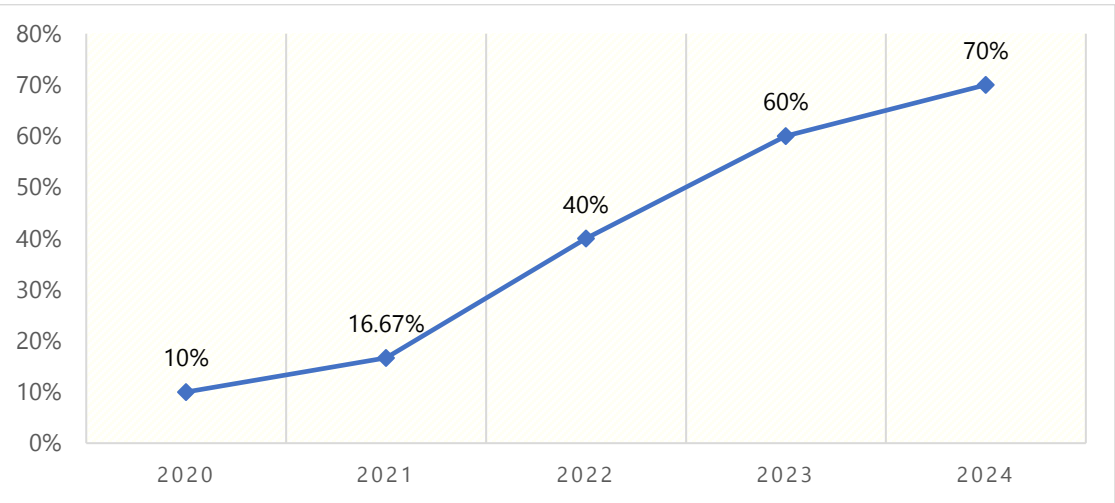
Sumber: DPKPP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Peningkatan angka Backlog perumahan disebabkan oleh rendahnya pembiaayaan sektor perumahan dari pemerintah ataupun swasta sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penilaian RTLH ini didasarkan pada rumah – rumah yang tidak memenuhi standar minimal rumah sehat. Masih ditemukannya RTLH di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi

masyarakat untuk menjangkau perumahan sehat dan letak tempat tinggal yang berada di kawasan kumuh.

2.3.6.6 Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu konsep yang menjadi fokus utama adalah Desa Mandiri. Konsep ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Desa Mandiri diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Lebih lanjut lagi, desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Berikut disajikan capaian dari persentase desa mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 61 Persentase desa mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Tabel 2. 39 Status desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

Status Desa	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berkembang	18	11	3		
Maju	9	14	15	12	9
Mandiri	3	5	12	18	21
Jumlah	30	30	30	30	30

Sumber: Bappelitbangda, 2025

Capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi pembangunan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mana status desa mandiri berpengaruh signifikan terhadap besaran dana desa yang diterima. Desa yang mencapai status mandiri berpotensi menerima alokasi dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.6.7 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Dalam rangka meningkatkan akurasi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, Pemerintah Daerah menempatkan pengukuran kinerja sebagai elemen krusial dalam proses perumusan kebijakan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui pemanfaatan indikator strategis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fisik infrastruktur serta persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Namun demikian, hingga saat penyusunan dokumen RPJMD ini, data baseline yang diperlukan untuk mengukur indeks tersebut belum tersedia secara sistematis dan terstandarisasi. Hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya survei awal secara menyeluruh, keterbatasan untuk instrumen pengukuran, serta belum optimalnya integrasi data lintas sektor yang mendukung penghitungan indeks secara komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk Menyusun data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) sebagai salah satu indikator strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memiliki harapan besar untuk dapat melakukan pemantauan secara lebih akurat dan berkelanjutan terhadap dinamika kualitas infrastruktur yang tersedia, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Indeks ini akan berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dan terstandarisasi dalam menilai efektivitas penyediaan layanan infrastruktur, baik dari aspek aksesibilitas, keandalan, maupun responsivitas terhadap kebutuhan publik.

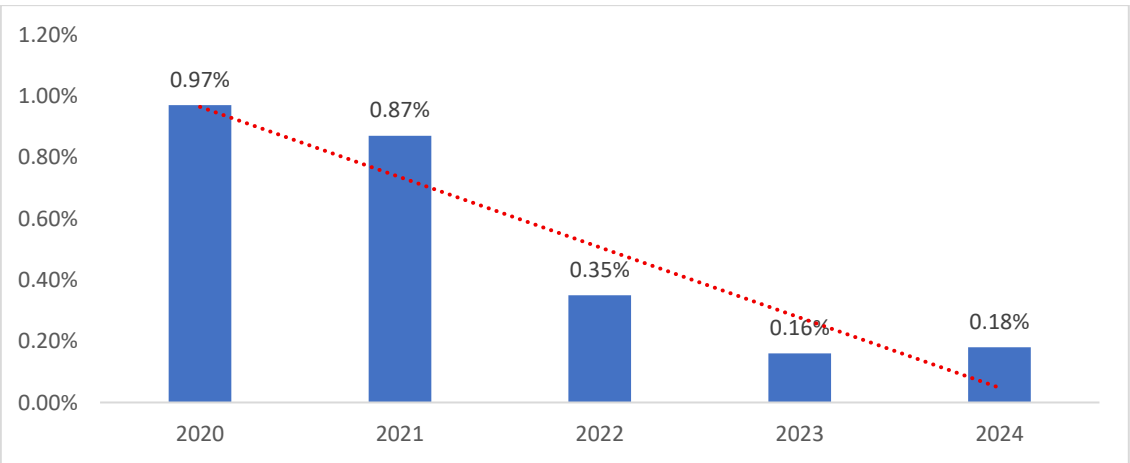
Keberadaan data indeks tersebut juga diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis evidensi, sehingga kebijakan pembangunan yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, data ini akan menjadi landasan penting dalam evaluasi kinerja perangkat daerah, penentuan prioritas program, serta penyusunan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Sub bab ini menjelaskan kondisi stabilitas ekonomi makro Kabupaten Penajam Paser Utara yang di dalamnya tercantum indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi. Gambaran kondisi stabilitas ekonomi makro daerah digunakan untuk melihat sejauh mana stabilitas ekonomi makro daerah dapat mewujudkan kesinambungan fiskal dan menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan.

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Tingginya rasio pajak dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah yang tinggi, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.



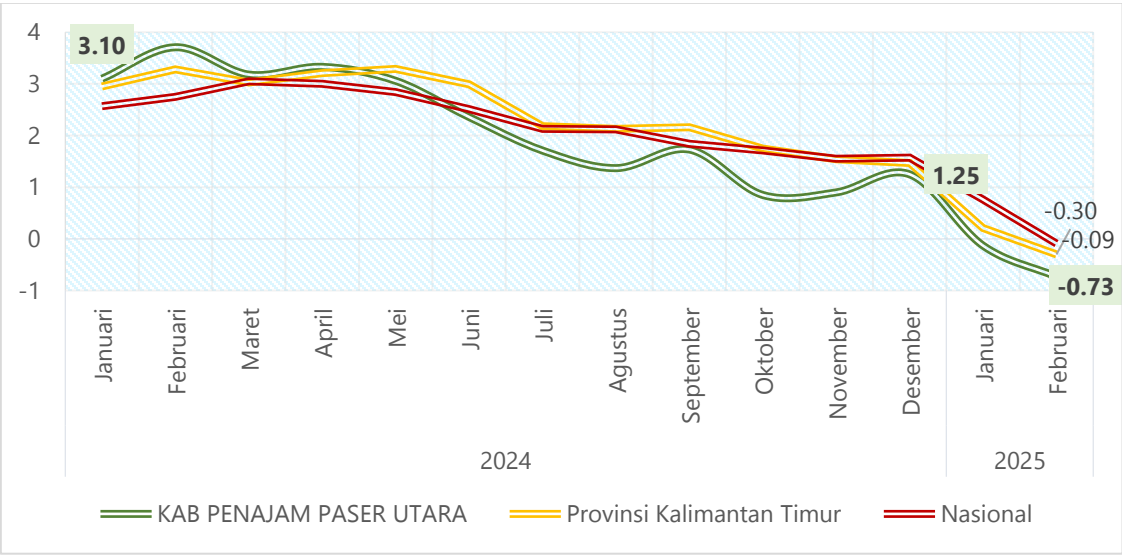
Gambar 2. 62 Rasio pajak terhadap PDRB

Sumber: Bapenda, 2025

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren yang relatif menurun pada kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh tidak berkolerasinya antara pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah yang dibatasi oleh kewenangan pengelolaan pajak di tingkat kabupaten. Apabila pertumbuhan PDRB lebih besar maka Rasio Pajak akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan nilai pajak daerah tinggi maka Rasio Pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga perlu upaya dalam hal mengoptimasi penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah kewenangan kabupaten yang dilakukan, diantaranya dengan meningkatkan penagihan piutang pajak dan digitalisasi layanan yang juga berperan dalam mendorong kepatuhan serta ketaatan pajak.

2.3.7.2 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Untuk mengukur inflasi digunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didapatkan melalui survei biaya hidup. Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri baru menjadi daerah survei pada tahun 2023 sehingga inflasi yang tersedia baru terdapat pada tahun 2024 hingga saat ini. Berikut adalah tingkat inflasi (y-o-y) Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 63 Inflasi Tahunan (Y-to-Y) Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Pergerakan harga barang dan jasa secara umum di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional hingga Desember 2024. Kenaikan harga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2024 hingga akhirnya

terdeflasi pada bulan Januari dan Februari 2025. Sepanjang tahun 2024, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi *y-o-y* pada bulan Desember 2024 yaitu sebesar 0,63 persen, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,23 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,16 persen.

Memasuki tahun 2025, pergerakan harga barang dan jasa terdeflasi ke angka 0,73 persen. Deflasi yang terjadi didorong oleh turunnya harga tarif listrik sejalan dengan kebijakan diskon tarif listrik yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 13,16 persen pada Februari 2025. Penurunan indeks juga ditunjukkan oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,21 persen.

Rendahnya tingkat inflasi, khususnya di bawah sasaran inflasi nasional, dapat menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung mengurangi konsumsi sehingga permintaan di pasar tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan menyebabkan kenaikan harga yang tinggi. Turunnya konsumsi umumnya terjadi ketika terdapat perubahan tingkat pendapatan. Penurunan tingkat pendapatan dapat menyebabkan penurunan daya beli sehingga masyarakat cenderung menahan keinginan untuk belanja. Namun, apabila melihat data konsumsi secara umum, deflasi yang terjadi pada awal tahun 2025 tidak disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat melainkan pemberian diskon tarif listrik. Meskipun demikian, apabila inflasi rendah bahkan terdeflasi secara terus menerus bahkan setelah pemberian diskon tarif listrik berakhir, maka kondisi tersebut dapat memberikan sinyal adanya pelemahan daya beli masyarakat yang jika dibiarkan dapat melemahkan perekonomian daerah ke depannya.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan, semakin tinggi potensi meraih keberhasilan pembangunan daerah. Adapun indikator dalam menganalisis aspek pelayanan umum mencakup, Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Hukum Berkeadilan, Keamanan

Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial, serta Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif adalah program yang mendorong kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menjadi lebih baik. transformasi ini selanjutnya akan menjadi fondasi utama dalam menopang agenda pembangunan yang lainnya. Indikator yang mencerminkan capaian kinerja dari regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencakup indeks reformasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, dan indeks integritas nasional.

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

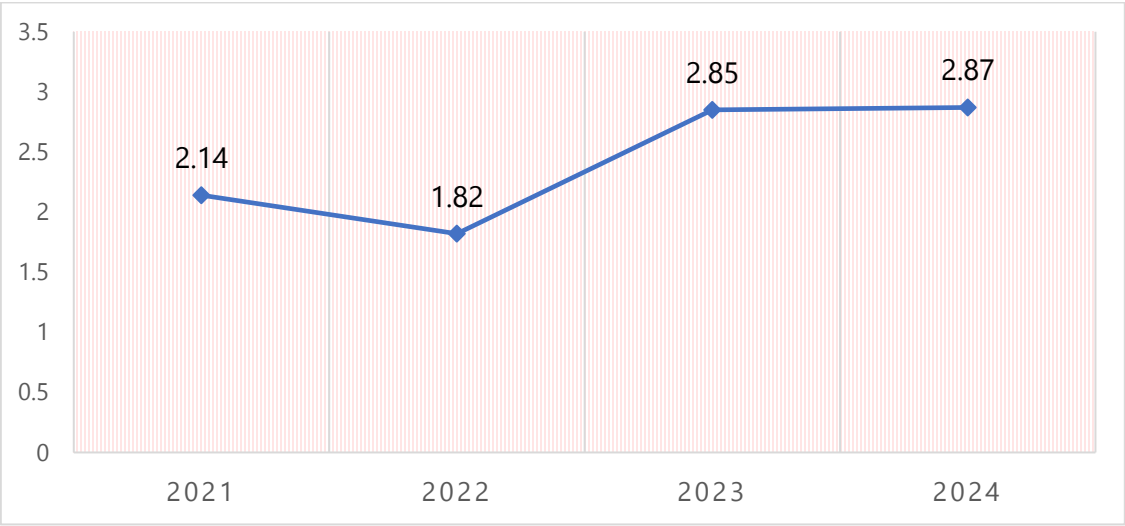
Indeks reformasi hukum (IRH) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel dan sesuai dengan target reformasi birokrasi. IRH juga berfokus pada penguatan sistem regulasi nasional dan daerah. Dengan demikian, IRH menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola hukum yang lebih merata. Capaian IRH di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 87,96. Pengukuran tersebut pertama kalinya dilaksanakan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, dan memiliki kategori capaian sangat baik. Kondisi ini tentu menjadi capaian kinerja yang baik bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk dapat meningkatkan capaian IRH, beberapa upaya yang perlu diperkuat diantaranya, memperkuat koordinasi antara lembaga terkait untuk harmonisasi regulasi, mendorong reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan, menyederhanakan regulasi pada setiap jenjang peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dikenal juga dengan singkatan SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencapai proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi berkala guna menilai kemajuan yang dicapai dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan nilai Indeks SPBE untuk menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE. Untuk memastikan bahwa penilaian tersebut dilakukan dengan efektif dan objektif, diperlukan pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Evaluasi ini minimal mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE yang diselenggarakan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 2. 64 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2020 - 2023

Sumber: Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

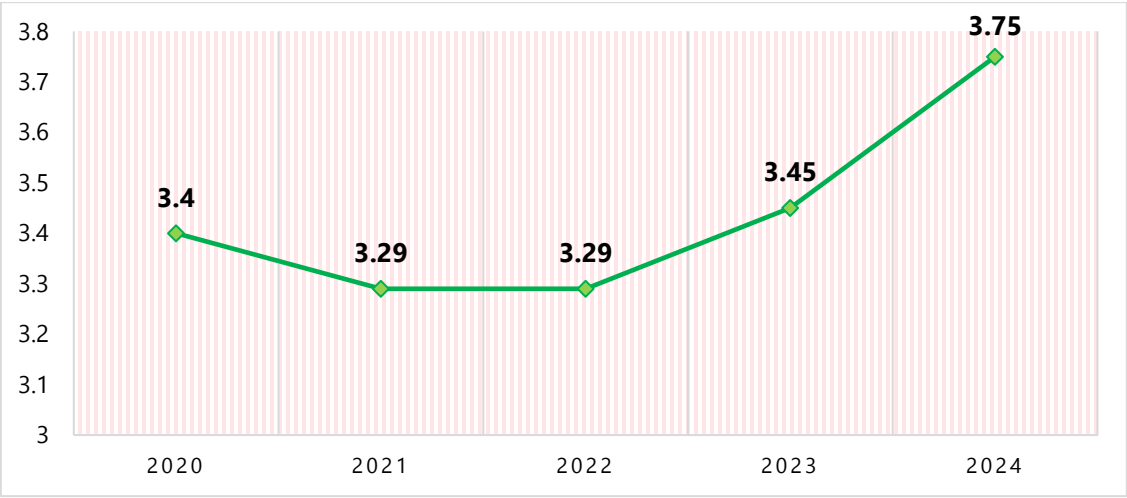
Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai indeks 2,87 (Baik), mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh partisipasi semua perangkat daerah dalam sistem pemerintahan yang menyukkseskan implementasi SPBE. Selain itu, dukungan dari pimpinan daerah dalam kebijakan dan penerapan SPBE juga berperan penting. Untuk masa depan, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara optimis dapat mencapai nilai yang lebih baik.

Dalam hal implementasi teknologi, Tanda Tangan Elektronik (TTE) telah diterapkan oleh pejabat pemerintah hingga tingkat UPTD. Selanjutnya, pada awal Februari 2024, E-Office diluncurkan untuk proses administrasi pemerintahan yang lebih efisien. Keberadaan E-Office akan mengintegrasikan berbagai aplikasi di

lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, mempermudah dan mempercepat proses administrasi secara keseluruhan.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan instrumen untuk menilai kualitas pelayanan publik. Adapun Kualitas pelayanan publik dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, seperti, bukti fisik (*tangible*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Standar pelayanan publik yang baik disusun dengan memperhatikan prinsip, sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan. Berikut disajikan capaian dari IPP di Kabupaten Penajam Paser Utara.



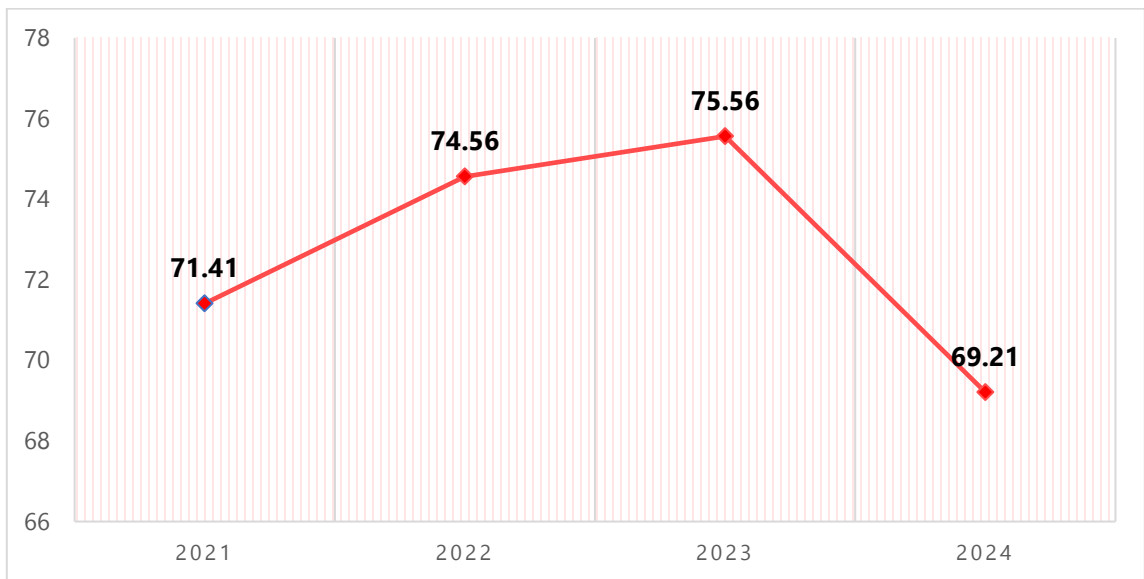
Gambar 2. 65 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Capaian dari IPP di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Perbaikan tata kelola pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan, dan inovasi pelayanan menjadi beberapa kondisi yang perlu semakin diperkuat, untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan terwujudnya kualitas pelayanan publik yang semakin baik di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diharapkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan, dan dapat menjadi memanifestasi nilai-nilai luhur pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, serta keadilan.

2.4.1.4 Indeks integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Tujuan dari pengukuran indikator ini diharapkan dapat mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK. Berikut disajikan capaian indeks integritas nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.



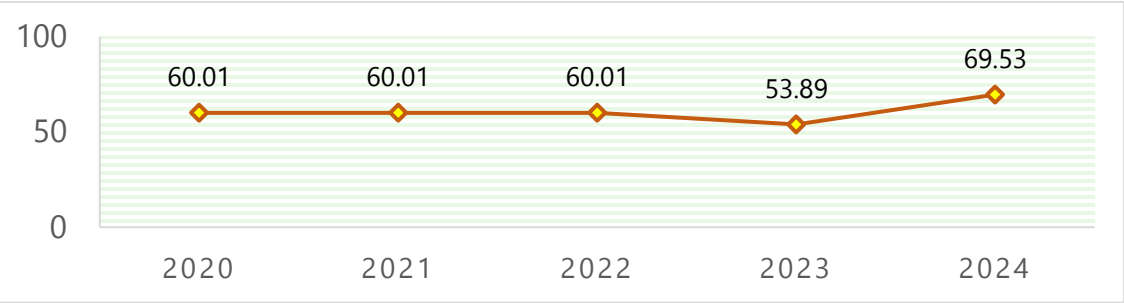
Gambar 2. 66 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024

Sumber: Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Pengukuran menunjukkan bahwa terdapat penurunan capaian tahun terakhir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian 69,21 termasuk dalam kategori capaian rentan (merah), yang mana di tahun sebelumnya masih memiliki kategori waspada. Beberapa indikasi yang menjadi penyebab penurunan capaian pada indikator ini diantaranya, tingginya ongkos politik, baik untuk pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), lemahnya pendanaan partai politik, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang belum optimal.

Masih memiliki keterkaitan dengan indeks integritas nasional, indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan ukuran efektivitas dari reformasi birokrasi di lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi sendiri adalah inisiatif untuk melakukan perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

IRB mencerminkan sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan telah berlangsung pada lembaga-lembaga pemerintah dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam manajemen tata pemerintahan, transparansi tanpa korupsi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai IRB, secara proporsional menunjukkan tingkat keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan, pencegahan korupsi, dan penyediaan layanan publik yang bermutu.



Gambar 2. 67 Nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, 2025

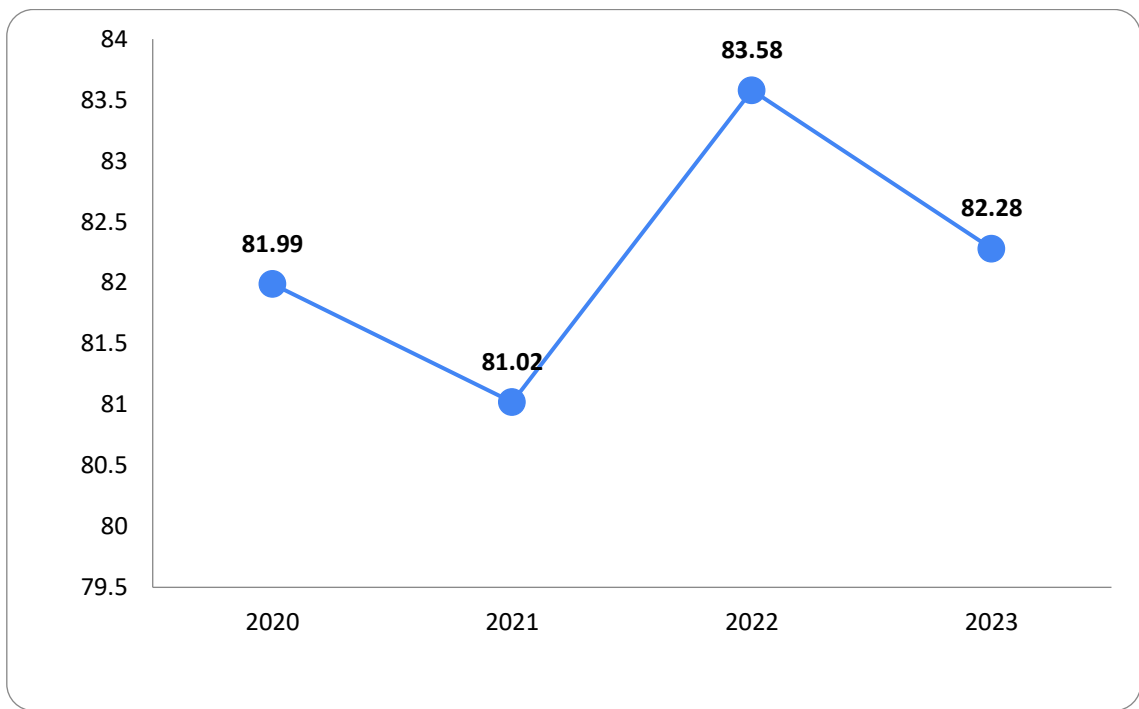
Berdasarkan data dari Kementerian PAN RB, IRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 hingga 2022 sebesar 60,01. Capaian IRB tersebut dapat dikatakan pertumbuhannya mengalami stagnasi, dan bahkan turun menjadi 53,89 pada tahun 2023 dengan predikat kategori “CC” atau Cukup. Adapun capaian terakhir, mengalami peningkatan 15,64 poin di Tahun 2024. Data series mengenai penilaian IRB menjadi fokus utama pemerintah kabupaten Penajam Utara yang bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penyusunan kembali sistem penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi hal yang penting dalam merubah kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi merupakan aspek yang menggambarkan kondusifitas daerah. Aspek ini dinilai dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Indeks Demokrasi Daerah. Adapun kinerja masing-masing indikator sebagai berikut.

2.3.7.1 Indeks Demokrasi

Perhitungan Indeks Demokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan proksi angka dari Provinsi Kalimantan Timur. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia secara umum, dan di masing-masing wilayah secara khusus. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek yang terdiri dari 11 variabel dan terbagi menjadi 28 indikator. Tiga aspek utama pembentuk IDI adalah: aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Capaian Indeks Demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023 disajikan sebagai berikut ini.



Gambar 2. 68 Indeks Demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023

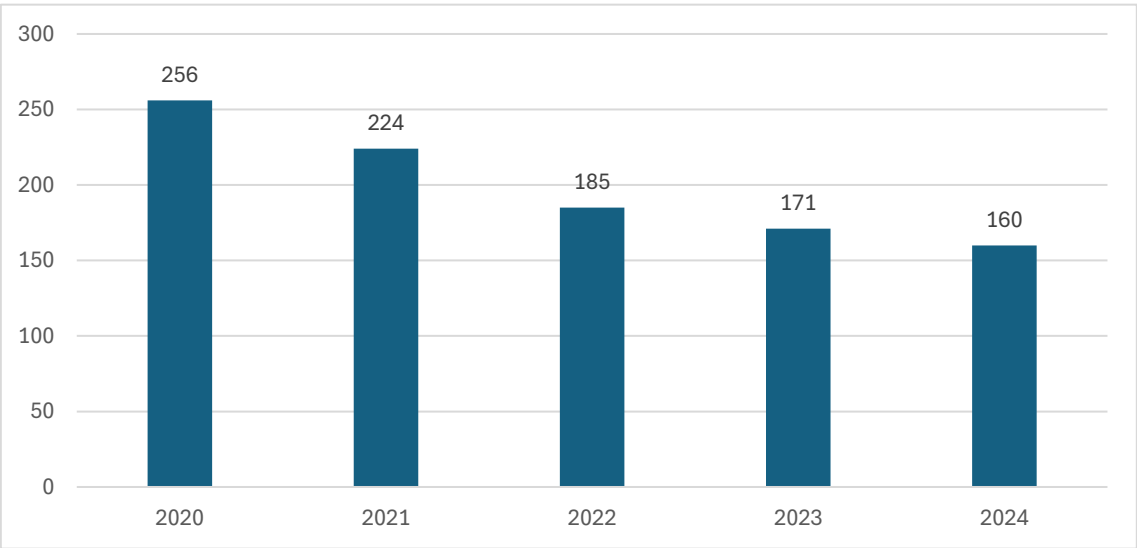
Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Timur (2024)*

Kualitas demokrasi dengan berbagai program dan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat serta penguatan lembaga demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Diantaranya ditunjukkan dengan kenaikan partisipasi dalam Pemilu untuk Pilpres dan Pilkada di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni 71,34% (Pilkada 2018) menjadi 79,70% (Pilkada 2024), dan ketika Pilpres yakni 79,63% (2019) menjadi 81,70% (2024). Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan partisipasi politik dan kebutuhan akan peningkatan edukasi politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah

dan masyarakat diperlukan, dengan harapan kualitas demokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus membaik di masa mendatang.

2.3.7.2 Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Rasa aman juga menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan di suatu wilayah. Meskipun begitu, kondisi yang menunjukkan rasa aman memerlukan instrumen yang dapat mengukur dan memberikan gambaran kondisi keamanan terkini.



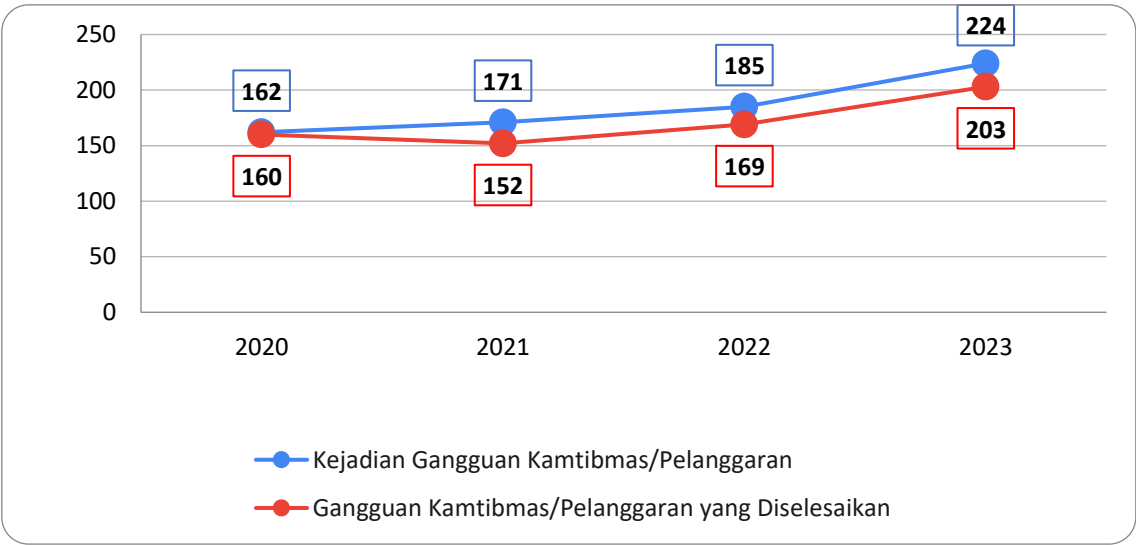
Gambar 2. 69 Kejadian gangguan Kantibmas / pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023

Sumber: *Polres Kabupaten Penajam Paser Utara*

Kondisi keamanan diantaranya direpresentasikan dari kejadian kriminalitas di suatu daerah. Kejadian kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan pada tahun 2024. Angka penurunan kejadian kriminalitas tersebut cukup signifikan dibandingkan dari tahun 2020, yang mana pada tahun tersebut memiliki angka kejadian tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinamika kejadian kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara tentu dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi fisik, ekonomi, maupun politik. Keberadaan sebuah instrumen yang sesuai dengan kondisi aktual menjadi sangat penting dalam pemberian rekomendasi bagi perumusan intervensi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penanganan penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan rasa aman.

2.3.7.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Kondusivitas iklim investasi perlu diciptakan untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondusivitas daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan investor untuk menanamkan modal ke daerah. Kondusivitas akan memengaruhi tingkat pembiayaan dan kemudahan untuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan terkait modal yang ditanamkan di daerah. Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran kondusivitas daerah adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas seringkali memiliki korelasi dengan tingkat kondusivitas iklim investasi di berbagai daerah karena akan mempengaruhi besarnya biaya keamanan, biaya transportasi, bahkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Data mengenai angka kriminalitas dalam dokumen Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, direpresentasikan melalui data jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut merupakan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023.



Gambar 2. 70 Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)/Pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023

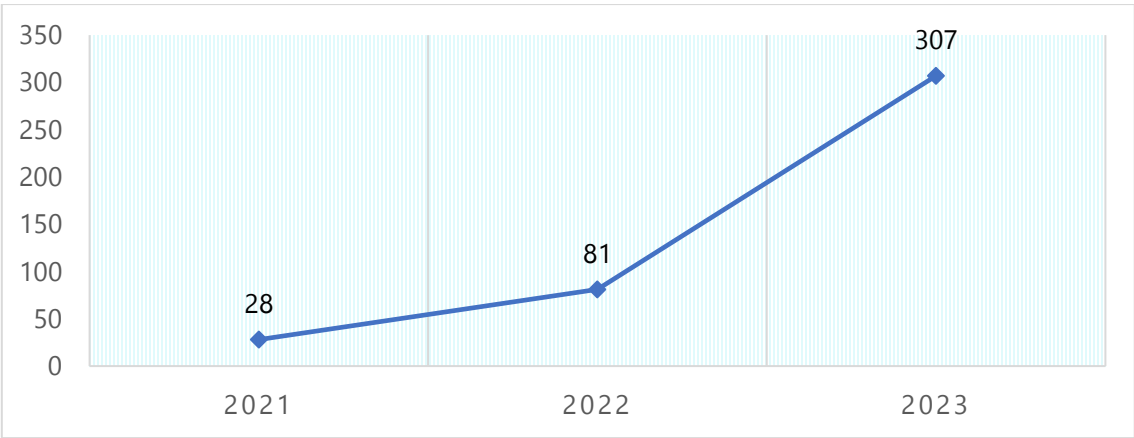
Sumber: BPS

Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) / pelanggaran sebagai salah satu proksi yang menilai kondusivitas iklim investasi daerah. Polres Penajam Paser Utara melaporkan bahwa jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser

Utara mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023. Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran yang dilaporkan menyentuh angka tertinggi pada tahun 2023, yakni mencapai 224 kasus yang didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 75 kasus. Cukup tingginya jumlah kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara juga disertai dengan penyelesaian yang cukup optimal, yakni secara rata-rata sebesar 93,68 persen. Bahkan pada tahun 2020, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran yang diselesaikan lebih tinggi dibandingkan jumlah kejadian, yakni selisih 2 kasus. Hal itu menunjukkan bahwa bahwa penegakan hukum di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin baik dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu untuk dioptimalkan agar dapat meningkatkan kondusivitas iklim daerah.

2.3.7.4 Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah upaya untuk menegakkan peraturan daerah yang berlaku. Penegakan peraturan daerah (Perda) dapat dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda. Berikut disajikan penyelesaian kasus dalam penegakan Perda di kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 71 Penyelesaian penegakan Perda di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024

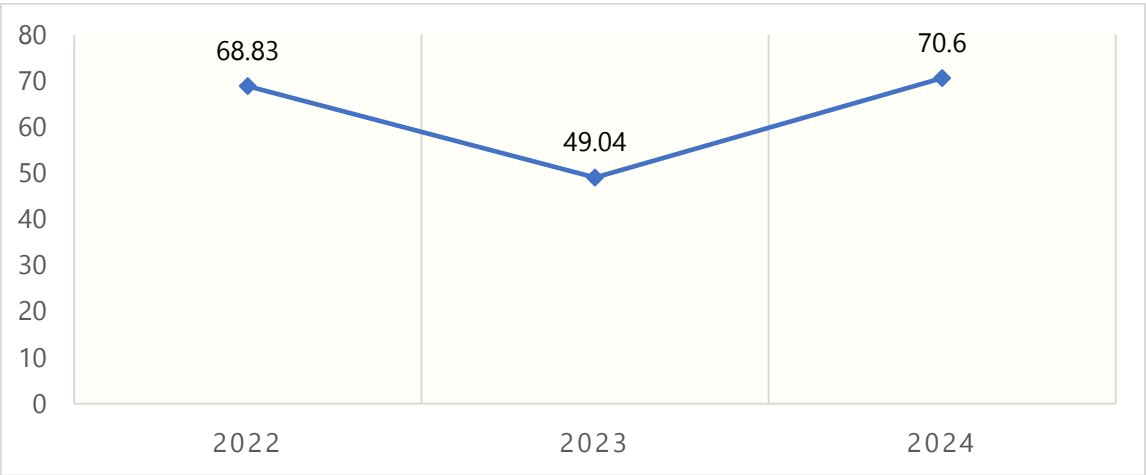
Sumber: *Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Ppaser Utara, 2025*

Terdapat peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dalam penegakan Perda selama tiga tahun terakhir. Semakin meningkatnya jumlah kasus penyelesaian penegakan Perda terhadap jumlah kasus pelanggaran Perda menunjukkan semakin

seriusnya pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, diharapkan kondisi wilayah menjadi semakin stabil dan kondusif, dan dapat memberikan dampak positif pada aspek lainnya, seperti bagi kondisi iklim investasi yang semakin baik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.7.5 Persentase Capaian Aksi HAM

Program terkait kabupaten/kota peduli HAM ditujukan untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwasannya Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Artinya, HAM wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Berikut capaian dari aksi HAM di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 72 Capaian aksi HAM di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024

Sumber: *Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025*

Capaian terakhir menunjukkan terdapat peningkatan skor dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen dan upaya serius dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Capaian tersebut tentunya merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat yang turut berperan dalam mewujudkan kebijakan dan program yang berfokus pada HAM. Namun demikian, capaian tersebut masih diperlukan upaya peningkatannya sekaligus dalam memperkuat pemenuhan HAM di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah (BRIN, 2023). Berikut adalah data IDSD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023.

Tabel 2. 40 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Indeks daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berada di posisi ke lima jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Skor indeks daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu seperti infrastruktur, pasar produk, ukura pasar, kapabilitas inovasi, pasar tenaga kerja dan beberapa faktor pengungkit daya saing daerah lainnya.

2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kunci (IKK) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan dalam bentuk rata-rata nilai ketercapaian indikator kinerja terhadap target.

Urusan	Indikator	Capaian 2024
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	38,70
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	58,42
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,62
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29,57
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,15
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,78
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,33
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	86,05
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	85,40
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	76,41
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS	0,00
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	14,02

Urusan	Indikator	Capaian 2024
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	97,08
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,69
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	33,38
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	53,28
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	99,58
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0
3	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,21
5	 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100

Urusan	Indikator	Capaian 2024
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,4
Sosial		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00
2	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,15
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	115,66
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	4,20
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	53,48

Urusan	Indikator	Capaian 2024
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15,22
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	24,67
Pangan		
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	383,31
Pertanahan		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	59,62
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100
Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	71,1
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	65,18
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-50
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Perekaman KTP elektronik	99,62

Urusan	Indikator	Capaian 2024
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	71,13
3	Kepemilikan akta kelahiran	96,94
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	28,57
Pemberdayaan masyarakat dan desa		
1`	Persentase pengentasan desa tertinggal	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2201
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	99,19
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,89
Perhubungan		
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	77
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,16
Komunikasi dan Informatika		
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	331,97
Koperasi, usaha kecil dan menengah		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	36,47
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100

Urusan	Indikator	Capaian 2024
Penanaman Modal		
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	56,56
Kepemudaan dan Olahraga		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 	9,06
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,34
3	Peningkatan prestasi olahraga	53
Statistik		
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
Persandian		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0
Kebudayaan		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	0
Perpustakaan		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,41
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	79,23
Kearsipan		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	16,67
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	15
Urusan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan		

Urusan	Indikator	Capaian 2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	100
Pariwisata		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-20,8
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	6,5
3	Tingkat hunian akomodasi	45,8
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,3
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,4
Pertanian		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	384,63
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0
Kehutanan		
	-	-
Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0
Perdagangan		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	72,51
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	8,98
Perindustrian		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	65,17

Urusan	Indikator	Capaian 2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	93,68
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	50,99
Kepegawaian		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,74
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,77
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,89
Manajemen Keuangan		
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	20,57
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	22,71
3	Manajemen Aset	4,00
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,10
Transparansi dan Partisipasi Publik		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	104,725
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100

Sumber: LPPD 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara

Evaluasi capaian kinerja daerah ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tingkat keberhasilan kepemimpinan kepala daerah secara menyeluruh. Capaian ini menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan serta

efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Sub Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya yaitu tahun 2020-2024 dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan pada tahun 2025-2029. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Gambaran keuangan daerah bertujuan menentukan kerangka pendanaan melalui identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja dan pengeluaran daerah agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.5.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Gambaran ringkas keuangan daerah menggambarkan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD pada periode yang lalu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2020-2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan tentang jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2020-2024. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan rata-rata

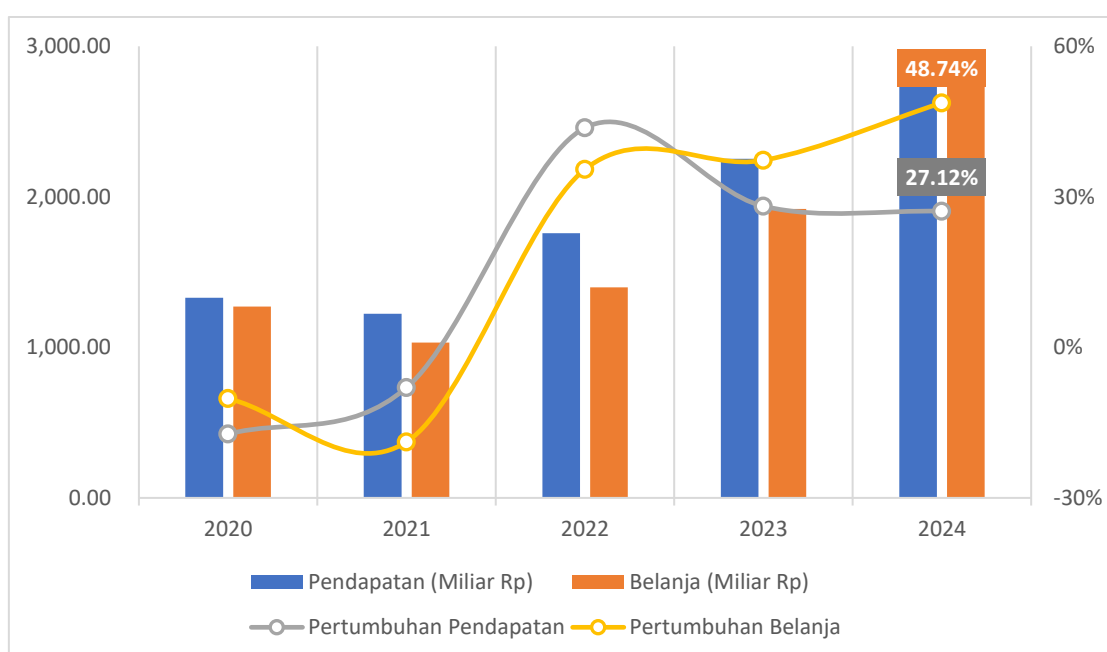
pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 43 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI APBD					Rata ² Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	1.329.210.020.255,99	1.222.723.310.615,79	1.757.844.430.423,32	2.252.747.559.375,91	2.863.178.174.299,59	14,75%
Pendapatan Asli Daerah	88.135.007.244,26	87.892.163.416,35	125.386.713.912,32	124.568.296.250,34	177.601.844.364,16	15,72%
Pendapatan Transfer	1.192.098.409.649,00	1.105.167.350.576,00	1.599.731.712.080,00	2.114.032.092.302,57	2.620.671.236.277,74	14,72%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48.976.603.362,73	29.663.796.623,44	32.726.004.431,00	13.720.879.979,00	64.905.093.657,69	79,11%
BELANJA	1.271.057.892.766,71	1.031.791.072.703,08	1.397.980.522.869,20	1.919.251.963.456,52	2.854.757.090.800,22	18,50%
Belanja Operasi	851.876.944.898,81	790.298.231.505,26	1.053.409.040.915,94	1.291.666.216.905,03	1.678.853.567.828,44	15,47%
Belanja Modal	361.340.242.742,90	235.384.436.356,82	342.529.909.461,26	612.173.752.479,49	1.175.765.469.045,78	29,42%
Belanja Tidak Terduga	57.840.705.125,00	6.108.404.841,00	2.041.572.492,00	15.411.994.072,00	138.053.926,00	696,18%
Belanja Transfer	116.293.066.415,00	96.521.729.694,00	144.145.459.332,00	165.434.004.052,00	168.065.080.191,00	5,87%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.387.350.959.181,71	1.128.312.802.397,08	1.542.125.982.201,20	2.084.685.967.508,52	3.022.822.170.991,22	17,43%
Surplus/Defisit	-58.140.938.925,72	94.410.508.218,71	215.718.448.222,12	167.635.301.023,39	(159.643.996.691,63)	-114,82%
PEMBIAYAAN	71.357.653.808,12	-52.731.291.847,60	-28.086.128.178,89	132.501.644.403,23	245.432.560.630,62	-130,27%
Penerimaan Pembiayaan	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40	41.679.216.371,11	187.632.320.043,23	300.563.236.270,62	109,91%
Pengeluaran Pembiayaan	21.834.725.842,00	65.948.006.730,00	69.765.344.550,00	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	28,51%
Pembiayaan Netto	71.357.653.808,12	-52.731.291.847,60	-28.086.128.178,89	132.501.644.403,23	245.432.560.630,62	-130,27%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	13.216.714.882,40	41.679.216.371,11	187.632.320.043,23	300.136.945.426,62	85.788.563.938,99	93,65%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 14,75 persen per tahun sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah rata-rata 18,50 persen per tahun, dan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan mencapai minus 130,27 persen per tahun. Pertumbuhan belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan adanya ketidakseimbangan keuangan daerah yang berdampak pada kondisi defisit anggaran yang selanjutnya dapat menimbulkan peningkatan utang daerah.

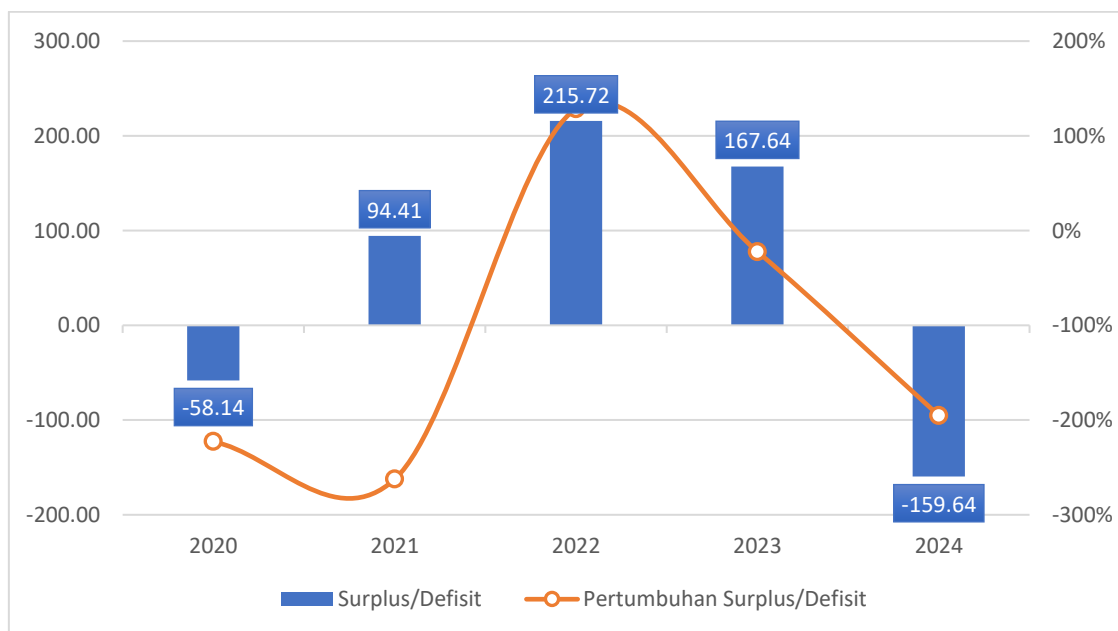


Gambar 2. 73 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025

Surplus anggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada periode 2021-2023. Pertumbuhan surplus tertinggi tercapai pada tahun 2022 dengan surplus mencapai Rp215,72 miliar. Kondisi keuangan yang surplus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah dengan efisien. Surplus yang berkelanjutan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi strategis baik dalam infrastruktur maupun bidang lain yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang, serta

mengakumulasikan dana cadangan atau tabungan yang dapat digunakan untuk investasi.



Gambar 2. 74 Surplus/Defisit Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025

Surplus anggaran yang dialami pada tahun 2021-2023 tidak dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Defisit anggaran kembali terjadi pada tahun 2024 di mana komponen belanja daerah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah. Seluruh pos belanja tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, baik pada komponen belanja operasi maupun belanja modal. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran tahun 2024 sebesar 159,64 miliar rupiah dari yang sebelumnya mengalami surplus anggaran sebesar 167,64 miliar rupiah. Analisis dari setiap komponen anggaran dijabarkan pada sub bagian berikut ini.

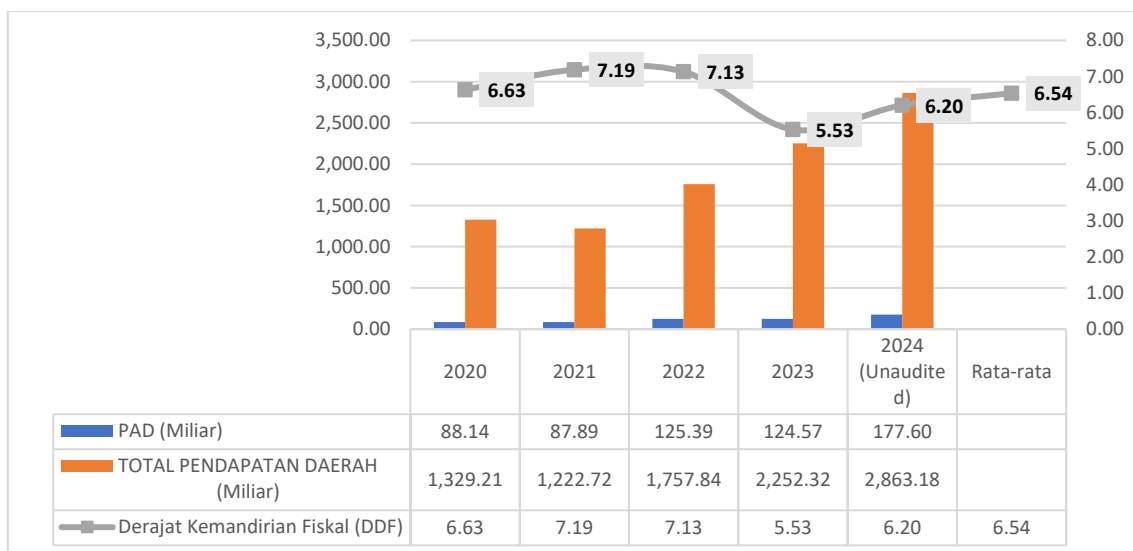
2.5.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dalam

struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, kontribusi pendapatan transfer merupakan yang tertinggi mencapai 91,29 persen per tahun pada periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Pemerintah Daerah dalam membangun Penajam Paser Utara sebagian besar masih ditopang oleh dana transfer.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang ($DDF \leq 10,00$); (2) Kurang ($10,00 < DDF \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < DDF \leq 30,00$); (4) Cukup Baik ($30,00 < DDF \leq 40,00$); (5) Baik ($40,00 < DDF \leq 50,00$); dan (6) Sangat Baik ($DDF > 50,00$). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024.



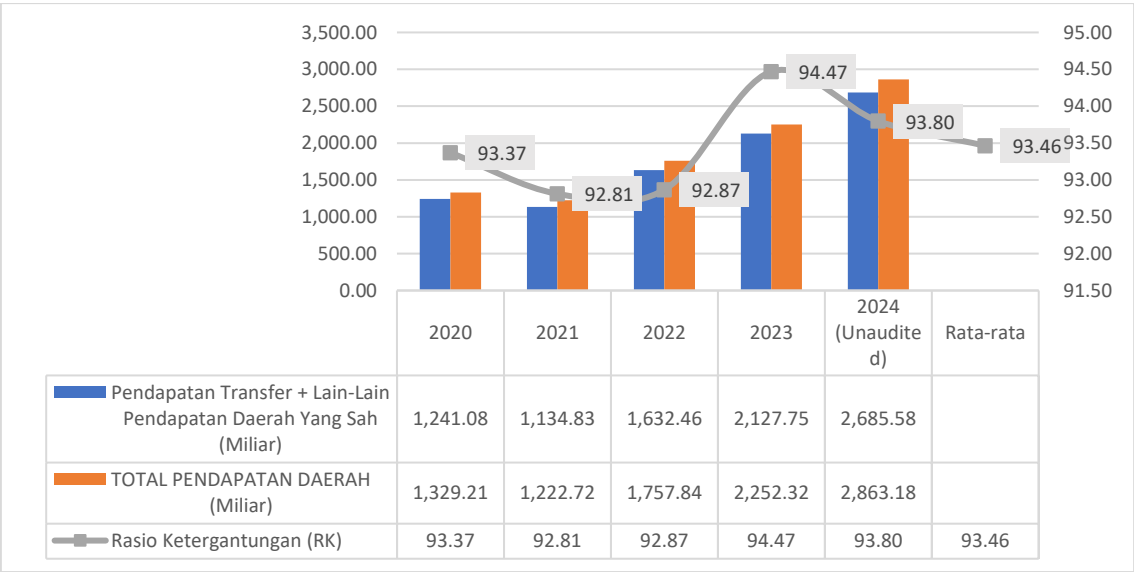
Gambar 2. 75 Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025

Derajat kemandirian fiskal Kabupaten PPU masuk dalam kategori “Sangat Kurang” ($DDF \leq 10,00$) dengan rata-rata sebesar 6,54. Kondisi ini menjelaskan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi untuk membiayai kebutuhannya. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara belum mencukupi kebutuhannya. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya basis ekonomi lokal, kurangnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengoptimalkan penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset daerah, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar anggaran dapat digunakan lebih produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah

terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah ($RK \leq 10,00$); (2) Rendah ($10,00 < RK \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < RK \leq 30,00$); (4) Cukup Tinggi ($30,00 < RK \leq 40,00$); (5) Tinggi ($40,00 < RK \leq 50,00$); dan (6) Sangat Tinggi ($RK > 50,00$). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Penjam Paser 2020-2024.



Gambar 2. 76 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020-2024 tergolong “Sangat Tinggi” ($RK > 50,00$) dengan rata-rata sebesar 93,46. Hal ini menjelaskan bahwa lebih dari 90 persen pendanaan Pembangunan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan/atau provinsi, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas. Tingginya ketergantungan fiskal mencerminkan rendahnya kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya sektor ekonomi produktif, kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, serta minimnya inovasi dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Ketergantungan yang

berlebihan ini juga berisiko terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi alokasi dana untuk daerah.

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan ini, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan PAD. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, penguatan sektor ekonomi lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Penajam Paser Utara dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen pendapatan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat diikuti PAD, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.

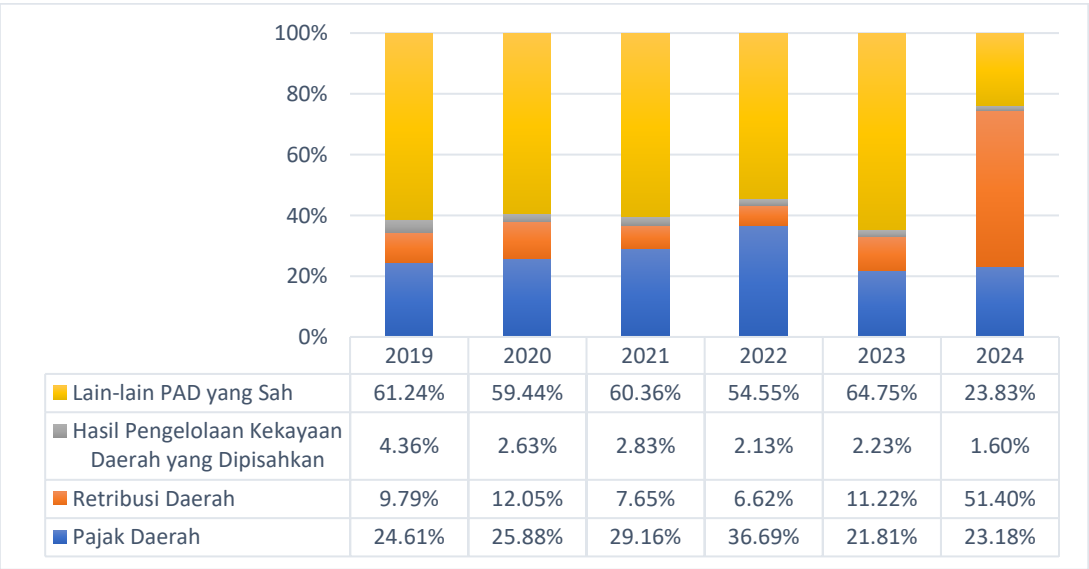
Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	101,31	88,14	(12,36)	(5,73)	87,00
2021	147,99	87,89	46,08	(0,28)	59,39
2022	93,78	125,39	(36,63)	42,66	133,71
2023	97,11	124,57	3,55	(0,65)	128,28
2024	145,21	177,60	49,53	42,57	122,31
Rata-rata			10,03	15,72	106,14

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024, mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 15,72 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 106,14 persen. Pertumbuhan realisasi PAD berfluktuasi cukup tajam dengan pertumbuhan tertinggi tercapai pada tahun 2022 mencapai 42,66 persen lalu berkontraksi ke angka 0,65 persen pada tahun 2023 lalu kembali tumbuh melesat mencapai 42,57 persen dengan nilai PAD sebesar Rp 177,60 miliar pada tahun 2024.

Terkait dengan realisasi capaian PAD, berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 77 Proporsi komponen PAD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025

Dari gambar di atas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2020-2024, penerimaan PAD terbesar bersumber dari lain-lain PAD yang sah sebesar 52,59 persen per tahun. Sedangkan pajak daerah sebesar 27,34 persen per tahun, dan Retribusi Daerah dan HPKD yang dipisahkan masing-masing sebesar 17,79 persen dan 2,28 persen. Tingginya kontribusi lain-lain pendapatan yang sah mencerminkan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Diperlukan pengawasan secara periodik pada lain-lain pendapatan supaya tidak memberatkan sektor tertentu seperti sektor pajak dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pajak daerah memegang peranan penting dalam skema redistribusi pendapatan di daerah. Selain itu, potensi pajak di daerah cukup besar seiring dengan pembangunan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara. Perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	24,40	22,81	34,05	(0,86)	93,47
2021	52,11	25,63	113,56	12,36	49,18
2022	38,47	46,01	(26,16)	79,53	119,59
2023	26,31	27,16	(31,62)	(40,96)	103,25
2024	49,50	41,16	88,14	51,54	83,16
Rata-rata			35,59	20,32	89,73

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan dengan tren positif setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 35,59 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,73 persen. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 79,53 persen.

Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan realisasi BPHTB yang mencapai 329,26 persen dibandingkan tahun 2021 yang berkontribusi hingga 55,60 persen terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2022. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2023 di mana realisasi pajak mengalami penurunan hingga 40,96 persen. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Rp25,58 miliar menjadi Rp6,18 miliar pada tahun 2023.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Pajak Daerah menunjukkan bahwa target Pajak Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 35,59 persen dari realisasi Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 20,32 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang optimis.

Sumber PAD Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara selain pajak daerah adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	13,83	10,62	115,26	16,03	76,76
2021	13,43	6,73	(2,89)	(36,65)	50,08
2022	9,21	8,31	(31,40)	23,50	90,15
2023	10,74	13,97	16,51	68,19	130,14
2024	74,03	91,28	589,60	553,35	123,30
Rata-rata			137,42	124,88	94,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, realisasi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung berfluktuasi. Realisasi pertumbuhan retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 553,35 persen. Peningkatan pertumbuhan tertinggi dikarenakan meningkatnya pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar 1438,85 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp 5,15 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp78,94 miliar pada tahun 2024. Pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan di RSUD menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 71,92 persen terhadap total pendapatan retribusi daerah. Pertumbuhan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar minus 36,65 persen. Rendahnya pertumbuhan dikarenakan menurunnya realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar minus 57,21 persen dari Rp7,04 miliar menjadi Rp3,01 miliar. Meskipun sempat mengalami penurunan, pendapatan retribusi daerah terus menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022 hingga mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024.

Rata-rata pertumbuhan target dan realisasi Retribusi Daerah menunjukkan target Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 137,42 persen dari realisasi Retribusi Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 124,88 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang relatif optimis.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,79 persen per tahun terhadap PAD. Retribusi ini mencakup penerimaan dari pelayanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke dalam jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang mencakup: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

2. Retribusi Jasa Usaha, yang mencakup: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,28 persen per tahun terhadap PAD pada periode 2020-2024. Kontribusi tersebut diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri atas Bank BPD Kaltim Cabang Penajam, Perumda Air Minum Danum Taka, Perumda Penajam Benuo Taka Energi, dan Perumda Benuo Taka. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	4,28	2,32	(15,12)	(43,14)	54,20
2021	18,08	2,49	322,58	7,28	13,76
2022	2,32	2,67	(87,17)	7,41	115,22
2023	2,32	2,77	0,00	3,74	119,53
2024	2,67	2,84	15,22	2,35	106,18

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Rata-rata			47,10	(4,47)	81,78

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,

Olah Data 2025

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 4,47 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,41 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,14 persen. Sementara itu, dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 81,78 persen selama kurun waktu 2020-2024. Tahun 2021 merupakan capaian kinerja terendah dibandingkan tahun lainnya yaitu 13,76 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sedikit lebih tinggi, yakni 47,10 persen dari realisasi yang rata-rata tumbuh sebesar minus 4,47 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha lain untuk dapat meningkatkan realisasinya.

Untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 52,61 persen per tahun. Kontribusi tersebut diperoleh dari Hasil Penjualan dan pemanfaatan BMD

yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda (Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah); Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lainnya. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	58,80	52,39	(31,58)	(8,50)	89,10
2021	64,37	53,05	9,48	1,26	82,42
2022	43,77	68,40	(32,00)	28,93	156,27
2023	57,75	80,66	31,93	17,93	139,68
2024	19,01	42,32	(67,08)	(47,53)	222,64
Rata-rata			(17,85)	(1,58)	138,02

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024

Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2020-2024 memperlihatkan perkembangan yang kurang baik dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 1,58 persen. Rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 138,02 persen dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 222,64 persen, sedangkan untuk capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 82,42 persen dari target proyeksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 17,85 persen dan realisasi pertumbuhan rata-rata sebesar minus 1,58 persen. Hal Ini mengindikasikan penetapan target cenderung konservatif untuk mengantisipasi penurunan dalam pendapatan dan ke depannya diperlukan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan sumber lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Daerah selain PAD adalah Pendapatan Transfer. Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan TKD untuk Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal, BHPP dan bantuan keuangan provinsi. Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.396,06	1.192,10	(7,72)	(19,99)	85,39
2021	1.707,31	1.105,17	22,30	(7,29)	64,73
2022	1.569,23	1.599,73	(8,09)	44,75	101,94
2023	2.049,71	2.114,03	30,62	32,15	103,14
2024	2.762,11	2.620,67	34,76	23,97	94,88
Rata-rata			14,37	14,72	90,02

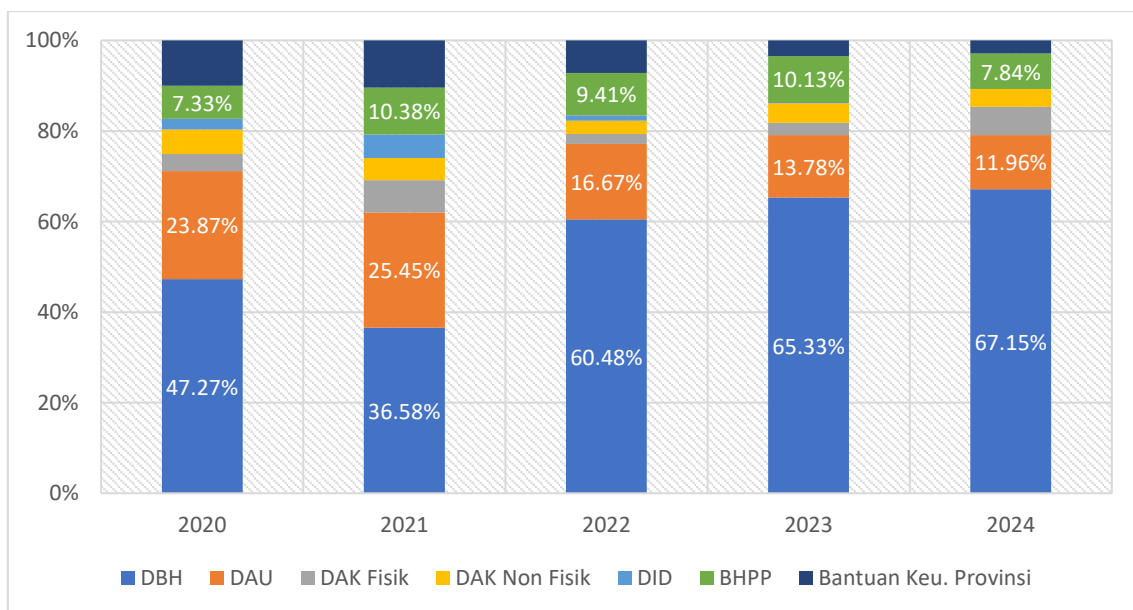
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,

Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 14,72 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 44,75 persen, terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar minus 19,99 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty yang turun 15,40 persen dibandingkan tahun 2019. Pos anggaran tersebut memiliki rata-rata kontribusi hingga 73,63 persen per tahun pada periode 2020-2024 sehingga kenaikan dan penurunan pada pos tersebut sangat mempengaruhi pendapatan transfer Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja pendapatan transfer Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 90,74 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 103,14 persen, sedangkan realisasi capaian kinerja terendah untuk pendapatan transfer Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 64,73 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah realisasi kontribusi komponen pendapatan transfer Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.



Gambar 2. 78 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025

Pendapatan transfer terbesar berasal dari DBH sebesar 55,36 persen per tahun kemudian DAU 18,35 persen per tahun pada periode 2020-2024. Meskipun pendapatan transfer DBH mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun tetap memiliki proporsi kontribusi paling besar jika dibandingkan dengan komponen pendapatan transfer lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh DBH dari pemerintah pusat terhadap kapasitas keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih tinggi.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil yang mencakup dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	745,02	546,30	(6,36)	(32,06)	73,33

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2021	981,08	390,05	31,68	(28,60)	39,76
2022	872,07	951,13	(11,11)	143,85	109,07
2023	1.307,07	1.361,86	49,88	43,18	104,19
2024	1.820,76	1.735,84	39,30	27,46	95,34
Rata-rata			20,68	30,77	84,34

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,

Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 30,77 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 143,85 persen dengan capaian kinerja mencapai 109,07 persen, tingginya pertumbuhan ini terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 32,06 persen dengan capaian kinerja 73,33 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan yang bersumber dari DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi dan DBH royalti mineral dan batu bara.

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah

perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 51 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	277,61	275,87	(1,82)	(0,88)	99,37
2021	280,39	271,41	1,00	(1,62)	96,80
2022	272,44	262,16	(2,84)	(3,41)	96,23
2023	287,31	287,30	5,46	9,59	100,00
2024	319,23	309,10	11,11	7,59	96,83
Rata-rata			2,58	2,25	97,84

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,
Olah Data 2025*

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer DAU Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung meningkat selama kurun waktu 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,25 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 9,59 persen dengan capaian kinerja mencapai 100 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang turun sebesar 3,41 persen dengan capaian kinerja 96,23 persen. Meskipun demikian, untuk realisasi capaian kinerja DAU Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 97,84 persen yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) relatif mendekati proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi.

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 52 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	109,67	105,78	(4,67)	(0,19)	96,45
2021	141,12	127,65	28,68	20,67	90,45
2022	131,68	80,34	(6,69)	(37,06)	61,02
2023	157,96	146,35	19,96	82,15	92,65
2024	165,39	262,64	4,71	79,46	158,80
Rata-rata			8,40	29,01	99,87

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 29,01 persen per tahun. Realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 99,87 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 158,80 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2022 menjadi capaian kinerja terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara dengan tingkat capaian sebesar 61,02 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerima DID pada tahun 2020 sampai 2023 dengan tren yang menurun. Pada tahun 2020, penerimaan DID sebesar 27,24 miliar rupiah lalu naik menjadi 55,64 miliar rupiah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, DID Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan menjadi 18,40 miliar rupiah dan kembali turun menjadi 5,91 miliar rupiah pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mendapatkan penerimaan yang bersumber dari DID.

Selain menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Penajam Paser Utara juga menerima dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen pendapatan transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 53 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Antar Daerah, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer: Antar Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	200,02	200,42	(24,39)	(21,92)	100,20
2021	210,31	221,64	5,14	10,59	105,39
2022	259,02	260,67	23,16	17,61	100,64
2023	268,93	283,16	3,83	8,63	105,29
2024	311,44	277,33	15,81	(2,06)	89,05
Rata-rata			4,71	2,57	100,11

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 2,57 persen. Realisasi pertumbuhan terjadi pada tahun 2022 sebesar 17,61 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,64. Kemudian, pertumbuhan realisasi menurun hingga tahun 2024 menjadi minus 2,06 persen. Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target pendapatan transfer antar daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71 persen dari rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,57 persen. Hal ini memperlihatkan dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan target pertumbuhan pendapatan transfer antar daerah memiliki target yang optimis.

Tabel 2. 54 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.422.544.845,00	221.642.792.391,00	260.665.191.258,00	283.157.744.137,00	277.333.011.551,00
Pendapatan Bagi Hasil	84.662.542.089,00	110.646.308.391,00	147.916.241.258,00	211.087.744.137,00	202.543.011.551,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.662.542.089,00	110.646.308.391,00	147.916.241.258,00	211.087.744.137,00	202.543.011.551,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.188.269.000,00	15.802.428.000,00	19.963.296.000,00	21.218.932.000,00	23.430.628.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.714.807.000,00	15.993.385.000,00	18.355.725.000,00	24.535.126.000,00	30.066.266.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.245.611.000,00	67.365.926.000,00	96.068.848.000,00	151.989.030.215,00	133.371.960.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	199.590.000,00	225.703.000,00	241.591.000,00	294.277.000,00	290.966.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.314.265.089,00	11.258.866.391,00	13.286.781.258,00	13.050.378.922,00	15.383.191.551,00
Bantuan Keuangan	115.760.002.756,00	110.996.484.000,00	112.748.950.000,00	72.070.000.000,00	74.790.000.000,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi					74.790.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	115.760.002.756,00	110.996.484.000,00	112.748.950.000,00	72.070.000.000,00	
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota		-			
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota					

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen terbesar dalam pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan bagi hasil yang lebih khusus pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang berfluktuasi selama tahun 2020-2024. Pendapatan Bagi Hasil memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,60 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 42,71 persen atau senilai Rp211,08 miliar. Kemudian menurun pada tahun 2024 sebesar 4,05 persen atau senilai Rp202,54 miliar. Komponen kedua dalam pendapatan transfer antar daerah adalah bantuan keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 10,87 persen. Rendahnya rata-rata pertumbuhan disebabkan karena rendahnya pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar minus 36,08 persen, penurunan ini terjadi dari Rp112,74 miliar menjadi Rp72,07 miliar. Kemudian terjadi peningkatan menjadi Rp74,79 miliar pada tahun 2024 atau pertumbuhan sebesar 3,77 persen.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 55 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	51,36	48,98	140,45	109,70	95,36
2021	46,15	29,66	(10,15)	(39,43)	64,28
2022	25,79	32,73	(44,12)	10,32	126,91
2023	4,28	13,72	(83,40)	(58,07)	320,48
2024	47,56	64,91	1010,78	373,04	136,48
Rata-rata			202,71	79,11	148,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024. Pertumbuhan realisasi pos tersebut sebesar 79,11 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024. Tingginya pendapatan tersebut didorong oleh pos Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebesar 64,38 miliar rupiah. Rata-rata capaian kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 148,70 persen relatif mendekati proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Keempat kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 56 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.473,92	1.271,06	(4,56)	(10,19)	86,24
2021	1.815,40	1.031,79	23,17	(18,82)	56,84
2022	1.507,84	1.397,98	(16,94)	35,49	92,71

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023	2.115,42	1.919,25	40,29	37,29	90,73
2024	3.031,35	2.854,76	43,30	48,74	94,17
Rata-rata			17,05	18,50	84,14

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,

Olah Data 2025

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,50 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar minus 18,82 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal Tanah sebesar minus 95,15 persen dan Belanja Tidak Terduga sebesar minus 89,44 persen atau masing-masing turun Rp5,74 miliar dan Rp51,73 miliar. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 48,73 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Modal sebesar 92,06 persen meningkat 563,59 miliar.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 84,14 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 94,17 persen dari target belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selama kurun waktu 2020-2024, hanya ada tiga pos belanja pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	975,05	851,88	4,45	(1,31)	87,37
2021	1.272,03	790,30	30,46	(7,23)	62,13
2022	1.108,32	1.053,41	(12,87)	33,29	95,05
2023	1.386,77	1.291,67	25,12	22,62	93,14
2024	1.786,19	1.678,85	28,80	29,98	93,99
Rata-rata			15,19	15,47	86,33

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Belanja Operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,47 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar minus 7,23 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Hibah sebesar minus 72,31 persen atau turun Rp21,51 miliar. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 33,29 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Bantuan Sosial sebesar 271,92 persen atau naik Rp7,32 miliar.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,33 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar 95,05 persen dari target belanja operasi Kabupaten

Penajam Paser Utara yang telah direncanakan sebelumnya, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Belanja Pegawai dari target yang direncanakan Rp568,04 miliar menjadi Rp545,13 miliar.

b. Belanja Modal

Kategori belanja daerah berikutnya adalah Belanja Modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Modal Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 58 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	424,55	361,34	(30,27)	(34,32)	85,11
2021	533,77	235,38	25,73	(34,86)	44,10
2022	381,15	342,53	(28,59)	45,52	89,87
2023	706,84	612,17	85,45	78,72	86,61
2024	1.236,07	1.175,77	74,87	92,06	95,12
Rata-rata			25,44	29,42	80,16

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,
Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,42 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar minus 34,86 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal Tanah sebesar minus 95,15 persen atau turun dari Rp6,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp292 juta pada tahun 2021. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 92,06 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan

pos Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 116,31 persen atau naik dari Rp1,67 miliar menjadi Rp3,61 miliar.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Modal Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 80,16 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 95,12 persen dari target belanja modal Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Kategori belanja daerah terakhir adalah Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 59 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

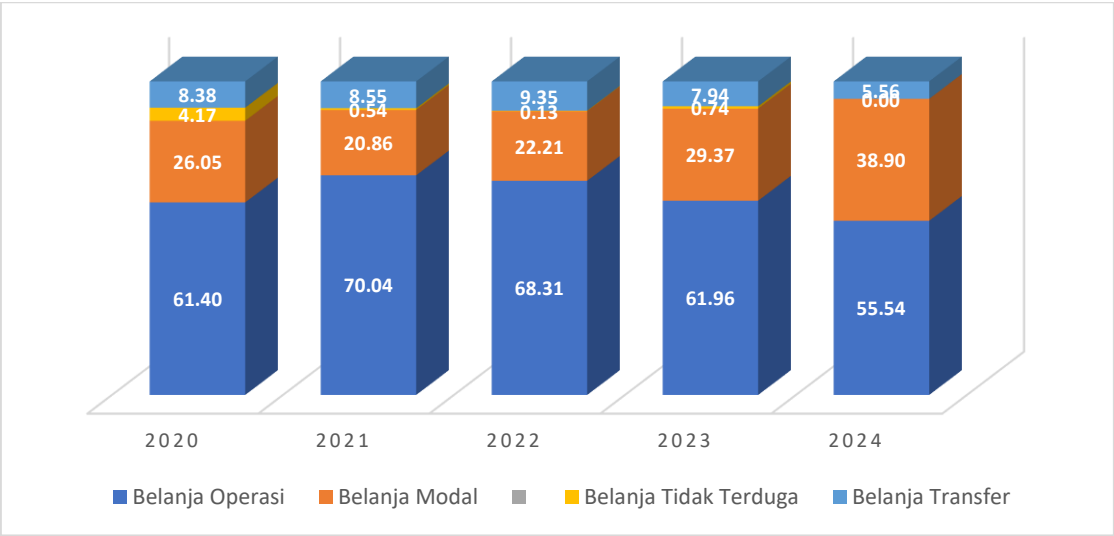
Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	74,32	57,84	3615,84	3081,12	77,83
2021	9,60	6,11	(87,08)	(89,44)	63,63
2022	18,37	2,04	91,30	(66,58)	11,12
2023	21,81	15,41	18,76	654,91	70,66
2024	9,09	0,14	(58,33)	(99,10)	1,52
Rata-rata			716,10	696,18	44,95

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,
Olah Data 2025

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2020–2024, rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Tidak Terduga Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar

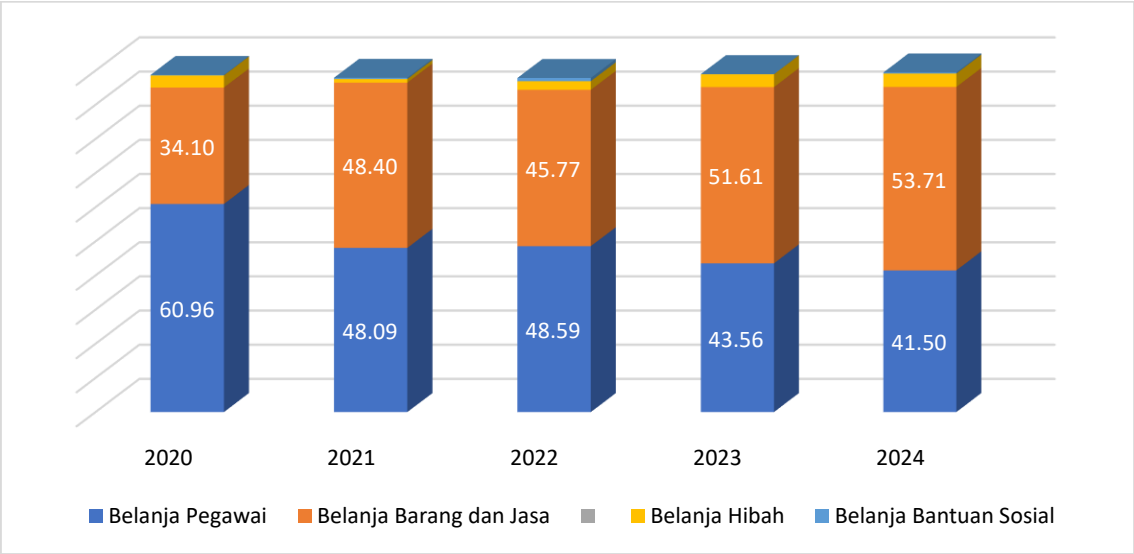
44,95 persen selama kurun waktu 2020-2024. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 696,18 persen per tahun. Pertumbuhan yang tersebut menunjukkan lebih sedikit kejadian atau situasi darurat yang memerlukan pengeluaran tambahan.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.



Gambar 2. 79 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025



Gambar 2. 80 Proporsi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah data, 2025

Belanja Daerah Kabupaten PPU didominasi oleh belanja operasi dengan rata-rata 63,45 persen pertahun sedangkan belanja modal sebesar 27,4persen pertahun. Pada kelompok belanja operasi, belanja terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai dengan rata-rata 48,54persen pertahun, sedangkan belanja barang jasa sebesar 46,72 persen pertahun. Besarnya porsi belanja pegawai perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengingat proporsi tersebut telah melewati ambang batas maksimal dalam alokasi belanja pegawai. Menurut ketentuan UU HKPD No. 1 Tahun 2022 mengatur maksimal belanja pegawai dari total anggaran daerah sebesar 30 persen. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD ini diundangkan.

2.5.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja.

Adapun cakupan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan

Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA).

Pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020-2024 umumnya masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

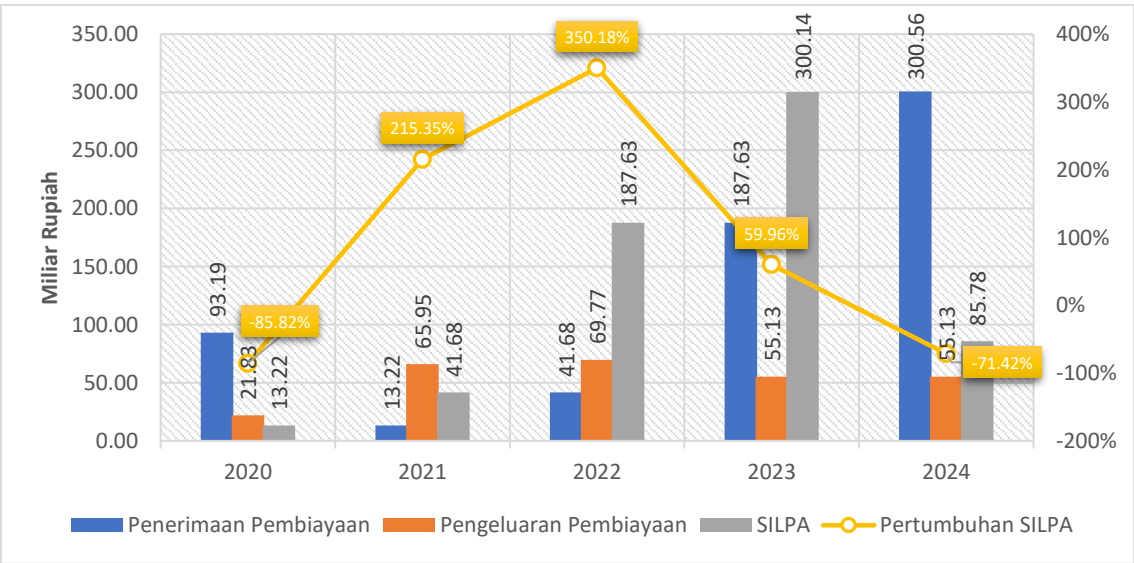
Tabel 2. 60 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	41,88	71,36	6,91	55,81	170,40
2021	54,61	-52,73	30,40	(173,90)	(96,56)
2022	-28,09	-28,09	(151,43)	(46,74)	100,00
2023	132,50	132,50	(571,77)	(571,77)	100,00
2024	244,70	245,43	84,68	85,23	100,30
Rata-rata			(120,24)	(130,27)	74,83

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi pembiayaan menunjukkan nilai yang berfluktuasi di mana besarnya tergantung pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai 245,432 miliar rupiah mengalami kenaikan sebesar 85,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2022 hingga 2024, realisasi pembiayaan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100 persen. Namun secara rata-rata, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan

daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 74,83 persen selama kurun waktu 2020–2024.



Gambar 2. 81 Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020–2024

Sumber: Olah data, 2025

Pada tahun 2020-2024, penerimaan pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren yang meningkat mencapai 300,56 miliar rupiah pada tahun 2024, tumbuh 60,19 persen dibandingkan tahun 2023. Sedangkan pos pengeluaran pembiayaan cenderung stagnan dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo (2020-2024) dan penyertaan modal daerah (2020-2022). Penerimaan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto yang positif. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran dan jika terdapat sisa akan masuk ke dalam pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pada tahun 2024, SILPA Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 85,78 miliar rupiah. SILPA tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang negatif karena pada tahun 2023 APBD Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami surplus anggaran sebesar 167,6 miliar rupiah,

sedangkan pada tahun 2024 terdapat defisit anggaran sebesar 159,6 miliar rupiah.

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 61 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	93,19	93,19	6,29	9,67	100,00
2021	155,84	13,22	67,22	(85,82)	8,48
2022	41,68	41,68	(73,25)	215,35	100,00
2023	187,63	187,63	350,18	350,18	100,00
2024	300,33	300,56	60,07	60,19	100,08
Rata-rata			82,10	109,91	81,71

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024,

Olah Data 2025

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memperlihatkan kinerja yang optimal selama kurun waktu 2020-2024. Secara rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan daerah mencapai 81,71 persen. Pada tahun 2021 menjadi realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tingkat capaian sebesar 8,48 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengembalian penyaluran DAU Rp0,24 miliar sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 29/KM.7/2023 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.

b. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	51,31	21,83	5,79	(44,27)	42,55
2021	101,23	65,95	97,27	202,03	65,15
2022	69,77	69,77	(31,08)	5,79	100,00
2023	55,13	55,13	(20,98)	(20,98)	100,00
2024	55,63	55,13	0,91	0,00	99,10
Rata-rata			10,38	28,51	81,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar 28,51 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 81,36 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 hingga 2023 yang mencapai 100 persen dari proyeksi target

yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2020 menjadi capaian kinerja terendah dengan capaian kinerja 42,55 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada BUMD selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 63 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Penyertaan Modal Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	38,98	9,50	608,73	216,67	24,37
2021	46,10	19,60	18,27	106,32	42,52
2022	5,85	5,85	(87,31)	(70,14)	100,00
2023	-	-	0,00	0,00	0,00
2024	-	-	0,00	0,00	0,00
Rata-rata			107,94	50,57	33,38

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penyertaan modal daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar 50,57 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 33,38 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 100 persen. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 capaian kinerjanya nol persen.

2.5.1.4 Realisasi Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah provinsi dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah akan memberikan informasi berharga kepada pejabat pemerintah daerah, legislatif

daerah, kreditur/debitur daerah, dan masyarakat umum tentang keadaan kekayaan dan kewajiban daerah, termasuk masalah ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang penyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Sehingga untuk mengetahui sebuah posisi keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, telah disajikan perkembangan data Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada beberapa tahun (2020-2024).

Tabel 2. 64 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	4.449.142.261.579	4.595.819.797.632	5.030.434.962.928	5.776.611.704.988	5.780.327.092.789
1.1	ASET LANCAR	86.634.171.869	116.657.082.072	263.879.345.374	457.281.527.585	215.013.573.598
	Kas	13.605.658.675	41.679.216.371	187.632.320.043	300.563.236.271	86.152.977.379
	Piutang	27.370.405.458	46.617.009.825	52.944.313.253	92.826.514.340	51.598.834.121
	Persediaan	45.453.929.736	28.133.344.543	23.075.200.745	63.763.026.982	76.602.262.269
	Beban Dibayar Dimuka	204.178.000	227.511.333	227.511.333	128.749.992	659.499.830
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	110.444.951.927	127.741.658.765	129.170.429.531	112.935.615.999	113.302.632.763
	Non Permanen	4.324.891.023	4.372.528.833	4.399.458.444	4.435.594.598	4.510.102.132
	Permanen	106.120.060.903	123.369.129.932	124.770.971.087	108.500.021.401	108.792.530.631
1.3	ASET TETAP	4.084.779.005.913	4.171.087.421.611	4.002.459.021.688	4.273.618.343.528	5.081.693.440.476
	Tanah	570.034.690.853	579.591.561.447	581.954.473.044	631.269.771.989	885.430.839.879
	Peralatan dan Mesin	862.578.507.989	922.482.310.840	933.878.243.491	1.075.078.496.987	1.366.021.994.174
	Gedung dan Bangunan	1.418.355.571.275	1.543.627.195.599	1.599.499.170.634	1.619.491.112.921	1.853.352.658.143
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.296.915.779.943	3.761.375.106.297	3.915.577.119.713	4.176.187.765.783	4.775.463.947.764
	Aset tetap Lainnya	55.269.310.676	59.099.988.778	61.416.164.143	64.136.461.304	73.402.142.784
	Konstruksi dalam pengerjaan	624.179.110.646	387.798.140.420	331.507.269.818	462.747.227.744	258.523.608.550
	Akumulasi Penyusutan	(2.742.553.965.469)	(3.082.886.881.770)	(3.421.373.419.156)	(3.755.292.493.201)	(4.130.501.750.816)
1.4	ASET LAINNYA	167.284.131.869	180.333.635.183	634.926.166.336	932.776.217.877	370.317.445.953
	Aset tak berwujud	2.824.026.509	1.906.299.857	1.439.194.844	2.741.592.291	4.899.033.536
	Aset Lain-lain	164.460.105.361	178.427.335.327	633.486.971.492	930.034.625.585	331.382.920.955
	Aset Properti Investasi					34.035.491.462
1.5	DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
	Dana Cadangan					
2	KEWAJIBAN	355.707.718.615	571.330.836.268	195.284.545.319	138.285.845.300	93.184.688.949
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	121.402.387.664	392.156.180.957	71.240.565.648	69.372.541.269	79.402.060.558
	Utang perhitungan pihak ketiga	6.328.014				13.461.306
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	55.130.675.640	63.913.344.550	55.130.675.640	55.130.675.640	55.130.675.640

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan diterima dimuka	61.000.000	60.000.000	94.000.000	599.250.000	603.250.000
	Utang Belanja	66.204.384.010	328.182.836.407	16.015.890.008	13.642.615.629	23.654.673.612
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJAG	234.305.330.951	179.174.655.311	124.043.979.671	68.913.304.031	13.782.628.391
	Utang Jangka Panjang Lainnya	234.305.330.951	179.174.655.311	124.043.979.671	68.913.304.031	13.782.628.391
3	EKUITAS	4.093.434.542.963	4.024.488.961.364	4.835.150.417.609	5.638.325.859.687	5.687.142.403.840
	Ekuitas	4.093.434.542.963	4.024.488.961.364	4.835.150.417.609	5.638.325.859.687	5.687.142.403.840
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.449.142.261.579	4.595.819.797.632	5.030.434.962.928	5.776.611.704.988	5.780.327.092.789

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024

Berdasarkan data realisasi neraca daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam komponen aset, kewajiban, dan ekuitas daerah. Secara umum, total aset mengalami peningkatan dari Rp4,449 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,78 triliun pada tahun 2024, kondisi ini menunjukkan adanya ekspansi aset secara substansial.

Aset lancar menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2022 dan 2023, terutama dipengaruhi oleh peningkatan kas dan piutang, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp215,01 miliar dari Rp457,28 miliar di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan potensi ketidakseimbangan likuiditas yang perlu diantisipasi. Pada saat yang sama, investasi jangka panjang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai investasi yang berkelanjutan.

Komponen aset tetap mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp4,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,08 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini utamanya berasal dari nilai tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, yang mencerminkan peningkatan kapasitas infrastruktur dan pelayanan publik daerah. Akan tetapi, akumulasi penyusutan juga meningkat secara progresif, dari Rp2,74 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,13 triliun pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap pemeliharaan aset tetap yang ada.

Aset lainnya melonjak drastis dari Rp167 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp932,77 miliar pada 2023, lalu menurun menjadi Rp370,3 miliar di tahun 2024. Kenaikan tajam tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai aset lain-lain yang perlu ditelaah lebih lanjut mengenai validitas dan manfaatnya terhadap pelayanan publik. Sementara itu, dana cadangan tidak tersedia dalam

keseluruhan periode, menandakan bahwa belum ada alokasi anggaran khusus untuk mengantisipasi kebutuhan darurat atau belanja tak terduga.

Dari sisi kewajiban, terlihat penurunan yang cukup tajam dari Rp355,7 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp93,18 miliar pada 2024. Penurunan ini terjadi baik pada kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan beban utang dan memperbaiki posisi keuangan. Penurunan kewajiban jangka panjang dari Rp234,31 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp13,78 miliar pada 2024 merupakan sinyal positif dalam pengelolaan utang daerah secara lebih efisien dan terukur.

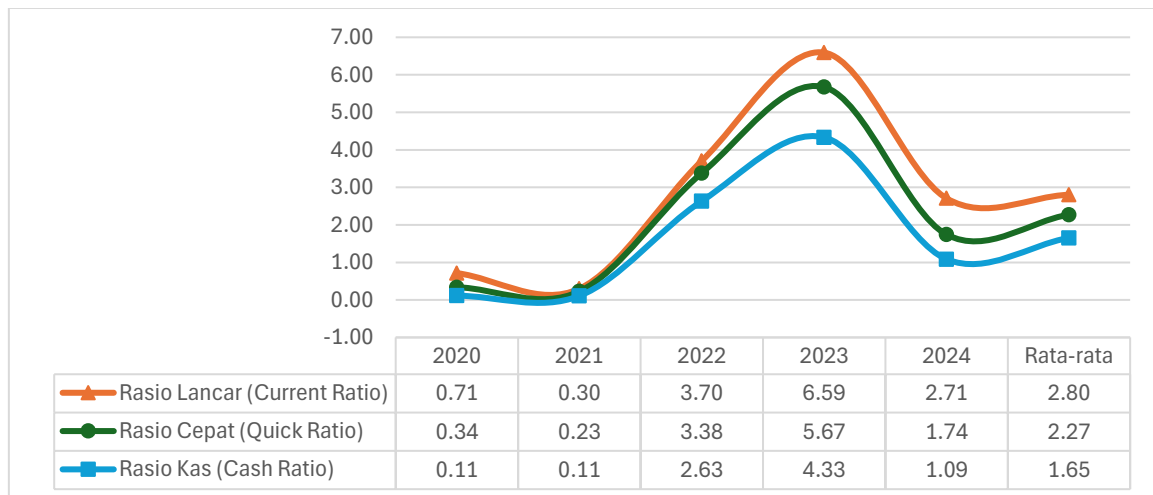
Komponen ekuitas meningkat secara konsisten dari Rp4,09 triliun pada 2020 menjadi Rp5,687 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa akumulasi surplus atau nilai kekayaan bersih pemerintah daerah menunjukkan tren yang positif, sekaligus menggambarkan peningkatan kapasitas fiskal dan daya tahan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, kondisi neraca daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan arah yang positif dalam jangka menengah, khususnya dalam penguatan ekuitas dan pengurangan kewajiban. Namun, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam pengelolaan aset lancar dan aset lainnya agar stabilitas likuiditas dan kualitas aset tetap terjaga. Ke depan, penataan aset dan optimalisasi pemanfaatan serta perencanaan dana cadangan menjadi agenda penting untuk menjamin kesinambungan keuangan daerah yang berkelanjutan.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

a. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



Gambar 2. 82 Rasio Likuiditas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

a) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) menunjukkan fluktuasi tajam, dimulai dari 0,71 pada tahun 2020, turun menjadi 0,30 pada 2021, namun melonjak drastis menjadi 3,70 pada 2022 dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 6,59 sebelum menurun kembali menjadi 2,71 pada

tahun 2024. Rata-rata rasio lancar selama periode tersebut sebesar 2,80, yang menunjukkan secara umum kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya berada dalam kategori cukup baik, meskipun sempat mengalami tekanan pada awal periode..

b) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*), yang mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan, juga menunjukkan tren serupa. Rasio ini berada pada angka rendah sebesar 0,34 pada tahun 2020 dan 0,23 pada tahun 2021, mencerminkan keterbatasan likuiditas pada masa awal. Namun, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan nilai mencapai 3,38 pada tahun 2022 dan 5,67 pada 2023, kemudian menurun menjadi 1,74 pada tahun 2024. Rata-rata rasio cepat sebesar 2,27 menandakan adanya perbaikan likuiditas yang cukup baik secara keseluruhan, meskipun masih perlu perhatian pada fluktuasi yang terjadi.

c) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

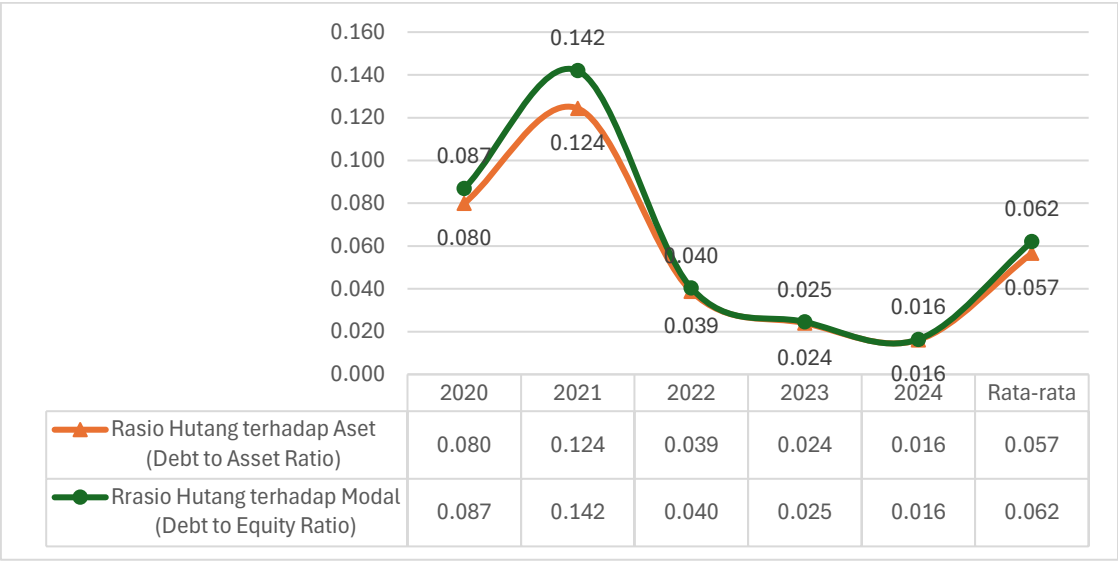
Rasio Kas (*Cash Ratio*), yang merupakan indikator paling konservatif dalam menilai likuiditas karena hanya mempertimbangkan kas dan setara kas terhadap kewajiban lancar, menunjukkan peningkatan yang lebih mencolok. Rasio ini berada pada angka 0,11 pada tahun 2020 dan tetap stagnan pada 2021, namun meningkat tajam menjadi 2,63 pada 2022 dan 4,33 pada 2023, lalu menurun menjadi 1,09 pada 2024. Rata-rata rasio kas selama lima tahun sebesar 1,65 menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah memiliki kas yang relatif mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, meskipun tetap memerlukan pengelolaan kas yang optimal untuk menjaga stabilitas.

Secara keseluruhan, analisis rasio likuiditas ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kapasitas likuiditas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu 2020–2024, meskipun dengan kecenderungan fluktuatif yang mencerminkan perlunya perencanaan kas dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang

dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



Gambar 2. 83 Rasio Solvabilitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio solvabilitas Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang signifikan dalam proporsi kewajiban terhadap aset maupun ekuitas.

1) Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) mengalami penurunan dari 0,080 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,016 pada tahun 2024, dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kewajiban terhadap total aset semakin kecil, yang berarti pemerintah daerah semakin mengandalkan aset

sendiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan semakin mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana dari luar.

2) Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

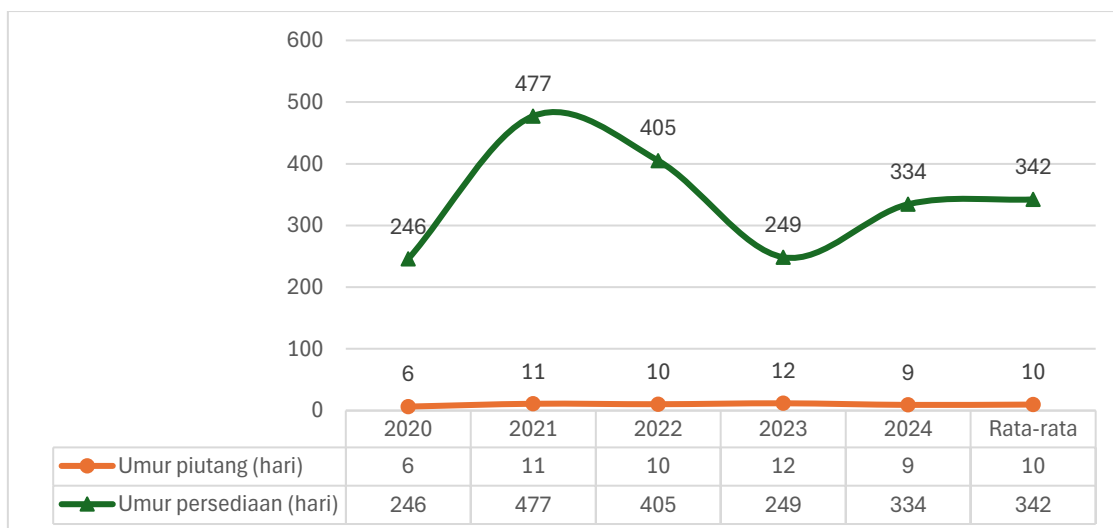
Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) juga menunjukkan penurunan dari 0,087 pada tahun 2020 menjadi 0,016 pada tahun 2024, dengan rata-rata lima tahunan sebesar 0,062. Penurunan ini mencerminkan semakin kuatnya struktur permodalan pemerintah daerah, di mana sebagian besar pendanaan bersumber dari modal sendiri dibandingkan dengan kewajiban.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tingkat solvabilitas yang sehat, serta kapasitas yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang tanpa membebani struktur keuangan daerah secara berlebihan.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan yang menggambarkan efisiensi pengelolaan penerimaan dan penggunaan barang dalam operasional pemerintahan.



Gambar 2. 84 Rasio Aktivitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio aktivitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset lancar, khususnya piutang dan persediaan, mengalami fluktuasi.

1) Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas.

Umur piutang rata-rata selama periode tersebut tercatat sebesar 10 hari, dengan nilai terendah pada tahun 2020 yaitu 6 hari dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 12 hari. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pemerintah daerah relatif cepat dalam menagih piutang, yang mencerminkan likuiditas yang baik dan manajemen piutang yang cukup efisien.

2) Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini

mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Rasio umur persediaan menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Rata-rata umur persediaan selama lima tahun tersebut mencapai 342 hari, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 477 hari dan terendah pada tahun 2020 sebesar 246 hari. Nilai umur persediaan yang tinggi mengindikasikan bahwa persediaan barang relatif lama tersimpan sebelum digunakan atau didistribusikan, yang dapat mencerminkan efisiensi distribusi logistik yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023, yakni 249 hari, peningkatan kembali di tahun 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam perencanaan kebutuhan barang dan pengendalian arus persediaan guna mencegah potensi pemborosan atau keusangan.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan piutang tergolong efektif, namun pengelolaan persediaan masih menunjukkan ruang untuk perbaikan agar siklus aktivitas aset lancar lebih optimal dalam mendukung efisiensi fiskal daerah.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah periode 2026-2030.

Tabel 2. 65 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	2025 (Perbub No 12 Th 2025)	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	177.601.844.364	211.038.967.077	210.910.457.716	262.831.816.416	292.121.568.093	325.336.486.365	212.982.964.431
1.2	Pendapatan Transfer	2.620.671.236.278	2.157.892.713.860	1.606.443.040.906	1.687.278.564.906	1.848.949.611.906	2.010.620.665.906	2.010.620.665.906
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	64.905.093.658	35.246.325.007	23.607.457.978	84.333.458.994	85.066.720.021	85.807.113.658	25.807.313.658
	JUMLAH PENDAPATAN	2.863.178.174.300	2.404.178.005.944	1.840.960.956.600	2.034.443.840.316	2.226.137.900.020	2.421.764.265.929	2.249.410.943.995
2.	BELANJA	-						
2.1	Belanja Operasi	1.678.853.567.828	1.588.938.479.965	1.409.398.390.228	1.310.995.204.796	1.438.821.627.978	1.574.909.963.547	1.453.513.343.750
2.2	Belanja Modal	1.175.765.469.046	635.684.793.326	217.217.673.750	522.886.371.289	586.754.007.812	646.292.038.151	595.335.336.014
2.3	Belanja Tidak Terduga	138.053.926	10.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	168.065.080.191	169.093.506.685	165.562.264.231	165.562.264.231	165.562.264.231	165.562.264.231	165.562.264.231
	JUMLAH BELANJA	3.022.822.170.991	2.403.716.779.977	1.827.178.328.209	2.034.443.840.316	2.226.137.900.020	2.421.764.265.929	2.249.410.943.995
	SURPLUS/DEFISIT	(159.643.996.692)	461.225.967	13.782.628.391	0	0	0	0
3.	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	300.563.236.271	55.169.449.673	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	55.130.675.640	55.630.675.640	13.782.628.391	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	245.432.560.631	(461.225.967)	(13.782.628.391)	0	0	0	0

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Hasil Olah Data 2025)

Proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan dinamika fiskal yang cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga 2030. Pada sisi pendapatan, total pendapatan daerah mengalami fluktuasi, dimulai dari Rp2,86 triliun pada tahun 2024, menurun menjadi Rp1,84 triliun pada tahun 2026, dan kembali mengalami tren peningkatan hingga mencapai Rp2,42 triliun pada tahun 2029, sebelum sedikit menurun menjadi Rp2,25 triliun pada tahun 2030. Penurunan tajam pada tahun 2026 terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer yang menurun dari Rp2,16 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp1,61 triliun pada tahun 2026.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dan mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp177,60 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp325,34 miliar pada tahun 2029. Namun, pada tahun 2030, PAD diproyeksikan menurun drastis menjadi Rp212,98 miliar, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan fiskal jangka menengah daerah. Sementara itu, kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan angka tertinggi pada tahun 2028 sebesar Rp85,81 miliar dan penurunan tajam di tahun 2030 menjadi Rp25,81 miliar.

Pada sisi belanja daerah, total belanja mengalami tren penyesuaian dari Rp3,02 triliun pada tahun 2024, menurun menjadi Rp1,83 triliun pada tahun 2026, kemudian naik secara bertahap hingga Rp2,42 triliun pada tahun 2029. Belanja operasi masih menjadi komponen belanja terbesar dengan rata-rata di atas Rp1,4 triliun per tahun, mencerminkan dominasi pengeluaran untuk pelayanan dasar, belanja pegawai, dan kegiatan rutin pemerintah daerah. Belanja modal, meskipun nilainya lebih kecil dibanding belanja operasi, menunjukkan peningkatan dari Rp217,21 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp646,29 miliar pada tahun 2029, mengindikasikan komitmen pembangunan infrastruktur yang terus diperkuat menjelang akhir periode proyeksi.

Dari sisi keseimbangan fiskal, terjadi defisit anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp159,64 miliar, yang kemudian berangsur menuju keseimbangan anggaran mulai

tahun 2027, di mana proyeksi menunjukkan kondisi anggaran berimbang (zero deficit). Untuk menutup defisit pada awal periode, pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Pada tahun 2024, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp245,43 miliar dan mengalami penurunan tajam hingga nihil pada tahun 2026 dan seterusnya, seiring dengan mulai stabilnya postur APBD.

Secara umum, proyeksi ini menggambarkan arah kebijakan fiskal yang adaptif dan realistis dalam merespons dinamika pendapatan daerah, khususnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang fluktuatif. Upaya peningkatan PAD yang cukup signifikan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memperkuat kemandirian fiskal. Ke depan, diperlukan penguatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan memiliki peran penting dalam perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah. Adanya estimasi pendapatan yang akurat, pemerintah dapat menyusun rencana pengeluaran secara lebih efektif, memastikan anggaran yang disusun realistis, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan dan program yang direncanakan. Selain itu, proyeksi pendapatan juga berfungsi sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas fiskal serta menghindari potensi defisit anggaran. Keakuratan proyeksi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi risiko keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah preventif guna memitigasi dampak negatifnya.

Dalam menyusun proyeksi pendapatan, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tren historis penerimaan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pencapaian dan pertumbuhan pendapatan, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan dan strategi pendapatan daerah yang akan diterapkan. Berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proyeksi yang

dihasilkan diharapkan lebih realistis dan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan fiskal. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 66 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	2025 (Perbub No 12 Th 2025)	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	177.601.844.364	211.038.967.077	210.910.457.716	262.831.816.416	292.121.568.093	325.336.486.365	212.982.964.431
1.1.1	Pajak Daerah	41.163.472.329	92.078.050.000	112.224.893.118	126.037.282.429	141.998.958.672	160.543.584.860	119.424.714.957
1.1.2	Retribusi Daerah	91.280.592.807	15.914.615.200	81.064.868.280	117.801.355.108	129.617.490.619	142.622.439.681	71.395.129.149
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.836.972.448	2.671.835.000	2.939.018.500	3.232.920.350	3.556.212.385	3.911.833.624	3.911.833.623
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	42.320.806.780	100.374.466.877	14.681.677.818	15.760.258.529	16.948.906.417	18.258.628.201	18.251.286.701
1.2	Pendapatan Transfer	2.620.671.236.278	2.157.892.713.860	1.606.443.040.906	1.687.278.564.906	1.848.949.611.906	2.010.620.665.906	2.010.620.665.906
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.343.338.224.727	1.914.669.024.000	1.428.486.156.306	1.509.321.680.306	1.670.992.727.306	1.832.663.781.306	1.832.663.781.306
1.2.2	Transfer antar – daerah	277.333.011.551	243.223.689.860	177.956.884.600	177.956.884.600	177.956.884.600	177.956.884.600	177.956.884.600
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	64.905.093.658	35.246.325.007	23.607.457.978	84.333.458.994	85.066.720.021	85.807.113.658	25.807.313.658
1.3.1	Pendapatan Hibah	526.748.711						
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	64.378.344.947	35.246.325.007	23.607.457.978	84.333.458.994	85.066.720.021	85.807.113.658	25.807.313.658
	JUMLAH PENDAPATAN	2.863.178.174.300	2.404.178.005.944	1.840.960.956.600	2.034.443.840.316	2.226.137.900.020	2.421.764.265.929	2.249.410.943.995

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Hasil Olah Data 2025)

Pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan dinamika fiskal yang menggambarkan adanya tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah secara berkelanjutan. Secara umum, total pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp2,86 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,84 triliun pada tahun 2026, namun secara bertahap kembali meningkat hingga Rp2,42 triliun pada tahun 2029 sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2030 sebesar Rp2,25 triliun. Fluktuasi ini mencerminkan ketergantungan daerah terhadap komponen pendapatan transfer, serta perlunya strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan progresif hingga tahun 2029. Proyeksi PAD meningkat dari Rp177,60 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp325,34 miliar pada tahun 2029, atau hampir mengalami pelipatan nilai dalam kurun waktu lima tahun. Pertumbuhan tersebut mencerminkan potensi ekonomi daerah yang meningkat, terutama didorong oleh aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal sebagai dampak dari percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur.

Namun demikian, proyeksi PAD pada tahun 2030 mengalami penurunan tajam menjadi Rp212,98 miliar, atau turun sekitar 34,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak struktural atas berdirinya IKN sebagai entitas pemerintahan yang berdiri sendiri, yang secara administratif akan berpisah dari Kabupaten Penajam Paser Utara mulai tahun 2028. Dengan pemisahan tersebut, wilayah yang semula menyumbang PAD secara signifikan—terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi—tidak lagi menjadi bagian dari otoritas fiskal kabupaten. Potensi penerimaan dari pajak-pajak strategis seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Restoran, dan Pajak Reklame yang berada di wilayah IKN akan berpindah ke kewenangan otoritas IKN.

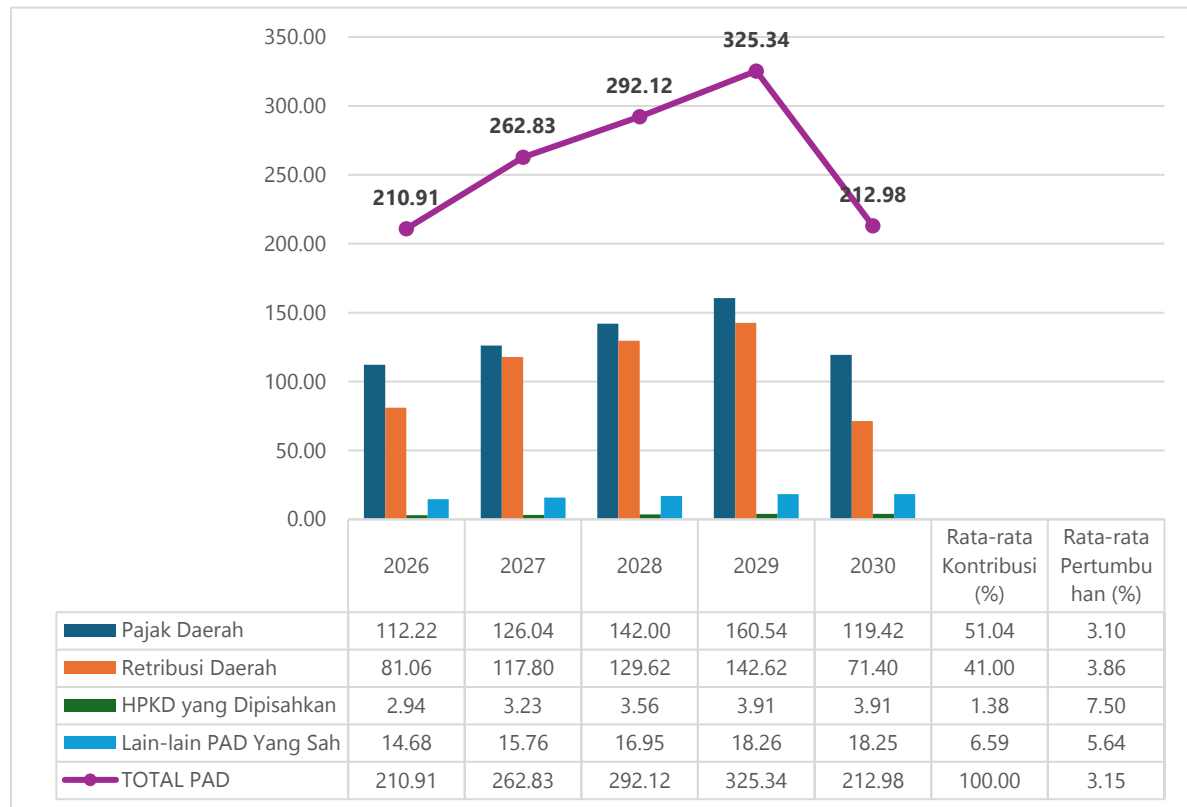
Fenomena ini mengindikasikan adanya risiko penurunan kapasitas fiskal daerah secara signifikan, yang harus diantisipasi dengan perencanaan fiskal yang matang dan adaptif. Pemerintah daerah perlu segera merumuskan strategi diversifikasi sumber PAD, termasuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru di luar wilayah IKN, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memperkuat pengelolaan kekayaan daerah dan pemanfaatan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan pendapatan sah lainnya.

Secara ekonomi-politik, transisi ini menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal daerah, di mana penguatan kemandirian fiskal pasca-pemisahan IKN menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun ekonomi daerah yang lebih resilien dan tidak terlalu bergantung pada satu wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun kebijakan jangka menengah dan panjang yang responsif terhadap perubahan tata ruang fiskal ini, termasuk memperkuat kemitraan fiskal dengan otoritas IKN guna mengurangi potensi ketimpangan pendapatan yang terjadi pasca-pemekaran wilayah administratif tersebut.

Dengan demikian, penurunan PAD pada tahun 2030 bukan hanya sekadar koreksi fiskal, tetapi juga mencerminkan perubahan struktural dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah, yang membutuhkan pendekatan strategis, adaptif, dan partisipatif demi menjamin kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Berdasarkan kontribusi komponen PAD menunjukkan didominasi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah mencapai 51,04 persen, sementara Retribusi Daerah berkontribusi sebesar 41,00 persen terhadap total PAD selama lima tahun tersebut. Dominasi dua komponen ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung

pada optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan lokal dan pelayanan publik. Grafik berikut ini menampilkan proyeksi kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing komponen PAD selama periode 2026-2030.



Gambar 2. 85 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Penajam Paser Utara 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Bapenda dan BKAD (Hasil Olah Data 2025)

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD, yakni hanya 1,38 persen, meskipun mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 7,50 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya rendah, terdapat peluang penguatan pada sektor ini melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, termasuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun Lain-lain PAD yang Sah mencatat kontribusi rata-rata sebesar 6,59 persen dengan pertumbuhan rata-rata 5,64 persen per tahun, menjadikannya

komponen yang relatif stabil dan berpotensi untuk terus dikembangkan, khususnya dari pendapatan bunga, surplus aset, maupun penerimaan sah lainnya.

Secara keseluruhan, total PAD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan tumbuh rata-rata 3,15 persen per tahun, dari Rp210,91 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp325,34 miliar pada tahun 2029, sebelum mengalami penurunan menjadi Rp212,98 miliar pada tahun 2030. Fluktuasi ini menandakan pentingnya strategi penguatan PAD yang berkelanjutan, baik melalui peningkatan basis pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, maupun pengembangan inovasi pendapatan lain yang sah. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal daerah ke depan harus difokuskan pada diversifikasi sumber PAD dan peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, guna memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif.

Pendapatan transfer, yang mencakup transfer dari pemerintah pusat dan antar-daerah, masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2024, pendapatan transfer mencapai Rp2,62 triliun dan mengalami penurunan tajam menjadi Rp1,61 triliun pada tahun 2026. Meskipun demikian, tren pemulihan mulai tampak pada tahun 2027 dengan peningkatan bertahap hingga Rp2,01 triliun pada tahun 2030. Subkomponen transfer pemerintah pusat mendominasi, sementara transfer antar-daerah cenderung stabil di kisaran Rp177 miliar per tahun. Ketergantungan terhadap transfer ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan agar kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan.

Kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi tambahan, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan PAD dan transfer. Nilainya berfluktuasi dari Rp64,90 miliar pada tahun 2024 menjadi tertinggi Rp85,80 miliar pada tahun 2029, sebelum kembali menurun menjadi Rp25,80 miliar pada tahun 2030. Sumber pendapatan ini, meskipun bersifat pelengkap, tetap penting sebagai bagian dari strategi pendapatan daerah secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menunjukkan dominasi pendapatan transfer, namun adanya peningkatan PAD dalam beberapa tahun menjadi sinyal positif terhadap upaya peningkatan kemandirian fiskal. Untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan strategis dalam memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah, serta membangun sistem keuangan daerah yang responsif terhadap perubahan ekonomi nasional dan global.

Dalam mewujudkan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Oleh karena itu, untuk mencapai target proyeksi pendapatan tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di masa mendatang diarahkan pada:

- a. Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, termasuk kewajiban Kabupaten/Kota dalam pendataan, sosialisasi, penanganan tunggakan, serta alokasi anggaran dari opsen pajak;
- b. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan pemungutan ini meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang, hingga kegiatan penagihan

- pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- c. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM di pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang lebih baik;
 - e. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - f. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
 - g. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
 - h. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam peningkatan pendapatan, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi serta bantuan keuangan Provinsi;
 - i. Mengantisipasi potensi penurunan dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan di sektor lain agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari sumber yang fluktuatif; dan
 - j. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau stakeholders lainnya.

Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan

ekonomi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk berbagai tujuan yang esensial dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi belanja membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan dengan mengestimasi kebutuhan pengeluaran. Ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara efektif dan efisien. Melalui proyeksi belanja yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Proyeksi belanja memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran, mencegah pemborosan, dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Sementara itu, Efisiensi belanja daerah sangat penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal demi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ditampilkan pada tabel di bawah ini.

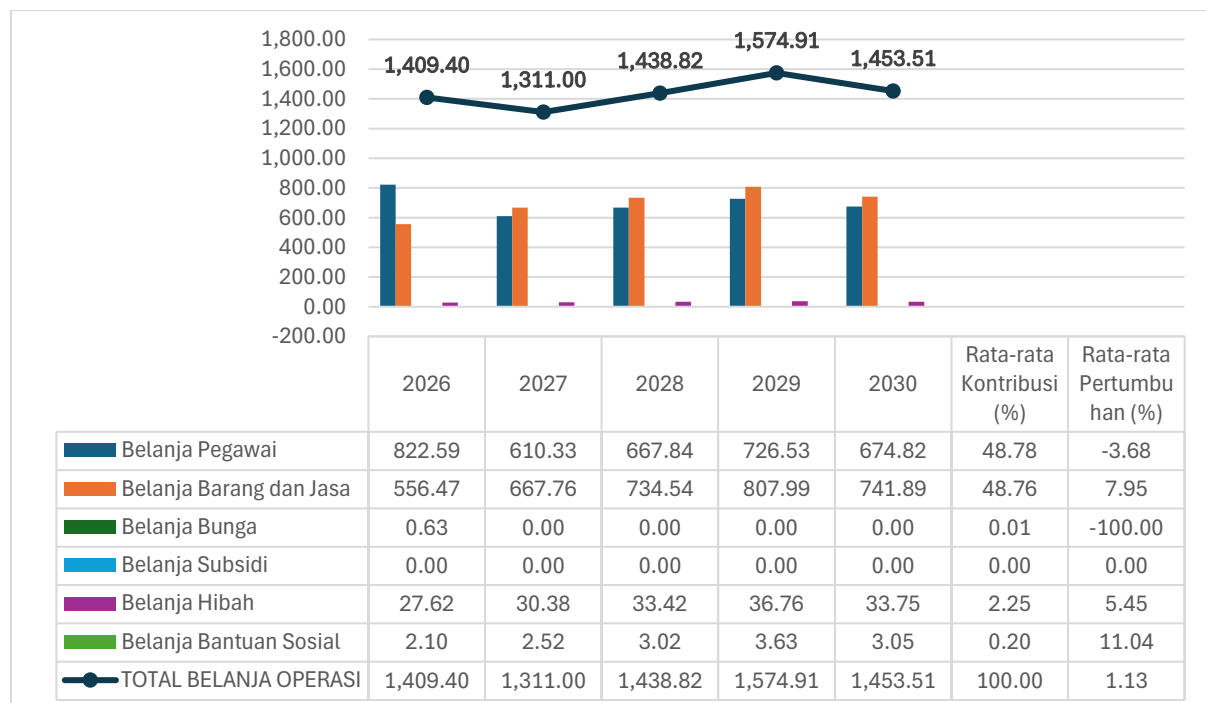
Tabel 2. 67 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	2025 (Perbub No 12 Th 2025)	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
2.	BELANJA							
2.1	Belanja Operasi	1.678.853.567.828	1.588.938.479.965	1.409.398.390.228	1.310.995.204.796	1.438.821.627.978	1.574.909.963.547	1.453.513.343.750
2.1.1	Belanja Pegawai	696.738.302.133	790.922.793.837	822.586.441.000	610.333.152.095	667.841.370.006	726.529.279.779	674.823.283.198
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	901.694.745.304	750.149.070.558	556.469.727.334	667.763.672.801	734.540.040.081	807.994.044.090	741.885.440.482
2.1.3	Belanja Bunga	9.329.601.458	11.149.347.450	625.512.894				
2.1.4	Belanja Subsidi	-						
2.1.5	Belanja Hibah	65.979.318.933	34.102.868.120	27.616.709.000	30.378.379.900	33.416.217.890	36.757.839.679	33.750.380.069
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.111.600.000	2.614.400.000	2.100.000.000	2.520.000.000	3.024.000.000	3.628.800.000	3.054.240.000
2.2	Belanja Modal	1.175.765.469.046	635.684.793.326	217.217.673.750	522.886.371.289	586.754.007.812	646.292.038.151	595.335.336.014
2.2.1	Tanah	6.174.423.795	8.905.304.282		30.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	40.000.000.000
2.2.2	Peralatan dan Mesin	289.780.597.537	84.905.594.346	15.000.000	50.000.000.000	60.000.000.000	70.000.000.000	60.000.000.000
2.2.3	Gedung dan Bangunan	278.730.711.048	183.789.506.591	17.700.000.000	141.153.786.452	153.993.164.491	169.392.480.940	156.129.081.761
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	588.118.370.311	352.788.069.427	185.252.673.750	283.436.590.838	311.780.249.921	333.820.904.471	318.015.854.920
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	9.343.376.680	4.817.921.080	14.250.000.000	17.100.000.000	19.665.000.000	21.631.500.000	19.861.650.000
2.2.6	Aset Lainnya	3.617.989.675	478.397.600		1.195.994.000	1.315.593.400	1.447.152.740	1.328.749.334
2.3	Belanja Tak Terduga	138.053.926	10.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	138.053.926	10.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	168.065.080.191	169.093.506.685	165.562.264.231	165.562.264.231	165.562.264.231	165.562.264.231	165.562.264.231
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	6.446.444.191	9.698.420.737	9.698.450.000	9.698.450.000	9.698.450.000	9.698.450.000	9.698.450.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	161.618.636.000	159.395.085.948	155.863.814.231	155.863.814.231	155.863.814.231	155.863.814.231	155.863.814.231
	JUMLAH BELANJA	3.022.822.170.991	2.403.716.779.977	1.827.178.328.209	2.034.443.840.316	2.226.137.900.020	2.421.764.265.929	2.249.410.943.995

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan data proyeksi, total belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2024 hingga 2030. Pada tahun 2024, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3,02 triliun, mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1,83 triliun pada tahun 2026, sebelum kembali meningkat hingga mencapai Rp2,42 triliun pada tahun 2029, dan menurun kembali menjadi Rp2,25 triliun pada tahun 2030. Fluktuasi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja daerah, baik akibat dinamika pendapatan daerah maupun dampak struktural dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) yang mulai berdiri secara administratif sejak tahun 2028.

Komponen belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah, dengan rata-rata alokasi di atas 60 persen dari total belanja tahunan. Komponen ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Grafik berikut ini menampilkan proyeksi kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing komponen Belanja Operasi selama periode 2026-2030.



Gambar 2. 86 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Bapenda dan BKAD (Hasil Olah Data 2025)

Struktur belanja operasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 2026–2030 menunjukkan pola pengeluaran yang relatif stabil, dengan kecenderungan peningkatan total nilai belanja dari Rp1,409 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,574 triliun pada tahun 2029, sebelum menurun menjadi Rp1,453 triliun pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 1,13 persen per tahun, yang mencerminkan pendekatan fiskal yang hati-hati dalam menjaga efisiensi pengeluaran daerah, terutama dalam menghadapi perubahan struktur fiskal akibat pemisahan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) mulai tahun 2028.

Komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara konsisten menjadi dua pengeluaran terbesar, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 48,78 persen dan 48,76 persen terhadap total belanja operasi. Namun demikian, dinamika pertumbuhan kedua komponen ini menunjukkan arah yang berbeda. Belanja pegawai mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar –3,68 persen per tahun, menurun dari Rp822,59 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp674,82 miliar pada tahun 2030. Penurunan ini patut dicermati sebagai bagian dari penyesuaian struktur kepegawaian daerah, terutama menyusul beroperasinya IKN yang kemungkinan menyebabkan pengalihan sebagian aparatur sipil negara (ASN) ke otoritas IKN, sehingga beban belanja pegawai daerah mengalami penurunan.

Sebaliknya, belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan positif yang cukup signifikan, yaitu 7,95 persen per tahun, meningkat dari Rp556,47 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp741,89 miliar pada tahun 2030. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan layanan operasional pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus menunjukkan pergeseran beban fiskal dari belanja pegawai ke belanja layanan dan pengadaan barang, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan di tengah perubahan wilayah administratif.

Komponen belanja hibah berkontribusi rata-rata sebesar 2,25 persen terhadap belanja operasi, dengan pertumbuhan 5,45 persen per tahun. Meskipun kontribusinya kecil, belanja hibah mengalami tren peningkatan yang stabil, mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung entitas masyarakat, organisasi, dan institusi lain dalam penyelenggaraan fungsi publik.

Sementara itu, belanja bantuan sosial berkontribusi hanya 0,20 persen, tetapi menunjukkan pertumbuhan rata-rata tertinggi, yaitu 11,04 persen per tahun, dari Rp2,10 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp3,05 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat rentan, yang memerlukan intervensi sosial secara langsung, khususnya dalam konteks dampak sosial dan ekonomi dari pemekaran wilayah IKN.

Adapun belanja bunga dan subsidi tidak memberikan kontribusi signifikan, bahkan belanja bunga mengalami penurunan drastis hingga 100 persen, menunjukkan penurunan kewajiban utang daerah, atau penghentian sementara atas komitmen pembayaran bunga, yang berdampak pada efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa arah kebijakan belanja operasi Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan perlu lebih adaptif terhadap dinamika fiskal dan sosial, terutama dalam menghadapi perubahan kelembagaan dan geografis akibat keberadaan IKN. Fokus pada efisiensi belanja pegawai, optimalisasi belanja barang dan jasa, serta penguatan peran belanja sosial dan hibah menjadi kunci penting dalam mewujudkan belanja daerah yang berdaya guna, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.

Belanja modal mengalami penurunan tajam dari Rp1,17 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp217,21 miliar pada tahun 2026, namun kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp646,29 miliar pada tahun 2029. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya pengetatan belanja pembangunan fisik, seiring dengan fokus pembangunan nasional di wilayah IKN yang berdampak pada pergeseran prioritas

investasi daerah. Namun demikian, peningkatan belanja modal pasca-2026 menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur di luar wilayah IKN, serta memastikan kesinambungan pembangunan daerah.

Belanja tak terduga meningkat secara signifikan dari Rp138 juta pada tahun 2024 menjadi Rp35 miliar per tahun mulai tahun 2026 hingga 2030, sebagai bentuk antisipasi risiko dan kondisi darurat, termasuk menghadapi kemungkinan dampak transisi administratif terkait pemekaran wilayah IKN.

Komponen belanja transfer, yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, cenderung stabil di angka Rp165,56 miliar per tahun. Stabilitas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerintah desa serta membina keseimbangan fiskal antardaerah, meskipun dalam kondisi fiskal yang menantang.

Secara keseluruhan, dinamika belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memperlihatkan upaya penyesuaian fiskal yang responsif terhadap tantangan struktural yang muncul, khususnya terkait beroperasinya IKN sebagai entitas terpisah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan, serta memperkuat efisiensi pengeluaran guna memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah terbatasnya kapasitas fiskal yang akan terjadi pascapemisahan wilayah IKN.

Dengan demikian, ke depan diperlukan strategi pengelolaan belanja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada prioritas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal, agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat yang berada di luar wilayah IKN.

Untuk mewujudkan proyeksi belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menetapkan kebijakan pengelolaan belanja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Kebijakan belanja

daerah untuk periode 2026–2030 diarahkan pada sejumlah prinsip utama sebagai berikut.

- a. Mendesain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. Penganggaran berbasis kinerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/subkegiatan, hasil dan manfaat yang diperoleh, serta efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran;
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat membelanjakan secara efektif dan efisien secara signifikan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk mendanai proyek-proyek strategis. Melalui proyeksi pembiayaan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola utang secara lebih efisien, termasuk dalam menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan serta jadwal pelunasan utangnya. Selain itu, proyeksi pembiayaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko keuangan yang mungkin timbul, seperti risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa sumber pembiayaan yang digunakan tidak menimbulkan beban yang berlebihan terhadap anggaran di masa mendatang.

Pertimbangan utama dalam penyusunan proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari tahun 2020 hingga 2024 untuk setiap objek pembiayaan. Di samping itu, proyeksi juga disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, serta kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, termasuk kebijakan defisit anggaran. Melalui pendekatan tersebut, proyeksi pembiayaan diharapkan lebih realistis dan

akuntabel. Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 68 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	2025 (Perbub No 12 Th 2025)	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	300.563.236.271	55.630.675.640					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	300.563.236.271	55.630.675.640					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	55.130.675.640		13.782.628.391				
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	55.130.675.640	55.630.675.640	13.782.628.391				
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-						
	PEMBIAYAAN NETTO	245.432.560.631	(461.225.697)	(13.782.628.391)				

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Hasil Olah Data 2025)

Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp300,56 miliar, yang seluruhnya berasal dari SiLPA. Namun, nilai ini mengalami penurunan drastis menjadi Rp55,63 miliar pada tahun 2025, dan lebih jauh menurun menjadi Rp13,78 miliar pada tahun 2026. Tren penurunan ini mencerminkan adanya penyusutan saldo kas daerah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya beban belanja atau turunnya pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan penerimaan pembiayaan ini perlu dicermati secara strategis, mengingat SiLPA bukan sumber pembiayaan yang bersifat berkelanjutan, dan tidak dapat diandalkan sebagai andalan fiskal jangka panjang. Ketergantungan pada SiLPA yang terus menurun dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 mencapai Rp55,13 miliar, yang seluruhnya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Namun, pada tahun-tahun berikutnya (2026 dan seterusnya), tidak terdapat proyeksi pengeluaran pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban utang daerah berakhir pada tahun 2025, atau pemerintah daerah tidak lagi mengambil kebijakan pembiayaan melalui utang baru. Secara fiskal, hal ini memberikan ruang fiskal positif di masa depan, asalkan tidak terjadi defisit anggaran yang signifikan.

Dari sisi pembiayaan netto, pada tahun 2024 tercatat surplus pembiayaan sebesar Rp245,43 miliar, namun kemudian mengalami koreksi menjadi defisit pembiayaan sebesar Rp461,22 juta pada tahun 2025, dan lebih jauh menjadi defisit Rp13,78 miliar pada tahun 2026. Tren defisit pembiayaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan pembiayaan program-

program prioritas, terutama jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dan pengendalian belanja.

Secara keseluruhan, kondisi pembiayaan daerah ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi tantangan dalam mengelola transisi fiskal seiring dengan berdirinya Ibu Kota Negara (IKN), yang akan berdampak langsung terhadap sumber pendapatan dan kapasitas fiskal daerah. Penurunan penerimaan pembiayaan dan meningkatnya potensi defisit memerlukan respon kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk diversifikasi sumber pembiayaan, efisiensi pengeluaran, serta penguatan posisi kas daerah agar tetap sehat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Dengan demikian, arah kebijakan pembiayaan daerah ke depan harus diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal mandiri, pengurangan ketergantungan pada SiLPA, serta optimalisasi aset daerah dan potensi investasi strategis yang dapat menjadi sumber penerimaan pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional terkait IKN..

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

- a. Pembiayaan: Diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran.
- b. Pendanaan APBD Defisit: Jika APBD diperkirakan mengalami defisit, pembiayaan dapat diperoleh dari sumber-sumber penerimaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang tidak akan membebani daerah.

- c. Pendanaan APBD Surplus: Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- d. Penganggaran SiLPA: Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- e. Penyertaan Modal Daerah: Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.5.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 69 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	2025 (Perbub No 12 Th 2025)	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2.863.178.174.300	2.404.178.005.944	1.840.960.956.600	2.034.443.840.316	2.226.137.900.020	2.421.764.265.929	2.249.410.943.995
2	Penerimaan Pembiayaan	300.563.236.271	55.169.449.673	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	3.163.741.410.570	2.459.347.455.617	1.840.960.956.600	2.034.443.840.316	2.226.137.900.020	2.421.764.265.929	2.249.410.943.995
3	Pengeluaran: Belanja Pegawai	696.738.302.133	790.922.793.837	822.586.441.000	610.333.152.095	667.841.370.006	726.529.279.779	674.823.283.198
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.467.003.108.437	1.668.424.661.780	1.018.374.515.600	1.424.110.688.221	1.558.296.530.014	1.695.234.986.150	1.574.587.660.796

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Hasil Olah Data 2025)

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (KKKD) merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan fiskal aktual suatu pemerintah daerah setelah dikurangi belanja wajib, terutama belanja pegawai. Berdasarkan data proyeksi tahun 2024 hingga 2030, KKKD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren fluktuatif, namun secara umum mengalami penurunan dalam jangka menengah, seiring dengan dinamika fiskal dan perubahan struktur wilayah akibat pemisahan Ibu Kota Negara (IKN) dari administrasi kabupaten.

Pada tahun 2024, KKKD tercatat sebesar Rp2,47 triliun, mencerminkan kapasitas fiskal yang cukup besar dalam mendanai belanja pembangunan dan pelayanan publik di luar kebutuhan belanja pegawai. Namun, nilai ini menurun drastis pada tahun 2026 menjadi Rp1,01 triliun, seiring dengan turunnya pendapatan daerah secara signifikan serta berkurangnya penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran (SiLPA). Penurunan ini patut dicermati sebagai sinyal peringatan dini atas berkurangnya ruang fiskal daerah, yang dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan strategis secara optimal.

Meskipun pada tahun 2027 hingga 2029 KKKD kembali mengalami peningkatan bertahap, yaitu dari Rp1,42 triliun pada tahun 2027 menjadi Rp1,69 triliun pada tahun 2029, namun pada tahun 2030 nilai tersebut kembali menurun menjadi Rp1,57 triliun. Tren ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah tetap berada dalam tekanan struktural, terutama setelah tahun 2028 ketika wilayah IKN resmi berdiri sebagai entitas pemerintahan sendiri. Kehilangan sebagian besar potensi pendapatan daerah yang sebelumnya berasal dari wilayah IKN menyebabkan kapasitas fiskal Penajam Paser Utara mengalami penyusutan signifikan.

Sementara itu, belanja pegawai yang terus berada pada kisaran Rp610 miliar hingga Rp826 miliar per tahun menjadi beban tetap yang harus ditanggung pemerintah daerah. Meskipun ada upaya rasionalisasi, terutama terlihat dari penurunan belanja pegawai pada tahun 2027, belanja ini tetap menggerus porsi penerimaan daerah, yang seharusnya dapat dialokasikan lebih besar untuk belanja modal dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan efisien, terutama dalam mengelola belanja wajib, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan baru yang sah. Strategi penguatan kapasitas fiskal jangka panjang, seperti penataan aset daerah, peningkatan layanan publik berbayar, dan kolaborasi pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta atau pemerintah pusat, menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158, dalam perencanaan pengeluaran, kapasitas keuangan daerah dibagi ke dalam tiga kelompok prioritas.

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencakup:

- a. Infrastruktur merata dan berkualitas
- b. Ketercukupan sumber daya air
- c. Pelayanan kesehatan berkualitas
- d. Pelayanan pendidikan berkualitas
- e. Peletarian budaya dan kearifan lokal
- f. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif
- g. Pengembangan kompetensi SDM
- h. Pengembangan pertanian
- i. Peningkatan investasi padat karya
- j. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan rukun tetangga
- k. Peningkatan kesejahteraan penggerak pembangunan SDM
- l. Penurunan beban pengeluaran

Program-program prioritas tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (*mandatory spending*) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas Pertama.

3. Prioritas III digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Kesimpulannya, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Penajam Paser Utara menunjukkan kecenderungan menurun pasca-2024, sebagai dampak dari berkurangnya pendapatan dan keterbatasan ruang fiskal akibat belanja wajib. Pemerintah daerah perlu segera melakukan antisipasi dan reformasi fiskal agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan struktural pasca-berdirinya IKN.

2.6 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bagian ini menyajikan analisis atas permasalahan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Sub bab ini membahas 2 (dua) hal, yaitu permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.6.1.1 Permasalahan lintas sektor

Pembangunan daerah merupakan agenda penting dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif.

Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup:

Tabel 2. 70 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan	Masih rendahnya kesejahteraan sosial	Investasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal
			Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan
			Pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia
			Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri belum optimal
			Pengembangan IKM, UMKM, dan Koperasi belum optimal
			Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor ekonomi potensial (pertanian, perikanan, pariwisata)
			ekosistem ekonomi dan talenta digital yang masih rendah
			Belum optimalnya penanganan akses rumah tidak layak huni
			Implementasi insentif/disinsentif investasi belum optimal
		Belum optimalnya keberdayaan sosial	Belum optimalnya perlindungan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat
			Kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan belum memadai

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya infrastruktur perhubungan pendukung perekonomian	Belum optimalnya sistem manajemen pelayanan perhubungan
		Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat terbangun
Transformasi Sosial	Belum optimalnya kualitas SDM	Belum meratanya akses dan kualitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan	Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata
			Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi guru
		Belum optimalnya tingkat partisipasi siswa	Masih tingginya angka putus sekolah
			Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
		Belum optimalnya peningkatan keluarga yang berkualitas	Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
			Belum optimalnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak
	Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan	Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
			Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal
			Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya gerakan PHBS
			Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum memenuhi standar
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang belum optimal	Belum optimalnya akses terhadap pelayanan publik
			Ekosistem inovasi daerah yang masih rendah
			Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas dan integritas
			Belum optimalnya sistem kerja dinamis dan kolaborasi lintas sektor
			Kualitas manajemen ASN dalam mendukung kinerja belum optimal
			Kualitas tata kelola desa yang masih perlu ditingkatkan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal
			Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah
			Pengendalian alih fungsi lahan yang belum optimal
			Belum optimalnya rehabilitasi lahan pasca tambang
			Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal
	Penurunan tingkat risiko	Belum optimalnya	Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	bencana belum optimal	penyelenggara an penganggulan ganc bencana dan keselamatan	kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
			Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penanganan banjir dan kebakaran
			Belum meratanya cakupan pelayanan penganggulan bencana dan kebakaran
			Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Belum optimalnya upaya penanggulan an risiko kelompok rentan	Masih tingginya pernikahan dini/anak
			Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlanar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis
			Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
			Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
			Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran
			Belum optimalnya pengarusutamaan gender

Sumber: Analisis Data, 2024

2.6.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Pada

bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada hasil *focus group discussion*. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 71 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum meratanya pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Kurangnya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
			Rendahnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan prasarana kesehatan	Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
			Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas
			asih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dasar	Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat).
			Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.
			Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi.
			Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi.
			Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
			Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.
			Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
			Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
			Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
			Belum ditetapkan peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan.
			Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyediaan permukiman layak huni	Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
			Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU).
			Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
			Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.
			Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
			Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
			Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya angka kriminalitas daerah	Penguatan sinergi dalam pencegahan tindak kejahatan belum optimal
			Ketaatan masyarakat terhadap peraturan keamanan dan ketertiban umum masih rendah
		Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana	Implementasi mitigasi struktural dan nonstruktural belum optimal
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih terkendala keterbatasan jumlah layanan pos pemadam
6	Sosial	Pengentasan kemiskinan belum optimal	Pemberdayaan terhadap kelompok rentan belum optimal
			Kolaborasi antar sektor perlu diperkuat dalam menangani kemiskinaN
			Pemberdayaan sosial dan bantuan sosial belum tepat sasaran
		Tingginya pernikahan dini/anak	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah
			Masih tingginya pergaulan bebas di kalangan remaja
			Pola asuh anak belum optimal
			Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
7	Tenaga Kerja	Penanganan pengangguran belum optimal	Masih minimnya kesempatan kerja
			Kurangnya link and match angkatan kerja dengan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI)
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kualitas calon tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya keberdayaan perempuan	Peranan aktif perempuan dalam dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal
			Penerapan anggaran responsif gender belum optimal

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan belum optimal
			Budaya patriarki yang lebih mengunggulkan laki-laki daripada perempuan masih cukup kuat
		Belum optimalnya perlindungan anak	Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal
			Upaya pemenuhan hak anak belum optimal
			Kasus pernikahan dini masih cukup banyak
9	Pangan	Ketahanan pangan belum optimal	Ketersediaan pangan belum optimal
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Pemanfaatan pangan belum memadai
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan	Tertib pengelolaan pertanahan belum berjalan optimal
			Fasilitasi penyelesaian konflik agraria belum optimal
			Kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi pertanahan masih rendah
			Belum optimalnya fasilitasi penerbitan sertifikat tanah masyarakat
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan tubuh air belum optimal
			Penanganan persampahan berbasis komunitas masyarakat yang belum terimplementasikan
			Penanganan dan pengurangan timbunan sampah belum efektif
			Potensi emisi GRK akibat kebakaran lahan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
			Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		belum berjalan optimal	pencatatan sipil belum menjangkau seluruh masyarakat
		Basisdata kependudukan belum dimanfaatkan secara luas	Implementasi pengintegrasian basisdata kependudukan belum optimal
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum optimalnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
			Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih rendahnya kepesertaan KB aktif	Pemahaman masyarakat masih rendah terhadap pentingnya KB
			Belum terpenuhinya kecukupan tenaga penyuluh keluarga berencana (KB)
			Pendampingan pada keluarga untuk pola asuh yang baik belum optimal
15	Perhubungan	Belum adanya layanan transportasi publik memadai	Transportasi masal dan terintegrasi belum optimal
			Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat
		Manajemen perhubungan dan fasilitas keselamatan belum optimal	Ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan belum optimal
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan informasi publik	Masih terdapatnya beberapa area blank spot, untuk daerah mentawir dan Suko Mulyo
		Belum optimalnya proses administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik berbasis elektronik	Belum optimalnya pengembangan sistem TIK
			Kapasitas SDM TIK masih terbatas
17			Kapasitas SDM pengelola koperasi belum optimal

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kapasitas manajerial koperasi belum optimal	Terbatasnya permodalan dan jenis usaha yang dikelola
		Belum optimalnya omzet UKM	Pembinaan terhadap para pelaku UKM belum optimal
			Masih lemahnya daya saing produk UMKM
			Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan IT dalam pemasaran
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi masih perlu ditingkatkan	Identifikasi potensi investasi belum optimal
			Promosi investasi belum optimal
			Masih minimnya pemanfaatan IT dalam pelayanan investasi daerah
			Pengawasan dan pengendalian investasi belum optimal
			Kualitas pelayanan perizinan belum optimal
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya upaya pembinaan kepada pemuda
			Masih kurangnya pengetahuan, ketrampilan, dan akses modal untuk wirausaha muda
		Belum optimalnya prestasi dan pembinaan olahraga	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
			Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi pelatih
			Belum optimalnya pembinaan atlet menurut mulai dari usia sekolah
			Masih terbatasnya kompetisi olahraga yang diikuti
20	Statistik		Implementasi pembaruan data yang belum optimal

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya pemenuhan data statistik terbaru	Database daerah belum terintegrasi optimal
			Kurang optimalnya metode dan sistem pengumpulan data
			Pemenuhan data statistik sektoral belum optimal
21	Persandian	Implementasi urusan persandian yang belum optimal	Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian
			Literasi terkait persandian dan keamanan informasi belum optimal
			Pemenuhan infrastruktur bidang persandian belum optimal
22	Kebudayaan	Implementasi urusan kebudayaan belum optimal	Sarana promosi kebudayaan masih belum optimal
			Pengembangan sanggar seni budaya yang masih minim
			Perubahan gaya hidup dan nilai yang berkembang di masyarakat (globalisasi)
23	Perpustakaan	Belum optimalnya literasi masyarakat	Sarana dan prasarana perpustakaan masih perlu ditingkatkan
			Layanan perpustakaan keliling masih terbatas
			Pembinaan perpustakaan sekolah masih kurang optimal
			Gedung layanan belum memadai sesuai standar
			Masih kurangnya koleksi buku digital dan non digital
			Belum optimalnya peran seluruh stakeholder untuk meningkatkan minat baca
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan kearsipan	Pemeliharaan dan perlindungan arsip daerah belum sesuai standar
			Pengelolaan arsip statis belum optimal
			Terbatasnya SDM arsiparis di dinas kearsipan dan masing-masing OPD
Urusan Pemerintahan Pilihan			

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya	Masih rendahnya pengelolaan pasca panen dan nilai tambah produksi perikanan
			Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan
			Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah
			Kapasitas sumber daya manusia pembudidaya/ penangkap ikan belum optimal
			Akses terhadap bantuan permodalan belum optimal
26	Pariwisata	Kunjungan wisatawan belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi belum optimal
			Pemasaran pariwisata belum optimal
			Pengembangan kapasitas sumber daya manusia belum optimal
			Pengembangan ekonomi kreatif belum memadai
27	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia petani belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Terbatasnya kapasitas irigasi teknis dalam mendukung produktivitas pertanian
			Metode pertanian masih konvensional
			Pencegahan hama penyakit belum optimal
			Penanggulangan bencana pertanian belum optimal
			Belum optimalnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
		Produksi hasil peternakan belum optimal	Kelahiran ternak belum memadai
			Ketersediaan indukan yang belum mencukupi
			penanggulangan kematian ternak belum optimal

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Kapasitas sumber daya manusia peternak belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Produksi Hijauan Pakan Ternak yang masih rendah
			Metode peternakan masih konvensional
			Pencegahan penyakit ternak belum optimal
28	Perdagangan	Tingkat kelancaran distribusi barang belum optimal	Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia belum memadai
			Informasi ketersediaan dan harga barang belum memadai
29	Perindustrian	Nilai produksi IKM belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Sarana dan prasarana pendukung produksi belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
30	Transmigrasi	Monitoring dan evaluasi ke wilayah transmigrasi belum memadai	Sarana dan prasarana belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia belum memadai
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
31	Sekretariat Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum optimal terutama dalam penguatan kinerja lintas sektor	Kenaikan AKIP dan capaian Reformasi Birokrasi belum optimal
			Peran PD dalam peningkatan AKIP daerah belum optimal
			Pengelolaan data kinerja belum optimal terutama ketersediaan dan sinkronisasi data
		Pelayanan publik belum berdampak terhadap masyarakat	Masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik
			Inovasi daerah masih rendah

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
32	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya output produk hukum dari DPRD	Pemahaman terkait perencanaan belum optimal terutama untuk memastikan sinkronisasi program antara eksekutif dan legislatif
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
33	Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan belum optimal	Konsistensi perencanaan jangka menengah dengan tahunan belum optimal
			Tantangan penyesuaian peraturan teknis dari pemerintah pusat terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinamis
			Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal
34	Keuangan	Kapasitas fiskal dan penganggaran daerah belum optimal	Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat
			Perusahaan Umum Daerah belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah
			Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain
			Konsistensi pagu anggaran di RPJMD dengan tahunan belum optimal
			Ketersediaan data dan ketepatan waktu penganggaran dan realisasi belum optimal
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalitas ASN	Kualitas dokumen belum optimal
			Pembinaan terhadap pelanggaran disiplin belum optimal
			Masih terbatasnya pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
			Penataan pegawai non ASN sesuai dengan regulasi belum optimal
			Kebutuhan pemenuhan kompetensi ASN belum terpenuhi
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalitas ASN	Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
36	Penelitian dan Pengembangan	Riset dan inovasi belum optimal	Ekosistem riset dan inovasi daerah masih lemah
			Masih terbatasnya fungsional peneliti
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
37	Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) belum optimal	Kapabilitas pengawasan belum optimal, karena belum mampu memeriksa semua objek pemeriksaan
			Keterlambatan penyerahan dokumen dari PD untuk direviu
			Masih belum optimalnya implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai jadwal
Unsur Kewilayahan			
38	Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Standar sarana prasarana pelayanan belum terpenuhi secara optimal
		Belum optimalnya koordinasi kewilayahan	Peran koordinasi pendataan belum optimal
			Tantangan penyelesaian potensi konflik di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi pembangunan desa	Belum optimalnya pendampingan pengembangan potensi kewilayahan di desa-desa
Unsur Pemerintahan Umum			
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih adanya potensi konflik sosial	Belum optimalnya pendidikan politik, partisipasi politik dan peran gender

Sumber: Analisis Data, 2024

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis ini memiliki sifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang atau menengah dan menentukan pencapaian

tujuan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah diperoleh dari analisis hasil pemetaan masalah dan analisis isu dalam konteks global, nasional, dan regional.

2.6.2.1 Isu Internasional

Perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah harus mempertimbangkan isu strategis internasional atau global. Isu internasional akan memandu perumusan kebijakan daerah dalam merespon dinamika global sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif. Identifikasi atau telaah terhadap isu internasional ini mengacu pada RPJPN 2025-2045 seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 72 Telaah Isu Strategis Internasional

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Demografi Global	• Peningkatan pesat populasi dunia yang mencapai 9,45 miliar jiwa. • Peningkatan pesat populasi lansia
Perkembangan Teknologi	• Ancaman hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang digantikan oleh teknologi • Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih
Konstelasi Perdagangan Global	• Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun • Urgensi pemanfaatan peluang melalui pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga kerja sama tingkat regional
Urbanisasi Dunia	• Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global • Perkotaan akan menjadi pusat perekonomian dan kehidupan • Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global
Luar Angkasa	• Peluang inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian • Limbah luar angkasa yang mengancam operasional satelit
Tata Kelola Keuangan Global	• Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal • Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Perubahan Iklim	• Peningkatan suhu global • Kejadian cuaca ekstrim • Bencana alam
Persaingan Sumber Daya Alam	• Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. • Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan.
Pertumbuhan Kelas Menengah	• Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari seluruh populasi global. • Fenomena generasi <i>sandwich</i>, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan.
Geopolitik dan Geoekonomi	• Persaingan antar negara yang menegang • Munculnya poros kekuatan baru • Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan.

Sumber: Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029, diolah

2.6.2.2 Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Isu nasional merupakan tantangan dan peluang di tingkat nasional yang harus direspon oleh seluruh daerah. Isu nasional jangka menengah berkaitan dengan isu RPJMN tahun 2025-2029. Dokumen RPJMN tahun 2025-2029 berkaitan dengan penguatan fondasi Pembangunan nasional tahap pertama dalam RPJPN 2025-2045. Hasil telaah terhadap isu strategis nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 87 Isu nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Isu nasional yang tidak kalah penting karena berkaitan erat dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN yang sedang berjalan dan akan berjalan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan perlu direspon secara tepat oleh daerah sekitar. Penajam Paser Utara memiliki dampak besar di dalam konteks pembangunan IKN ini. Terdapat peluang bagi Penajam Paser Utara untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi ketika mampu sinergis dengan arah pembangunan IKN, tetapi di sisi lain juga terdapat tantangan antara lain berupa mendesaknya penataan ulang wilayah danantisipasi dampak perubahan sosial, budaya dan lingkungan.

Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 IKN memiliki visi “Kota Dunia untuk Semua” dan memiliki tiga tujuan utama yaitu simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan. IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. IKN memiliki tema pembangunan yang dapat diacu oleh daerah sekitar agar terbangun sinergi pembangunan. Tema pembangunan berdasarkan prinsip *Key Performance Indicator* (KPI) IKN sebagai berikut:

1. Mendesain sesuai kondisi alam: solusi berbasis alam, jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau, restorasi hutan, konservasi habitat dan ekosistem (termasuk kehidupan laut).
2. Sirkuler dan tangguh: air, energi, dan ketahanan suplai pangan; membangun ketahanan masyarakat, adaptasi perubahan iklim.
3. Bhineka tunggal ika: integrasi semua lapisan masyarakat, akses ke ruang komunitas/kultural/sipil/publik, peningkatan ketahanan sosial.
4. Aman dan terjangkau: keamanan pribadi/persepsi keamanan; akses ke perumahan terjangkau; suplai yang cukup untuk perumahan yang aman, beragam, dan terjangkau.

5. Terhubung, aktif dan mudah diakses: transportasi yang aktif dan berkelanjutan; lingkungan yang mengedepankan berjalan kaki; akses yang nyaman ke fasilitas dasar, sosial, masyarakat (termasuk pendidikan dan kesehatan), dan konektivitas regional.
6. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi: konektivitas dan akses digital, infrastruktur yang siap secara digital, serta keterlibatan dan pelayanan warga.
7. Rendah emisi karbon: energi terbarukan, desain pasif, optimalisasi dan pengurangan penggunaan energi.
8. Peluang ekonomi untuk semua: pertumbuhan dan peningkatan PDB yang tinggi, akses ke pekerjaan, mendukung model bisnis ekonomi sirkuler, dan ketahanan ekonomi.

2.6.2.3 Isu Regional Pulau Kalimantan

Rancangan Teknokratik RPJMN telah mengidentifikasi beberapa isu strategis regional Pulau Kalimantan. Isu-isu tersebut secara umum terkait dengan persoalan pelayanan dasar, konektivitas wilayah, penguatan nilai tambah SDA hingga persoalan lingkungan. Rumusan isu Pulau Kalimantan berpijak dari hasil evaluasi pembangunan sebagai berikut:

		Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
		Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
		- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). - Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara. - Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur). - Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
		Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

Gambar 2. 88 Isu regional Kalimantan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Respon atas isu-isu Pulau Kalimantan salah satunya melalui penetapan tema pembangunan Pulau Kalimantan berupa “Superhub Ekonomi Nusantara”. Superhub ini diarahkan sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.

2.6.2.4 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur di dalam RPJPD telah mengidentifikasi isu-isu pembangunan jangka panjang berupa kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, akselerasi transformasi ekonomi, pemenuhan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi, peluang pembangunan superhub ekonomi dan mitra IKN, kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi GRK, tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel menuju *world class government*, dan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.

Isu-isu tersebut melandasi visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur, yaitu “Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan periode pertama tahun 2025-2029, yaitu pembangunan landasan transformasi sebagai superhub ekonomi dan mitra IKN. Pentahapan pembangunan setiap misi pada periode pertama, yaitu:

Tabel 2. 73 Arah Kebijakan Periode Pertama RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029
Misi 1 Mewujudkan transformasi sosial	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi	Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja.
Misi 3 Mewujudkan transformasi tata kelola	Pemantapan sistem merit ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029
	publik, penegakan regulasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Misi 4 Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substantial dan stabilitas ekonomi daerah.	Penguatan kerjasama daerah keamanan daerah, peningkatan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal secara inklusif.
Misi 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal	Penguatan sarana dan prasarana pendukung praktik kearifan tradisional dan sosial budaya dalam pembangunan lingkungan dan ekologi.
Misi 6 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur dasar pemukiman berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan inklusivitas sosial.
Misi 7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana dan prasarana berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan berbasis perencanaan berbasis lingkungan dan ekologi.
Misi 8 Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan	Peningkatan kapasitas antar pemangku dan pihak pelaksana pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas sosial.

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

Provinsi Kalimantan Timur di dalam Rancangan Teknokratik RPJMN memiliki tema pembangunan “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia”. Tema tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur. Selain tema, Rancangan Teknokratik RPJMN juga merumuskan target kinerja makro Kalimantan Timur pada tahun 2029, yaitu share PDRB 5,0-5,0 persen; LPE 5,6-6,9 persen; kemiskinan 1,62-2,12 persen; gini ratio 0,309-0,312; TPT 4,54-5,31 persen. Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, terdapat indikasi intervensi untuk Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. **Transformasi sosial:** penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kabupaten/kota dengan kasus tertinggi; wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya; percepatan peningkatan partisipasi pendidik dan

pengembangan perguruan tinggi eksisting yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. **Transformasi ekonomi:** peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, batu bara, migas dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi; pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein, habati dan energi terbarukan; pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di Balikpapan) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah; pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur; pengembangan angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan di Kota Samarinda dan Balikpapan; pengembangan pembangkit listrik hidro, sistem penyimpanan energi, interkoneksi sistem Kalimantan 150 kV serta sistem terisolasi (*isolated grid*).
3. **Transformasi tata kelola:** pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah; peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
4. **Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia:** peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan

pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon; peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.

5. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi:** peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat; pengembangan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal; peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara; pengembangan irigasi di WS Mahakam untuk mendukung ketahanan pangan; pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

Lebih lanjut lagi, Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah jangka menengah (tahun 2025-2029) di Kalimantan Timur. Adapun isu strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah
5. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
6. Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK
8. Kemandirian Pangan
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

2.6.2.5 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Penajam Paser Utara

Penelaahan terhadap isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka panjang dengan kebijakan jangka menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu kewilayahan, hasil evaluasi RPJPD, FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta observasi lapangan, dan penelaahan KLHS RPJPD. Berikut adalah isu strategis jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2025-2045.

1. Pembangunan SDM yang produktif dan berdaya saing

Sumber Daya Manusia merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa faktor yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut merupakan fondasi yang sangat menentukan kondisi sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat serta kualitas tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain bidang pendidikan dan kesehatan, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek perlindungan sosial. hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang mencakup menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial serta pemberdayaan bagi individu maupun kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran dapat dilakukan dengan melakukan integrasi data penerima

bantuan serta pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak.

Penguatan fondasi Sumber Daya Manusia secara optimal akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat serta kualitas tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif perlu untuk terus dilakukan guna mengimbangi persaingan di masa yang akan datang di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pembangunan dan penguatan pelayanan dasar menjadi kunci utama pembangunan daerah khususnya dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial adaptif

Data indeks gini dan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa rendahnya ketimpangan tidak disertai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu tampak dari indeks gini yang hanya pada angka 0,274 dan berhasil berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur serta nasional, namun tingkat kemiskinan juga mencapai 7,25 persen pada tahun 2022. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang ditandai dengan adanya perluasan sumber penghidupan yang dapat diakses serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga harus disertai dengan adanya perlindungan sosial yang adaptif. Pada dasarnya, perlindungan sosial adaptif merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui upaya penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pada masyarakat rentan. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk merespon efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif.

3. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha pertanian sebesar 19,41 persen dan sektor pertambangan dan penggalan sebesar 22,62 persen. Angka tersebut mengindikasikan 42 persen perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara digerakkan oleh sektor primer yang bergantung pada sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Besarnya dominasi sektor pertambangan dan penggalan untuk saat ini memang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tetapi kontribusi tersebut dikhawatirkan akan semakin turun seiring dengan perubahan pola konsumsi energi yang perlahan mulai mengarah pada energi baru terbarukan yang berkelanjutan.

Selain sifatnya yang ekstraktif dengan jumlah cenderung terbatas, sektor primer juga memiliki nilai tambah yang paling rendah jika dibandingkan dengan sektor usaha sekunder dan tersier. Kondisi ini terkonfirmasi dari nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar 13,19 triliun rupiah berdasar harga berlaku atau 7,43 triliun rupiah berdasar harga konstan. Angka tersebut menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kabupaten dengan nilai PDRB terendah kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Mahakam Hulu sejak tahun 2010 hingga 2022.

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya berfokus pada perekonomian di dalam daerah saja tetapi juga perlu mempertimbangkan kehadiran IKN. Kehadiran IKN dapat membawa dampak positif apabila dapat direspons dengan tepat namun dapat membawa persoalan baru jika tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Masifnya migrasi penduduk ke IKN diprediksi akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang berimbas pada perluasan pangsa pasar. Namun, jika daerah mitra IKN, salah satunya yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak dapat memenuhi permintaan tersebut maka ancaman inflasi dapat membayangi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perencanaan

pembangunan perekonomian daerah juga perlu memperhatikan perencanaan pembangunan IKN agar dapat mengantisipasi perubahan pola konsumsi dan permintaan sehingga ke depannya Kabupaten Penajam Paser Utara dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah maupun IKN dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan terlebih lagi pola aktivitas perekonomian daerah selama ini bertopang pada aktivitas ekstraktif. Pembangunan ekonomi perlu dijalankan secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan nilai PDRB secara besar-besaran tetapi juga tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

4. Pemerataan infrastruktur daerah yang berkualitas

Konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama wilayah Kalimantan yang mengakibatkan tingginya biaya logistik serta biaya pembangunan wilayah. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Total panjang jalan Kabupaten tahun 2022 sepanjang 1.243,80 Km dengan rincian panjang jalan mantap 328,74 Km (26,43%), sedang 149,60 Km (12,03%), rusak ringan 103,10 Km (8,29%) dan rusak berat 662,36 Km (53,25%). Persentase jaringan jalan dalam kondisi rusak lebih besar jika dibandingkan dengan jalan dalam kondisi mantap, lebih dari itu belum optimalnya keberadaan terminal serta angkutan umum menjadi penyebab rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Potensi alih fungsi lahan yang akan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjadi perhatian dalam penataan tata ruang, karena dampak dari perkembangan Ibu Kota Nusantara pasti akan dirasakan. Sehingga perlu adanya

upaya preventif untuk pemanfaatan ruang agar tidak terjadi degradasi lahan dan perubahan peruntukan ruang yang membawa dampak negatif untuk lingkungan. Perlu adanya upaya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, perlu adanya upaya pembangunan jaringan drainase yang dapat mendukung produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan, sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

5. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan

Ketersediaan air bersih dibutuhkan secara kontinyu bagi masyarakat untuk hidup layak, pengelolaan lahan, dan mendukung sektor industri. Disisi lain kualitas air Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 tergolong rendah berdasarkan nilai IKA 48,33. Akses sumber air bersih bagi masyarakat masih merata, pada tahun 2022 sekitar 41 persen rumah tangga yang terlayani air bersih dan selebihnya memanfaatkan sumur, air sungai, dan waduk. Catatan tahun 2023 masih terdapat beberapa desa yang mengalami kekeringan pada saat musim kemarau seperti Desa Rintik dan Desa dan Desa Sumber Sari di Kecamatan Babulu. Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian yang belum seluruhnya teraliri irigasi teknis.

Dari segi infrastruktur, setiap kecamatan terdapat beberapa embung dan bendungan yang difungsikan untuk penyedia air bersih dan irigasi. Pengelolaan sumber air baku yang belum optimal menjadi permasalahan mendasar yang harus segera dituntaskan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengelolaan sumber air baku yang berkelanjutan dapat diadopsi untuk mengoptimalkan layanan air bersih dengan bertumpu pada pembangunan sistem terintegrasi dan peningkatan infrastruktur sumber daya air yang resilien terhadap perubahan iklim dan mendukung pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa waduk dan bendungan yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik non fosil dengan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pengelolaannya yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan komitmen

zero emission. Bendungan dan waduk menampung air dalam jumlah besar dengan prinsip memanen air, sehingga terdapat keberlanjutan sumberdaya air. Pengembangan PLTA memacu efektivitas bendungan, gerak aliran air untuk menggerakkan turbin PLTA sekaligus dialirkan untuk kebutuhan sumber air baku dan irigasi pertanian.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai upaya untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup agar tetap selalu terjaga dengan baik. Kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu daerah, namun telah menjadi isu di level nasional bahkan global. Di tingkat nasional, isu lingkungan telah tercermin dalam misi dan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045, sedangkan di level global, telah dirumuskan tiga isu lingkungan yang dikenal tripple planetary crisis. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka urgensi terhadap pengelolaan lingkungan sangat tinggi dan harus direspon dengan tepat.

Pengelolaan sampah, alih fungsi lahan dan beragam bencana seperti banjir, menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pengelolaan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terlebih lagi, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan IKN, tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat menerima dampak terhadap kondisi kualitas lingkungan hidupnya. Berbagai kondisi tersebut tentunya perlu mendapatkan intervensi secara tepat, seperti penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait kesesuaian tata ruang, mempertahankan wilayah imbuhan air, hingga peningkatan resiliensi penanggulangan bencana perlu untuk diintegrasikan dalam setiap periode pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Tata kelola kolaboratif & transformasi digital

Isu strategis di bidang tata kelola pemerintahan berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dan transformasi digital. Tata kelola kolaboratif ini merespon dinamika pembangunan daerah yang saat ini wilayahnya dibangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan adanya pembangunan IKN secara otomatis Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholders guna memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir dampak negatif IKN. Hal ini menandakan bahwa kolaborasi pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah semata tetapi lebih luas lagi ke seluruh stakeholders pembangunan non pemerintah, seperti masyarakat sipil dan swasta. Oleh karena itu, prinsip partisipasi dan transparansi penting untuk diterapkan dalam kolaborasi pemerintahan agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara semu, tetapi mampu berpartisipasi aktif di seluruh aspek pembangunan daerah.

Transformasi digital mengandaikan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena perkembangannya sangat pesat dan sudah menjadi kebutuhan bahkan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan transformasi digital dibutuhkan berbagai sarana prasarana yang memadai dan kualitas ASN yang baik. Sarana dan prasarana berkaitan dengan bangunan perkantoran yang belum memadai saat ini. Sedangkan kualitas ASN berkaitan dengan profesionalitas dan integritas ASN dalam merespon perkembangan tersebut.

Selain itu, penataan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemekaran wilayah penting untuk dilakukan mengingat rentang kendali yang sangat luas dan adanya wilayah Penajam Paser Utara yang digunakan untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, penataan wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penataan wilayah juga untuk memperjelas administrasi kewilayahan Penajam Paser Utara yang saat ini digunakan untuk pembangunan IKN

8. Integrasi dan Sinergi Pembangunan dengan Ibu Kota Nusantara

Dengan adanya pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku menjadi isu strategis ke depan. Pembangunan IKN tidak hanya mendatangkan manfaat bagi daerah, melainkan juga memiliki dampak negative terhadap pembangunan daerah. Dampak positif dari adanya pembangunan IKN saat ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat aktivitas ekonomi yang meningkat terutama di bidang konstruksi membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Namun, di sisi lain menimbulkan potensi permasalahan, seperti potensi alih fungsi lahan secara masif yang dikhawatirkan berdampak pada konservasi sumber daya air dan kualitas lingkungan hidup menurun.

Sebagian wilayah dan penduduk Penajam Paser Utara yang turut masuk ke dalam kawasan IKN, mengharuskan adanya integrasi dan sinergitas pembangunan antara Penajam Paser Utara dengan IKN. Integrasi dan sinergitas pembangunan dengan IKN menjadi isu strategis yang harus direspon baik dalam kebijakan jangka panjang, menengah, maupun pendek. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus memastikan integrasi dan sinergitas pembangunan IKN memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya terhadap pembangunan Penajam Paser Utara, sehingga dapat maju dan berkembang bersama. Integrasi dan sinergitas harus diimplementasi di seluruh aspek pembangunan daerah, baik ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik agar terwujudnya pembangunan daerah yang menyejahterakan

2.6.2.6 Telaah RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Kondisi geografis di Kabupaten Penajam Paser Utara jika ditinjau dari kondisi topografinya, maka dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan. Daerah perbukitan yang tersebar di bagian utara dan barat merupakan bentukan dari struktur geologi

lipatan yang berbentuk antiklinal dan sinklinal yang membentuk sistem rekahan dan rongga akibat pelarutan berupa batu gamping yang banyak menyimpan air. Daerah dataran tertutup lapisan tanah yang terdiri dari lempung, lempung pasir dan napal. Pada umumnya berupa dataran alluvial yang batuanannya bersifat kedap air, oleh karena itu peresapan air hujan lebih kecil apabila dibandingkan dengan daerah batu gamping. Pelayanan air bersih ataupun air minum di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilayani oleh PDAM masih belum menjangkau seluruh kecamatan, Kecamatan Babulu belum terlayani.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pesisir yang memiliki banyak sungai yang bermuara pada selat Makasar yang terletak diantara Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Potensi air permukaan tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari, karena adanya sungai yang mendukung imbuhan air bawah tanah. Banyak mata air yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat ini baru mata air yang terletak di Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku yang telah dikelola untuk dimanfaatkan. Tutupan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan luasan 293.308 hektar atau 16,72% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Selanjutnya, tutupan lahan dengan luasan mencapai 15,41% atau 45.262,67 hektar merupakan kebun campuran. Luasan RTH di Kabupaten Penajam Paser Utara masih jauh dari luas ideal yang dipersyaratkan, yakni baru memiliki RTH sebesar 0.0047 hektar dari total kebutuhan 5.420 hektar.

Jaringan transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara telah didukung oleh jalan darat yang telah terbangun di seluruh kecamatan. Kondisi jalan tidak semuanya dalam kondisi baik, bahkan jalan sepanjang 143,29 Km dalam keadaan rusak berat. Aksesibilitas masyarakat antar desa telah terfasilitasi dengan bus perkotaan maupun angkutan perdesaan yang dilengkapi dengan shelter, halte, maupun terminal. Namun karena letaknya tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, banyak angkutan yang berhenti di sembarang tempat. Selain jaringan jalan dan angkutan, transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara juga dilengkapi dengan transportasi laut atau sungai. Jalur menuju dan dari Kabupaten Penajam Paser Utara lebih cepat jika ditempuh dengan menyeberang menggunakan *speed boat*, kapal kelotok, atau kapal penumpang.

Berdasarkan isu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dirumuskan tujuan penataan ruang yaitu "Mewujudkan Daerah sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang berbasis pertanian, industri, perikanan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan". Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemantapan peran pusat pelayanan skala lokal dan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru Wilayah
 - a. Pemantapan Peran PKL Koridor Penajam – Petung sebagai Pusat Pemerintahan dan Perdagangan Jasa
 - b. Mengembangkan Pusat Permukiman dalam Bidang Jasa, Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur
2. Kebijakan Pemerataan jaringan infrastruktur yang menjamin konektivitas antar kawasan guna meningkatkan daya saing wilayah
 - a. mengoptimalkan fungsi jaringan jalan eksisting dan pengembangan jaringan jalan baru guna menunjang aksesibilitas wilayah
 - b. mengembangkan sistem transportasi intermoda pada lokasi pusat kegiatan ekonomi menuju ke pusat pertanian, perikanan, industri dan pelayanan pariwisata
 - c. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif melalui energi baru dan terbarukan
 - d. mengembangkan sarana prasarana sumber daya air sebagai sumber air baku bagi pemenuhan kebutuhan air minum

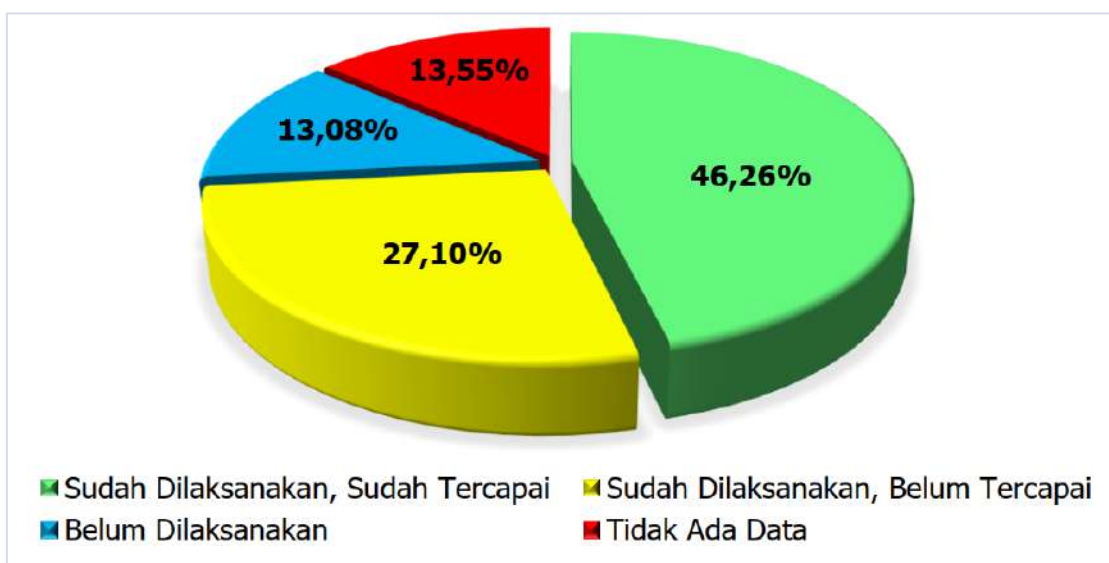
- e. meningkatkan pelayanan jaringan / prasarana telematika di seluruh wilayah kabupaten
 - f. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan
 - g. mengembangkan sarana prasarana pengelolaan limbah
 - h. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan
3. Kebijakan Pengembangan koridor ekonomi berbasis pertanian, perikanan pariwisata yang didukung oleh perdagangan dan logistik
- a. mengembangkan kawasan pusat ekonomi terpadu yang berbasis agropolitan
 - b. mengembangkan kawasan pusat ekonomi terpadu berbasis minapolitan di sekitar babulu dan waru
 - c. mengembangkan jalur destinasi / koridor wisata
 - d. mengembangkan desa pusat pertumbuhan (dpp) sebagai sentral pengembangan dari segi fisik, sosial, dan ekonomi
 - e. pengembangan pusat bisnis, pemasaran dan logistik bagi produk unggulan Penajam Paser Utara
 - f. meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi terpadu
4. Pemanfaatan ruang budidaya yang mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan dengan tetap mempertahankan regenerasi alam
- a. penetapan dan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. mengembangkan areal persawahan baru pada lahan potensial dan mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering melalui intensifikasi pertanian
 - c. menetapkan zona perikanan tangkap dengan berbasis kelestarian lingkungan
 - d. mengembangkan pusat informasi dan penelitian perikanan

- e. mengembangkan pusat pengolahan dan hasil pertanian - perikanan termasuk lumbung modern dan *cold storage* pada kawasan pusat produksi
 - f. mengembangkan kawasan industri kecil menengah melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan
 - g. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan
5. Kebijakan Peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi resiko bencana
- a. mengembangkan sistem mitigasi bencana bencana
 - b. menetapkan kawasan rawan bencana melalui system zonasi kawasan rawan bencana
 - c. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana
 - d. menyiapkan upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

2.6.2.7 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara

Secara keseluruhan capaian TPB Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum maksimal, di mana masih ada indikator TPB yang belum ada data (N/A) hingga dokumen ini disusun, yakni 13,55% (29 dari 214 indikator). Namun seperti yang telah diuraikan di atas bahwa tidak semua dari 29 indikator tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari 214 indikator, terdapat capaian program yang dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebesar 46,26%, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) pun masih cukup banyak, yakni 27,10%, indikator TPB yang belum terjabarkan dalam program-program pendukung yang belum pernah dilaksanakan (BB) yaitu sebanyak 13,08%, dan program yang tidak ada data hingga dokumen ini disusun (N/A) sebanyak 13,55%. Dengan demikian

menunjukkan masih perlunya optimalisasi implementasi indikator-indikator dalam TPB. Secara grafis, kondisi capaian tersebut disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. 89 Capaian indikator TPB Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2029

Berdasarkan hasil penjaringan isu pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dihasilkan beberapa isu yang dikelompokkan ke dalam daftar isu pendek. Daftar isu pendek pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut terdapat 7 isu pembangunan yang diperoleh berdasarkan kajian dokumen terkait dan konsultasi publik yang telah dilakukan. Daftar pendek isu pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut yakni:

- 1) Infrastruktur Dasar yang terdiri dari:
 - a) Air dan sanitasi layak;
 - b) Transportasi;
 - c) Komunikasi;
- 2) Layanan Dasar yang meliputi:
 - a) Kesehatan;
 - b) Pendidikan;
- 3) Kebencanaan;
- 4) Pengelolaan Sampah dan Limbah;

- 5) Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak;
- 6) Ekonomi; dan
- 7) Kelembagaan dan Tata Kelola.

2.6.1.1 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara

Melalui hasil penelaahan terhadap potensi, dan permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, mempertimbangkan hasil telaahan terhadap isu strategis KLHS RPJMD serta isu lingkungan dinamis di level global, nasional, hingga dalam cakupan Provinsi Kalimantan Timur, maka dihasilkan hasil perumusan isu strategis daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut ini.

Tabel 2. 74 Penentuan isu strategis RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Potensi daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sebagai Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan	1) Infrastruktur Dasar yang terdiri dari: a) Air dan sanitasi layak; b) Transportasi; c) Komunikasi;	Demografi Global	Rendahnya produktivitas	Isu Pulau Kalimantan: Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi SPM Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri Tingginya konservasi hutan menjadi lahan tidak produktif	1. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Tingginya usia produktif	Belum optimalnya kualitas SDM	a) Air dan sanitasi layak; b) Transportasi; c) Komunikasi;	Perkembangan Teknologi	Rendahnya kualitas sumber daya manusia		2. Pengentasan kemiskinan terintegrasi
Stabilitas daerah yang terjaga	Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	2) Layanan Dasar yang meliputi: a) Kesehatan; b) Pendidikan;	Konstelasi Perdagangan Global	Pergeseran struktur kelas masyarakat		3. Pengembangan sektor ekonomi potensial bernilai tambah
Dukungan infrastruktur wilayah	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	3) Kebencanaan; 4) Pengelolaan Sampah dan Limbah; 5) Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak; 6) Ekonomi; dan 7) Kelembagaan dan Tata Kelola.	Urbanisasi Dunia	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif		4. Pemerataan infrastruktur pelayanan publik dan pendukung perekonomian wilayah yang belum optimal
Potensi nilai budaya dan kearifan lokal daerah	Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim		Luar Angkasa	Krisis lingkungan		5. Pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan
	Penurunan tingkat risiko bencana belum optimal		Tata Kelola Keuangan Global	Geopolitik dan geoekonomi		6. Kualitas manajemen ASN dan kinerja pelayanan publik
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif		Perubahan Iklim	Tatakelola dan akuntabilitas pemerintah		7. Sinergi dan kolaborasi dengan IKN dan daerah sekitar
			Persaingan Sumber Daya Alam			
			Pertumbuhan Kelas Menengah			
			Geopolitik dan Geoekonomi			

Potensi daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Isu Provinsi Kalimantan Timur: Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif Pemerataan Pembangunan Wilayah Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK Kemandirian Pangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

Sumber: Olah, 2025

1. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara. Kualitas sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah terutama dalam menghadapi tantangan adaptasi dan inovasi kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Berdasarkan analisis data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diantaranya yaitu akses layanan pendidikan yang belum merata, kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik yang belum optimal, motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, dan dukungan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang belum optimal. Upaya akselerasi layanan pendidikan berkualitas di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat kehadiran IKN Nusantara akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja dalam berbagai bidang. Upaya penyediaan layanan pendidikan vokasional menjadi penting untuk merespon kebutuhan tenaga kerja dan menjamin SDM Kabupaten Penajam Paser Utara mampu bersaing di dunia kerja.

Disamping itu, Kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih belum optimal, dukungan sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang masih belum lengkap, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal, kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas kesehatan masih rendah, serta upaya pemenuhan gizi seimbang bagi anak masih belum optimal. Lebih lanjut, komposisi penduduk lansia yang terus bertambah memerlukan fasilitas layanan kesehatan secara holistik sesuai dengan kebutuhan kelompok lansia.

Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan berdampak luas pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing dan beradaptasi di tengah tantangan kemajuan teknologi dan perkembangan daerah yang berjalan begitu cepat. Untuk itulah, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.

2. Pengentasan kemiskinan terintegrasi

Data indeks gini dan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa rendahnya ketimpangan tidak disertai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu tampak dari indeks gini yang hanya pada angka 0,299 dan berhasil berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur serta nasional, namun tingkat kemiskinan juga mencapai 6,97 persen pada tahun 2023. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang ditandai dengan adanya perluasan sumber penghidupan yang dapat diakses serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut lagi, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya terbatas pada persoalan sumber penghidupan. Sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga perlu dirumuskan strategi pembangunannya secara integratif dengan tujuan akhir pengentasan kemiskinan yang holistik. Akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang optimal, keberadaan jaminan sosial yang adaptif dan menyeluruh, serta perluasan kesempatan

pekerjaan yang layak perlu dilakukan untuk menurunkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara menyeluruh.

3. Pengembangan sektor ekonomi potensial bernilai tambah

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh sektor konstruksi dan pertambangan. Sektor pertambangan sangat rentan terhadap fluktuasi harga di tingkat internasional. Persoalan ini harus direspon dengan kebijakan yang baik dan tepat. Pengembangan sektor ekonomi potensial di luar pertambangan harus dijalankan dan dikawal oleh berbagai *stakeholders* secara berkesinambungan.

Pengembangan sektor ekonomi potensial dapat dijalankan dengan peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk dan peningkatan kapasitas pemasaran produk-produk ekonomi potensial. Peningkatan kapasitas produksi dapat dijalankan dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan akses kemudahan terhadap bantuan permodalan, penggunaan metode modern serta peningkatan kemudahan akses dan mutu terhadap bahan produksi. Peningkatan kualitas produk dapat dijalankan dengan cara meningkatkan sertifikasi produk-produk ekonomi potensial. Peningkatan kapasitas pemasaran dapat dijalankan dengan penerapan metode pemasaran baruan (*marketing-mix*) secara berkesinambungan.

Proses industrialisasi terhadap produk-produk ekonomi potensial juga harus dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah dari berbagai produk di sektor ekonomi potensial. Riset dan inovasi produk unggulan dan potensial daerah juga harus dijalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan juga harus diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi, kohesivitas sosial dan kualitas lingkungan dapat dijaga dengan baik.

4. Pemerataan infrastruktur pelayanan publik dan pendukung perekonomian wilayah yang belum optimal

Pemerataan infrastruktur pelayanan publik merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu daerah, khususnya terhadap dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur pelayanan publik dan pendukung perekonomian seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta akses terhadap air bersih dan energi, merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat bagi suatu daerah. Namun, di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik ini masih menjadi masalah serius.

Lebih lanjut lagi, ketidakmerataan infrastruktur tersebut memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa dampak tersebut diantaranya:

- keterbatasan akses terhadap layanan publik: wilayah yang kurang berkembang sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan potensi pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.
- perlambatan pertumbuhan ekonomi: infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat mobilitas barang dan orang, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Keterbatasan infrastruktur juga dapat mengurangi daya tarik investasi dan memperbesar kesenjangan ekonomi antarwilayah.
- peningkatan ketimpangan sosial: ketidakmerataan infrastruktur dapat memperparah ketimpangan sosial, karena daerah yang kurang berkembang tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Dengan demikian, pemerataan infrastruktur pelayanan publik dan pendukung perekonomian perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui strategi yang tepat, termasuk tata kelola alokasi anggaran yang lebih adaptif, insentif untuk investasi, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik.

5. Pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan

Kelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan menjadi aspek yang penting, khususnya dalam mendukung ketahanan daerah terhadap kondisi lingkungan yang semakin dinamis. Perubahan iklim global, degradasi alam dan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah menjadi tiga isu utama yang saat ini menjadi perhatian masyarakat dunia, terlebih dalam mendorong dan mempercepat penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan potensi kebencanaan yang semakin besar. Dengan demikian, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aksi mitigasi dan penanggulangan bencana perlu untuk direncanakan secara tepat, dengan harapan intervensi yang diimplementasikan dapat terarah, terukur dan tepat sasaran.

Kehadiran IKN yang berdekatan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadikan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun mitigasi dan penanggulangan bencana perlu direncanakan dengan baik. Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan IKN, tentu akan merasakan dampak dari segala bentuk aktivitas pembangunan maupun dampak ikutan lainnya, khususnya bagi kelestarian lingkungan hidup dan potensi kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kerusakan pada lingkungan seringkali memiliki hubungan terhadap potensi terjadinya bencana, seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan. Diantara bentuk perlindungan maupun pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup sekaligus mitigasi kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui penjagaan dan konservasi pada sumber-sumber air dan juga pada daerah

tangkapan air, dengan harapan ketersediaan sumber daya air dan tata aliran air di Kabupaten Penajam Paser Utara dan daerah sekitarnya dapat terjaga dengan baik. Selain itu, penjagaan terhadap pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang juga memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup sekaligus sebagai bentuk mitigasi kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Kualitas manajemen ASN dan kinerja pelayanan publik

Kualitas manajemen ASN dan kinerja pelayanan publik menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk 5 tahun ke depan. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, bersih, dan bebas dari berbagai intervensi politik. Manajemen ASN yang tidak dikelola secara baik dapat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik buruk. Salah satu cara meningkatkan kualitas manajemen ASN, yaitu melalui digitalisasi manajemen ASN seperti memanfaatkan TIK, baik dalam membangun sistem ataupun data untuk mempermudah penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Pengelolaan manajemen ASN juga harus sesuai dengan prinsip meritokrasi sehingga penempatan atau promosi jabatan misalnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta keterampilan yang dibutuhkan.

Kinerja pelayanan publik perlu ditingkatkan. Saat ini, kinerja pelayanan publik Kabupaten Penajam Paser Utara belum optimal yang ditandai dengan IPP. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dapat dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik dan meningkatkan inovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, profesionalitas ASN yang didukung oleh manajemen ASN yang sesuai dengan prinsip meritokrasi juga menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

7. Sinergi dan kolaborasi dengan IKN dan daerah sekitar

Dengan adanya pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku menjadi isu strategis ke depan. Pembangunan IKN tidak hanya mendatangkan manfaat bagi daerah, melainkan juga memiliki potensi dampak permasalahan terhadap pembangunan daerah. Dampak positif dari adanya pembangunan IKN saat ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat aktivitas ekonomi yang meningkat terutama di bidang konstruksi membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Namun, di sisi lain menimbulkan potensi permasalahan, seperti potensi alih fungsi lahan secara masif yang dikhawatirkan berdampak pada konservasi sumber daya air dan kualitas lingkungan hidup menurun.

Sebagian wilayah dan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang turut masuk ke dalam kawasan IKN, mengharuskan adanya sinergitas dan kolaborasi pembangunan antara Penajam Paser Utara dengan IKN. Integrasi dan sinergitas pembangunan dengan IKN menjadi isu strategis yang harus direspon baik dalam kebijakan jangka panjang, menengah, maupun pendek. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus memastikan integrasi dan sinergitas pembangunan IKN memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya terhadap pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dapat maju dan berkembang bersama. Integrasi dan sinergitas harus diimplementasi di seluruh aspek pembangunan daerah, baik ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik agar terwujudnya pembangunan daerah yang menyejahterakan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian sekaligus penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045. Sehingga, visi dan misi kepala daerah juga harus selaras terhadap dokumen RPJPD. Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

3.1 Visi dan Misi

Rumusan Visi dan Misi merupakan bagian utama dalam dokumen RPJMD. Visi menggambarkan harapan akan kondisi yang lebih baik yang hendak diwujudkan pada masa depan, dalam hal ini lima tahun mendatang. Kondisi yang lebih baik tersebut didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah maupun tantangan dan peluang baik yang berada pada level lokal, regional, nasional, dan global. Sedangkan misi menggambarkan serangkaian upaya strategis yang hendak dilakukan untuk mewujudkan harapan akan kondisi ideal tersebut. Dengan demikian secara substantif, rumusan visi dan misi dalam RPJMD merupakan manifesto kolektif seluruh stakeholder untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang dicita-citakan bersama.

3.1.1 Visi

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah. Adapun visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Visi:

“Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”

1) Unggul

Visi unggul mencerminkan tekad untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dan memberikan dampak pada peningkatan kualitas dalam segala lini di Kabupaten Penajam Paser Utara. Unggul dari sumber daya manusianya,

pertumbuhan ekonominya yang signifikan, performa tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif maupun dari sisi ketahanan lingkungannya. Visi unggul juga menunjukkan tekad untuk senantiasa berinovasi dan berkembang, dengan tujuan untuk tetap berada di garis depan dalam segala aspek.

2) Berkeadilan

Kalimat visi "berkeadilan" merujuk pada tujuan yang mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap aspek, termasuk dalam sisi pemerataan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Visi berkeadilan lebih lanjut dimaknai bahwa setiap individu atau kelompok mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, kesenjangan, atau ketidaksetaraan. Hal ini mencakup pemerataan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesempatan kerja, serta pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan atau kurang mendapat perhatian.

3) Sejahtera

Visi 'sejahtera' merujuk pada kondisi atau keadaan di mana warga masyarakat PPU merasa bahagia, nyaman, dan puas dalam berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan mencakup berbagai dimensi seperti kesehatan fisik dan mental, keamanan finansial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hubungan sosial yang baik dengan sesama anggota masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan seringkali dikaitkan dengan indikator-indikator seperti PDB per kapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, harapan hidup, tingkat pendidikan, serta kualitas lingkungan hidup. Meski kesejahteraan juga merupakan pengalaman subyektif setiap warga, secara umum indikator-indikator di atas disepakati sebagai tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks PPU, harus diakui bahwa berdasarkan indikator-indikator makro yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesejahteraan masyarakat PPU masih berada pada tingkat bawah di antara kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur. Diperlukan upaya serius dalam

mensinergikan berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU.

4) Berdaya saing

Visi berdaya saing mengindikasikan bahwa Kabupaten PPU mampu untuk mengoptimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitifnya dalam memajukan perekonomian daerah. Daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh setidaknya empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Oleh karena itu visi pengembangan daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun mendatang perlu difokuskan pada aspek-aspek tersebut. Di samping itu, terkait dengan pembangunan IKN yang membuka peluang besar bagi lapangan pekerjaan di berbagai sektor, penguatan daya saing menjadi faktor kunci agar masyarakat PPU dapat turut mengoptimalkan peluang tersebut.

5) Gerbang Ibu Kota Nusantara

Frasa "Gerbang Ibu Kota Nusantara" disematkan untuk menegaskan bahwa pembangunan PPU diarahkan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan tidak terpisahkan dari perkembangannya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, visi pembangunan Ibu Kota Nusantara didasarkan antara lain pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keselarasan dengan alam, aksesabilitas dan inklusivitas, inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan nilai Bhineka Tunggal Ika. Sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara, visi pembangunan Kabupaten PPU diarahkan untuk sinergis dan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

3.1.2 Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Berdasarkan Visi

yang telah dirumuskan yaitu “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”, terdapat enam (6) Misi yang akan dilaksanakan. Masing-masing penjelasan misi tersebut sebagai berikut ini.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing

Misi ini berorientasi pada upaya pemerintah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. SDM yang unggul mengacu pada individu yang memiliki keterampilan, wawasan, dan karakter yang tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasional sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM baik di Tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, aspek layanan kesehatan yang berkualitas, kesejahteraan sosial, dan pembentukan karakter juga menjadi faktor krusial dalam menciptakan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga sehat dan berintegritas.

Di sisi lain, SDM yang berdaya saing menekankan pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi. Sebagai daerah yang memiliki posisi strategis, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di berbagai sektor. Oleh karena itu, upaya penguatan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital perlu dilakukan. Melalui langkah-langkah ini, Sumber daya manusia Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu memiliki daya saing yang lebih baik, sehingga tidak hanya menjadi pengamat dalam pembangunan, melainkan turut serta dalam memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik

Misi 2 ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka kolaborasi. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip *good governance* dan *clean governance*, yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih dicapai melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, dan berintegritas. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi aspek utama dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, dan bersih. Keberhasilan dalam aspek ini dapat dilihat menggambarkan sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan dalam memperoleh layanan pemerintahan. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan yang mendorong keterbukaan dan efisiensi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terkadang mendatangkan persoalan tersendiri terlebih jika tidak diikuti dengan prinsip pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi daerah seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan dan berkeadilan berbasis ekonomi kerakyatan menjadi misi yang akan mengawal agenda pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat menjadi kunci pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara lebih spesifik, kebijakan yang berpihak pada UMKM dan ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

4. Mewujudkan ketahanan pangan daerah

Misi Ketahanan pangan daerah dimaknai dengan kemampuan dari Kabupaten Penajam Paser Utara nantinya dalam menyediakan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta memastikan kestabilan pangan daerah. Misi ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem pangan yang tidak hanya bergantung pada pasokan eksternal, tetapi lebih pada kemandirian daerah dalam memproduksi dan mengelola sumber daya pangan lokal.

Pemaknaan dari misi ini juga dititikberatkan pada upaya untuk membangun sistem pangan yang tangguh, mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti bencana alam, fluktuasi harga pangan global, dan krisis ekonomi. Lebih lanjut lagi, ketahanan pangan daerah tidak hanya terkait jumlah pangan yang tersedia, namun juga terkait dengan kualitas, keberagaman, dan keberlanjutan sumber daya pangan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, misi ini juga mencakup terkait peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan lokal, pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya alam, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung distribusi pangan secara merata.

Adanya regulasi yang mengatur terkait larangan alih fungsi lahan pertanian pangan, peraturan daerah terkait kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) juga diharapkan nantinya dapat memberi dukungan yang

signifikan dalam meningkatkan produksi tanaman pangan. Adapun program-program unggulan yang direncanakan untuk mewujudkan misi ke-4 ini yaitu melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi usaha tani, peningkatan SDM Pertanian, mitigasi bencana pertanian, pembangunan lumbung pangan/lantai jemur, serta peningkatan sarana prasarana perikanan.

5. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan sosial budaya yang inklusif dan berkelanjutan pada periode pembangunan 2025-2029. Misi tersebut berlandaskan pada semangat dalam memperkuat identitas sosial dan budaya di tengah dinamika perubahan yang semakin kompleks.

Misi Mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan dan program yang mampu mempererat kohesi sosial, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta melestarikan warisan budaya lokal. Keberagaman merupakan potensi besar yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan mendorong pembangunan daerah yang harmonis.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengedepankan prinsip inklusivitas, gotong royong, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sinergi antara masyarakat dengan berbagai elemen sosial lainnya diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara akan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan, penguatan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan komunitas dalam menjaga dan mengembangkan tradisi. Misi mewujudkan pembangunan sosail budaya dalam bingkai keberagaman diharapkan mampu mengelola perbedaan sebagai sebagai kekuatan untuk membangun Penajam Paser Utara yang lebih baik.

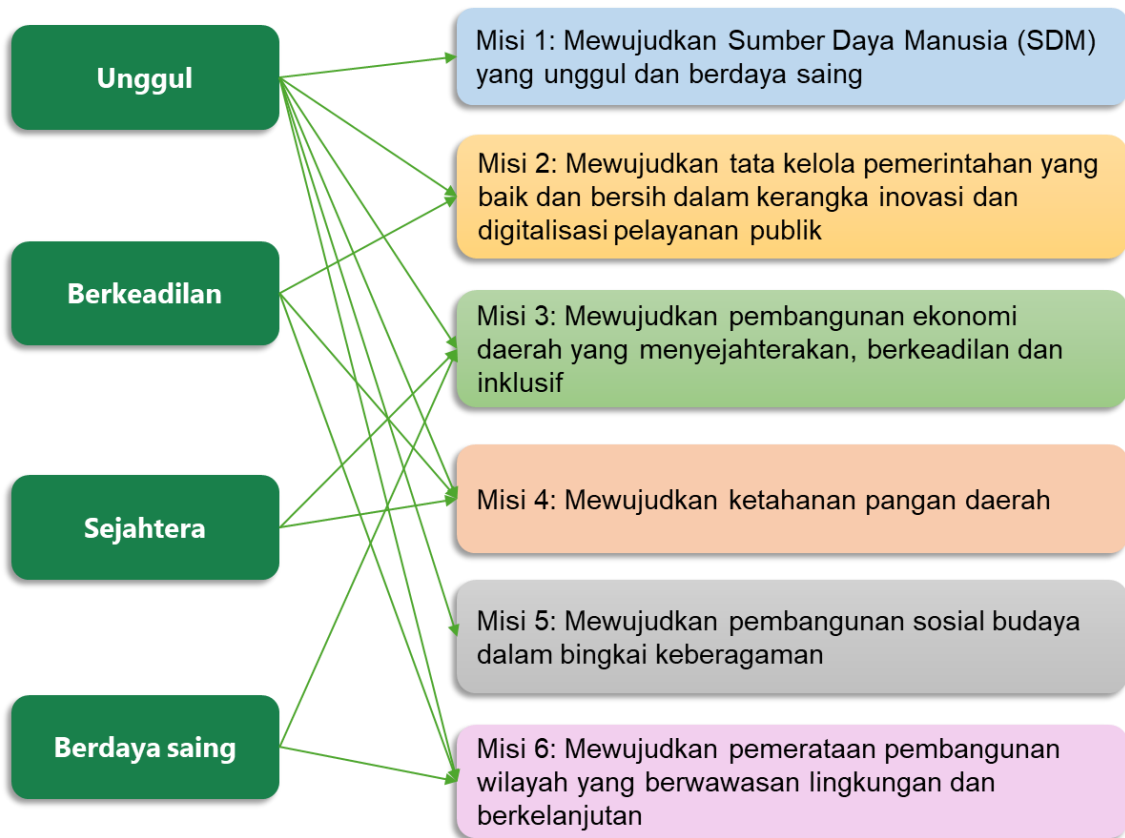
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini berfokus pada perwujudan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, serta mewujudkan ketahanan ekologi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Infrastruktur yang berkualitas dan merata mencakup infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang merata di diharapkan dapat menciptakan kemudahan interaksi antar daerah dan selanjutnya mendorong Kabupaten Penajam Paser Utara dapat memiliki peran strategis di Kalimantan Timur. Terlebih dengan hadirnya IKN yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadikan posisi tersebut berpotensi untuk dioptimalkan. Pemerataan pembangunan infrastruktur mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kabupaten, jaringan air minum, jaringan irigasi, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi berkorelasi dengan meratanya pembangunan infrastruktur akan berdampak bagi akselerasi ekonomi daerah secara signifikan.

Ketahanan ekologi berfokus pada lingkungan hidup yang berkelanjutan, kondisi yang diharapkan dapat terus terjaga. Artinya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara bijak dan berorientasi pada prinsip kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam melaksanakan agenda pembangunan penting untuk melakukan integrasi dengan skenario-skenario pembangunan dari hasil kajian lingkungan hidup.

3.1.3 Keterkaitan Visi dan Misi

Enam misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan kata kunci yang tertuang dalam rumusan visi, sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian dan target Pembangunan pada akhir periode RPJMD. Keterkaitan antara visi dan misi dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:



Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa setiap misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan setiap kata kunci yang terdapat pada Visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya sinergitas antara kondisi yang ingin dicapai dengan cara yang akan dilakukan.

3.1.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD terhadap RPMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN

Selain itu, visi dan misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan visi dan misi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Berikut disajikan penyandingan dan keterkaitan antara visi, misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dengan visi, misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Penyandingan Visi dan Misi RPJMD Penajam Paser Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara	Asta Cita	RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Visi: Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara	Visi: Bersana Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (gen-milenial dan gen-Z) dan penyandang disabilitas	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi
Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 2: Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian,
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara	Asta Cita	RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Visi: Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara	Visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas
	ekonomi syariah, ekonomidigital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	pelayanan publik dan kesehatan
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	
Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomidigital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 5: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal
Misi 6: Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara	Asta Cita	RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Visi: Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara	Visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas
	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomidigital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Misi 6: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: Olah, 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari kata kunci visi dan misi pembangunan, serta menjawab dari isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran RPJMD merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan Sasaran kemudian dijabarkan lebih detail dalam rumusan *outcome*. Masing-masing tujuan, sasaran, dan outcome memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur untuk memastikan kondisi yang diinginkan dapat terwujud. Berikut tujuan, sasaran, dan indikator RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara Misi: 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan 4. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah 5. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	75,00	75,49	75,99	76,48	76,97	77,46
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah di atas 15 tahun	8,59	8,61	8,63	8,65	8,69	8,72
			Harapan Lama Sekolah	12,92	12,94	13,02	13,11	13,17	13,25
			Rapor Pendidikan	74,09	75	77	79	81	83
		Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	Usia Harapan Hidup	74,51	74,98	75,07	75,13	75,19	75,22
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,460	0,454	0,444	0,434	0,424	0,414
		Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00
	Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,00	7,6	8,2	8,8	9,4	10
			Indeks Gini	0,256	0,251	0,247	0,242	0,238	0,233
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)	15,89	16,69	17,52	18,4	19,32	20,28

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bingkai Keberagaman 6. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			Nilai investasi	1.053.000.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.400,00	1.167.328.800,00	1.190.675.370
		Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,40	4,38	4,36	4,34	4,32	4,3
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,02	2	1,97	1,95	1,92	1,9
		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	88,61	89,11	89,61	90,11	90,61	91,21
		Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,65	7,7	7,75	7,8	7,85	7,9
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,31	76,48	76,65	76,82	76,99	77,16
			Indeks Risiko Bencana	123,81	115,81	107,81	99,81	91,81	83,81
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	69,80	69,98	70,04	70,11	70,32	70,45
		Tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	64,00	65,50	66,80	67,90	69,80	70,70
			IPKD	55	56	57	58	59	60

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			SPI KPK	62	63	64	66	68	69
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	3,76	3,77	3,78	3,8	3,82	3,85
			Indeks Pemdi	2,90	1,49	1,49	1,70	1,90	1,90

Sumber: Olah, 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka dalam rangka pencapaian target sasaran RPJM Nasional Tahun 2025-2029 diperlukan penyelarasan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat daerah. Penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan intergrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah, mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2025-2029, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN tahun 2025-2029, dan menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional. Berikut disajikan hasil penyelarasan terhadap target indikator makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 3 Penyelarasan Target Makro RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJM Nasional		Target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur		Target RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara	
	2025	2029	2025	2029	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,8	8,6	6,4	8,6	7	9,4
PDRB Per-Kapita (Juta Rupiah)	237,1	326,9	237,1	326,9	93,93	102,13
Kontribusi PDRB (%)	4,2	4,6	4,2	4,6	15,89	19,32
Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-5,05	2,37-3,37	4,24-5,05	2,37-3,37	6,18-6,50	4,30-4,90
Indeks Gini	0,310-0,321	0,309-0,313	0,310-0,321	0,309-0,313	0,248-0,256	0,224-0,233
Indeks Modal Manusia	0,59	0,62	0,59	0,62	-	-
Indeks Pembangunan Manusia	-	-	-	-	75,00	76,97
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	67,46	40,82	67,46	47,31	62,39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,2	80,87	80,2	81,46	76,31	76,99
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60-5,14	4,14-4,77	4,60-5,14	3,95-4,68	2,00-2,02	1,90-192

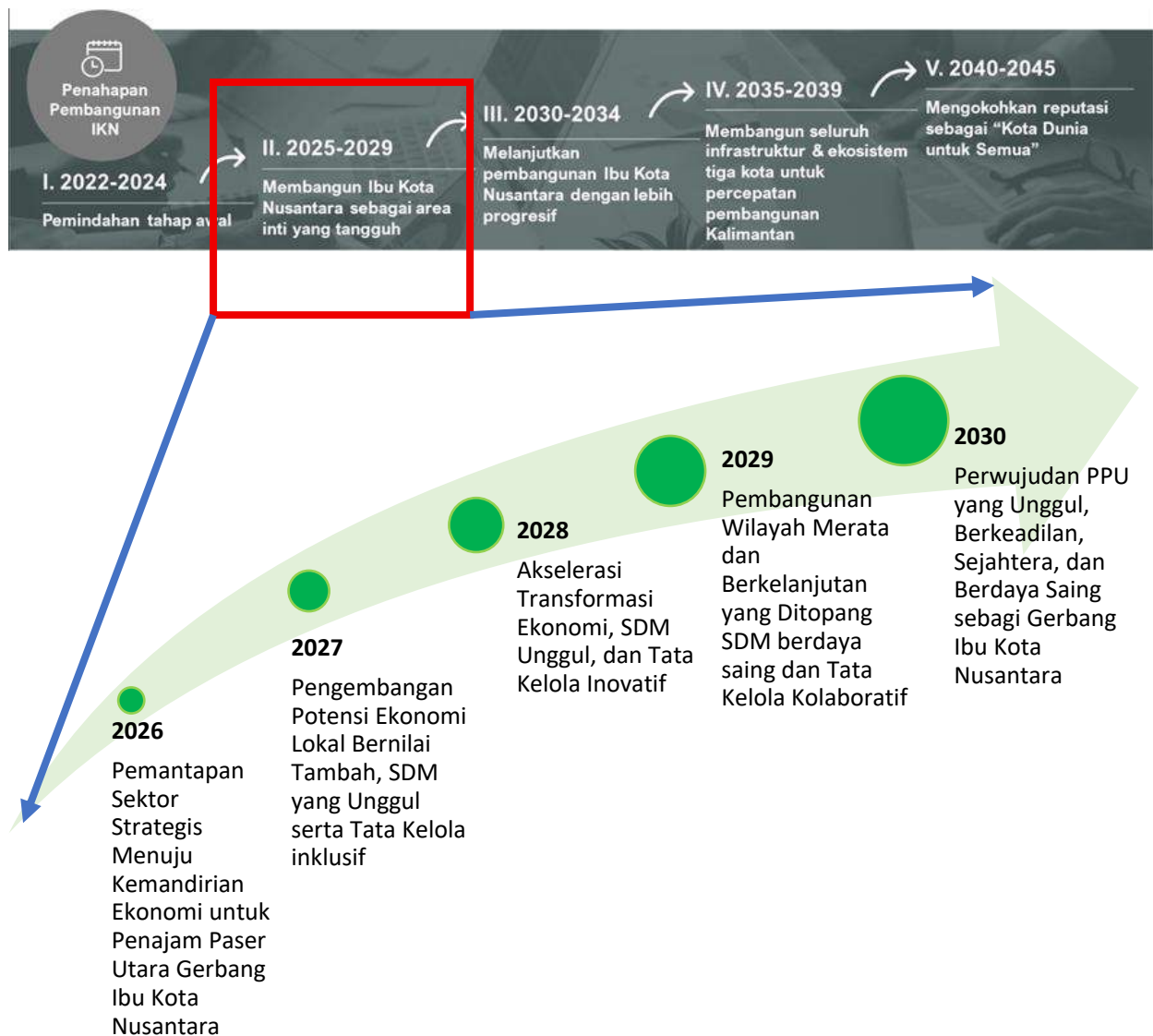
Sumber: Olah, 2025

3.3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima tahun ke depan. Secara garis besar, sub bab ini mencakup tiga aspek yaitu penahapan pembangunan RPJMD, arah kebijakan, dan program prioritas daerah.

3.3.1 Penahapan Pembangunan RPJMD

Penahapan pembangunan RPJMD merupakan bagian dari strategi dalam RPJMD. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan sendiri merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut merupakan tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2025-2029.



Gambar 3. 2 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan tahapan pembangunan IKN

Berikut disajikan uraian dari setiap tema pembangunan dalam lima tahun ke depan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tahap 1 (2026): Pemantapan Sektor Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi untuk Penajam Paser Utara Gerbang Ibu Kota Nusantara

Tema pembangunan “Pemantapan Sektor Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi untuk Penajam Paser Utara Gerbang Ibu Kota Nusantara” mencerminkan sebuah mimpi yang besar dalam menyongsong peran strategis Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai salah satu wilayah utama yang menopang pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebagai daerah yang berada tepat di kawasan inti, Penajam Paser Utara dituntut tidak hanya menjadi wilayah penyangga secara fisik dan infrastruktur, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Pemantapan sektor strategis menjadi langkah prioritas untuk memastikan bahwa seluruh potensi unggulan daerah dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, serta sektor energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui pembangunan fondasi ekonomi yang kokoh pada sektor-sektor tersebut, PPU diarahkan agar tidak semata bergantung pada aliran investasi eksternal atau keberadaan IKN, melainkan mampu berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Melalui penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur ekonomi yang memadai, serta transformasi tata kelola, diharapkan Penajam Paser Utara mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, dampak pembangunan yang dihasilkan dapat secara merata dan berkeadilan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tahap 2 (2027): Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, SDM yang Unggul serta Tata Kelola inklusif

Tema ‘Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, SDM yang Unggul serta Tata Kelola Inklusif’ mencerminkan orientasi pembangunan yang mana, menempatkan potensi lokal, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pengembangan potensi ekonomi lokal bernilai tambah menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kekayaan alam dan potensi sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, serta industri kreatif dan

pariwisata yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan hilirisasi produk lokal, penguatan UMKM, serta penciptaan rantai nilai ekonomi yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui proses hilirisasi berupa pengolahan dan pemasaran produk lokal secara lebih inovatif, nilai tambah ekonomi dapat ditingkatkan, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.

SDM yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan, terlebih dalam konteks Penajam Paser Utara sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan vokasi dan kewirausahaan menjadi fokus utama dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di era transformasi ekonomi. Sementara itu, tata kelola inklusif menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintahan yang terbuka, transparan, dan responsive, diharapkan dapat menciptakan ruang dialog yang kolaboratif antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendekatan inklusif ini diharapkan dapat mewujudkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tahap 3 (2028): Akselerasi Transformasi Ekonomi, SDM Unggul, dan Tata Kelola Inovatif

Tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi, SDM Unggul, dan Tata Kelola Inovatif” menggambarkan arah pembangunan yang progresif dan berorientasi pada percepatan perubahan menuju struktur ekonomi yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah strategis yang berperan penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tema ini menekankan perlunya langkah-langkah akseleratif

untuk dalam mendukung transformasi pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akselerasi transformasi ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan merata melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan industrialisasi lokal, serta integrasi teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Penajam Paser Utara harus mampu mengembangkan sektor-sektor potensial seperti agrobisnis, ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan jasa berbasis digital, yang tidak hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Dalam kerangka ini, digitalisasi menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, serta membuka peluang usaha baru yang inklusif.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fondasi utama dari transformasi ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang unggul diarahkan pada peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan berbasis kompetensi, serta pembangunan karakter dan etos kerja yang tinggi. PPU harus menyiapkan generasi muda yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional di era digital dan industri 4.0. Sementara itu, tata kelola inovatif menegaskan bahwa pemerintahan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor inovasi yang mendorong kolaborasi antar sektor, mempercepat layanan publik berbasis digital, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi masyarakat. Inovasi dalam tata kelola juga mencakup pemanfaatan data secara cerdas (*smart governance*), pendekatan berbasis bukti, dan model kemitraan yang mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Tahap 4 (2029): Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM berdaya saing dan Tata Kelola Kolaboratif

Tema “Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Berdaya Saing dan Tata Kelola Kolaboratif” mencerminkan arah pembangunan yang menekankan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah serta keberlanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), tema ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap masyarakat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang tengah berlangsung.

Pembangunan wilayah yang merata berarti tidak hanya terfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tertentu, tetapi juga menyentuh wilayah pinggiran dan pedesaan secara adil. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta pengembangan potensi lokal di masing-masing wilayah. Dengan demikian, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berkembang.

Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan harus ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta mengintegrasikan mitigasi terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam. Penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing juga menjadi sangat penting. SDM yang kompeten, terampil, dan produktif merupakan fondasi dalam mendukung kemajuan wilayah. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak pembangunan di seluruh sektor, baik sebagai pelaku ekonomi, pelayan publik, maupun agen perubahan di masyarakat.

Sementara itu, tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan yang menempatkan sinergi antar berbagai pihak sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, pelaksanaan program yang lebih efektif, serta pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tahap 5 (2030): Perwujudan PPU yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara

Tema “Perwujudan Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara” sebagai tema tahapan pembangunan pada periode akhir RPJMD, tidak hanya menyiapkan diri secara fisik sebagai bagian dari kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), tetapi juga membangun kekuatan dari dalam untuk menjadi wilayah yang maju, adil, merata dan sejahtera, serta kompetitif di tengah dinamika nasional dan global. Kata “unggul” dalam tema ini mencerminkan tekad untuk menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah yang memiliki keunggulan baik dalam kapasitas sumber daya manusia, pelayanan publik, daya saing ekonomi, maupun dalam kemampuan mengelola potensi lokal secara efisien dan inovatif. Keunggulan ini dibangun melalui peningkatan kualitas pendidikan, teknologi, infrastruktur, serta sistem pemerintahan yang responsif terhadap tantangan zaman. Dalam konteks Penajam Paser Utara sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara, keunggulan daerah menjadi mutlak agar mampu mengimbangi serta mendukung ritme dan standar pembangunan nasional.

Aspek “berkeadilan” menekankan pentingnya pembangunan yang tidak eksklusif, melainkan menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Keadilan sosial mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, hingga penguatan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah

menciptakan tatanan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan, di mana tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dari dampak positif pembangunan. Adapun “Sejahtera” menjadi hasil yang ingin dicapai dari seluruh proses pembangunan yang dilakukan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari sisi pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan yang bersih dan aman, serta hubungan sosial yang kuat. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah daerah harus mampu menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Sementara itu, “berdaya saing” merupakan karakter yang harus melekat dalam setiap aspek pembangunan, terutama dalam era transformasi digital dan globalisasi. Kabupaten Penajam Paser Utara dituntut untuk memiliki daya saing, baik dalam menarik investasi, mengembangkan potensi unggulan, maupun dalam menyiapkan SDM yang siap bersaing secara regional dan nasional. Daya saing ini juga mencakup kesiapan infrastruktur, efisiensi pelayanan publik, kualitas regulasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan global dan kemajuan teknologi.

Lebih lanjut lagi, sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara, PPU memiliki posisi strategis yang perlu diiringi dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Gerbang tidak hanya berarti pintu masuk secara fisik, tetapi juga sebagai representasi awal dari wajah baru Indonesia. Oleh karena itu, PPU harus mampu menampilkan citra daerah yang tertata, teratur, berwawasan lingkungan, serta mencerminkan semangat kebangsaan dan kemajuan.

Lebih lanjut lagi, strategi RPJMD Tahun 2025-2029 juga disusun secara komprehensif yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk

mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029:

Tabel 3. 4 Penyelarasan tujuan, sasaran dan strategi RPJMD

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul	Sasaran 1: Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Perbaikan dan Peningkatan Bangunan Sekolah 2. Pemberian Beasiswa Pendidikan 3. Pemberian Seragam dan kelengkapan Sekolah 4. Pemberian Insentif Tenaga Pendidik 5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik 6. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis teknologi inovatif
	Sasaran 2: Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Penguatan sistem rujukan berjenjang 3. Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan 4. Perluasan perlindungan jaminan kesehatan 5. Penguatan penanganan penyakit menular dan tidak menular penting 6. Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting 7. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak
	Sasaran 3: Meningkatnya Kesetaraan Gender	1. Penguatan prinsip inklusivitas gender dan disabilitas dalam perencanaan dan disain sarana prasarana layanan publik 2. Penyediaan layanan publik pemerintah yang dapat diakses seluruh kelompok 3. Pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan 4. Penyediaan pusat pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		perlindungan perempuan dan kelompok rentan yang optimal
	Sasaran 4: Meningkatnya Harmoni sosial budaya masyarakat	1. Penguatan peran lembaga adat dan komunitas masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi 2. Penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat 3. Peningkatan kapasitas deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial 4. Pelestarian budaya lokal melalui pengembangan pusat budaya, pendidikan karakter, dan penyediaan ruang publik bagi aktivitas sosial dan kebudayaan. 5. Menetapkan dan melindungi situs-situs bersejarah serta objek budaya sebagai cagar budaya daerah untuk mendukung pelestarian warisan budaya
Tujuan 2: Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	Sasaran 5: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Berbasis Potensi Lokal	1. Pengembangan produktifitas komoditi unggulan 2. Pengembangan kawasan pusat ekonomi terpadu 3. Optimalisasi peran sentra industri Kabupaten 4. Mendorong peningkatan investasi melalui kemudahan perijinan 5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM 6. Penguatan kelembagaan koperasi 7. Penguatan peran Kawasan Peruntukan Industri Buluminung bagi peningkatan PAD 8. Peningkatan daya saing BUMD melalui inovasi model bisnis dan ekspansi sektor prioritas 9. Peningkatan manfaat pengelolaan aset daerah melalui sumber pendanaan alternatif 10. Perluasan akses layanan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		keuangan formal secara inklusif 11. Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata unggulan. 12. Pengendalian inflasi dengan menjamin ketersediaan stok dan keterjangkauan harga komoditas pokok 13. Peningkatan ekspor barang dan jasa melalui penguatan pasar lokal
	Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui Usaha Ekonomi Produktif 4. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin 5. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
	Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	1. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan, sertifikasi angkatan kerja dan pendidikan vokasi 2. Perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam penempatan kerja penduduk lokal 3. Peningkatan akses informasi pasar kerja 4. Perlindungan tenaga kerja
	Sasaran 8: Meningkatnya Ketahanan pangan	1. Peningkatan produksi pangan lokal 2. Peningkatan konsumsi pangan lokal bergizi 3. Optimalisasi ketersediaan dan distribusi cadangan pangan untuk menjamin keamanan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 9: meningkatkan Infrastruktur merata dan berkualitas	1. Peningkatan sistem transportasi yang aman, terjangkau dan terintegrasi antar wilayah 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan. 3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar 4. Peningkatan kualitas serta penataan lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merata 5. Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik 6. Peningkatan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan 7. Peningkatan kualitas konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja
	Sasaran 10: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	1. Peningkatan program penanaman pohon dan reboisasi, 2. Mendorong perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati melalui edukasi dan kolaborasi berbasis masyarakat; 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat melalui kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, 4. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 5. Pemantauan kualitas air, tanah, dan udara secara berkala, dengan melibatkan masyarakat 6. penguatan perizinan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan 7. Optimalisasi pengelolaan sampah terintegrasi melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi
		edukasi, pemilahan dari sumber, penerapan 3R dan pembangunan TPST; 8. Penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana 9. Penguatan respon cepat terhadap bencana 10. Penguatan peran <i>stakeholder</i> dalam penanggulangan bencana 11. Penyediaan rumah layak huni dan relokasi korban bencana.
Tujuan 3: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Sasaran 11: Tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif	1. Penyesuaian struktur organisasi berdasarkan evaluasi kelembagaan secara berkala dan berbasis kinerja 2. Penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi 3. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan akuntabilitas kinerja
	Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1. Pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis digital 2. Peningkatan jaringan internet pada fasilitas layanan public

Sumber: Olah, 2025

Sasaran 1: Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan

1. Perbaikan dan Peningkatan Bangunan Sekolah

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangunan sekolah di seluruh wilayah. Dengan kondisi bangunan yang layak, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih nyaman dan aman. Peningkatan ini juga mencakup fasilitas pendukung seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi siswa dan guru. Selain itu, peningkatan

fasilitas akan menarik minat masyarakat untuk terus mengakses pendidikan berkualitas.

2. Pemberian Beasiswa Pendidikan

Pemberian beasiswa di PPU diarahkan untuk membantu pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dengan adanya dukungan finansial, siswa akan lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah biaya. Program ini juga mendorong terciptanya pemerataan akses pendidikan di seluruh kecamatan. Pemberian beasiswa merupakan investasi penting untuk masa depan pembangunan daerah.

3. Pemberian Seragam dan Kelengkapan Sekolah

Seragam dan perlengkapan sekolah menjadi bagian dari upaya memastikan semua siswa mendapatkan fasilitas yang memadai. Pemerintah PPU menyediakan bantuan ini agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak terhambat dalam mengikuti proses pendidikan. Dengan seragam yang layak, siswa dapat merasa percaya diri dan memiliki identitas sekolah yang jelas. Bantuan kelengkapan seperti alat tulis dan buku juga mendukung proses belajar yang optimal. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa.

4. Pemberian Insentif Tenaga Pendidik

Untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja guru, Pemerintah PPU memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi. Insentif ini mencakup tunjangan tambahan, penghargaan, dan berbagai fasilitas pendukung. Dengan penghargaan yang layak, tenaga pendidik diharapkan lebih termotivasi dalam mendidik generasi muda. Insentif juga berfungsi sebagai alat mempertahankan guru berkualitas agar tidak pindah ke daerah lain. Dengan demikian, mutu pendidikan dapat terus terjaga dan meningkat.

5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik

Peningkatan kapasitas guru menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan di PPU. Melalui pelatihan, workshop, dan program sertifikasi, tenaga pendidik didorong untuk terus memperbarui kompetensinya. Penguasaan metode pembelajaran terbaru dan teknologi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah daerah aktif menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesional untuk mendukung hal ini. Upaya ini memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan inovatif.

6. Pengembangan Sistem dan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Inovatif

Kabupaten PPU berupaya mengintegrasikan teknologi dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penggunaan platform digital dan media pembelajaran interaktif memudahkan akses dan variasi materi. Hal ini juga mendukung pembelajaran jarak jauh, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah mendorong sekolah untuk mengadopsi teknologi inovatif agar siswa lebih siap menghadapi tantangan zaman. Pengembangan ini memperkuat kualitas pendidikan berbasis kemajuan teknologi.

Sasaran 2: Derajat Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat

1. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Kabupaten Penajam Paser Utara fokus meningkatkan fasilitas kesehatan dasar dan layanan rujukan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perbaikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik desa menjadi prioritas utama. Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, pelayanan medis bisa lebih cepat dan tepat. Hal ini juga mengurangi kesenjangan akses kesehatan antar wilayah. Peningkatan fasilitas

diharapkan mampu menurunkan angka penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

2. Penguatan Sistem Rujukan Berjenjang

Sistem rujukan berjenjang di PPU diperkuat untuk memastikan pasien mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Mulai dari pelayanan primer di puskesmas hingga rumah sakit rujukan, alur perawatan dibuat efisien dan mudah diakses. Penguatan sistem ini juga mempercepat penanganan kasus-kasus medis yang membutuhkan tingkat pelayanan lebih tinggi. Pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan untuk optimalisasi rujukan. Dengan demikian, layanan kesehatan berkualitas dapat dirasakan seluruh warga.

3. Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

PPU berkomitmen untuk menambah jumlah tenaga kesehatan dan menyebarkannya merata ke seluruh daerah, terutama wilayah terpencil. Rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan terus dilakukan agar pelayanan medis lebih profesional. Pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di lokasi yang sulit dijangkau. Dengan pemerataan tenaga kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan dapat lebih terjamin. Hal ini penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

4. Perluasan Perlindungan Jaminan Kesehatan

Kabupaten PPU terus memperluas cakupan jaminan kesehatan agar semua warga dapat menikmati layanan kesehatan tanpa beban biaya berlebih. Melalui program BPJS dan skema lokal, perlindungan kesehatan diperluas untuk kelompok rentan dan miskin. Program ini membantu mengurangi risiko keuangan akibat penyakit atau kecelakaan. Pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan. Perluasan jaminan kesehatan diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

5. Penguatan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Penting

Penajam Paser Utara mengintensifkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular seperti TB dan malaria, serta penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Melalui kampanye kesehatan dan program skrining rutin, deteksi dini penyakit dapat dilakukan. Pemerintah bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit untuk penanganan yang tepat dan cepat. Edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat juga menjadi bagian penting strategi ini. Dengan penguatan ini, derajat kesehatan masyarakat diharapkan meningkat signifikan.

6. Peningkatan Gizi Masyarakat dan Pencegahan Stunting

Peningkatan gizi keluarga dan pencegahan stunting menjadi fokus utama pembangunan kesehatan di PPU. Program edukasi gizi dan penyediaan makanan bergizi diarahkan kepada ibu hamil dan balita. Pemerintah juga bekerja sama dengan sektor pendidikan untuk mengintegrasikan materi gizi dalam kurikulum sekolah. Pencegahan stunting diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masa depan. Dengan perbaikan gizi, generasi muda PPU akan tumbuh sehat dan produktif.

7. Penguatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

PPU meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan dipastikan tersedia dan berkualitas di seluruh fasilitas kesehatan. Pemerintah menyediakan tenaga kesehatan terlatih khusus untuk menangani kesehatan ibu dan anak. Program imunisasi dan edukasi kesehatan reproduksi juga ditingkatkan. Langkah ini bertujuan menciptakan generasi baru yang sehat dan berkualitas.

Sasaran 3: Meningkatnya Kesenjangan Gender

1. Penguatan prinsip inklusivitas gender dan disabilitas dalam perencanaan dan desain sarana prasarana layanan publik

Kabupaten PPU berkomitmen untuk memastikan setiap perencanaan dan desain sarana prasarana layanan publik mengakomodasi kebutuhan semua gender dan penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah melakukan audit dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran inklusivitas di kalangan perencana dan pengelola fasilitas publik. Fasilitas yang ramah difabel dan sensitif gender akan mendukung partisipasi masyarakat secara lebih luas. Strategi ini memperkuat pondasi kesetaraan sosial di PPU.

2. Penyediaan layanan publik pemerintah yang dapat diakses seluruh kelompok

Layanan publik di Kabupaten PPU didesain agar dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Penyediaan fasilitas fisik, layanan digital, serta dukungan pendampingan menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah memastikan lokasi layanan mudah dijangkau dan staf layanan terlatih untuk melayani dengan inklusif. Upaya ini membantu menghilangkan hambatan akses layanan publik. Dengan layanan yang merata, tercipta pemerataan kesempatan dan kesejahteraan.

3. Pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan

PPU mengedepankan partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan untuk menjamin kebutuhan mereka terakomodasi. Pemerintah daerah secara aktif melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas dalam forum konsultasi dan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, pembangunan yang dilakukan lebih responsif dan adil. Pelibatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas. Strategi ini mendukung pembangunan berkelanjutan yang berbasis keadilan sosial.

4. Penyediaan pusat pelayanan perlindungan perempuan dan kelompok rentan yang optimal

Kabupaten PPU membangun dan mengoptimalkan pusat pelayanan perlindungan khusus untuk perempuan dan kelompok rentan agar mendapatkan dukungan maksimal. Pusat ini menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah memastikan pusat-pusat ini tersebar di lokasi strategis agar mudah dijangkau masyarakat. Pelayanan yang responsif dan ramah menjadi prioritas utama. Keberadaan pusat ini sangat penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.

Sasaran 4: Meningkatnya Harmoni Sosial Budaya Masyarakat

1. Penguatan peran lembaga adat dan komunitas masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi

Lembaga adat dan komunitas di PPU diperkuat sebagai penjaga tradisi dan pelestari kerukunan antar kelompok masyarakat. Pemerintah daerah memberikan dukungan pelatihan dan fasilitasi agar peran mereka semakin optimal dalam mencegah konflik sosial. Melalui dialog dan kegiatan budaya bersama, toleransi dan saling pengertian dapat tumbuh kuat. Strategi ini penting untuk menciptakan suasana harmonis yang mendukung pembangunan daerah. Penguatan peran lembaga adat menjadi fondasi keharmonisan sosial PPU.

2. Penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat

Pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan terus ditingkatkan di sekolah dan komunitas di Kabupaten PPU. Materi mengenai toleransi, nilai-nilai Pancasila, dan budaya lokal diintegrasikan dalam pembelajaran dan kegiatan masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan untuk penyebaran nilai positif ini.

Penguatan ini membantu membangun identitas sosial yang kuat dan menghargai perbedaan. Dengan pendidikan karakter, masyarakat PPU dapat hidup harmonis dan bersatu.

3. Peningkatan kapasitas deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial

PPU membangun sistem deteksi dini untuk mengenali potensi konflik sosial agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Pemerintah melakukan pelatihan bagi aparat desa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dalam merespons konflik. Strategi ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Dengan kapasitas penyelesaian konflik yang baik, potensi kerusuhan dapat diminimalisir. Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kenyamanan masyarakat.

4. Pelestarian budaya lokal melalui pengembangan pusat budaya, pendidikan karakter, dan penyediaan ruang publik bagi aktivitas sosial dan kebudayaan

Pemerintah Kabupaten PPU mengembangkan pusat budaya sebagai wadah pelestarian seni dan tradisi lokal. Di pusat ini, masyarakat dapat belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang memperkuat identitas daerah. Pendidikan karakter juga diintegrasikan dengan pelestarian budaya agar generasi muda mengenal dan mencintai warisan leluhur. Ruang publik yang representatif disediakan untuk mendukung aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Strategi ini menjaga kelestarian budaya sekaligus memperkuat kohesi sosial.

5. Menetapkan dan melindungi situs-situs bersejarah serta objek budaya sebagai cagar budaya daerah untuk mendukung pelestarian warisan budaya

PPU melakukan pendataan dan penetapan situs bersejarah serta objek budaya penting sebagai cagar budaya daerah. Perlindungan hukum dan pengelolaan dilakukan untuk menjaga kelestarian situs tersebut dari

kerusakan atau alih fungsi. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya tersebut. Langkah ini tidak hanya melestarikan sejarah tetapi juga mendukung pariwisata budaya. Dengan demikian, nilai budaya lokal tetap hidup dan menjadi aset daerah.

Sasaran 5: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

1. Pengembangan produktivitas komoditi unggulan

Kabupaten PPU mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan yang menjadi potensi utama daerah. Pemerintah memberikan dukungan teknologi dan pelatihan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Penguatan akses pasar dan permodalan juga menjadi prioritas agar produk unggulan dapat bersaing secara luas. Pengembangan ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi ini menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi PPU.

2. Pengembangan kawasan pusat ekonomi terpadu

Pemerintah PPU mengembangkan kawasan ekonomi terpadu yang menggabungkan sektor industri, perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan daya saing. Kawasan ini didukung infrastruktur memadai dan kemudahan perizinan bagi investor dan pelaku usaha. Pengembangan kawasan diharapkan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di daerah. Dengan sentra ekonomi yang terintegrasi, pertumbuhan ekonomi lokal akan lebih optimal dan merata. Strategi ini memperkuat posisi PPU sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah.

3. Optimalisasi peran sentra industri Kabupaten

Sentra industri kecil dan menengah di PPU diberdayakan untuk mendukung produksi dan distribusi produk lokal. Pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan kepada pelaku industri.

Upaya ini membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Optimalisasi sentra industri juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor industri menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Mendorong peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan

Kabupaten PPU berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Pemerintah daerah mengimplementasikan sistem perizinan berbasis elektronik yang transparan dan efisien. Kemudahan perizinan ini menarik minat investor baik lokal maupun luar daerah untuk menanamkan modalnya. Peningkatan investasi akan memperkuat ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Strategi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi PPU.

5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM

Pelaku usaha ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten PPU didukung melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan perbankan untuk memberikan pembinaan yang menyeluruh. Dukungan ini mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk lokal. UMKM yang berkembang dapat meningkatkan pendapatan dan kontribusi ekonomi daerah. Strategi ini memperkuat ekosistem bisnis lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Penguatan kelembagaan koperasi

Koperasi di PPU diperkuat melalui pendampingan manajemen, peningkatan kapasitas anggota, dan pengembangan jaringan usaha. Pemerintah memberikan bantuan teknis dan akses pembiayaan untuk mendorong koperasi yang sehat dan mandiri. Koperasi berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi membantu meningkatkan daya tawar

dan kesejahteraan anggotanya. Strategi ini mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

7. Penguatan peran Kawasan Peruntukan Industri Buluminung bagi peningkatan PAD

Kawasan Industri Buluminung dioptimalkan sebagai pusat kegiatan industri yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur dan fasilitasi investor untuk meningkatkan aktivitas industri di kawasan ini. Optimalisasi kawasan industri juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi daerah. PAD yang meningkat akan digunakan untuk mendukung program pembangunan lain di PPU. Strategi ini merupakan langkah penting dalam diversifikasi ekonomi daerah.

8. Peningkatan daya saing BUMD melalui inovasi model bisnis dan ekspansi sektor prioritas

BUMD di Kabupaten PPU didorong untuk melakukan inovasi model bisnis agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Pemerintah memberikan dukungan dalam pengembangan kapasitas manajemen dan penguatan sektor-sektor prioritas seperti energi dan pariwisata. Ekspansi bisnis dilakukan secara strategis untuk memperluas kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Peningkatan daya saing BUMD juga membuka peluang pendapatan baru bagi daerah. Strategi ini memperkuat peran BUMD sebagai motor pembangunan daerah.

9. Peningkatan manfaat pengelolaan aset daerah melalui sumber pendanaan alternatif

Pengelolaan aset daerah di PPU dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat ekonomi. Pemerintah mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama publik-swasta dan skema pembiayaan inovatif. Pendapatan dari aset yang dikelola dengan baik akan mendukung pembiayaan pembangunan. Strategi ini memastikan aset

daerah menjadi sumber daya yang produktif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan aset yang tepat, keberlanjutan pembangunan lebih terjamin.

10. Perluasan akses layanan keuangan formal secara inklusif

Pemerintah PPU mendorong perluasan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok rentan dan UMKM. Program literasi keuangan dan kemitraan dengan lembaga perbankan diintensifkan agar layanan lebih mudah diakses. Akses keuangan yang lebih baik memungkinkan masyarakat melakukan investasi usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Strategi ini juga mengurangi ketergantungan pada rentenir dan praktik keuangan informal. Dengan inklusivitas keuangan, ekonomi daerah tumbuh lebih sehat dan merata.

11. Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata unggulan

PPU mengembangkan destinasi wisata unggulan dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal. Pemerintah membangun fasilitas pendukung seperti akses transportasi, penginapan, dan promosi pariwisata. Pengembangan ini bertujuan menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Wisata yang berkembang juga membuka peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi kreatif. Strategi ini mendukung diversifikasi ekonomi daerah dan pelestarian budaya.

12. Pengendalian inflasi dengan menjamin ketersediaan stok dan keterjangkauan harga komoditas pokok

Pemerintah PPU mengendalikan inflasi melalui pengawasan ketat terhadap ketersediaan stok dan harga komoditas pokok. Langkah ini dilakukan dengan memantau distribusi barang kebutuhan pokok agar selalu tersedia dan terjangkau. Pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku usaha dan pasar tradisional untuk menjaga kestabilan harga. Pengendalian inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Strategi ini menjaga keseimbangan ekonomi makro daerah.

13. Peningkatan ekspor barang dan jasa melalui penguatan pasar lokal

Kabupaten PPU mendorong peningkatan ekspor dengan memperkuat basis pasar lokal sebagai titik awal pengembangan produk. Pemerintah mendukung pengembangan kualitas produk dan promosi di pasar regional dan internasional. Penguatan jaringan distribusi dan kemitraan usaha menjadi fokus utama. Dengan meningkatnya ekspor, pendapatan daerah dan pelaku usaha lokal bertambah. Strategi ini memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing produk PPU.

Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan

1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial

Kabupaten PPU memperluas cakupan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Program ini mencakup bantuan langsung, subsidi, dan jaminan sosial agar kebutuhan dasar terpenuhi. Peningkatan kualitas layanan memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak maksimal. Perlindungan sosial yang memadai membantu mengurangi risiko kemiskinan. Strategi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PPU meningkatkan layanan rehabilitasi sosial untuk PMKS agar mereka dapat kembali mandiri dan produktif. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Pemerintah memperkuat fasilitas dan tenaga pendukung dalam pelayanan rehabilitasi. Upaya ini membantu mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kualitas hidup PMKS. Strategi ini memperkuat jaringan sosial dan inklusivitas masyarakat.

3. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui Usaha Ekonomi Produktif

Kabupaten PPU memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini menyediakan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi kelompok rentan. Dengan dukungan ini, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Pemerintah juga mempromosikan produk hasil UEP untuk memperluas pasar. Strategi ini menggerakkan ekonomi lokal dari basis masyarakat miskin.

4. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin

PPU meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pemerintah memastikan fasilitas dan program subsidi dapat dijangkau oleh kelompok rentan. Peningkatan akses ini membantu mendorong kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Pelayanan dasar yang merata menjadi fondasi pengentasan kemiskinan. Strategi ini menguatkan pondasi pembangunan sosial ekonomi daerah.

5. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Kabupaten PPU melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara berkala untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan sosial. Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan data terkini dan valid. Dengan data yang tepat, bantuan dan program dapat diberikan secara efektif dan efisien. Strategi ini memperkuat tata kelola dan transparansi program sosial.

Sasaran 7: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

1. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (APD)

PPU fokus pada peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Aparatur yang profesional dan berintegritas mampu memberikan pelayanan publik

berkualitas. Pemerintah juga menerapkan sistem evaluasi kinerja untuk mendorong peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas APD menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Strategi ini memperkuat birokrasi yang efektif dan efisien.

2. Peningkatan sistem dan proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Kabupaten PPU meningkatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses tersebut secara digital. Dengan perencanaan yang matang dan pelaporan yang akurat, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal. Strategi ini memastikan penggunaan anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah. Upaya ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal

PPU menguatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah melakukan audit rutin dan pengawasan berbasis risiko untuk menjaga integritas organisasi. Penguatan sistem pengendalian internal membantu terciptanya tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Strategi ini mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat.

4. Penguatan manajemen aset daerah

Pemerintah Kabupaten PPU memperkuat pengelolaan aset daerah melalui pendataan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan nilai dan manfaat aset bagi pembangunan daerah. Pemerintah juga memanfaatkan aset untuk mendukung sumber pendanaan alternatif. Penguatan manajemen aset menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi ini mendukung keberlanjutan dan efisiensi pembangunan.

5. Peningkatan layanan administrasi dan pelayanan publik

Kabupaten PPU berkomitmen meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik dengan sistem yang mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah menerapkan digitalisasi layanan untuk memudahkan akses masyarakat. Pelayanan yang prima meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Strategi ini mendorong pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik. Pelayanan publik yang baik menjadi ciri pemerintahan modern di PPU.

Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten dan desa

Kabupaten PPU fokus memperbaiki dan membangun jalan kabupaten serta desa untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Peningkatan ini bertujuan mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang lebih lancar. Pemerintah menggunakan teknologi konstruksi yang tepat agar jalan tahan lama dan ramah lingkungan. Dengan infrastruktur jalan yang baik, akses layanan publik dan ekonomi semakin optimal. Strategi ini memperkuat integrasi wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pengembangan jaringan listrik dan energi terbarukan

PPU berkomitmen mengembangkan jaringan listrik yang handal sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan ini mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah melakukan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga riset untuk implementasi teknologi energi hijau. Penyediaan energi yang cukup dan berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Strategi ini memperkuat ketahanan energi daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Peningkatan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi

Kabupaten PPU meningkatkan akses dan kualitas sistem penyediaan air bersih serta fasilitas sanitasi yang layak. Pemerintah membangun infrastruktur distribusi air dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Penyediaan air bersih yang merata dan sanitasi yang baik mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Strategi ini mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar warga dan kualitas lingkungan yang lebih sehat. Infrastruktur air bersih yang handal menjadi fondasi pembangunan sosial ekonomi.

4. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan internet

PPU mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet untuk memperluas akses digital di seluruh wilayah. Pemerintah mendorong kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memperbaiki kualitas dan jangkauan layanan. Akses internet yang merata mendukung pendidikan, pelayanan publik, dan peluang bisnis digital. Strategi ini penting untuk mempersiapkan PPU menghadapi era ekonomi digital. Infrastruktur telekomunikasi yang kuat menjadi pilar pembangunan modern dan inklusif.

Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan

Kabupaten PPU terus memperbaiki dan menambah sarana prasarana pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemerintah membangun ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar nasional. Sarana yang memadai mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Strategi ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh jenjang. Dengan fasilitas berkualitas, hasil belajar diharapkan meningkat signifikan.

2. Penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan

PPU memberikan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan kepada guru serta tenaga kependidikan agar kompetensinya terus meningkat. Guru yang berkualitas mampu mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pemerintah juga mendorong sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Strategi ini meningkatkan mutu pengajaran dan kualitas sumber daya manusia daerah. Guru yang profesional menjadi ujung tombak pendidikan bermutu.

3. Peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan

Kabupaten PPU berupaya menghilangkan kesenjangan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Pemerintah menyediakan program beasiswa, transportasi siswa, dan fasilitas belajar tambahan. Pemerataan pendidikan memastikan setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Strategi ini mendukung terciptanya SDM unggul yang berdaya saing. Dengan akses pendidikan yang merata, pembangunan manusia lebih inklusif.

4. Penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal

PPU mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya lokal dalam kurikulum untuk membentuk kepribadian siswa yang berintegritas dan cinta tanah air. Pendidikan karakter mencakup nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Penanaman budaya lokal juga memperkuat identitas daerah dan kebanggaan generasi muda. Strategi ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Pendidikan karakter menjadi modal sosial bagi kemajuan daerah.

Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan dasar

Kabupaten PPU memperkuat fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu agar layanan medis lebih optimal dan merata. Pemerintah melakukan peningkatan sarana, alat kesehatan, serta jumlah tenaga medis di daerah. Layanan yang lebih baik mempercepat penanganan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Strategi ini menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup warga. Fasilitas kesehatan yang memadai juga mendorong upaya pencegahan penyakit secara efektif.

2. Peningkatan cakupan dan kualitas program imunisasi dan gizi

PPU meningkatkan cakupan imunisasi dan program gizi untuk mencegah penyakit dan mendukung pertumbuhan anak yang optimal. Pemerintah mengadakan kampanye kesehatan dan pengawasan berkala terhadap status gizi balita. Program ini membantu menurunkan angka kematian bayi dan stunting di daerah. Strategi ini memperkuat kesehatan generasi muda PPU. Imunisasi dan gizi yang baik menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

3. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak

Kabupaten PPU memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan ibu hamil dan anak untuk menekan angka kematian dan komplikasi. Pemerintah menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai di seluruh wilayah. Penyuluhan dan pendampingan kehamilan dilakukan secara intensif. Strategi ini menjamin ibu dan anak memperoleh pelayanan yang aman dan berkualitas. Layanan kesehatan ibu dan anak yang baik memperkuat fondasi kesehatan keluarga.

4. Pengembangan sistem informasi dan manajemen kesehatan

PPU mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan. Data kesehatan yang akurat membantu perencanaan program dan penanganan penyakit

secara tepat sasaran. Pemerintah juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi informasi. Strategi ini mendukung efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan di daerah. Sistem informasi yang baik menjadi alat penting dalam pengelolaan kesehatan masyarakat.

Sasaran 11: Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial

1. Penguatan program pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan

Kabupaten PPU menguatkan program pemberdayaan sosial yang fokus pada kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan anak jalanan. Pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan sosial agar mereka mandiri dan produktif. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan. Strategi ini memperkuat inklusivitas dan keadilan sosial di PPU. Pemberdayaan sosial menjadi kunci ketahanan masyarakat secara menyeluruh.

2. Pengembangan pusat layanan sosial terpadu

PPU membangun pusat layanan sosial terpadu yang menyediakan berbagai bantuan dan layanan di satu lokasi. Pusat ini memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemerintah memastikan koordinasi antar lembaga untuk pelayanan yang sinergis dan responsif. Strategi ini meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan sosial di daerah. Pusat layanan terpadu memperkuat jaringan sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam mengatasi risiko sosial

Kabupaten PPU mendorong peningkatan kapasitas keluarga dan komunitas untuk mengelola risiko sosial seperti kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah melakukan pelatihan, pendampingan,

dan kampanye kesadaran sosial. Upaya ini memperkuat sistem sosial lokal dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan keluarga. Strategi ini mendukung terbentuknya masyarakat yang tangguh dan harmonis. Keluarga yang kuat menjadi pondasi ketahanan sosial.

4. Pengembangan program jaminan sosial dan perlindungan sosial

PPU memperluas dan meningkatkan program jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah memastikan program ini menjangkau kelompok yang membutuhkan secara tepat dan cepat. Jaminan sosial memberikan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi. Strategi ini membantu mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan jaminan sosial yang kuat, masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera.

Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Kabupaten PPU mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan. Pemerintah menerapkan prinsip konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan lestari. Pengelolaan berkelanjutan mendukung kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Strategi ini menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pengelolaan yang baik menjadi kunci pembangunan hijau di PPU.

2. Pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah

PPU meningkatkan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi dan pengawasan ketat. Pemerintah mendorong pengelolaan limbah domestik dan industri secara ramah lingkungan. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Pengendalian pencemaran penting untuk menjaga kesehatan masyarakat

dan kualitas lingkungan. Strategi ini menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

3. Peningkatan penghijauan dan konservasi kawasan hutan dan lahan

Kabupaten PPU melakukan penghijauan dan konservasi hutan serta lahan kritis untuk mencegah degradasi lingkungan. Pemerintah menggalakkan penanaman pohon dan perlindungan habitat alami. Konservasi ini berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. Strategi ini memperkuat ketahanan ekologis daerah. Penghijauan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

PPU mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Program pelatihan dan kampanye lingkungan dilakukan untuk membangun kesadaran dan tindakan nyata. Partisipasi masyarakat memperkuat keberhasilan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi ini mendukung terciptanya budaya peduli lingkungan di PPU. Dengan keterlibatan masyarakat, lingkungan hidup dapat terjaga secara optimal.

3.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara lebih operasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut ini.

Tabel 3. 5 Penyelarasan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul	Sasaran 1: Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Perbaikan dan Peningkatan Bangunan Sekolah 2. Pemberian Beasiswa Pendidikan 3. Pemberian Seragam dan kelengkapan Sekolah 4. Pemberian Insentif Tenaga Pendidik 5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik 6. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis teknologi inovatif	1. Memperluas cakupan partisipasi sekolah wajib belajar 13 tahun 2. Menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik 3. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Transformasi Pembelajaran Digital
		Sasaran 2: Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Penguatan sistem rujukan berjenjang 3. Peningkatan kapasitas	1. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai 2. Menyediakan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat 3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan setiap kelompok usia siklus hidup, penanganan stunting,

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan pemerataan tenaga kesehatan 4. Perluasan perlindungan jaminan kesehatan 5. Penguatan penanganan penyakit menular dan tidak menular penting 6. Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting 7. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak, serta penyakit menular dan tidak menular.
		Sasaran 3: Meningkatkan Kesetaraan Gender	1. Penguatan prinsip inklusivitas gender dan disabilitas dalam perencanaan dan disain sarana prasarana layanan publik 2. Penyediaan layanan publik pemerintah yang dapat diakses seluruh	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana layanan publik ramah gender dan disabilitas 2. Memperkuat proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 3. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kelompok 3. Pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan 4. Penyediaan pusat pelayanan perlindungan perempuan dan kelompok rentan yang optimal	
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik	Tujuan 3: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Sasaran 11: Tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif	1. Penyesuaian struktur organisasi berdasarkan evaluasi kelembagaan secara berkala dan berbasis kinerja 2. Penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi 3. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 2. Penguatan regulasi standar pelayanan pemerintahan dan implementasinya 3. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			akuntabilitas kinerja	
		Sasaran 12: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1. Pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis digital 2. Peningkatan jaringan internet pada fasilitas layanan publik	1. Pengembangan sistem layanan publik digital yang responsif dan terintegrasi, 2. peningkatan infrastruktur TIK pendukung layanan pemerintahan
Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif	Tujuan 2: Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	Sasaran 5: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Berbasis Potensi Lokal	1. Pengembangan produktifitas komoditi unggulan 2. Pengembangan kawasan pusat ekonomi terpadu 3. Optimalisasi peran sentra industri Kabupaten 4. Mendorong peningkatan investasi melalui kemudahan perijinan	1. Mengoptimalkan nilai tambah KPI Buluminung. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Lokal 3. Mengembangkan pusat bisnis, pemasaran dan logistik bagi produk unggulan Penajam Paser Utara; Pengembangan pusat bisnis, pemasaran dan logistik bagi produk unggulan Penajam Paser Utara. 4. Penguatan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pertanian berbasis potensi lokal melalui pengembangan transportasi, energi, irigasi, telekomunikasi,

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM 6. Penguatan kelembagaan koperasi 7. Penguatan peran Kawasan Peruntukan Industri Buluminung bagi peningkatan PAD 8. Peningkatan daya saing BUMD melalui inovasi model bisnis dan ekspansi sektor prioritas 9. Peningkatan manfaat pengelolaan aset daerah melalui sumber pendanaan alternatif 10. Perluasan akses layanan keuangan formal secara inklusif 11.	dan logistik untuk mendorong konektivitas, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan 5. Mendorong penguatan koperasi dan BUMD, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan kelembagaan UMKM, optimalisasi aset daerah, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi usaha, serta peningkatan kapasitas pengelola UMKM sesuai kewenangan daerah. 6. Meningkatkan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal, penguatan peran TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), serta pemberdayaan UMKM dan masyarakat rentan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata unggulan. 12. Pengendalian inflasi dengan menjamin ketersediaan stok dan keterjangkauan harga komoditas pokok 13. Peningkatan ekspor barang dan jasa melalui penguatan pasar lokal	
		Sasaran 6: Menurunkan Kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Mendorong pemberdayaan ekonomi	1. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work 2. Pengentasan kemiskinan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat miskin dan rentan melalui Usaha Ekonomi Produktif 4. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin 5. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala 4. Pemberian program bantuan sosial tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi kedaruratan. 5. Meningkatkan graduasi penduduk miskin melalui pemberdayaan dan program usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin 6. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial dasar bagi PPKS dan kelompok rentan
		Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	1. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan, sertifikasi angkatan kerja dan pendidikan vokasi 2. Perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam penempatan	1. Meningkatkan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi menyesuaikan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri dan peluang kebutuhan tenaga kerja IKN, 2. Kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam perluasan kesempatan kerja penduduk lokal, 3. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kerja penduduk lokal 3. Peningkatan akses informasi pasar kerja 4. Perlindungan tenaga kerja	
Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah	Tujuan 2: Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	Sasaran 8: Meningkatkannya Ketahanan pangan	1. Peningkatan produksi pangan lokal 2. Peningkatan konsumsi pangan lokal bergizi 3. Optimalisasi ketersediaan dan distribusi cadangan pangan untuk menjamin keamanan pangan	1. Penguatan kapasitas produksi pangan melalui perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan areal baru, optimalisasi lahan kering, serta penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan. 2. Pengembangan kawasan sentra produksi terpadu dan modern, serta penyediaan fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian-perikanan seperti lumbung pangan dan cold storage di pusat-pusat produksi. 3. Meningkatkan konsumsi pangan lokal bergizi melalui edukasi masyarakat, promosi pangan lokal, dan diversifikasi produk olahan guna memperkuat ketahanan gizi dan ekonomi petani.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman	Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul	Sasaran 4: Meningkatnya Harmoni sosial budaya masyarakat	1. Penguatan peran lembaga adat dan komunitas masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi 2. Penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat 3. Peningkatan kapasitas deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial 4. Pelestarian budaya lokal melalui pengembangan pusat budaya, pendidikan karakter, dan penyediaan ruang publik bagi aktivitas sosial dan kebudayaan. 5. Menetapkan dan melindungi situs-situs bersejarah serta objek budaya sebagai	1. Fasilitasi kegiatan pelestarian adat istiadat dan kebudayaan 2. Peningkatan kapasitas komunitas dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan 3. . Penguatan perlindungan masyarakat lokal dan budaya melalui pengembangan pusat budaya, pelestarian bahasa daerah, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta penyediaan ruang publik untuk aktivitas sosial dan kebudayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			cagar budaya daerah untuk mendukung pelestarian warisan budaya	
Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tujuan 2: Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	Sasaran 9: meningkatkan Infrastruktur merata dan berkualitas	1. Peningkatan sistem transportasi yang aman, terjangkau dan terintegrasi antar wilayah 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan. 3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar 4. Peningkatan kualitas serta penataan lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merata 5. Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan untuk mendukung	1. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan wilayah pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata guna meningkatkan kemudahan mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 2. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 3. Pemerataan kualitas keselamatan Jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan strategis wilayah. 4. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif melalui jaringan perpipaan, peningkatan layanan sanitasi, penguatan kelembagaan SPAM,

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penyelenggaraan pelayanan publik 6. Peningkatan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan 7. Peningkatan kualitas konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja	pengawasan kualitas air, dan pemanfaatan IPTEK. 5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui rehabilitasi ekosistem kritis, konservasi keanekaragaman hayati, penguatan peran masyarakat berbasis kearifan lokal, dan perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 6. Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance, 7. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan secara bertahap guna mendukung pemenuhan kebutuhan layanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pemerataan fasilitas pelayanan di seluruh wilayah.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 10: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	1. Peningkatan program penanaman pohon dan reboisasi, 2. Mendorong perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati melalui edukasi dan kolaborasi berbasis masyarakat; 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat melalui kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, 4. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 5. Pemantauan kualitas air, tanah, dan udara secara berkala, dengan melibatkan	1. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana 2. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi melalui edukasi masyarakat, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), dan penguatan pemilahan sejak dari sumber. 3. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan 4. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. 5. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem. 6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat 6. penguatan perizinan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan 7. Optimalisasi pengelolaan sampah terintegrasi melalui edukasi, pemilahan dari sumber, penerapan 3R dan pembangunan TPST; 10. Penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana 11. Penguatan respon cepat terhadap bencana 12. Penguatan peran <i>stakeholder</i> dalam penanggulangan bencana 13. Penyediaan rumah layak huni dan relokasi korban bencana.	tampung lingkungan hidup

3.3.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
Visi: Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera , dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia		
				Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) di atas 15 tahun		
				Harapan Lama Sekolah (HLS)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rapor Pendidikan		
				Tingkat Partisipasi penduduk usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pelayanan pendidikan berkualitas Pengembangan kompetensi SDM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
Misi: 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih				Tingkat Partisipasi penduduk usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
		Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat		Usia Harapan Hidup (UHH)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting	Pelayanan kesehatan berkualitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka Kematian Ibu (AKI)		
		Meningkatnya kesetara		Indeks Ketimpangan Gender		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
dalam Kerangka Kolaborasi 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan 4. Mewujudkan		an gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Persentase Anggaran Responsif Gender		
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
Ketahanan Pangan Daerah 5. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman 6. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang			perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak			
		Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan	Peningkatan kerukunan dan keharmonisan Masyarakat dan Pelestarian budaya dan kearifan lokal	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
Berkelanjutan				umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional daerah yang masih lestari dan dikembangkan		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH
	Ekonomi daerah yang menyejahterakan,			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
				Indeks Gini		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
	berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah		Kontribusi PDRB sektor primer		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan	Persentase Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting	Pengembangan pertanian	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
			barang penting			
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang representatif		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Nilai investasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Peningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		Menurunnya Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerimaan Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
			Meningkatnya Produktifitas tenaga kerja	Persentase Angkatan Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan kompetensi angkatan kerja dan Pengembangan industri padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		Meningkatnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan	Skor Pola Pangan Harapan	Penguatan ketahanan pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
		Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	pangan masyarakat			
				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Infrastruktur merata dan berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Persentase penataan bangunan dan lingkungan		
			Meningkatnya pemberda	Persentase Lembaga		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
			yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	kemasyarakatan yang aktif		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kapasitas air baku	Ketercukupan sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Indeks Risiko Bencana		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
			Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana; 3. Persentase penanganan pemulihan pasca bencana	Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Tata kelola pemerintahan		Nilai AKIP Pemerintah Daerah		
				IPKD		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
	berkualitas	yang bersih, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas		SPI KPK		
			Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan melayani	Rata-rata nilai AKIP Perangkat Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				Persentase penurunan SILPA		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Nilai rata-rata tingkat maturitas SPIP perangkat daerah		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital		Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Pemdi		
			Meningkatnya jangkauan	Indeks inovasi daerah	Peningkatan kesejahteraan penggerak	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Nomenklatur
			dan kualitas layanan publik		pembangunan SDM	
					Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan rukun tetangga	
					Penurunan beban pengeluaran	
					Penguatan pemerintahan berbasis ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Sumber: Olah, 2025

Tabel 3. 7 Rincian Program Unggulan (Janji Politik) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
Memberikan seragam, tas, dan sepatu sekolah gratis yang terintegrasi dengan program Kartu Penajam Cerdas.	Sebagai upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di Kab. Penajam Paser Utara, maka dicanangkan Program Pelayanan Pendidikan, yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah kabupaten. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan sarana belajar fisik, tetapi juga memperkuat sistem dukungan sosial yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar serta mendukung pemerataan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan program prioritas berupa pemberian seragam, tas, dan sepatu sekolah gratis bagi peserta didik. Program ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengikuti kegiatan belajar dengan layak dan percaya diri. Program ini terintegrasi dengan Program Kartu Penajam Cerdas (KPC), yang merupakan skema bantuan pendidikan berbasis data terintegrasi. Melalui KPC, pendistribusian bantuan seragam, tas, dan sepatu dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terencana. Kartu ini berfungsi sebagai identitas penerima manfaat berbagai layanan pendidikan dan sosial, termasuk dukungan sarana pendidikan dasar seperti perlengkapan sekolah. Dengan sinergi antara bantuan perlengkapan sekolah dan pemanfaatan teknologi serta data dalam Program Kartu Penajam Cerdas, diharapkan terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah, pengurangan angka putus sekolah, serta terbangunnya semangat belajar yang lebih tinggi di kalangan peserta didik. Ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
BPJS Kesehatan gratis hingga peningkatan pelayanan kesehatan	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen untuk menjamin hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Sebagai bagian dari program prioritas daerah, diselenggarakan program BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat yang belum tercover jaminan kesehatan nasional, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk menjamin pemberian layanan kesehatan serta untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses layanan kesehatan hanya karena faktor biaya. Pemerintah daerah secara aktif mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah, yang datanya disinergikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan dukungan lintas sektor. Selain menjamin kepesertaan, program ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat kapasitas Puskesmas, menambah ketersediaan tenaga medis, memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatkan sistem rujukan yang efektif, yaitu dengan peningkatan RSUD Ratu Aji Putri Botung ke Tipe B dan Rumah Sakit Sepaku. Seluruh upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Program ini menjadi bagian penting dari Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang merupakan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui sinergi antara pembiayaan jaminan kesehatan dan perbaikan layanan, diharapkan akan tercipta masyarakat Penajam Paser Utara yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
Membuka lapangan pekerjaan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia kaum milenial, gen Z, dan beasiswa pendidikan guru serta beasiswa SD hingga S-3	Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan serangkaian program prioritas yang berfokus pada peningkatan kapasitas generasi muda, pemerataan akses pendidikan, serta penciptaan peluang kerja produktif. Salah satu strategi utama adalah mendorong pembukaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis, seperti pertanian modern, ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, serta pariwisata berbasis potensi lokal. Program ini tidak hanya menargetkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memfasilitasi pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) bagi angkatan kerja muda. Sejalan dengan itu, perhatian khusus diberikan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia generasi milenial dan Gen Z. Melalui berbagai pelatihan berbasis teknologi, inovasi, kewirausahaan, serta literasi digital, generasi muda diarahkan untuk menjadi pelaku utama pembangunan daerah di era transformasi digital dan ekonomi hijau. Untuk menjamin keberlanjutan pengembangan SDM, pemerintah juga meluncurkan program beasiswa pendidikan secara berjenjang. Beasiswa ini mencakup dukungan pendidikan sejak jenjang SD hingga S-3, baik untuk pelajar umum maupun untuk calon dan tenaga pendidik (guru), sebagai bagian dari upaya mencetak tenaga pendidik profesional dan akademisi berkualitas di masa depan. Program ini dikelola secara akuntabel dan terintegrasi dalam sistem Kartu Penajam Cerdas, memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Keseluruhan program ini merupakan pilar penting dalam Program Prioritas Peningkatan Daya Saing SDM Daerah, yang berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya—produktif, berpengetahuan, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
Penguatan Peran Sosial Keagamaan melalui Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Pemuka Lintas Agama	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, peran para guru ngaji, guru PAUD, guru madrasah, imam masjid, pemangku adat maupun tokoh agama lainnya memiliki arti penting sebagai penjaga nilai, pendidik generasi, dan pemersatu masyarakat di tingkat akar rumput. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang selama ini sering dilakukan secara sukarela dan penuh keikhlasan, pemerintah daerah menjalankan program prioritas berupa pemberian dan peningkatan honorarium bagi para pelaku pendidikan keagamaan dan tokoh keagamaan lintas agama tersebut. Program ini bukan sekadar pemberian insentif, tetapi juga wujud komitmen untuk menghadirkan keadilan dan pengakuan yang layak terhadap peran sosial mereka dalam membina akhlak, memperkuat toleransi, dan merawat harmoni antar umat beragama. Kebijakan ini dirancang dengan pendekatan inklusif lintas agama, memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, dan memperkuat ikatan sosial di tengah keberagaman masyarakat Penajam Paser Utara. Diharapkan, melalui program ini, para guru dan pemuka agama dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan terfasilitasi, serta menjadikan ruang-ruang pendidikan keagamaan sebagai tempat yang nyaman, konsisten, dan berkelanjutan bagi pembentukan karakter anak-anak kita.
Menguatkan Peran Sosial Masyarakat Melalui Peningkatan Insentif Pelayan Masyarakat	Masyarakat yang berperan dalam pelayanan dan bersifat kemanusiaan atau sukarela, perlu mendapat dukungan dalam pelaksanaan tugasnya. Kader posyandu yang rutin memantau tumbuh kembang anak, sopir ambulans yang sigap saat darurat, tim fardu kifayah yang dengan ikhlas membantu saat duka, anggota LPM dan karang taruna yang aktif di lingkungan. semuanya adalah bagian penting dari nadi pelayanan di tingkat paling dasar. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melihat mereka bukan sekadar pelengkap sistem, tapi sebagai ujung tombak yang menyentuh langsung kehidupan warga. Karena itu, melalui program prioritas daerah, pemerintah mengambil langkah nyata dengan memberikan insentif bagi para pelayan masyarakat

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
	tersebut. Ini merupakan bentuk dukungan operasional, tapi juga soal penghargaan, pengakuan, dan perhatian terhadap kerja-kerja sunyi yang mereka lakukan setiap hari. Dengan insentif yang lebih layak, diharapkan semangat mereka semakin terjaga, dan peran sosial yang selama ini dijalankan dengan penuh dedikasi bisa terus berkelanjutan. Program ini juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah yang adil dan peduli—bahwa mereka yang setia bekerja untuk masyarakat, harus juga dirawat oleh negara.
Pemberdayaan dan bantuan modal bergulir pelaku UMKM serta ekonomi kreatif	Perekonomian rakyat juga digerakkan oleh sektor nonformal. Ekonomi masyarakat juga tumbuh dari usaha kecil di rumah, pasar tradisional, warung sederhana, hingga ide-ide kreatif dari generasi muda yang tidak pernah lelah berinovasi. Di sinilah UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memainkan peran penting—bukan hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, tapi juga sebagai penopang keseharian banyak keluarga. Melihat semangat itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menjalankan program prioritas berupa pemberdayaan pelaku UMKM serta bantuan modal bergulir. Program ini hadir bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi membangun kemandirian. Modal diberikan tidak untuk habis dipakai, tapi didesain agar bisa terus berputar dan digunakan bergantian oleh pelaku usaha lain yang juga sedang merintis. Selain dukungan modal, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif juga akan mendapatkan pendampingan usaha, pelatihan, dan akses pasar, agar usahanya bisa naik kelas, produknya lebih dikenal, dan omzetnya meningkat. Fokusnya adalah membuat usaha rakyat tumbuh secara berkelanjutan dan punya daya tahan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan semangat gotong royong, program ini diharapkan bukan hanya menguatkan ekonomi lokal, tapi juga menjadi jalan bagi lahirnya wirausaha baru yang kreatif, mandiri, dan siap bersaing—baik di tingkat daerah, nasional, maupun pasar digital yang lebih luas.

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
Santunan Kematian melalui Perlindungan Sosial	Program Santunan Kematian melalui Perlindungan Sosial merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang sedang mengalami musibah kehilangan anggota keluarga. Program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat dalam situasi duka. Santunan kematian diberikan kepada ahli waris warga yang meninggal dunia sebagai dukungan moril dan material, terutama bagi keluarga yang tergolong rentan secara sosial dan ekonomi. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa sendiri saat menghadapi kehilangan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat masyarakat, mendorong solidaritas sosial, serta mempertegas prinsip keadilan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan, Pemerintah Daerah meluncurkan Program Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan melalui fasilitasi kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk mendapatkan jaminan kematian. Program ini merupakan salah satu program unggulan Kepala Daerah dalam upaya memperluas cakupan perlindungan sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah, seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, pedagang kecil, tukang ojek, dan pekerja non-formal lainnya. Melalui program ini, Pemerintah Daerah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan yang telah terdaftar. Jika terjadi risiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka ahli waris akan menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta, sesuai ketentuan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, jika peserta telah memenuhi masa kepesertaan tertentu, anak dari peserta juga berhak atas beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi. Program ini tidak hanya memberikan bantuan saat terjadi musibah, tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun rasa aman bekerja,

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
	memperkuat jaring pengaman sosial, dan memperluas akses masyarakat rentan terhadap sistem perlindungan ketenagakerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu mengurangi kerentanan sosial-ekonomi serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pemberian Insentif bagi RT sebagai Penggerak Utama di Lingkungan Warga	Rukun Tetangga (RT) adalah satuan kelembagaan kependudukan yang paling dekat dengan warga. Mereka yang pertama kali menerima laporan jika ada masalah di lingkungan, dan yang terus aktif menjaga ketertiban serta gotong royong di tingkat paling dasar. Perannya sangat sentral, meskipun seringkali dilakukan secara sukarela dan jauh dari sorotan. Sebagai bentuk penghargaan dan perhatian atas dedikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan program prioritas berupa pemberian dana insentif bagi RT di seluruh wilayah kabupaten. Insentif ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pembangunan yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat RT sesuai dengan kebutuhan dan menjawab persoalan masyarakat. Dengan adanya insentif ini, diharapkan semangat pembangunan serta kualitas pelayanan di tingkat lingkungan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah juga mendorong agar insentif ini dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan pelibatan RT dalam berbagai agenda pembangunan berbasis komunitas. Program ini

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
	menjadi bagian dari komitmen membangun dari bawah, dimulai dari lingkungan paling kecil, dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan gotong royong.
Pembangunan yang adil, merata, dan partisipatif hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT)	Dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat paling dasar, Pemerintah Daerah memberikan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis RT. Dalam penentuan alokasi besaran Dana PPMK tersebut dihitung berdasarkan banyaknya jumlah RT dalam setiap kelurahan. Program ini menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada satupun wilayah yang tertinggal dari arus pembangunan, termasuk di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang merupakan garda terdepan pelayanan publik. Melalui program ini, setiap RT difasilitasi untuk mengidentifikasi kebutuhan lingkungannya secara partisipatif, mengusulkan prioritas pembangunan yang paling mendesak, dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara transparan dan swakelola. Dukungan anggaran diberikan secara langsung ke lingkungan RT, dengan pengawasan melekat dari masyarakat, pemerintah kelurahan/desa, dan perangkat pengawasan lainnya. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan lingkungan, saluran drainase, penerangan, atau sarana posyandu, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial masyarakat dan penguatan gotong royong. Melalui musyawarah warga, pelibatan pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat, program ini mendorong masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat: 1. Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah RT. 2. Meningkatkan kualitas layanan dasar di permukiman

Program Unggulan (Janji Politik)	Rincian
	padat. 3. Memperkuat kohesi sosial dan kemandirian komunitas lokal. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan di tingkat akar rumput. Pemerintah Daerah meyakini bahwa pembangunan yang dimulai dari bawah, yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, serta dijalankan dengan semangat kolaborasi dan akuntabilitas, akan menciptakan fondasi yang kuat untuk kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Sumber: Olah, 2025

Selanjutnya terdapat beberapa program unggulan yang merupakan program pembangunan daerah strategis untuk perlu diperhatikan pelaksanaannya oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Program tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Pembangunan Water Front City
- 2) Revitalisasi Pasar Induk Sepaku dan Pasar Petung
- 3) Pengembangan Food Estate
- 4) Pembangunan Pusat Layanan Publik Terintegrasi (Mall Pelayanan Publik)
- 5) Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

3.3.4 Arah Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMD memiliki peran penting dalam perencanaan berbasis spasial. Pembangunan kewilayahan dapat merujuk pada pembangunan kewilayahan yang ada pada dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, maupun dokumen RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut beberapa

pembangunan kewilayahan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.3.4.1 Arah Kebijakan (*Highlight* intervensi) Pembangunan Penajam Paser Utara dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN tertuang dalam arah kebijakan kewilayahan yang ada pada lampiran IV RPJMN. Pada lampiran tersebut disajikan *highlight* indikasi intervensi pada masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kabupaten Penajam Paser Utara masuk sebagai Kawasan SuperHub ekonomi Ibu Kota Nusantara. Secara lebih rinci, berikut arah kebijakan kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 8 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
1.	Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, yakni SPAM Regional Kalimantan Timur
		Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara
		Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara
		Pengembangan Kawasan peruntukan industry di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara
		Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustry hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu
		Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar)

No	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
		Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku / penolong di industry padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil dan alas kaki)
		Fasilitasi pengembangan industry padat karya terampil
		Peningkatan produksi pangan nabati
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistic
		Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan laut
		Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara
		Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi
		Pengembangan transportasi berkelanjutan
2	Provinsi Kalimantan Timur	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis melalui pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan
		Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif beserta penanganannya
		Penguatan konektivitas Listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu serta implementasi transisi energi
		Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan Kesehatan
		Perwujudan swasembada sektor pangan, hortikultura dan Perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim
		Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta)
		Penguatan kapasitas pelayanan Kesehatan dan tata Kelola pelayanan Kesehatan

No	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
		Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu system registrasi social ekonomi (Regososek)
		Penguatan Pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang STEAM, serta penguatan Pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat
		Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna
		Pengembangan Kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat Masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya

Sumber: RPJM Nasional Tahun 2025-2029

3.3.4.2 Arah Kebijakan (*Highlight* intervensi) Pembangunan Penajam Paser Utara dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan lebih lanjut dirinci kedalam *highlights* indikasi kebijakan yang akan menjadi pedoman masing – masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan. Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan untuk Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan Industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa dan perdagangan, yang diiringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN. *Highlights* indikasi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun *highlights* indikasi kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan;
4. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional;
5. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas;
6. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
7. Dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung;
8. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan;
9. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
10. Pengembangan ekonomi maritim;
11. Pengembangan pasar modern dan sentra IKM terintegrasi;
12. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
13. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
14. Optimalisasi destinasi wisata berbasis alam & budaya;
15. Pengembangan diversifikasi pangan;
16. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Api-api;
17. Pembangunan SPAM Regional Sistem Long Kali;
18. Penghijauan lingkungan;
19. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial;
20. Pemantauan sampah laut;
21. Penyediaan PSU permukiman;
22. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
23. Pembangunan Jalan Sotek – Bongan;

24. Penyelenggaraan Jalan Nenang – Buluminung;
25. Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
26. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
27. Pembangunan pengaman pantai;
28. Pengendalian banjir;
29. Penanganan kawasan kumuh;
30. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem mahakam;
31. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
32. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan.



Gambar 3. 3 Peta Highlights Indikasi Kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

3.3.4.3 Indikasi program utama RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi dokumen yang penting untuk dipertimbangkan dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan harapan implementasi kebijakan, rencana dan program dapat sinkron terhadap arahan rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya dalam periode pertama implementasi RTRW. Berikut disajikan indikasi program utama dalam dokumen RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3. 9 Indikasi program utama RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan								
1.1	Pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Koridor Penajam Petung							
	a. Penyusunan RDTR	BWP Penajam	APBN, APBD Kab	Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Kab. PPU					
	b. Pemantapan Pusat Pelayanan dan Pemerintahan	Perkotaan Penajam (Kec. Penajam)	APBD Kab	Bappelitbang Bag. Pemerintahan, Dinas PUPR Kab. PPU					
	c. Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional	Perkotaan Petung (Kec. Penajam)	APBD Kab	Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindustrian Perdagangan Kab. PPU					
1.2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	- Perkotaan Sotek (Kec. Penajam) - Perkotaan Waru (Kec. Waru) - Perkotaan Babulu Darat (Kec. Babulu)							
	a. Penyusunan RDTR BWP Waru	BWP Waru	APBD Kab	Dinas PUPR Kab, PPU					
	b. Penyusunan RDTR BWP Babulu	BWP Babulu	APBD Kab	Dinas PUPR Kab, PPU					
	c. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Fungsi PPK	Perkotaan Waru dan Perkotaan Babulu	APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. PPU, Swasta					
1.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	BWP Penajam Kelurahan Buluminung (Kec. Penajam)							

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	melalui Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang PPL	BWP Waru Desa Sesulu (Kec. Waru) BWP Babulu - Desa Gunung Mulia (Kec. Babulu) - Desa Babulu Laut (Kec. Babulu)						
	a. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Fungsi PPL	PPL di Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. PPU, Swasta				
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi							
2.1	Sistem Jaringan Jalan							
	a. Sistem Jaringan Transportasi Darat							
	Penyusunan Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Penyusunan Rencana Strategis Jalan dan Jembatan	Kab. Penajam Paser Utara	APBD	Kementerian PU, Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Sistem Jaringan Jalan							
	Rencana Jalan Tol							
	Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) TANAH GROGOT - PENAJAM	Kab. Penajam Paser Utara dan Kab Paser	APBN, Swasta	Kementerian PU, BPJT, KPBU				
	Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) BALIKPAPAN - PENAJAM (TOL TELUK BALIKPAPAN)	Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	APBN, Swasta	Kementerian PU, BPJT, KPBU				
	Rencana Jalan Arteri Primer (JAP) di Kab. Penajam Paser Utara							
	Ruas Jalan SP. LANGO - JEMBATAN P. BALANG BENTANG PENDEK	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser	APBN	Kementerian PU, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan				
	Rencana Jalan Kolektor Primer (JKP)							
	Ruas Jalan Sotek – Jambu – Sp. Resak Riko B	Kab. Penajam Paser Utara	APBN	Kementerian PU, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan				
	Ruas Jalan Muka PU Lama-Jalan Lingkar Riko	Kab. Penajam Paser Utara	APBN	Kementerian PU, Balai Pelaksanaan				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Jalan Nasional XII Balikpapan				
	Ruas Jalan Nenang – Pantai Lango – P. Balang – Karianga	Kab. Penajam Paser Utara	APBN	Kementerian PU, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan				
Pengembangan Jalan Kolektor Primer (JKP)								
	Ruas Jalan Logging ITCHI	Kab. Penajam Paser Utara	APBN	Kementerian PU, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan				
Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder (JKS)								
	Ruas Jalan Petung	Kab. Penajam Paser Utara	APBN	Kementerian PU, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan				
Jalan Kabupaten								
Rencana Jalan Lokal Primer (JLP)								
	Ruas Jalan <i>Coastal Road</i> Penajam (Gn. Seteleng - Sungai Parit)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Kademan-Buluminung	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Gerbang Madani-Jalan Ingkur	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Babulu Laut Ke Perbatasan Kab Paser	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	<i>Coastal Road</i> (Tanjung Tengah ke Sesulu)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
Pengembangan Jalan Lokal Primer (JLP)								
	Ruas Jalan Labangka	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Labangka-Babulu Laut	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Coastal Road (Jalan Bahari)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Waru-Bangun Mulya	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	<i>Coastal Road</i> (Sesulu-Api-api Labangka)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Ruas Jalan Labangka ke perkebunan	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Bangun Mulya-Waru (Perkebunan)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Pusat Pemerintahan-RTH	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Akses Coastal Road-Jalan Pariwisata	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Buluminung-Sotek-Waru-Sesulu-Paser	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Waru (Perkebunan)	Kecamatan Waru	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Perkebunan	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
Pengembangan Jalan Lokal Sekunder (JLS)								
	Ruas Jalan Suka Maju	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan CPO	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Jambu-Jalan Kemiri Gading	Kecamatan Penajam	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Girimukti	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Kopi-kopi	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Produksi	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
	Ruas Jalan Nipah-Nipah	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas PUPR (Bina Marga) Kab. PPU				
Terminal Penumpang								
	Terminal Penumpang Tipe B → Terminal Petung (Kec.Penajam)	Kec. Penajam	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim				
	Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Sepan	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		Terminal Waru	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
		Terminal Babulu	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Perwujudan Jembatan							
	1) Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/ jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan	Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., swasta	Kemen PU, Kemenhub, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas PUPR Kab. PPU, swasta				
		Jembatan Sungai Riko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., swasta	Kementerian PU, Kemenhub, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas PUPR Kab. PPU, swasta				
		Jembatan Nipah-nipah - Melawai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., swasta	Kementerian PU, Kemenhub, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas PUPR Kab. PPU, swasta				
	Pengembangan Angkutan Umum :							
	Penyusunan Studi Kelayakan Sistem Angkutan Umum;	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Penyediaan Pemberhentian untuk	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Angkutan Umum;							
	Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas berupa Trayek Angkutan Penumpang							
	Penajam – Nipah-Nipah;	Kec. Penajam	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Penajam – Babulu;	Kec. Penajam, Kec. Babulu	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Penajam – Tanjung Jumalai;	Kec. Penajam	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Penajam – Gersik – Jenebora – Pantai Lango;	Kec. Penajam	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Petung – Sotek;	Kec. Penajam	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Sotek – Maridan – Sepaku;	Kec. Penajam, Kec. Sepaku	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab. PPU				
	Penajam – Tanah Grogot (Kab. Paser)	Kab. PPU, Kab. Paser	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim				
	B. Sistem Jaringan Kereta Api							
	Jaringan Jalur Kereta Api (KA)							
	Jaringan Jalur KA Umum							
	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Kalimantan	Melintasi Kab.Paser - Kec.Babulu – Kec.Waru – Kec.Penajam – Kec.Sepaku – Balikpapan.	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Rencana Pengembangan Rel Kereta Api Pendukung IKN	Samarinda – Sanga2 – Muara Jawa – Sp.Samboja (Balsam KM 38) – Balikpapan – P. Balang – P. Lango – Sepan · Sp. Samboja (Balsam KM 38) – Semoi – Sepaku – KIPP IKN – Sotek – Petung	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Pengembangan Jalur Kereta Bandara	KIPP IKN – Sepaku – Sp. Samboja – Balikpapan – Bandara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Rencana Pengembangan LRT	Pemaluan – KIPP IKN – Loa Kulu	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Rencana Pengembangan LRT Wisata	Loa Kulu – KIPP IKN	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Penumpang							
	Stasiun Babulu Darat (Kab. Penajam Paser Utara)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Pondok Sungkai (Kab. Penajam Paser Utara)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Simpang Tiga Petung (Kab. Penajam Paser Utara)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Depo di WP IKN Timur 2	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Depo di WP IKN Timur 2	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Depo di WP IKN Timur 1	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Depo di WP IKN Barat	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Simpang Tengin Baru di WP IKN Timur 1	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Depo di WP KIPP	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Sentral Sepaku di WP IKN Barat	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Sentral Bumi Harapan di WP KIPP	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Pantai Lango (Kab. Penajam Paser Utara)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Stasiun Riko (Kab. Penajam Paser Utara)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Buluminung (Kab. Penajam Paser Utara)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Pembangunan Stasiun Besar	di Kec. Penajam	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Pembangunan Stasiun Besar Pendukung IKN	di Kec. Sepaku	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Pembangunan Stasiun COD (<i>Center of District</i>) Pendukung IKN	di Mentawir dan Sotek	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Pengembangan Stasiun Besar, Stasiun Istana, Stasiun Kereta Bandara	Kec. Sepaku dan Kec. Penajam	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
	Stasiun Kecil (di Babulu Darat, Pondok Sungkai, Simpang Tiga Petung, Buluminung, Riko, Pantai Lango)	Kec. Babulu, Kec. Waru dan Kec. Penajam	APBN, KPBU	Kemenhub, BUMN, Swasta				
C. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi								
	Rute Penajam - Balikpapan	Kab. Penajam Paser Utara	ABDP Prov, Swasta, Masyarakat	Dishub Prov. Kaltim, Swasta, Masyarakat				
	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Penajam, yang melayani penyeberangan ke Kampung Baru (Balikpapan)	Kec. Penajam (Kab. PPU), Balikpapan	ABDP Prov, Swasta, Masyarakat	Dishub Prov. Kaltim, Swasta, Masyarakat				
	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Binuang, yang melayani penyeberangan ke Kampung Baru (Balikpapan)	Kec. Sepaku (Kab. PPU), Balikpapan	ABDP Prov, Swasta, Masyarakat	Dishub Prov. Kaltim, Swasta, Masyarakat				
	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Mentawir, yang	Kec. Sepaku (Kab. PPU), Balikpapan	ABDP Prov, Swasta, Masyarakat	Dishub Prov. Kaltim, Swasta,				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	melayani penyeberangan ke Kampung Baru (Balikpapan)			Masyarakat				
	Sistem Jaringan Transportasi Laut							
	Pelabuhan Pengumpan Regional							
	Pembangunan Tersus PT. Bakal Makmur Sejahtera	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov. Kaltim, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat				
	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perikanan dan Kelautan (Kemen KP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
	Pelabuhan Laut							
	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) pada Pelabuhan Pengumpul Penajam (Kec.Penajam)	Kec. Penajam	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten				
	Peningkatan Sarana Prasarana Angkutan Laut pada Pelabuhan Pengumpul Penajam (Kec.Penajam)	Kec. Penajam	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
	Pelabuhan Pengumpan Regional Penajam (<i>Speed Boat</i>) berada di Kec.Penajam yang melayani lintas Penajam, melayani rute ke Kariangau (Balikpapan);	Kec. Penajam	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Pelabuhan Pengumpan Lokal Kenangan berada di Kelurahan Maridan, melayani rute ke Kampung Baru (Balikpapan);	Kec. Sepaku (Kab.PPU), Balikpapan	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
	Pelabuhan Pengumpan Lokal Inne Dong Hwa berada di Kelurahan Jenebora (Penajam), melayani rute ke Kampung Baru (Balikpapan)	Kec. Penajam (Kab. PPU), Balikpapan	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
	Pengembangan Terminal Umum – Pelabuhan Penajam Banua Taka (satu kesatuan dengan pengembangan Pelabuhan Balikpapan)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
	Pengendalian pembangunan terminal khusus di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Prov., Dishub Kabupaten				
D. Sistem Jaringan Transportasi Udara								
	Pembangunan Bandar Udara Khusus (VVIP) sebagai pendukung IKN	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, pelaku usaha, dan/atau masyarakat				
2.2	Sistem Jaringan Energi							
	a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi							
	Pengembangan jaringan minyak bumi untuk mendukung kegiatan industri dan pembangkit listrik	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	Pengembangan jaringan pipa gas bertekanan rendah berhimpit mengikuti jaringan jalan arteri primer	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan							
	Peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Peningkatan dan pengembangan PLTD di Kel. Girmukti (50 MW)	Kec. Penajam	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Peningkatan dan pengembangan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas) di Kel. Nenang (3 MW)	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (transmisi sist. Samarinda - sist. Balikpapan (<i>inducing power</i>))	Kalimantan Timur	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	Pembangunan Transmisi Interkoneksi Tegangan Tinggi berkapasitas 150 KV (SUTET) yang menghubungkan Tanjung – Kuaro – Petung – Karangjoang yang melalui Kecamatan, Babulu, Waru dan Penajam.	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	Pembangunan Gardu Induk Petung kapasitas 30 MVA di Desa Girmukti (Kec. Penajam)	Kec. Penajam	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	Rencana pengembangan transmisi tegangan 150 kV: - Tenggarong / Bukit Biru – Sepaku - Kariangau – Sepaku	Kec. Sepaku	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	Rencana pembangunan Gardu Induk) : - Semoi – Sepaku - Kariangau (arah Sepaku) - Tenggarong (arah Sepaku)	Kec. Sepaku	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				
	Rencana pembangunan Gardu Induk	G.I Gersik	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Pengembangan PLTBio Penajam Paser Utara dengan target kapasitas 10 MW	Tersebar di Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pengembangan sumber energi Baru dan Terbarukan untuk meningkatkan pasokan energi listrik	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pembangunan PLTU untuk memenuhi kebutuhan energi di Kawasan IKN	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, KPBU, Swasta	BUMN, KPBU, Swasta				
2. 3	Sistem Jaringan Telekomunikasi							
	a. Jaringan Tetap							
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Telepon di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pengembangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kawasan Perkotaan untuk Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Internet	Kawasan Perkotaan di Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pengembangan Jaringan Mikro Digital meliputi Jalur Penajam – Tanah Grogot	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	b. Jaringan Bergerak							
	Penyusunan Masterplan / Rencana Zonasi <i>Cell Plan</i> Menara BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab.	Diskominfo Kab. PPU				
	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				
	Pengoptimalan Menara BTS melalui penggunaan menara Bersama	Kab. Penajam Paser Utara	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
2. 4	Sistem Jaringan Sumberdaya Air							
	a. Peningkatan Pengelolaan WS dan DAS. WS Kendilo sebagai WS Lintas Kabupaten, meliputi: - DAS Riko - DAS Trunen; - DAS Babulu; - DAS Tunan; - DAS Sesumpu; - DAS Semoi; - DAS Sepaku; dan - DAS Pemaluan	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Prov.	Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim				
	b. Pembangunan danPerbaikan Operasional Prasarana Jaringan Irigasi pada DI (Daerah Irigasi) di Kab. Penajam Paser Utara - DI Petung Tunan di Kec. Penajam (1.157 Ha) - DI Sepaku di Kec. Sepaku (1.047 Ha) - DI Labangka di Kec. Babulu (1.000 Ha)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Prov	Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim				
	c. Pengembangan Bendungan/ Bendung / Waduk /Embung sebagai Sumber Air Permukaan - Waduk ITCHI	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas PUPR Kab. PPU				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	berada di Kecamatan Sepaku; - Waduk Tengin berada di Kecamatan Sepaku; - Waduk Terunen berada di Kecamatan Sepaku; - Waduk Waru berada di Kecamatan Waru; - Waduk Tunan berada di Kecamatan Waru; - Waduk Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu; - Embung Sotek berada di Kecamatan Penajam.							
	d. Pemantapan dan Pengembangan Bendung /DAM sebagai Bangunan Pengendali Banjir : - Bendung Lawe – Lawe berada di Kecamatan Penajam; - Bendung Waru berada di Kecamatan Waru; - Bendung Sepaku – Semoi berada di	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab., BUMD, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, BUMD, Swasta				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Kecamatan Sepaku; - DAM Korindo berada di Kecamatan Penajam; - Bendung Bukit Subur berada di Kecamatan Penajam.							
	e. Pengembangan Sumber Mata Air: - Giri Mukti di Kec. Penajam; - Labangka I di Kec. Babulu; - Labangka II di Kec. Babulu; - Babulu Darat di Kec. Babulu; dan Suka Raja di Kec. Sepaku	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab., BUMD, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, BUMD, Swasta				
2.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya							
	a. Sistem Penyediaan Air Minum							
	▪ Penyediaan Sistem Air Minum Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kab. Penajam Paser Utara melalui Pengembangan layanan IPA (Instalasi Pengolahan Air) pada: 1. IPA Lawe – Lawe (Penajam) 2. IPA Unit Sotek	Kawasan Perkotaan di Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. PPU				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	3. IPA Unit Waru 4. IPA Unit Sepaku 5. IPA Unit Maridan 6. IPA Sepaku 2 7. IPA Babulu							
	Pemanfaatan Air Permukaan Intake di Sungai/ Mata Air yang terdekat pada Kawasan Perdesaan dan Perkotaan Kab. Penajam Paser Utara, antara lain : 1. Sungai Lawe – Lawe (IPA Lawe – Lawe) 2. Embung Sotek (IPA Unit Sotek) 3. Embung Waru (IPA Waru) 4. Sungai Tengin Baru (IPA Unit Sepaku) 5. Embung Maridan (IPA Unit Maridan) 6. Sungai Sepaku (IPA Unit Sepaku 2) 7. Bendung Telake yang ada di Kab. Paser (IPA Babulu).	Kawasan Perdesaan di Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. PPU				
	Pengembangan Intake Sepaku untuk menunjang Kebutuhan Air di Kawasan IKN dan sekitarnya	Kec. Sepaku	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. PPU				
	Pengembangan SPAM Regional yang memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Sepaku	Kab. PPU, Balikpapan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim				
	Pengembangan Jaringan dan Intake dari Bendung Telake (Kab. Paser) untuk	Kab. PPU, Kab. Paser	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAA N	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	menunjang kebutuhan air baku di Kec. Babulu							
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)							
	Pengembangan Pengelolaan Limbah Kawasan Perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. PPU				
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Lumpur Tinja (IPLT) pada Kawasan Perkotaan di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. PPU				
	Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. PPU, Swasta				
	c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							
	Pembangunan Instalasi Pengumpulan/ Pengolahan Limbah B3 pada Kawasan Peruntukan Industri di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Prov. Kaltim, DLH Kab. PPU, Swasta				
	Pengumpul Limbah B3 Skala Kabupaten	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab. Swasta	DLH Kab. PPU, Swasta				
	d. D. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah							
	Peningkatan dan Pengembangan TPA dengan Sistem <i>Sanitary Landfill</i> di	Kec. Penajam, Kec.Sepaku	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Prov. Kaltim,				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	Kel. Buluminung (Kec. Penajam) dan Sepaku			DLH Kab. PPU, Swasta				
	Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST (pada PKL, PPK, dan PPL)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab. Swasta	DLH Kab. PPU, Swasta				
	Program Pengelolaan Sampah 5R Berbasis Masyarakat (pada PKL, PPK, dan PPL)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab. Swasta	DLH Kab. PPU, Swasta				
	e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana							
	Penyusunan Studi /Identifikasi Potensi Alur Kejadian Bencana	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Kaltim, BPBD Kab. PPU, Swasta				
	Penyusunan Studi /Identifikasi Jalur Evaluasi pada Potensi Bencana, meliputi : - Bencana Gempa Bumi - Bencana Banjir - Tanah Longsor - Puting Beliung - Kekeringan - Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Kaltim, BPBD Kab. PPU, Swasta				
	Sosialisasi Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Kaltim, BPBD Kab. PPU, Swasta				
	Penetapan dan Pembangunan Jalur Evakuasi, Tempat Evakuasi Sementara (TES), Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Kaltim, BPBD Kab. PPU, Swasta				
	f. Sistem Drainase Wilayah							
	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan di Kawasan Perkotaan Kab. Penajam Paser Utara	Kawasan Perkotaan di Kab. Penajam Paser Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kemen. PU, Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim, Dinas PUPR Kab. PPU, Swasta				
	Normalisasi Peningkatan Saluran Primer dan Sekunder	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. PPU				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	di Kab. Penajam Paser Utara							
	Normalisasi Saluran Sungai di Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. PPU				
B	Perwujudan Pola Ruang							
1	Perwujudan Kawasan Lindung							
1.1 kawasan perlindungan setempat								
1.1.1 Sempadan Pantai								
a.	pemanfaatan ruang sempadan pantai	sepanjang pesisir Pantai timur Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
b.	penetapan batas kawasan pasang surut	sepanjang pesisir Pantai timur Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
c.	penghijauan	sepanjang pesisir Pantai timur Kab Penajam Paser Utara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen KP, DLH Provinsi, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
d.	sosialisasi dan <i>workshop</i> pengelolaan kawasan sempadan pantai	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten/Kota				
1.1.2 Sempadan Sungai								
a.	pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
b.	penertiban bangunan di atas saluran irigasi	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
c.	penghijauan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAA N	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
c.	program pembinaan, penyuluhan pelestarian Kawasan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.1.3 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk								
a.	Penetapan delineasi kawasan perlindungan sekitar waduk/danau	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
b.	Perencanaan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan kawasan sekitar waduk/danau	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.2 Kawasan Ekosistem Mangrove								
a.	Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan mangrove	Pesisir Kab Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LH, DLH Provinsi, DKP Provinsi, DLH Kab., Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat				
b.	Perencanaan pengembangan kawasan hutan bakau/mangrove untuk kegiatan perlindungan ekosistem dan lingkungan	Pesisir Kab. Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.3 Kawasan Imbuhan Air Tanah								
a.	Penetapan delineasi kawasan cekungan air tanah (CAT)	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
b.	Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan imbuhan air tanah	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
c.	penghijauan di sekitar kawasan	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.4 Taman Hutan Raya								
a.	Pengelolaan hutan kemitraan secara terpadu dengan partisipasi masyarakat	Taman Hutan Raya di Kecamatan Sepaku	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
b.	Perencanaan kawasan untuk pengembangan fungsi ekonomi dan pendidikan untuk kepariwisataan dan penelitian	Taman Hutan Raya di Kecamatan Sepaku	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.5 Taman Pulau Kecil								
a.	Penetapan kawasan taman pulau kecil	Kecamatan Penajam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, Dinas PUPRPERA				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
b.	Pengadaan sarana dan prasarana di kawasan taman pulau kecil	Kecamatan Penajam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
c.	Rehabilitasi ekosistem di taman pulau kecil	Kecamatan Penajam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
d.	Monitoring sumberdaya pesisir di kawasan taman pulau kecil	Kecamatan Penajam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.6 Kawasan Imbuhan Air Tanah								
a.	Penetapan delineasi kawasan cekungan air tanah (CAT)	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
b.	Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan imbuhan air tanah	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
c.	penghijauan di sekitar kawasan	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan				
2	Perwujudan Kawasan Budidaya							
2.1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas								
a.	penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
b.	mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya	Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, DLH Provinsi dan Kabupaten, Dinas				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Kehutanan Provinsi				
c	sosialisasi dan <i>workshop</i> pengelolaan kawasan hutan produksi	Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, DLH Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
2.2 Kawasan Hutan Produksi Tetap								
a.	penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi tetap	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
b	mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat sekitarnya	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
c	sosialisasi dan <i>workshop</i> pengelolaan kawasan hutan produksi	Kab. Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten,				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
2.3 Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi								
a	penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi	Kecamatan Sepaku	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
b	sosialisasi dan <i>workshop</i> pengelolaan kawasan hutan produksi	Kecamatan Sepaku	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi				
2.4 Kawasan Pariwisata								
a.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan serta Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata	Kawasan peruntukan pariwisata alam: a. Pulau Kwangan di Kec. Penajam; b. Pantai Tanjung Jumalai (Pantai Pejala, Pantai Salo Loang, Pantai	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		Tanjung Tengah, Pantai Corong dan Gusung Terumbu Karang) di Kec. Penajam; c. Pantai Sipakario Nipah-Nipah di Kec. Penajam; d. Pantai Api-Api di Kec. Waru; e. Pulau Balang di Kec. Sepaku; f. Hutan Konservasi Arsari di Kec. Sepaku; g. Ekowisata Mangrove Kampung Baru di Kec. Penajam; h. Ekowisata Mangrove Babulu Laut di Kec. Babulu; i. Ekowisata Mangrove Mentawir di Kec. Sepaku; j. Gunung Parung di Kec. Sepaku; k. Kampung Waru Tua di Kec. Waru; l. Hutan Kota di Kec. Penajam;						

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		m. Hutan Pinus di Kec. Waru; n. Wisata Sawah di Kec. Babulu; o. Goa Tapak Raja di Kec. Sepaku; p. Wisata Mangrove Maridan di Kec. Sepaku; q. Pantai Nenang di Kec. Penajam; r. Bukit Embun Semoi II di Kec. Sepaku. Kawasan peruntukan pariwisata budaya: a. Pesta Adat Nondoi di Kec. Penajam; b. Pesta Pantai Sipakario di Kec. Penajam; c. Pesta Pantai Lango di Kec. Penajam; d. Festival Layang-Layang di Kec. Penajam; e. Pesta Adat Belian di Kec. Waru; f. Pesta adat Buen di kec. Waru; dan g. Pesta adat Ronggeng						

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		Paser di Kec.Babulu Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi: a. Meriam Jepang di Kec.Penajam; b. Penangkaran Rusa Api Api di Kec.Waru; c. Waduk Waru di Kec. Waru; d. Wana Wisata Api-api di Kec. Waru; e. Waduk Babulu di Kec. Babulu; f. Agro Wisata di Kec. Waru dan Babulu; g. Pantai Istana Amal di Kec. Penajam; h. Kampung Inggris di Kec. Penajam						
b.	Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat pariwisata	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
2.5 Kawasan Perikanan Budidaya								
a.	Pengembangan sentra perikanan dan minapolitan	Desa Babulu Laut di Kec.Babulu; dan Desa Sesulu di Kec.Waru	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten,				

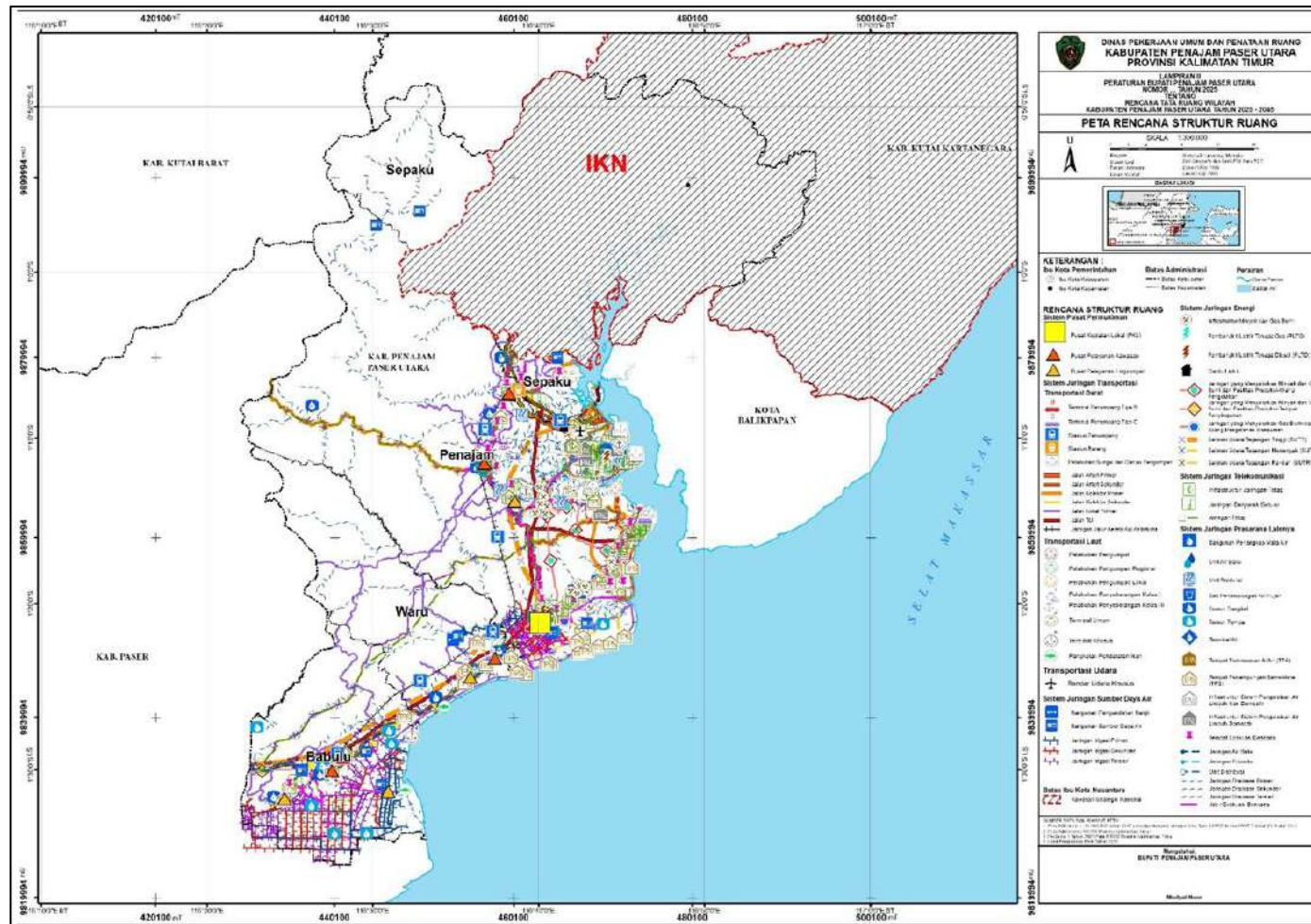
NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten				
b.	Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten				
c	Pengembangan industri pengolahan perikanan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten				
2.6 Kawasan Perkebunan								
a.	pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pertanian				
b.	peningkatan produksi tanaman perkebunan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pertanian				
c.	Rehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pertanian				
2.7 Kawasan Permukiman Pedesaan								
a.	Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan pedesaan	Kawasan Pedesaan Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan				
2.8 Kawasan Permukiman Perkotaan								
a.	Relokasi pemukiman yang rawan bencana alam	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman				

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAA N	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
				dan Pertanahan				
b.	Fasilitasi kerjasama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat dengan harga terjangkau	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
c.	Pembangunan rusun di kawasan perkotaan	Perkotaan Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan				
2.10 Kawasan Pertambangan Batubara								
a.	pengembangan kawasan pertambangan batubara berdasarkan potensi bahan galian, kondisi vegetasi, geologi dan geohidrologi	Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku	APBD Provinsi	Dinas ESDM Provinsi				
b.	rehabilitasi lahan pasca tambang	Kab Penajam Paser Utara	APBD Provinsi	Dinas ESDM Provinsi				
c.	pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Provinsi	Dinas ESDM Provinsi				
2.11 Kawasan Peruntukan Industri								
a.	pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten/ Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM				
b.	pemberian insentif industri non polutif	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten/ Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM				
c.	pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi produk industri manufaktur	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten / Swasta	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM				
2.12 Kawasan Tanaman Pangan								

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
a.	Delineasi dan penetapan lahan pertanian lahan basah	Kec. Babulu	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian				
b.	Rehabilitasi infrastruktur pertanian	Kec. Babulu	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian				
c.	pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan	Desa Babulu Darat Kec. Babulu	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian				
d.	pengembangan dan peningkatan saprotan dan pemasaran hasil pertanian	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian				
b.	Pengembangan kawasan pertanian lahan kering	Kab Penajam Paser Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian				

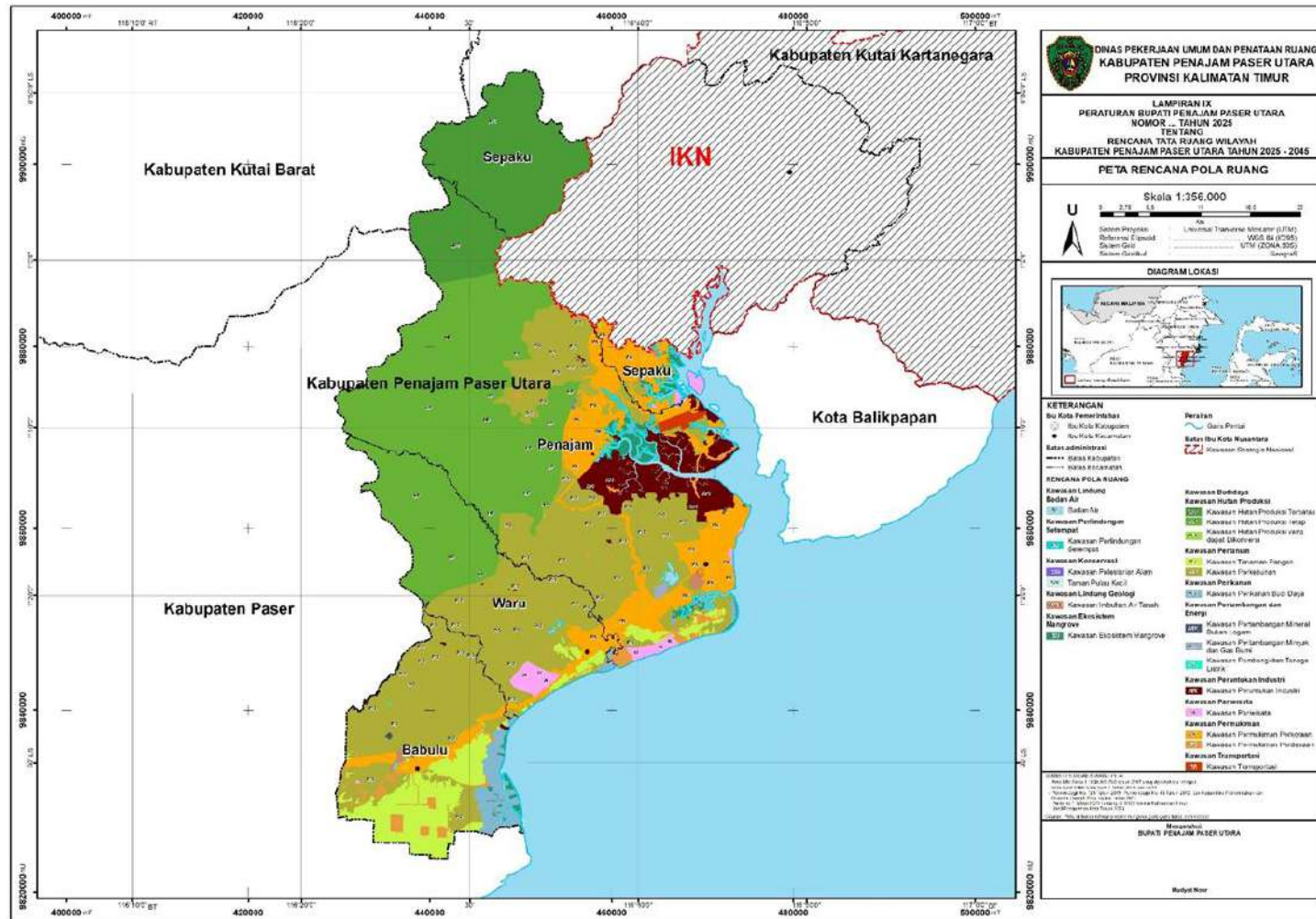
Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Berikut disajikan sebaran spasial dari struktur dan pola ruang, serta Kawasan Strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 3. 4 Rencana struktur ruang Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara



Gambar 3. 5 Rencana pola ruang Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

3.3.5 Dukungan Program Strategis Nasional

Program strategis nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden dan tercantum dalam RPJM Nasional 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lagi, program strategis nasional wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah dan dilaporkan melalui laporan kinerja program strategis nasional setiap bulan Juni untuk kinerja semester pertama dan bulan Januari untuk kinerja semester kedua. Adapun daftar Program Strategis Nasional dituangkan sebagai berikut ini:

1. Penanggulangan kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Sekolah Rakyat; dan
 - c. Pembangunan 3 juta rumah.
2. Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah
3. Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan:
 - a. Jaminan kesehatan nasional, dan
 - b. Makan bergizi gratis
4. Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah
5. Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 - a. Pengendalian inflasi;

- b. Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, dan
 - c. Kemudahan perizinan di daerah
6. Program strategis nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

3.3.6 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional terhadap program daerah dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Prioritas Nasional 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	Pengembangan Pangan Hewani		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
5	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
6	Peningkatan Penyediaan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
7	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
8	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
9	Konservasi Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)
10	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
11	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
12	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
13	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
14	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
15	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
16	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
17	Peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem gambut		
18	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
19	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
20	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
21	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
22	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
23	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
24	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
25	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
26	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
27	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
28	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
29	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
30	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
31	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
32	Pencegahan dan Penurunan Stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
33	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
34	Penuntasan TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
35	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
36	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
37	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
38	Investasi pelayanan kesehatan primer		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
39	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
40	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
41	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
42	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
43	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
44	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Prioritas Nasional 5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
45	Pengembangan Hilirisasi Kelapa		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
46	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
47	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
48	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
49	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
50	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
51	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
52	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
53	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		PROGRAM PENATAAN DESA
54	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
55	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Prioritas Nasional 7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
56	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
57	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program
58	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
59	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
60	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
61	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: Olah RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 3. 11 Penyelarasan Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

No.	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
Makan Bergizi Gratis				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Penanganan Kerawanan Pangan 9. Program Rehabilitasi Sosial
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
Swasembada Pangan				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No.	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
	Berbasis Masyarakat			
7	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Swasembada Energi				
9	North Hub Development Project Selat Makassar	Kalimantan	Swasta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital				
10	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bsl, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Swasta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Badan Informasi Geospasial	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Konektivitas dan Kawasan				
13	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	IKN	Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta	-
Perumahan dan Permukiman				
14	Pembangunan 3 juta rumah	nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)	Program Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: Olah RPJMN Tahun 2025-2029

3.3.7 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 Terhadap Program Kerja Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara Provinsi Kalimantan Timur dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun penyelarasan Program Kerja Prioritas Kalimantan Timur terhadap program daerah dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
Program Unggulan Gratispol			
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3	10 Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Kesejahteraan Rakyat
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	10 Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
4	Gratis Internet di Setiap Desa	7 Kabupaten	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
5	Gratis Seragam Sekolah	10 Kabupaten/Kota	Program pengelolaan pendidikan
6	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol			
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern			

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
1	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang, Balikpapan	Program Penyuluhan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao, Kopi, dan Karet	Karet: Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Samarinda, Penajam Paser Utara, Balikpapan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4	Peningkatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengembangan Agensia Pengendali Hayati (APH)	10 Kabupaten/Kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5	Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul	Penajam Paser Utara	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Jospol 2: Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik			
1	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai Sarana Sistem Rantai Dingin	Berau, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jospol 3: Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, serta Penjaga Rumah Ibadah			
1	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Jospol 4: Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Mendukung UMKM			

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
1	Bantuan Permodalan, Peralatan, dan Pembinaan UMKM secara Terpadu	10 Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan UMKM
Jospol 5: Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa			
1	Pengembangan Desa Wisata yang berstandar	7 Kabupaten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2	Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya	7 Kabupaten	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Jospol 6: Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan			
1	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Pendidikan
Jospol 7: Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional			
1	Pembangunan Jalan Sumbu IKN / Sotek – Bongan	Penajam Paser Utara – Kutai Barat	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Pembangunan SPAM Regional	Balikpapan, Samarinda, Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi	8 Kabupaten/Kota	-
Jospol 9: Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta			
1	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO, dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Forum Investasi Daerah	10 Kabupaten/Kota	Program Promosi Penanaman Modal

Sumber: Olah RPJMN Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB II perihal gambaran keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Program perangkat daerah dalam mencapai kerja dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program untuk tahun 2030 merupakan bagian upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat menjadi pijakan dalam menyusun dokumen RKPD Tahun 2030 nantinya, dan akan dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah periode 2030-2034. Berikut disajikan Rencana Program Perangkat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					440.188.728.951		482.767.721.25 4		523.541.958.82 4		565.686.122.469		522.801.357.619	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					298.826.361.487		317.684.417.05 8		338.480.794.87 5		346.688.794.381		299.065.024.285	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,33	85,8 8	91,25	298.826.361.487	91,3	317.684.417.05 8	92	338.480.794.87 5	92,25	346.688.794.381	93	299.065.024.285	1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	51	-	75		78		80		85		90		1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					136.673.782.493		165.083.304.19 6		185.061.163.94 9		218.997.328.088		223.736.333.334	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (%)	-	-	80,73	136.673.782.493	81,25	165.083.304.19 6	81,5	185.061.163.94 9	82	218.997.328.088	82,5	223.736.333.334	1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.01.2.19.0.00.01. 2008 - SD NEGERI 008 WARU
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM					4.675.832.700		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	74,82	-	74,82	4.675.832.700	-	0	-	0	-	0	-	0	1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					12.752.271		0		0		0		0	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	83,08	-	87	12.752.271	90	0	92	0	95	0	100	0	1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	72	-	74		76		78		80		82		1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN					350.153.515.630		386.954.650.12 3		423.405.778.16 4		460.623.146.066		427.826.778.065	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG KESEHATAN														
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					265.271.618.892		201.010.754.226		232.120.278.521		252.030.427.426		217.010.601.229	
Meningkatnya layanan kepada masyarakat					0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.02. 0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) (%)	86,4	86,4	86,5	140.203.963.204	87	62.594.380.929	87,3	82.953.866.694	88	94.772.281.837	88,3	63.519.775.725	1.02.0.00.0.00.02. 0000 - DINAS KESEHATAN
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0000 - DINAS KESEHATAN
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0103 - UPT Puskesmas Penajam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0204 - UPT Puskesmas Petung
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0204 - UPT Puskesmas Petung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,3		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02. 0208 - UPT Puskesmas Gn Intan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	78,5	78,75		79		79,25		79,5		79,75		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	74,5	75	76	125.067.655.688	78	138.416.373.297	80	149.166.411.827	81	157.258.145.589	81,5	153.490.825.504	1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG
	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) (%)	84,22	84,5	85		86		87		88		89		1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN					84.310.105.068		152.819.284.725		187.558.447.770		204.051.632.017		205.512.195.057	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yangberkualitas baik, adil dan terjangkau	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	79,52	100	100	1.539.578.280	100	1.497.280.961	100	3.927.108.662	100	9.292.295.351	100	1.201.224.041	1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20	82.770.526.788	30	151.322.003.764	40	183.631.339.108	50	194.759.336.666	60	204.310.971.016	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70,96	87	87		87		89		89		89		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi	61,29	66	70		75		80		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kesehatan nasional (%)													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	45,16	45	45		45		54		54		54		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	85	85	85		90		95		95		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Penemuan Kasus TBC (%)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pelayanan kesehatan sesuai standar (%)													Sakit Umum Daerah Sepaku
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,6		24,4		24,2		24		23,8		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Penemuan Kasus TBC (%)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun (%)	0	2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perbekalan kesehatan sesuai standar (%)													
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Penemuan Kasus TBC (%)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,1 5	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Kesehatan (%)													Puskesmas Sotek
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Persentase tempat	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)													Puskesmas Gn Intan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	0	0	0		0		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	93	94	95		95		96		96		97		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	tuberkulosis (Angka)													
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,1 5	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0210 - UPT Puskesmas Sepaku I

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Prevalensi Depresi pada	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	usia > 15 tahun (%)													Puskesmas Sepaku III
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Presentase Desa/Kelurahan	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)													Puskesmas Maridan
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,15	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	0	0	0		0		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terakreditasi paripurna (%)													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02. 0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,15	86,1 5	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02. 0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	0	0	0		0		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 0213 - UPT Puskesmas Semoi II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
														1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	16	16	20		30		40		50		60		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	24,8	24,8	24,7		24,6		24,5		24,4		24,3		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	86,4	86,4	86,5		87		87,3		88		88,3		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	86,15	86,1 5	86,5		87		87,5		88		88,5		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Persentase fasilitas	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02. 2007 - UPT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)													Puskesmas Babulu
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	60	65	70		75		80		90		100		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	6,6	6,6	6,6		6,5		6,5		6,4		6,4		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Angka)	25	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.2007 - UPT Puskesmas Babulu
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					559.392.020		32.713.512.649		3.189.270.586		4.043.506.238		4.787.978.924	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000	559.392.020	1:5000	32.713.512.649	1:5000	3.189.270.586	1:5000	4.043.506.238	1:5000	4.787.978.924	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	50	50	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0204 - UPT Puskesmas Petung
														1.02.0.00.0.00.02.0205 - UPT Puskesmas Waru
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0208 - UPT Puskesmas Gn Intan
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
														1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	1:5000	1:5000	1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1:5000		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
														1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														AJI PUTRI BOTUNG
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					3.483.250		168.534.707		216.490.819		241.590.432		265.674.395	
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	85	85	85	3.483.250	90	168.534.707	95	216.490.819	95	241.590.432	100	265.674.395	1.02.0.00.0.00.02. 0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.02. 0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					8.916.400		242.563.816		321.290.468		255.989.953		250.328.460	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30	8.916.400	40	242.563.816	50	321.290.468	60	255.989.953	70	250.328.460	1.02.0.00.0.00.02. 0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.02.0.00.0.00.02. 0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02. 0103 - UPT Puskesmas Penajam
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02. 0204 - UPT Puskesmas Petung
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02. 0205 - UPT Puskesmas Waru
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02. 0206 - UPT Puskesmas Sotek
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02. 0208 - UPT Puskesmas Gn Intan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02.0209 - UPT Puskesmas Sebakung Jaya
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02.0210 - UPT Puskesmas Sepaku I
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02.0211 - UPT Puskesmas Sepaku III
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02.0212 - UPT Puskesmas Maridan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	25	25	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.02.0213 - UPT Puskesmas Semoi II
														1.02.0.00.0.00.02.1000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														AJI PUTRI BOTUNG
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					179.859.287.832		213.991.568.79 5		234.199.024.52 2		254.734.163.274		236.673.198.903	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					30.773.370.633, 65		31.410.266.573 ,22		33.599.935.229 ,87		36.241.887.946, 63		36.631.735.230, 23	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,51	84,4 4	85	30.773.370.633, 65	85,3	31.410.266.573 ,22	85,6	33.599.935.229 ,87	86	36.241.887.946, 63	86,3	36.631.735.230, 23	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	89,75	89,7 6	89,77		89,78		89,79		89,8		89,81		1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.2.11.1.04.03. 0003 - UPT PU Kecamatan Babulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.2.11.1.04.03.0005 - UPT LAB dan Alat Berat
														1.03.2.11.1.04.03.0006 - UPT PU Kecamatan Penajam
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					16.390.323.554,25		66.903.704.060,28		37.241.916.404,22		40.332.750.141,14		35.700.881.241,34	
Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	Persentase Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%) (%)	25,49	30,85	34,9	4.010.193.778,51	37,98	4.227.607.234,24	40,43	6.566.404.511,09	43,51	7.108.692.738,51	46,58	6.292.320.616,64	1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.2.11.1.04.03.0003 - UPT PU Kecamatan Babulu
Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%) (%)	13,47	19,15	20,15	12.380.129.775,74	20,98	62.676.096.826,04	21,81	30.675.511.893,13	22,64	33.224.057.402,63	23,47	29.408.560.624,7	1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.2.11.1.04.03.0004 - UPT PU Kecamatan Sepaku

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.383.791.957		18.536.431.719 ,36		6.983.118.644		2.311.692.196,3 1		2.255.675.934,9	
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman Perpipaan (%)	23,83	25,3 8	26,93	2.383.791.957	28,48	18.536.431.719 ,36	30,03	6.983.118.644	31,58	2.311.692.196,3 1	33,13	2.255.675.934,9	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH					822.576.998		617.881.057		454.597.235		382.775.763		338.817.264	
Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sarana Sanitasi Layak dan Aman	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Aman (%)	51,72	51,7 2	51,72	822.576.998	51,72	617.881.057	51,72	454.597.235	51,72	382.775.763	51,72	338.817.264	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase rumah tangga sanitasi layak (%)	95,57	95,7 1	95,74		95,77		95,8		95,83		95,86		1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE					4.909.838.652,6 2		3.360.375.310		5.234.901.873, 87		5.676.277.521,4 7		5.034.876.918,1	
Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	40,66	41,9 3	42,27	4.909.838.652,6 2	42,61	3.360.375.310	42,95	5.234.901.873, 87	43,29	5.676.277.521,4 7	43,63	5.034.876.918,1	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.2.11.1.04.03. 0003 - UPT PU Kecamatan Babulu
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					15.217.080.106, 9		10.211.297.473 ,48		15.759.370.826 ,61		17.060.862.572, 43		15.101.569.479, 93	
Tersedianya bangunan pemerintah yang memadai untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun (%)	32,86	34,2 9	37,14	14.922.107.783, 07	40	10.146.257.362 ,18	42,86	15.658.349.218 ,75	45,71	16.951.498.068, 76	48,57	15.004.764.547, 37	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang	Persentase bangunan yang memiliki Persetujuan	20,97	32,6 6	36,11	294.972.323,83	38,79	65.040.111,3	40,93	101.021.607,86	42,67	109.364.503,67	44,13	96.804.932,56	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tertib, aman, dan fungsional	Bangunan Gedung (PBG) dan SLF (%)													PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					6.802.677.924,96		5.100.298.117,52		8.171.876.050,48		9.760.862.524,69		9.526.676.088,93	
Meningkatnya pemenuhan Sarana - Prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan	Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)	-	-	20	6.802.677.924,96	40	5.100.298.117,52	60	8.171.876.050,48	80	9.760.862.524,69	100	9.526.676.088,93	1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.2.11.1.04.03.0003 - UPT PU Kecamatan Babulu
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					100.914.811.554,08		76.552.138.261		123.864.090.273,07		139.442.783.477,59		128.689.953.859,21	
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	36,38	38,73	40,67	100.914.811.554,08	42,61	76.552.138.261	44,55	123.864.090.273,07	46,49	139.442.783.477,59	48,42	128.689.953.859,21	1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.03.2.11.1.04.03. 0003 - UPT PU Kecamatan Babulu
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI					476.758.391,46		339.834.581,52		565.721.004,03		653.452.909,42		609.871.075,15	
Meningkatnya kualitas tenaga TenagaTrampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	55,81	60,0 4	65,12	476.758.391,46	70,19	339.834.581,52	75,26	565.721.004,03	80,34	653.452.909,42	85,41	609.871.075,15	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG					1.168.058.059,0 8		959.341.641,62		2.323.496.980, 85		2.870.818.221,3 2		2.783.141.811,2 1	
Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang (Skor)	51,35	52,1 7	60,88	1.168.058.059,0 8	61,55	959.341.641,62	73,83	2.323.496.980, 85	73,99	2.870.818.221,3 2	74,16	2.783.141.811,2 1	1.03.2.11.1.04.03. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					15.603.550.859		18.008.688.763		20.421.636.024		22.531.523.716		23.832.445.307	
1.04.01 - PROGRAM					11.693.039.059		12.257.043.512		12.848.835.238		13.469.795.340		14.143.285.107	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA														
Meningkatnya kualitas layanan publik yang akuntable dan responsif	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,5	64,5 5	65,5	11.693.039.059	65,55	12.257.043.512	65,8	12.848.835.238	80	13.469.795.340	85,05	14.143.285.107	1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN					550.000.000		813.461.700		980.525.645		1.170.998.206		1.398.430.029	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	13,4	11,0 3	43,94	550.000.000	67,5	813.461.700	85	980.525.645	100	1.170.998.206	100	1.398.430.029	1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi	13,4	11,0 3	43,94		67,5		85		100		100		1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)													
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					500.000.000		650.000.000		800.000.000		950.000.000		1.150.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (%)	6,14	8,29	51,83	500.000.000	66,78	650.000.000	83,39	800.000.000	100	950.000.000	100	1.150.000.000	1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					500.000.000		650.000.000		800.000.000		950.000.000		1.150.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Presentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	23,05	8,19	26,52	500.000.000	44,85	650.000.000	63,18	800.000.000	81,51	950.000.000	100	1.150.000.000	1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN					2.360.511.800		3.638.183.551		4.992.275.141		5.990.730.170		5.990.730.171	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman	Presentase Penyediaan Infrastruktur PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan dan Lingkungan Permukiman (%)	46	20	40	2.360.511.800	60	3.638.183.551	80	4.992.275.141	100	5.990.730.170	100	5.990.730.171	1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					49.544.065.254		56.140.700.564		62.683.257.510		68.138.143.899		61.555.409.156	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					46.366.029.828		50.608.233.934		54.549.786.120		58.546.228.796		53.068.693.007	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					18.535.917.490		20.484.042.418		22.413.639.213		24.383.798.100		22.647.671.676	1.05.0.00.0.00.06. 0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPKP	Nilai Akip (Predikat)	B	B	B	19.117.324.195	B	20.506.740.340	BB	21.612.731.830	BB	22.714.007.434	BB	19.787.725.805	1.05.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Menjalankan Tupoksi Penanggulangan Bencana	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	62	66,5	71,5	8.712.788.143	76,5	9.617.451.176	81,5	10.523.415.077	86,5	11.448.423.262	91,5	10.633.295.526	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					555.451.612		2.003.383.630		3.446.205.321		3.694.154.822		1.699.832.101	
Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					555.451.612		2.003.383.630		3.446.205.321		3.694.154.822		1.699.832.101	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.820.000.000		2.022.333.000		2.212.836.769		2.407.345.121		2.235.942.148	
Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Pelayanan	96	96	97	1.820.000.000	98	2.022.333.000	98	2.212.836.769	98	2.407.345.121	100	2.235.942.148	1.05.0.00.0.00.07.0000 - BADAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penanggulangan Bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)													PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana (%)	96	96	97		98		98		98		100		1.05.0.00.0.00.07. 0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	96	96	97		98		98		98		100		1.05.0.00.0.00.07. 0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					802.583.814		1.506.750.000		2.474.429.300		3.490.415.160		4.550.941.900	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	802.583.814	100	1.506.750.000	100	2.474.429.300	100	3.490.415.160	100	4.550.941.900	1.05.0.00.0.00.05. 0000 - DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					10.455.073.237		11.553.901.434		12.642.278.949		13.753.535.268		12.774.283.557	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					6.365.976.817		7.129.894.035		7.957.471.021		8.594.068.703		8.032.475.629	
Meningkatnya dukungan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat					6.365.976.817		7.129.894.035		7.957.471.021		8.594.068.703		8.032.475.629	1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.230.000.000		1.273.007.399		1.350.000.000		1.450.000.000		1.405.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Presentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	99	99	99	1.230.000.000	99	1.273.007.399	99	1.350.000.000	99	1.450.000.000	99	1.405.000.000	1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL
	Presentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat	99	99	99		99		99		99		99		1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)													
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000		28.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	100	100	20.000.000	100	24.000.000	100	26.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.250.000.000		1.300.000.000		1.373.807.928		1.541.257.565		1.373.807.928	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	1.250.000.000	100	1.300.000.000	100	1.373.807.928	100	1.541.257.565	100	1.373.807.928	1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase (%) lanjut usia terlan- tar yang ter- penuhi ke- butuhan da- sarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) penyang- dang disa- bilitas terlan- tar, anak terlan- tar, lanjut usia terlan- tar dan ge- landangan pen- gemis yang ter- penuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) penyang- dang disa- bilitas terlan- tar yang ter- penuhi ke- butuhan da- sarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.172.096.420		1.300.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		1.350.000.000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian	100	100	100	1.172.096.420	100	1.300.000.000	100	1.350.000.000	100	1.500.000.000	100	1.350.000.000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ekonomi (Persentase)													
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	23,1	32,1 9	36,87		41,45		44,58		48,9		48,9		1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					417.000.000		527.000.000		585.000.000		640.209.000		585.000.000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana					417.000.000		527.000.000		585.000.000		640.209.000		585.000.000	1.06.0.00.0.00.08. 0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					10.575.667.474		11.686.265.925		12.783.235.175		13.903.074.047		12.902.044.695	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					5.736.028.574		6.734.627.425		7.366.235.175		7.651.074.047		7.207.044.695	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,61	76,6 1	76,61	5.736.028.574	88,31	6.734.627.425	88,31	7.366.235.175	88,31	7.651.074.047	88,31	7.207.044.695	2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP (Nilai)	54,5	62,1	65,45		68,9		72,5		75,85		79,85		2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					190.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		200.000.000	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	83	85	88	190.000.000	89	50.000.000	91	50.000.000	92	75.000.000	94	200.000.000	2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					850.000.000		954.000.000		1.175.000.000		1.875.000.000		1.275.000.000	
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	33	35	38	850.000.000	41	954.000.000	44	1.175.000.000	47	1.875.000.000	52	1.275.000.000	2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					287.988.900		310.988.500		372.000.000		387.000.000		365.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	26,5	29,7 5	34,5	287.988.900	38,5	310.988.500	41,5	372.000.000	46,9	387.000.000	50,3	365.000.000	2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.511.650.000		3.636.650.000		3.820.000.000		3.915.000.000		3.855.000.000	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	100	100	100	3.511.650.000	100	3.636.650.000	100	3.820.000.000	100	3.915.000.000	100	3.855.000.000	2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.349.326.610		1.494.959.409		1.632.685.199		1.795.953.718		1.314.640.205	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					503.568.008		553.924.809		609.317.290		670.249.019		501.679.317	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG dalam Perencanaan dan Anggaran Tahunan (%)	-	-	100	503.568.008	100	553.924.809	100	609.317.290	100	670.249.019	100	501.679.317	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					313.170.763		344.487.839		378.936.623		416.830.286		314.936.301	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	313.170.763	100	344.487.839	100	378.936.623	100	416.830.286	100	314.936.301	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
														2.08.2.14.0.00.10.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					167.083.942		183.792.336		202.171.570		222.388.727		129.308.232	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung Kesenjaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Keluarga yang terlayani oleh PUSPAGA (%)	100	100	100	167.083.942	100	183.792.336	100	202.171.570	100	222.388.727	100	129.308.232	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					13.063.272		14.369.599		15.806.559		17.387.215		19.125.937	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	100	13.063.272	100	14.369.599	100	15.806.559	100	17.387.215	100	19.125.937	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					99.593.222		109.552.544		120.507.799		132.558.578		98.578.803	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara	Capaian Skor Kabupaten Layak Anak (Angka)	603	-	700	99.593.222	750	109.552.544	800	120.507.799	850	132.558.578	900	98.578.803	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					252.847.403		288.832.282		305.945.358		336.539.893		251.011.615	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	-	100	100	252.847.403	100	288.832.282	100	305.945.358	100	336.539.893	100	251.011.615	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
														2.08.2.14.0.00.10.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.368.059.278		8.142.442.308		8.909.460.373		9.692.601.940		9.002.488.682	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					5.943.059.278		6.232.442.308		6.444.460.373		6.707.601.940		6.547.488.682	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,75	65	70	5.943.059.278	72	6.232.442.308	74	6.444.460.373	76	6.707.601.940	80,05	6.547.488.682	2.09.0.00.0.00.22. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	60	75	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	250.000.000	2.09.0.00.0.00.22. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN					935.000.000		1.290.000.000		1.710.000.000		2.130.000.000		1.800.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (Angka)	90,02	90,0 3	90,05	935.000.000	90,1	1.290.000.000	90,2	1.710.000.000	90,3	2.130.000.000	90,4	1.800.000.000	2.09.0.00.0.00.22. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					250.000.000		270.000.000		305.000.000		305.000.000		205.000.000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18,52	16,6 7	14,81	250.000.000	11,11	270.000.000	7,41	305.000.000	3,7	305.000.000	0	205.000.000	2.09.0.00.0.00.22. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					90.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	20	25	30	90.000.000	40	150.000.000	50	200.000.000	60	250.000.000	70	200.000.000	2.09.0.00.0.00.22. 0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125	
Meningkatnya penyelesaian konflik sengketa dan hak milik atas tanah pemerintah	Presentasi penyelesaian perkara pertanahan (%)	75	80	80	500.000.000	80	525.000.000	80	551.250.000	80	578.812.500	80	607.753.125	1.04.2.10.2.11.04. 0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					31.473.837.096		34.044.082.665		36.557.711.473		39.477.200.801		33.691.105.950	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					15.061.397.429		16.000.000.000		17.000.000.000		18.000.000.000		17.000.000.000	
Meningkatnya mutu pelayanan bidang lingkungan hidup	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,5	74,5	76	15.061.397.429	77,5	16.000.000.000	79	17.000.000.000	80,5	18.000.000.000	82	17.000.000.000	2.11.0.00.0.00.11. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN					304.951.466		200.000.000		500.000.000		300.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya Efektifitas kajian perencanaan lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan, Rencana dan/atau Program)	Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti (%)	-	70	75	304.951.466	80	200.000.000	85	500.000.000	90	300.000.000	100	200.000.000	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					255.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		650.000.000	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Titik Pantau yang Memenuhi Status Mutu Tercemar Ringan	-	55	60	255.000.000	65	600.000.000	70	700.000.000	75	800.000.000	80	650.000.000	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					8.741.488.201		9.370.353.702		9.317.327.241		9.870.411.795		6.163.680.321	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang dikelola (%)	-	65	70	2.000.000	75	450.000.000	80	250.000.000	85	300.000.000	90	250.000.000	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Luas RTH Pemerintah Daerah yang dikelola (%)	92	67,6 8	75,4	8.739.488.201	83,6	8.920.353.702	91,8	9.067.327.241	100	9.570.411.795	100	5.913.680.321	1.04.2.10.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					1.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		50.000.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota (%)	98	100	100	1.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN					202.000.000		160.000.000		171.000.000		192.000.000		160.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH) (%)	-	55	60	202.000.000	65	160.000.000	70	171.000.000	75	192.000.000	80	160.000.000	2.11.0.00.0.00.11. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		32.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan	-	55	60	1.000.000	65	30.000.000	70	35.000.000	75	40.000.000	80	32.000.000	2.11.0.00.0.00.11. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kompetensinya (%)													
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000		250.000.000		270.000.000		290.000.000		265.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat (%)	88,24	75	80	100.000.000	85	250.000.000	90	270.000.000	95	290.000.000	100	265.000.000	2.11.0.00.0.00.11. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					1.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		175.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	-	100	100	1.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	175.000.000	2.11.0.00.0.00.11. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.806.000.000		7.213.728.963		8.329.384.232		9.734.789.006		8.995.425.629	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola (%)	70,99	73	75	6.806.000.000	77	7.213.728.963	79	8.329.384.232	81	9.734.789.006	83	8.995.425.629	2.11.0.00.0.00.11. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.913.161.159		8.744.834.396		9.568.597.796		10.409.677.543		9.668.508.502	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					7.268.161.159		7.859.834.396		8.483.597.796		9.079.677.543		8.478.508.502	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel dan bersih pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	57,25	60,2 5	60,75	7.268.161.159	62,25	7.859.834.396	62,75	8.483.597.796	64,75	9.079.677.543	66	8.478.508.502	2.12.0.00.0.00.12. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					200.000.000		275.000.000		335.000.000		410.000.000		365.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	0	30	30	200.000.000	30	275.000.000	32	335.000.000	35	410.000.000	35	365.000.000	2.12.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	0	62	62		65		65		68		70		2.12.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					200.000.000		275.000.000		335.000.000		410.000.000		365.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	0	78	78	200.000.000	81	275.000.000	86	335.000.000	91	410.000.000	97	365.000.000	2.12.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	80	80		83		87		91		96		2.12.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	80	80		84		88		92		97		2.12.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	78	78		80		85		90		95		2.12.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					200.000.000		280.000.000		340.000.000		425.000.000		385.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	0	100	100	200.000.000	100	280.000.000	100	340.000.000	100	425.000.000	100	385.000.000	2.12.0.00.0.00.12. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					45.000.000		55.000.000		75.000.000		85.000.000		75.000.000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	0	100	100	45.000.000	100	55.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	75.000.000	2.12.0.00.0.00.12. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.832.869.979		8.656.104.613		9.471.509.668		10.304.055.368		9.570.406.626	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.547.084.183,0 8		6.261.350.607, 79		6.383.343.784, 6		6.742.767.702,1 2		6.648.167.597,2 3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOTA														
Terlaksananya Kegiatan Urusan Perangkat Daerah yang Efektif dan Akuntabel					0		0		0		0		0	2.13.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Terlaksananya Kegiatan Urusan Perangkat Daerah yang Efektif dan Akuntabel	Nilai SAKIP (Nilai)	61	61	61	5.547.084.183,08	61	6.261.350.607,79	61	6.383.343.784,6	81	6.742.767.702,12	81	6.648.167.597,23	2.13.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80,18	80	80		86		88		89		90		2.13.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100.000.000		110.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000	
Persentase Fasilitas Penataan Desa					0		0		0		0		0	
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	110.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	2.13.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN					186.000.000		186.000.000		186.000.000		186.000.000		186.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KERJA SAMA DESA														
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diwilayah yang lebih luas	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	100	100	100	186.000.000	100	186.000.000	100	186.000.000	100	186.000.000	100	186.000.000	2.13.0.00.0.00.13. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					802.199.011,92		1.055.000.000		1.357.000.000		1.585.000.000		1.135.000.000	
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dan Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi (%)	100	100	100	802.199.011,92	100	1.055.000.000	100	1.357.000.000	100	1.585.000.000	100	1.135.000.000	2.13.0.00.0.00.13. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
	Presentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.13. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN					1.197.586.784		1.043.754.005, 21		1.380.165.883, 4		1.608.787.665,8 8		1.401.589.028,7 7	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	1.197.586.784	100	1.043.754.005, 21	100	1.380.165.883, 4	100	1.608.787.665,8 8	100	1.401.589.028,7 7	2.13.0.00.0.00.13. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.13. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.552.661.566		11.657.927.722 ,1		12.759.203.903 ,01		13.860.982.435, 61		13.227.522.093, 41	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					9.797.046.494		10.776.751.143		11.854.426.258		12.886.715.605		12.220.430.324	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,5	-	82,5	9.797.046.494	82,5	10.776.751.143	82,5	11.854.426.258	82,5	12.886.715.605	82,5	12.220.430.324	2.08.2.14.0.00.10. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	90,25	-	91		91		91		91		91		2.08.2.14.0.00.10. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
														2.08.2.14.0.00.10. 0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					264.195.472		290.615.019		310.159.929		320.187.343		352.206.078	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun/Age Specific Fertility	18,4	14,9	12,6	264.195.472	11	290.615.019	9,9	310.159.929	9,1	320.187.343	8,6	352.206.078	2.08.2.14.0.00.10. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rate (ASFR 15-19) (%)													ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	47,8	48,9	49,9		50,9		51,9		52,9		53,9		2.08.2.14.0.00.10. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					356.432.881		392.076.169,1		431.283.786,01		474.412.164,61		457.251.636,41	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	-	-	75,34	356.432.881	76,81	392.076.169,1	78,29	431.283.786,01	79,77	474.412.164,61	81,25	457.251.636,41	2.08.2.14.0.00.10. 0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					134.986.719		198.485.391		163.333.930		179.667.323		197.634.055	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	58,7	59,5	60,3	134.986.719	61,1	198.485.391	61,8	163.333.930	62,6	179.667.323	63,3	197.634.055	2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)	90,8	91,3	91,7		92,1		92,5		92,9		93,3		2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahan Keluarga (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.10.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					17.950.887.644, 25		19.837.525.934		21.706.220.878		23.614.197.693		21.932.866.817	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					14.640.374.058, 25		15.824.091.684		16.893.141.622		18.423.557.604		17.603.199.555	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,75	28	63,75	14.640.374.058, 25	65,66	15.824.091.684	67,63	16.893.141.622	69,66	18.423.557.604	71,75	17.603.199.555	2.15.0.00.0.00.14. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.969.014.696		2.608.334.250		3.253.878.836		3.494.385.952		3.029.667.262	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	-	30	35	1.165.000.000	36	1.749.694.250	42	2.076.835.448	48	2.213.389.125	52	2.004.667.262	2.15.0.00.0.00.14. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Terselenggarany a pengelolaan lalu lintas yang	Persentase keterlaksanaan pengaturan lalu	72,5	75	75	415.130.947	77,5	498.640.000	82,25	586.952.888	84,75	562.336.946	87,75	405.000.000	2.15.0.00.0.00.14. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terencana dan efisien pada jaringan jalan kabupaten	lintas pada kegiatan dengan potensi dampak terhadap lalu lintas (%)													
Meningkatnya penerapan sistem manajemen keselamatan oleh perusahaan angkutan umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan)	0	0	1	88.024.750	1	95.000.000	1	200.000.000	2	217.580.000	4	200.000.000	2.15.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) dengan Akreditasi Minimal B	Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Unit)	1	1	1	300.858.999	1	265.000.000	1	390.090.500	1	501.079.881	1	420.000.000	2.15.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.341.498.890		1.405.100.000		1.559.200.420		1.696.254.137		1.300.000.000	
Meningkatnya kualitas Prasarana Transportasi Laut	Persentase pelabuhan dan dermaga dalam kondisi baik (%)	50	55	66,67	1.341.498.890	69,33	1.405.100.000	72	1.559.200.420	74,67	1.696.254.137	77,33	1.300.000.000	2.15.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI					15.935.331.859		17.621.241.047		19.278.818.834		20.987.875.279		19.308.486.439	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN INFORMATIKA														
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					9.650.700.000		9.710.880.000		10.150.000.000		10.875.200.000		11.210.500.000	
Meningkatnya layanan penunjang penyediaan informasi dan komunikasi pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,61	76,6 1	88,31	9.650.700.000	88,31	9.710.880.000	88,31	10.150.000.000	88,31	10.875.200.000	88,31	11.210.500.000	2.16.2.20.2.21.15. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	73	76		79		81		85		88		2.16.2.20.2.21.15. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					620.500.000		750.000.000		810.500.000		880.750.000		900.150.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	82,5	86,7	92,3	620.500.000	97,55	750.000.000	98	810.500.000	99	880.750.000	99,5	900.150.000	2.16.2.20.2.21.15. 0000 - DINAS KOMUNIKASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
komunikasi publik pemerintah daerah	terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)													DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.664.131.859		7.160.361.047		8.318.318.834		9.231.925.279		7.197.836.439	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	85	87	90	5.664.131.859	91	7.160.361.047	93,5	8.318.318.834	95	9.231.925.279	97,5	7.197.836.439	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.340.221.123		10.903.322.363		11.394.648.329		11.886.752.917		11.548.384.110	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.880.221.123		10.253.322.363		10.464.648.329		10.746.752.917		10.618.384.110	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,5	65	70	9.880.221.123	72,5	10.253.322.363	75	10.464.648.329	77,5	10.746.752.917	80	10.618.384.110	2.17.3.31.3.30.16.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					30.000.000		50.000.000		50.000.000		80.000.000		50.000.000	
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	30,4	32	35	30.000.000	40	50.000.000	45	50.000.000	50	80.000.000	55	50.000.000	2.17.3.31.3.30.16.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	5	5	5	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	200.000.000	2.17.3.31.3.30.16.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA					180.000.000		250.000.000		330.000.000		380.000.000		330.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya Keberdayaan UMKM	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%) (%)	50	50	55	180.000.000	60	250.000.000	65	330.000.000	70	380.000.000	75	330.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM					150.000.000		200.000.000		350.000.000		430.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Kapasitas UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya (%)	50	50	55	150.000.000	60	200.000.000	65	350.000.000	70	430.000.000	75	350.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.967.622.046		8.805.019.123		9.634.451.924		10.481.320.248		9.735.050.246	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					6.517.622.046		6.885.019.123		7.214.451.924		7.601.320.248		7.295.050.246	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	77,25	70	72	6.517.622.046	74	6.885.019.123	76	7.214.451.924	78	7.601.320.248	80	7.295.050.246	2.18.0.00.0.00.17. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL					350.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	145	70	75	350.000.000	80	400.000.000	85	500.000.000	90	600.000.000	95	500.000.000	2.18.0.00.0.00.17. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000		450.000.000		600.000.000		750.000.000		600.000.000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	18	10	10	250.000.000	10	450.000.000	10	600.000.000	10	750.000.000	10	600.000.000	2.18.0.00.0.00.17. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM					450.000.000		600.000.000		750.000.000		900.000.000		750.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	450.000.000	100	600.000.000	100	750.000.000	100	900.000.000	100	750.000.000	2.18.0.00.0.00.17. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000		360.000.000		450.000.000		500.000.000		450.000.000	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	300.000.000	100	360.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	450.000.000	2.18.0.00.0.00.17. 0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (jumlah data/jumlah data yang dimanfaatkan) (%)	-	85	90	100.000.000	95	110.000.000	95	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					20.474.730.328		26.311.467.611		33.492.489.632		40.311.654.003		40.049.377.152	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					6.960.554.708		8.665.031.781		10.807.714.889		12.852.040.696		12.196.581.612	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	-	1,34	6.960.554.708	1,61	8.665.031.781	1,93	10.807.714.889	2,32	12.852.040.696	2,78	12.196.581.612	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
														1.01.2.19.0.00.01.0001 - UPT Pemuda dan olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS					13.089.099.920		17.149.618.740		22.107.468.963		26.824.422.712		27.265.569.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	-	8,02	13.089.099.920	9,62	17.149.618.740	11,55	22.107.468.963	13,86	26.824.422.712	16,63	27.265.569.600	1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
														1.01.2.19.0.00.01. 0001 - UPT Pemuda dan olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN					425.075.700		496.817.090		577.305.780		635.190.595		587.225.940	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	-	0,33	425.075.700	0,5	496.817.090	1	577.305.780	1	635.190.595	2	587.225.940	1.01.2.19.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
														1.01.2.19.0.00.01. 0001 - UPT Pemuda dan olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					262.600.000		285.400.000		316.300.000		336.250.000		367.365.000	
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					12.500.000		14.750.000		15.800.000		16.100.000		16.490.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA														
Meningkatnya dukungan penyediaan dan penyelenggaraan statistik sektoral daerah					12.500.000		14.750.000		15.800.000		16.100.000		16.490.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL					250.100.000		270.650.000		300.500.000		320.150.000		350.875.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan data statistik sektoral daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,7	2,85	2,95	250.100.000	2,95	270.650.000	3,45	300.500.000	3,45	320.150.000	3,75	350.875.000	2.16.2.20.2.21.15. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					540.500.000		591.000.000		645.000.000		695.100.000		775.605.000	
2.21.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					40.500.000		41.000.000		42.000.000		43.900.000		44.005.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KO TA														
Meningkatnya kualitas layanan penunjang keamanan informasi Pemerintah daerah					40.500.000		41.000.000		42.000.000		43.900.000		44.005.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					500.000.000		550.000.000		603.000.000		651.200.000		731.600.000	
Meningkatnya keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	-	-	2,5	250.000.000	2,75	275.000.000	2,9	301.500.000	3,1	325.600.000	3,3	365.800.000	2.16.2.20.2.21.15. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah					250.000.000		275.000.000		301.500.000		325.600.000		365.800.000	2.16.2.20.2.21.15. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN					600.000.000		706.653.147		938.623.346		1.096.223.346		729.929.119	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG KEBUDAYAAN														
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN					440.000.000		523.229.695		678.199.749		794.199.749		469.505.522	
Terwujudnya Pengembangan Budaya Daerah	Persentase Budaya Daerah Yang Dikembangkan (Objek)	3	3	3	440.000.000	3	523.229.695	3	678.199.749	3	794.199.749	3	469.505.522	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL					50.000.000		52.632.578		84.632.578		90.632.578		84.632.578	
Meningkatnya Pengembangan Kesenian	Persentase Kesenian Daerah Yang Dikembangkan (%)	21	25	28	50.000.000	35	52.632.578	42	84.632.578	49	90.632.578	56	84.632.578	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					20.000.000		21.052.632		54.052.777		74.052.777		54.052.777	
Meningkatnya Pembinaan Sejarah Lokal	Pesentase Pembinaan Sejarah Lokal Yang Dikembangkan (%)	-	2	2	20.000.000	4	21.052.632	5	54.052.777	6	74.052.777	8	54.052.777	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN					40.000.000		57.105.664		67.105.664		80.705.664		67.105.664	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	25	25	40	40.000.000	50	57.105.664	75	67.105.664	100	80.705.664	100	67.105.664	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					50.000.000		52.632.578		54.632.578		56.632.578		54.632.578	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Budaya	Kunjungan Wisatawan ke Taman Budaya (Orang)	-	100	600	50.000.000	1.000	52.632.578	1.400	54.632.578	1.600	56.632.578	2.000	54.632.578	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.480.248.272		7.926.176.605		8.367.863.804		8.818.835.754		8.421.434.138	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					7.260.248.272		7.525.018.225		7.787.269.986		8.055.034.600		7.819.077.371	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,24	-	88,35	7.260.248.272	88,45	7.525.018.225	88,55	7.787.269.986	88,65	8.055.034.600	88,75	7.819.077.371	2.23.2.24.0.00.19. 0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
efektif, efisien dan berkualitas														
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	70,61	71,5	71,5		72,5		73		73,5		74		2.23.2.24.0.00.19. 0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					220.000.000		401.158.380		580.593.818		763.801.154		602.356.767	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan Binaan yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (%)	-	-	10	220.000.000	12	401.158.380	15	580.593.818	17	763.801.154	20	602.356.767	2.23.2.24.0.00.19. 0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					210.000.000		572.316.760		931.187.636		1.297.602.308		974.713.534	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					190.000.000		343.287.860		495.117.846		650.139.438		513.532.649	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Dinamis dan Statis (%)	0	0	55	190.000.000	65	343.287.860	70	495.117.846	70	650.139.438	75	513.532.649	2.23.2.24.0.00.19. 0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN					20.000.000		201.158.380		380.593.818		563.801.154		402.356.767	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENYELAMATAN ARSIP														
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	70	20.000.000	75	201.158.380	80	380.593.818	80	563.801.154	85	402.356.767	2.23.2.24.0.00.19. 0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					0		27.870.520		55.475.972		83.661.716		58.824.118	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	70	0	70	27.870.520	70	55.475.972	70	83.661.716	70	58.824.118	2.23.2.24.0.00.19. 0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.428.501.136		10.419.436.605		11.400.947.533		12.403.090.821		11.519.990.755	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					5.038.363.214		5.364.140.561		5.735.826.196		5.816.855.866		5.478.694.630	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Bersih	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01	70,05	71	5.038.363.214	71,03	5.364.140.561	72	5.735.826.196	72,05	5.816.855.866	73	5.478.694.630	3.25.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.652.815.381		1.804.990.206		1.633.302.380		2.063.170.701		1.905.211.197	
Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	6.607	6.667	6.739	1.652.815.381	6.873	1.804.990.206	7.011	1.633.302.380	7.151	2.063.170.701	7.294	1.905.211.197	3.25.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.215.228.999		2.563.590.523		3.244.518.868		3.525.685.030		3.141.917.107	
Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Budidaya Yang Ramah Lingkungan dan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	11.049	12.100	12.342	2.215.228.999	12.589	2.563.590.523	12.840	3.244.518.868	13.096	3.525.685.030	13.357	3.141.917.107	3.25.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.														
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					216.337.090		283.506.314		269.339.497		378.067.927		349.122.468	
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan, Perlindungan Sumber Daya Perikanan, Peningkatan Kualitas Produk Perikanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku (%)	10	10	13	216.337.090	15	283.506.314	18	269.339.497	20	378.067.927	25	349.122.468	3.25.0.00.0.00.20. 0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN					305.756.452		403.209.001		517.960.592		619.311.297		645.045.353	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
HASIL PERIKANAN														
Berkontribusi Terhadap Penurunan Angka Stunting dan Malnutrisi	Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Angka)	40,69	41,5	42,69	305.756.452	42,7	403.209.001	42,8	517.960.592	43	619.311.297	45	645.045.353	3.25.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.112.710.086		7.816.662.769		8.387.588.929		9.049.762.988		8.693.662.988	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.239.710.086		5.564.568.882		5.898.972.713		6.365.046.772		6.365.046.772	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	76	77	5.239.710.086	78	5.564.568.882	79	5.898.972.713	80	6.365.046.772	81	6.365.046.772	2.22.3.26.0.00.18.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					75.890.000		179.890.733		118.900.733		144.000.733		108.900.733	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Pariwisata Yang	12,5	18,75	18,75	75.890.000	18,75	179.890.733	20	118.900.733	20	144.000.733	25	108.900.733	2.22.3.26.0.00.18.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dikembangkan (%)													DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.780.000.000		1.948.189.945		2.210.557.367		2.370.557.367		2.060.557.367	
Meningkatnya Pemasaran Destinasi	Persentase Destinasi Wisata Yang Berhasil Dipasarkan (%)	-	12,5	18,75	1.780.000.000	20	1.948.189.945	25	2.210.557.367	25	2.370.557.367	30	2.060.557.367	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					7.110.000		113.486.693		146.031.600		152.031.600		146.031.600	
Meningkatnya Perlindungan HAKI Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (%)	-	1	1,5	7.110.000	2	113.486.693	2,5	146.031.600	2,5	152.031.600	3	146.031.600	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA					10.000.000		10.526.516		13.126.516		18.126.516		13.126.516	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	-	5	6	10.000.000	7	10.526.516	5	13.126.516	8	18.126.516	9	13.126.516	2.22.3.26.0.00.18. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					32.840.272.453		36.291.785.087		39.710.471.243		43.201.021.665		40.125.108.922	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					28.130.272.453		31.085.658.754		33.962.629.308		36.909.336.046		34.281.391.316	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Indeks)	64,75	65	67	28.130.272.453	69	31.085.658.754	70	33.962.629.308	71	36.909.336.046	71	34.281.391.316	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN					1.039.000.000		1.148.751.805		1.282.624.565		1.414.679.787		1.313.954.585	
Meningkatnya Sarana Pertanian, peternakan dan perkebunan	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	-25,4	5	10,25	1.039.000.000	15,76	1.148.751.805	21,55	1.282.624.565	27,63	1.414.679.787	34,01	1.313.954.585	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
yang berkualitas serta jumlah populasi dan produksi hasil ternak														
	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	25,64	0,25	0,5		0,75		1		1,26		1,51		3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Pternakan (Persentase)	18	41,9 3	48,27		54,72		57,72		59,52		62,05		3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	68,33	5	10,25		15,76		21,55		27,63		34,01		3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN					3.277.000.000		3.471.741.805		3.828.183.665		4.189.361.413		3.880.398.875	
Meningkatnya Prasarana Pertanian yang berkualitas	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan MenjadiÂ LP2B (Ha)	0	50	100	3.277.000.000	150	3.471.741.805	200	3.828.183.665	250	4.189.361.413	250	3.880.398.875	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN					15.000.000		16.575.000		18.066.750		19.602.425		18.206.730	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit)	0	1	2	15.000.000	3	16.575.000	3	18.066.750	3	19.602.425	3	18.206.730	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular StrategisÂ (PHMS) (Ekor)	9.967	9.96 7	9.967		9.967		9.967		9.967		9.967		3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN					173.000.000		191.165.000		208.369.850		226.081.288		209.984.299	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100	173.000.000	100	191.165.000	100	208.369.850	100	226.081.288	100	209.984.299	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					6.000.000		156.761.362		163.466.902		169.218.008		167.849.699	
Meningkatnya Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	100	100	100	6.000.000	100	156.761.362	100	163.466.902	100	169.218.008	100	167.849.699	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					200.000.000		221.131.361		247.130.203		272.742.698		253.323.418	
Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing Kelembagaan Ekonomi Usaha Tani	Persentase Peningkatan kapasitas Kelompok Tani (%)	-	-	5	200.000.000	5	221.131.361	5	247.130.203	5	272.742.698	30	253.323.418	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani (%)	-	10	10		10		10		10		10		3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Petani Milenial (%)	0	5	5		5		5		5		5		3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					900.000.000		1.360.000.000		1.740.000.000		2.255.000.000		1.620.000.000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					700.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000		1.700.000.000		1.150.000.000	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkondisi baik (%)	24	30	35	700.000.000	40	1.050.000.000	45	1.200.000.000	50	1.700.000.000	55	1.150.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					140.000.000		250.000.000		430.000.000		430.000.000		390.000.000	
Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting (%)	-	50	55	140.000.000	60	250.000.000	65	430.000.000	70	430.000.000	75	390.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI					60.000.000		60.000.000		110.000.000		125.000.000		80.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya kapasitas Alat UTTP yang memenuhi standard	Persentase Permohonan Standarisasi Alat UTTP yang ditindaklanjuti (%)	65	70	80	60.000.000	85	60.000.000	90	110.000.000	95	125.000.000	95	80.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					540.000.000		755.000.000		1.110.000.000		1.355.000.000		1.225.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					510.000.000		705.000.000		1.030.000.000		1.275.000.000		1.175.000.000	
Meningkatnya Sumber Daya Produksi Pelaku IKM yang Memadai	Persentase pelaku IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai (%)	1	1	2,5	510.000.000	5	705.000.000	7,5	1.030.000.000	10	1.275.000.000	12,5	1.175.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					30.000.000		50.000.000		80.000.000		80.000.000		50.000.000	
Meningkatnya Kualitas	Persentase Pelaku Usaha	5	10	15	30.000.000	20	50.000.000	25	80.000.000	30	80.000.000	35	50.000.000	2.17.3.31.3.30.16. 0000 - DINAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Informasi Industri	Industri yang terdaftar dalam SIINAS (%)													KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					58.000.000		65.000.000		75.000.000		85.400.000		90.450.000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					58.000.000		65.000.000		75.000.000		85.400.000		90.450.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Presentase potensi kawasan transmigrasi teridentifikasi (%)	30	45	50	58.000.000	55	65.000.000	60	75.000.000	63	85.400.000	65	90.450.000	2.07.3.32.0.00.09. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					66.645.879.042		73.650.360.928		80.588.224.928		87.671.929.901		81.429.688.491	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					48.283.294.559		53.357.868.817		58.369.497.703		63.433.318.382		59.027.335.422	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Panganggaran	100	100	100	48.283.294.559	100	53.357.868.817	100	58.369.497.703	100	63.433.318.382	100	59.027.335.422	4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)													
	Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti (%)	70	70	75		78		80		85		90		4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rekomendasi LHE Indeks Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti (%)	70	70	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,75	82,7 5	85		87		88		89		90		4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	70	70	75		78		80		85		90		4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,61	76,6 1	76,61		76,61		76,61		76,61		76,61		4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai SAKIP (Nilai)	82,75	84	85		86		87		88		89		4.01.0.00.0.00.27. 2701 - Bagian Organisasi
	Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang	90	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27. 2701 - Bagian Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanjuti (%)													
	Persentase Rekomendasi LHE Indeks Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti (%)	70	71	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.27.2701 - Bagian Organisasi
	Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti (%)	70	73	75		78		80		85		90		4.01.0.00.0.00.27.2701 - Bagian Organisasi
														4.01.0.00.0.00.27.2702 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,61	76,61	76,61		76,61		76,61		76,61		88,31		4.01.0.00.0.00.27.2703 - Bagian Umum
	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27.2704 - Bagian Administrasi Pembangunan
														4.01.0.00.0.00.27.2705 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN					16.053.960.508		17.741.231.757		19.425.292.215		21.191.227.871		19.585.831.820	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Yang Efektif (%)	95	95	95	1.299.062.400	95	1.435.593.858	95	1.571.865.504	95	1.714.762.368	95	1.584.856.128	4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Yang Efektif (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27. 2706 - Bagian Pemerintahan
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Presentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang efektif (%)	95	95	95	12.704.898.108	95	14.040.182.899	95	15.372.926.711	95	16.770.465.503	95	15.499.975.692	4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Presentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang efektif (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27. 2705 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Fasilitasi Tata kelola pemerintahan di Bidang Hukum Yang Efektif (%)	95	95	95	2.050.000.000	95	2.265.455.000	96	2.480.500.000	96	2.706.000.000	97	2.501.000.000	4.01.0.00.0.00.27. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi Tata kelola pemerintahan di Bidang Hukum Yang Efektif (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27.2708 - Bagian Hukum
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.308.623.975		2.551.260.354		2.793.435.010		3.047.383.648		2.816.521.249	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian yang efektif (%)	95	95	95	591.530.533	95	653.700.392	95	715.751.945	95	780.820.304	95	721.667.250	4.01.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian yang efektif (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27.2702 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi Pembangunan	Presentase pelaksanaan kebijakan Administrasi Pembangunan yang efektif (%)	95	95	95	639.558.805	95	706.776.435	95	773.866.154	95	844.217.623	95	780.261.742	4.01.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Presentase pelaksanaan kebijakan Administrasi	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.27.2704 - Bagian Administrasi Pembangunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan yang efektif (%)													
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Level)	3	3	3	1.077.534.637	3	1.190.783.527	3	1.303.816.911	4	1.422.345.721	4	1.314.592.257	4.01.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Level)	3	3	3		3		3		4		4		4.01.0.00.0.00.27.2709 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					52.849.271.298		58.403.729.711		63.905.361.050		69.522.642.286		64.572.630.155	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.084.251.522		37.562.541.935		39.987.273.274		45.182.023.510		43.044.088.379	
Pelayanan Kesekretariatan yang Berkualitas untuk Mendukung Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	65	76,61	76,61	34.084.251.522	76,61	37.562.541.935	76,61	39.987.273.274	76,61	45.182.023.510	76,61	43.044.088.379	4.02.0.00.0.00.29.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN					18.765.019.776		20.841.187.776		23.918.087.776		24.340.618.776		21.528.541.776	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Pelayanan kesekretariatan yang berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD	Persentase Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (%)	100	100	100	18.765.019.776	100	20.841.187.776	100	23.918.087.776	100	24.340.618.776	100	21.528.541.776	4.02.0.00.0.00.29. 0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	0	60	60		60		70		80		90		4.02.0.00.0.00.29. 0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					14.409.002.528		15.937.413.693		17.168.171.808		18.425.936.868		17.453.340.527	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					11.658.943.123		12.642.348.348		13.021.618.798		13.412.267.362		13.475.305.019	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Nilai)	76,5	77	80	11.658.943.123	80,05	12.642.348.348	80,1	13.021.618.798	80,15	13.412.267.362	80,2	13.475.305.019	5.01.5.05.0.00.24. 0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	78,977	80	81		82		83		84		85		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PENGEMBANGA N
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.771.159.912		2.098.275.903		2.566.479.748		3.043.390.561		2.487.370.788	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					1.771.159.912		2.098.275.903		2.566.479.748		3.043.390.561		2.487.370.788	5.01.5.05.0.00.24. 0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					978.899.493		1.196.789.442		1.580.073.262		1.970.278.945		1.490.664.720	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	978.899.493	100	1.196.789.442	100	1.580.073.262	100	1.970.278.945	100	1.490.664.720	5.01.5.05.0.00.24. 0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					303.582.618.305		335.489.151.48 9		367.092.229.55 9		399.359.636.538		370.925.230.416	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					83.244.445.784		91.993.087.969		100.658.386.82 0		109.506.259.022		100.591.089.778	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	91,75	91,7 6	91,76	70.401.950.180	91,76	77.800.846.077	91,76	85.129.235.742	91,76	92.612.095.564	91,76	84.873.068.747	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel dan Bersih pada Badan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	88	88,1 9	88,63	12.842.495.604	89,52	14.192.241.892	90,41	15.529.151.078	91,32	16.894.163.458	92,23	15.718.021.031	5.02.0.00.0.00.35. 0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84	84,6 7	85,09		85,94		86,8		87,67		88,55		5.02.0.00.0.00.35. 0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					218.112.360.709		241.035.335.50 7		263.740.046.30 9		286.922.796.380		267.575.229.338	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Penganggaran APBD Yang Tepat Waktu (Persentase)	82	100	100	1.763.045.169	100	1.948.815.820	100	2.133.006.159	100	2.320.497.400	100	2.320.497.400	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)	100	100	100	553.427.404	100	612.081.742	100	670.370.446	100	729.296.009	100	729.296.009	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Yang Tertib Dan Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	1.327.777.430	100	1.467.806.663	100	1.606.692.675	100	1.747.920.961	100	1.747.920.961	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah	Persentase Belanja Daerah (Persentase)	84	100	100	214.468.110.706	100	237.006.631.28 2	100	259.329.977.02 9	100	282.125.082.010	100	262.777.514.968	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					678.262.692		750.531.480		822.499.384		894.797.080		894.797.080	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Kontribusi Pemanfaatan BMD Berupa Tanah, Gedung, Dan Bangunan (Persentase)	100	100	100	678.262.692	100	750.531.480	100	822.499.384	100	894.797.080	100	894.797.080	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah Yang Dilaksanakan Secara Tertib Dan Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.547.549.120		1.710.196.533		1.871.297.046		2.035.784.056		1.864.114.220	
Meningkatnya upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah	Persentase peningkatan Wajib Pajak (WP) (%)	30	32	34	1.381.708.121	36	1.526.925.645	40	1.670.762.040	44	1.817.622.023	48	1.664.348.952	5.02.0.00.0.00.35.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase kepatuhan wajib pajak (%)	75	77	78		80		83		84		87		5.02.0.00.0.00.35.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Jumlah Inovasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Digital yang Diterapkan (Angka)	1	1	2	165.840.999	1	183.270.888	1	200.535.006	1	218.162.033	1	199.765.268	5.02.0.00.0.00.35.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					11.334.718.852		12.449.412.803		13.599.202.000		14.831.256.595		13.765.071.126	
5.03.01 - PROGRAM					8.784.718.852		9.274.412.803		9.739.202.000		10.381.256.595		9.905.071.126	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA														
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,61	76,6 1	76,61	8.784.718.852	88,31	9.274.412.803	88,31	9.739.202.000	88,31	10.381.256.595	88,31	9.905.071.126	5.03.5.04.0.00.26. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.550.000.000		3.175.000.000		3.860.000.000		4.450.000.000		3.860.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti assessment (%)	70	70	72	2.550.000.000	76	3.175.000.000	78	3.860.000.000	78	4.450.000.000	80	3.860.000.000	5.03.5.04.0.00.26. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	91	91	92		93		94		95		96		5.03.5.04.0.00.26. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Kasus Pelanggaran	70	70	80		82		85		88		90		5.03.5.04.0.00.26. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disiplin yang terselesaikan (%)													DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.650.000.000		1.900.000.000		2.101.925.489		2.250.000.000		2.100.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.650.000.000		1.900.000.000		2.101.925.489		2.250.000.000		2.100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Aparatur	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	70	70	74	1.650.000.000	78	1.900.000.000	80	2.101.925.489	82	2.250.000.000	84	2.100.000.000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	70	70	72		75		77		78		80		5.03.5.04.0.00.26.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.750.000.000		3.025.000.000		3.580.501.255		4.146.544.557		3.511.980.221	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN					100.000.000		110.000.000		130.200.046		150.783.438		127.708.372	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGA N DAERAH														
Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah					100.000.000		110.000.000		130.200.046		150.783.438		127.708.372	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					2.650.000.000		2.915.000.000		3.450.301.209		3.995.761.119		3.384.271.849	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi dalam pebangunan daerah					2.650.000.000		2.915.000.000		3.450.301.209		3.995.761.119		3.384.271.849	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					16.658.610.568		18.409.430.538		20.143.598.894,99		21.914.221.238		20.353.928.686	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					14.077.753.830,88		15.559.531.864,02		16.637.508.457,22		17.813.529.585,84		16.048.202.451,23	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya layanan pendukung yang akuntabel dan tepat waktu dalam mendukung penyelenggaraan urusan pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	91	92	92	14.077.753.830,88	92	15.559.531.864,02	92	16.637.508.457,22	93	17.813.529.585,84	93	16.048.202.451,23	6.01.0.00.0.00.23.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,89	80	80		80		80		80		80		6.01.0.00.0.00.23.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					1.925.249.000		2.161.510.550		2.783.282.907,6		3.341.743.745,48		3.508.830.932,75	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih	Nilai Rata-Rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	72,23	74	75	1.925.249.000	76	2.161.510.550	77	2.783.282.907,6	78	3.341.743.745,48	80	3.508.830.932,75	6.01.0.00.0.00.23.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (%)	91,5	90	90		90		90		90		90		6.01.0.00.0.00.23.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN
	Persentase Pengawasan	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.23.0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dengan Tujuan Tertentu (%)													INSPEKTORAT KABUPATEN
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat (%)	90,7	90	90		90		90		90		90		6.01.0.00.0.00.23.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					655.607.737,12		688.388.123,98		722.807.530,17		758.947.906,68		796.895.302,02	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Predikat Kapabilitas APIP (Level)	3.000	3.000	3.000	655.607.737,12	3.000	688.388.123,98	3.000	722.807.530,17	3.000	758.947.906,68	3.000	796.895.302,02	6.01.0.00.0.00.23.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN
7.01 - KECAMATAN					91.071.656.673		100.643.287.787		110.123.885.496		119.803.775.033		111.273.746.250	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.947.662.481		55.522.158.171		60.605.745.293		63.406.441.025		58.154.743.691	
Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,49	86,4	87,15	27.639.082.572	87,4	31.078.234.566	88,15	34.807.622.714	88,4	36.548.003.850	88,45	31.375.404.043	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN PENAJAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
perangkat Daerah														
														7.01.0.00.0.00.31. 3101 - Kelurahan Penajam
Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82,86	84	84	5.760.000.000	85	6.290.000.000	86	6.280.932.971	87	7.280.000.000	88	6.910.000.000	7.01.0.00.0.00.32. 0000 - KECAMATAN WARU
														7.01.0.00.0.00.32. 3201 - Kelurahan Waru
Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Umum Jasa Penunjang Urusan (%)	70	70	100	4.874.252.878	100	5.400.015.555	100	5.892.969.420	100	6.425.640.032	100	5.874.341.662	7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU
Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	83,68	85	87,5	9.674.327.031	88,5	12.753.908.050	90	13.624.220.188	92,5	13.152.797.143	95	13.994.997.986	7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU
														7.01.0.00.0.00.34. 3401 - Kelurahan Sepaku

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.893.373.788		14.923.593.656		16.431.753.022		18.550.165.975		18.174.453.398	
Terselenggarany a Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan (%)	84,45	87	88	11.401.385.788	90,41	13.111.593.656	92,03	14.422.753.022	93,88	16.586.165.975	95,97	16.094.453.398	7.01.0.00.0.00.31. 0000 - KECAMATAN PENAJAM
														7.01.0.00.0.00.31. 3101 - Kelurahan Penajam
Terselenggarany a Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan (%)	70	100	100	350.000.000	100	410.000.000	100	385.000.000	100	530.000.000	100	470.000.000	7.01.0.00.0.00.32. 0000 - KECAMATAN WARU
														7.01.0.00.0.00.32. 3201 - Kelurahan Waru
Terselenggarany a Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan (%)	1	1	100	92.000.000	100	102.000.000	100	114.000.000	100	124.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU
Terselenggarany a Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan (%)	-	100	100	1.049.988.000	100	1.300.000.000	100	1.510.000.000	100	1.310.000.000	100	1.510.000.000	7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														7.01.0.00.0.00.34. 3401 - Kelurahan Sepaku
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					25.220.051.603		27.165.505.932		28.851.146.023		31.124.899.096		31.281.157.769	
Terselenggarany a Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (%)	80	82	84	18.995.701.856	86	19.945.486.949	88	20.956.146.023	90	23.129.674.066	95	23.286.157.769	7.01.0.00.0.00.31. 0000 - KECAMATAN PENAJAM
														7.01.0.00.0.00.31. 3101 - Kelurahan Penajam
Terselenggarany a Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (%)	85	90	100	2.492.296.610	100	2.750.018.983	100	2.765.000.000	100	3.230.225.030	100	3.020.000.000	7.01.0.00.0.00.32. 0000 - KECAMATAN WARU
														7.01.0.00.0.00.32. 3201 - Kelurahan Waru
Terselenggarany a Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (%)	80	90	100	190.000.000	100	210.000.000	100	235.000.000	100	250.000.000	100	230.000.000	7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya a Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (%)	85	87,5	90	3.542.053.137	92,5	4.260.000.000	95	4.895.000.000	97,5	4.515.000.000	100	4.745.000.000	7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU
														7.01.0.00.0.00.34. 3401 - Kelurahan Sepaku
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					252.995.000		366.371.500		370.308.650		472.104.948		439.860.195	
Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	0	82	37.310.000	85	59.371.500	87	65.308.650	89	75.104.948	90	78.860.195	7.01.0.00.0.00.31. 0000 - KECAMATAN PENAJAM
														7.01.0.00.0.00.31. 3101 - Kelurahan Penajam
Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	0	100	50.000.000	100	80.000.000	100	55.000.000	100	140.000.000	100	110.000.000	7.01.0.00.0.00.32. 0000 - KECAMATAN WARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														7.01.0.00.0.00.32. 3201 - Kelurahan Waru
Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	70	70	100	70.000.000	100	77.000.000	100	85.000.000	100	92.000.000	100	86.000.000	7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU
Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	-	100	100	95.685.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU
														7.01.0.00.0.00.34. 3401 - Kelurahan Sepaku
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.282.170.675		1.845.747.989		2.996.235.388		4.758.547.157		2.151.724.515	
Terselenggaray a Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	420.000.000	100	450.000.000	100	495.000.000	100	530.000.000	100	500.000.000	7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
Terselenggaranya a Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	314.045.704	100	329.747.989	100	346.235.388	100	463.547.157	100	486.724.515	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN PENAJAM
														7.01.0.00.0.00.31.3101 - Kelurahan Penajam
Terselenggaranya a Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi (%)	70	70	100	550.000.000	100	591.000.000	100	1.630.000.000	100	780.000.000	100	640.000.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN WARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														7.01.0.00.0.00.32. 3201 - Kelurahan Waru
Terselenggaranya a Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	2.998.124.971	100	475.000.000	100	525.000.000	100	2.985.000.000	100	525.000.000	7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU
														7.01.0.00.0.00.34. 3401 - Kelurahan Sepaku
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					475.403.126		819.910.539		868.697.120		1.491.616.832		1.071.806.682	
Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu (%)	100	100	100	74.464.126	100	81.910.539	100	94.197.120	100	103.616.832	100	108.797.674	7.01.0.00.0.00.31. 0000 - KECAMATAN PENAJAM
	Persentase Jumlah Desa	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.31. 0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu (%)													KECAMATAN PENAJAM
														7.01.0.00.0.00.31. 3101 - Kelurahan Penajam
Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu (%)	100	100	100	110.000.000	100	170.000.000	100	144.500.000	100	290.000.000	100	228.009.008	7.01.0.00.0.00.32. 0000 - KECAMATAN WARU
	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.32. 0000 - KECAMATAN WARU
														7.01.0.00.0.00.32. 3201 - Kelurahan Waru
Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu (%)	100	100	100	165.000.000	100	183.000.000	100	205.000.000	100	223.000.000	100	310.000.000	7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU
	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.33. 0000 - KECAMATAN BABULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDDes Tepat Waktu (%)	-	87,5	90	125.939.000	92,5	385.000.000	95	425.000.000	97,5	875.000.000	100	425.000.000	7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU
	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDDes Tepat Waktu (%)	-	87,5	90		92,5		95		97,5		100		7.01.0.00.0.00.34. 0000 - KECAMATAN SEPAKU
														7.01.0.00.0.00.34. 3401 - Kelurahan Sepaku
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					10.770.592.683		11.902.581.973		13.023.805.195		14.168.597.672		13.159.793.518	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					6.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000	
Meningkatnya kinerja pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,61	76,6 1	88,31	6.050.000.000	88,31	6.050.000.000	88,31	6.050.000.000	88,31	6.050.000.000	88,31	6.050.000.000	8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Nilai SAKIP (Nilai)	61,5	61,5	65		68		75		78		80		8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.532.988.563		420.581.973		3.053.805.195		4.858.597.672		2.799.793.518	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	35	38,5	40,1	1.532.988.563	42,15	420.581.973	44,85	3.053.805.195	46,9	4.858.597.672	48,25	2.799.793.518	8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN					600.000.000		2.527.000.000		855.000.000		885.000.000		975.000.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	55	65	70	600.000.000	75	2.527.000.000	80	855.000.000	85	885.000.000	90	975.000.000	8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	75	80	80		85		85		85		90		8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					995.000.000		605.000.000		665.000.000		825.000.000		885.000.000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya bermasyarakat	Persentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	80	82	85	995.000.000	87,5	605.000.000	90	665.000.000	92	825.000.000	94,5	885.000.000	8.01.0.00.0.00.30. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.042.604.120		1.750.000.000		1.850.000.000		1.000.000.000		1.900.000.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.042.604.120	100	1.750.000.000	100	1.850.000.000	100	1.000.000.000	100	1.900.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					1.827.733.779.821,25		2.036.447.223.944,1		2.229.584.105.343		2.425.458.620.754,61		2.251.110.776.095,41	

Sumber: Olah data, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,00	75,49	75,99	76,48	76,97	77,46
2	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,460	0,454	0,444	0,434	0,424	0,414
3	LPE	Persen	7,00	7,6	8,2	8,8	9,4	10
4	Indeks Gini	Angka	0,256	0,251	0,247	0,242	0,238	0,233
5	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Persen	15,89	16,69	17,52	18,4	19,32	20,28
6	Nilai investasi	Angka	1.053.000.000.000,00	1.100.000.000.000,00	1.122.000.000.000,00	1.144.440.000.000,00	1.167.328.800.000,00	1.190.675.376.000,00
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,18-6,50	5,86-6,18	5,54-5,86	5,22-5,54	4,90-5,22	4,30-4,90

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00-2,02	1,90-2,00	1,96-1,98	1,94-1,96	1,92-1,94	1,90-1,92
9	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	88,61	89,11	89,61	90,11	90,61	91,21
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	7,65	7,70	7,75	7,80	7,85	7,90
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,31	76,48	76,65	76,82	76,99	77,16
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	123,81	115,81	107,81	99,81	91,81	83,81
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,80	69,98	70,04	70,11	70,32	70,45
14	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,76	3,77	3,78	3,80	3,82	3,85
15	Indeks Pemdi	Angka	2,90*	1,49	1,49	1,70	1,90	1,90

*Target Tahun 2025 masih menggunakan nilai Indeks SPBE

Sumber: Olah, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Risiko Bencana	Angka	131.81	123.81	115.81	107.81	99.81	91.81	83.81	
2	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	%	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	
3	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	%	0.18	0.23	0.29	0.22	0.27	0.20	0.24	
4	Persentase desa mandiri (%)	%	26.67	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2.75	3.10	3.14	3.18	3.22	3.26	3.30	
6	Persentase penduduk yang menggunakan internet	%	50.06	55.82	61.14	68.45	70.02	73.11	75.26	
7	Indeks pembangunan Kebudayaan	Angka	-	13	15	17	19	21	23	
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	%	-	0.0016	0.0019	0.0023	0.0027	0.0031	0.0035	
9	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0.0359	0.0144	0.0161	0.0162	0.0164	0.0203	0.0252	
10	Rasio kewirausahaan daerah (%)	%	-	1.93	2.15	2.37	2.59	2.81	3.03	
11	PDRB Per Kapita	Angka	87.14	93.93	95.93	97.97	100.04	102.13	104.24	
12	Jumlah usaha industri ekonomi kreatif (%)	%	16.39	19.94	19.39	18.81	18.19	17.55	16.89	
13	Total Kredit/PDRB	(%)	0.022	0.024	0.027	0.029	0.032	0.036	0.039	
14	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	%	0.33	0.43	0.70	0.96	1.23	1.50	1.77	
15	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	%	0.33	0.43	0.70	0.96	1.23	1.50	1.77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
16	Tingkat inflasi (%)	%	1-1.57	1-2.5	1-2.40	1-2.43	1-2.45	1-2.4	0-2.51	
17	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	Angka	12.26	15.89	16.69	17.52	18.40	19.32	20.28	
18	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	%	16.26	18.39	20.83	23.26	25.70	28.13	30.57	
19	Proporsi PDRB sektor keuangan terhadap PDRB ADHB (%)	%	0.54	0.50	0.42	0.34	0.26	0.18	0.10	
20	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2.72	2.74	3.04	3.35	3.65	3.96	4.24	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	64.64	65.73	66.82	67.91	69.00	70.09	71.18	
22	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	96.88	96.87	97.16	97.46	97.76	98.06	98.36	
23	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	%	96.17	97.33	96.58	95.81	95.03	94.23	93.42	
24	Disparitas harga	*	-0.07	-0.12	-0.14	-0.16	-0.18	-0.20	-0.22	
25	Ketersediaan pangan per kapita (%)	%	86.51	86.51	86.50	86.50	86.49	86.49	86.48	
26	Indeks Inovasi Daerah	Angka	37,61	40	41	42	43	44	45	
27	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	Angka	38	42	47	52	57	62	67	
28	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	%	-25.57	2.9	3.48	4.07	4.66	5.25	5.84	
29	Produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta Per Tahun	-	92.01	94.13	96.06	97.78	99.32	100.69	
30	Jumlah tamu wisatawan	Orang	479438	648270	781094	913917	1046740	1179564	1312387	
31	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.16	4.22	4.25	4.28	4.32	4.35	4.37	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
32	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0.37	0.40	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	
33.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	8,2	7,83	7,45	7,07	6,69	6,32	5,94	
II ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	71.1	76.31	76.48	76.65	76.82	76.99	77.16	
2	Persentase rumah tangga sanitasi layak	%	95.57	95.71	95.74	95.77	95.80	95.83	95.86	
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0.09	51.72	51.75	51.78	51.81	51.84	51.87	
4	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%	88.37	88.43	88.49	88.55	88.61	88.67	88.73	
5	Persentase penurunan emisi GRK Tahunan (%)	%	-	-1.24	17.34	20.46	23.62	25.08	28.57	
6	Angka Kematian Ibu (per 1.000 kelahiran hidup)	Angka	1.90	1.50	1.30	1.10	0.87	0.85	0.75	
7	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% Rumah Tangga)	%	1	5	10	15	20	25	30	
8	Persentase penurunan emisi GRK kumulatif (%)	%	-	5.44	6.21	7.08	8.05	9.00	10.05	
9	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Angka	-	7.5	7.7	7.75	7.8	7.85	7.9	
III ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.470	0.460	0.454	0.444	0.434	0.424	0.414	
2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	-	8.59	8.61	8.63	8.65	8.69	8.72	
3	Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	12.87	12.92	12.94	13.02	13.11	13.17	13.25	
4	Rapor Pendidikan	%	-	74.09	75	77	79	81	83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72.04	74.51	74.98	75.07	75.13	75.19	75.22	
6	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Angka	-	0	0	0	0	0	0	
7	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6.69	6,18-6,50	5,86-6,18	5,54-5,86	5,22-5,54	4,90-5,22	4,30-4,90	
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	2.05	2.04	2.03	2.01	1.98	1.96	1.93	
9	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	80.03	82.58	87.51	92.44	97.37	100	100	
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,2	67,4	68,5	69,6	70,6	71,5	72,5	
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	78.19	79.02	79.54	80.13	80.68	81.33	81.50	
12	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	-	8.70	9.17	9.63	10.10	10.56	11.03	
13	Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan (%)	%	23.83	25.38	26.93	28.48	30.03	31.58	33.13	
14	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	15.21	17.50	18.25	19.50	20.00	21.00	22.00	
15	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Angka	24.98	43.56	45.88	48.20	50.53	52.85	55.17	
16	Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (%)	%	15.4	16.21	18.88	19.73	21.89	23.11	25.65	
17	Persentase jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (%)	%	-	12.80	13.76	14.82	15.91	16.62	17.85	
18	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	%	81.15	82.10	82.34	83.45	84.71	85.23	86.11	
19	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	32	29.52	24.42	21.97	18.72	16.37	14.02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	66.99	75.25	78.15	81.05	83.95	86.85	89.75	
21	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	96.44	99.89	99.93	99.99	100	100	100	
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	56.79	52.38	52.86	53.34	53.81	54.29	54.77	
23	Kapasitas air baku (m3/detik)	m³/detik	390	394	396	398	400	402	404	
24	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	%	95	95	95	97	97	98	-	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3.75	3.76	3.77	3.78	3.80	3.82	3.85	
2	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Angka	82	83	86	87	90	92	94	
3	Indeks Pemdi	Angka	2.87	2.90*	1,49	1,49	1,70	1,90	1,90	
4	Jumlah kejadian tindak kriminal dan kejahatan	Angka	341	212	208	203	199	194	189	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	76.61	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31	
6	Persentase Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	%	3	3	3	3	3	3	3	
7	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	62.19	64.00	65.50	66.80	67.90	69.80	70.70	
8	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	0	60	60	60	70	80	90	
9	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Olah data, 2025

Tabel 4. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Indeks SPM Bidang Pendidikan		73,61	74,09	75,60	75,70	75,80	75,90	76,00	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2	Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (%)	Persen	-	-	80.73	81.25	81.50	82.00	82.50	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Persen	74.82	-	74.82	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
4	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	Rasio	83.08	-	87.00	90.00	92.00	95.00	100	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
5	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	Persen	72	-	74	76	78	80	82	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN KESEHATAN									

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Kematian Ibu	Ibu	5	5	5	4	3	2	1	Dinas Kesehatan
2	Jumlah Kematian Balita	Balita	2	6	5	4	3	2	1	Dinas Kesehatan
3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%		5	7	9	11	13	15	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Imunisasi Lengkap	%	59	85	85	90	93	95	96	Dinas Kesehatan
6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	70.96	86	86.5	87	88	89	90	Dinas Kesehatan
7	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	%	86.4	86.4	86.5	87	87.3	88	88.3	Dinas Kesehatan
8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	%	45.16	45	45	45	54	54	54	Dinas Kesehatan
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	%	85	85	85	90	95	95	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan	%	25	25	30	40	50	60	70	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang Diberdayakan (Persentase)									
11	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	%	85	85	85	90	95	95	100	Dinas Kesehatan
12	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Angka)	%	84:20:00	84:20:00	84:20:00	84:20:00	84:20:00	84:20:00	84:20:00	Dinas Kesehatan
13	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	%	50	50	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Presentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	91	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	0	50	50	60	65	70	75	Dinas Kesehatan
16	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persen	79.52	80.12	100	100	100	100	100	RSUD RAPB
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase infrastruktur dasar wilayah yang berada dalam kondisi Layak	%	-	-	46,21%	47,51%	48,71%	50,01%	51,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	34,89%	42,24%	45,50%	52,49%	59,28%	65,94%	72,49%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase Saluran Irigasi Kondisi Baik	%	25,49 %	30,85 %	34,90 %	37,98 %	40,43 %	43,51 %	46,58 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase Saluran Pembuang Kondisi Baik	%	13,47 %	19,15 %	20,15 %	20,98 %	21,81 %	22,64 %	23,47 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	40,66 %	41,93%	42,27%	42,61%	42,95%	43,29%	43,63%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan Rumah Tangga	%	24,44%	25,38%	26,93 %	28,48%	30,03%	31,58%	33,13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase rumah tangga sanitasi aman	%	51,72%	51,72%	51,72%	51,72%	51,72%	51,72%	51,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase rumah tangga sanitasi layak	%	95.57%	95.71%	95.74%	95.77%	95.80%	95.83%	95.86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Tingkat Kemantapan Jalan	%	36 %	38,73 %	40,67 %	42,61 %	44,55 %	46,49 %	48,42 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	44,20 %	59,32 %	65,12 %	69,47 %	74,55 %	79,62 %	84,69 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun	%	32.86%	34.29%	37.14%	40.00%	42.86%	45.71%	48.57%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF	%	20.97%	32.66%	36.11%	38.79%	40.93%	42.67%	44.13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skor	55,81	60,04	65,12	70,19	75,26	80,34	85,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	96,88	96,87	97,16	97,46	97,76	98,06	98,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Penyediaan rumah layak huni	Unit	1.666	300	300	300	300	330	331	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang	%	13,40%	11,03%	43,94%	67,50%	85%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Memperoleh Rumah Layak Huni									
4	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	13,40%	11,03%	43,94%	67,50%	85%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	6,14%	8,29%	51,83%	66,78%	83,39%	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Presentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	23,05%	8,19%	26,52%	44,85%	63,18%	81,51%	100,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Presentase Penyediaan Infrastruktur PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan dan Lingkungan Permukiman	%	46,00%	20,00%	40%	60%	80%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	URUSAN KETENTRAMAN,									

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum Yang Dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi dan Pamong Praja
2	Jumlah personel Linmas yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	84	100	120	130	150	180	200	Satuan Polisi dan Pamong Praja
3	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0.43	0.44	0.49	0.54	0.59	0.64	0.69	Indikator Tujua
4	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub-urusan bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran
5	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	Persentase	96%	96%	97%	98%	98%	98%	100%	Indikator Program
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	Persentase	96%	96%	97%	98%	98%	98%	100%	Indikator Program
7	capaian tingkat waktu tanggap	menit	11.4	11.35	11.3	11.2	11.1	11	11	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	response time di wilayah manajemen kebakaran (WMK)									
8	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Nilai	94.56	94.58	94.6	94.7	94.8	94.9	95	Dinas Kesehatan
9	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	URUSAN SOSIAL									
1	Presentase masyarakat miskin dan kelompok rentan yang terlayani dalam hal kesejahteraan sosial	%	92	93	95%	95%	97%	97%	98%	Dinas Sosial
2	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	%	92	93	95%	95%	97%	97%	98%	Dinas Sosial
3	Presentase warga miskin dan kelompok rentan yang mendapat bantuan	%	90	93	95%	95%	97%	97%	98%	Dinas Sosial
4	Presentase anak terlantar yang	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya									
5	Presentase Lansia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Presentase disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Presentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Presentase Korban Bencana Alam, Sosial, atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
B.	URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	-	-	59,22	59,27	59,32	59,54	59,64	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Indeks	0,353	0,355	0,357	0,359	0,361	0,363	0,365	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,428	1,43	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,340	0,342	0,344	0,346	0,348	0,350	0,352	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase prestasi olahraga tingkat daerah dan Nasional	Persen	5,75	6,09	6,44	6,77	7,11	7,45	7,79	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Wirausaha Pemuda (Persentase)	Persentase	-	-	1,34	1,61	1,93	2,32	2,78	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN PEMBERDAYAAN									

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	N PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender	Angka	87,23	87,25	87,27	87,30	87,32	87,25	87,35	DP3AP2KB
2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan PUG dalam perencanaan dan anggaran tahunan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
3	Persentase Anggaran Responsif Gender	Persen	15,21	17,5	18,25	19,5	20	21	22	DP3AP2KB
4	Capaian Skor Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	603	650	650	700	700	700	700	DP3AP2KB
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	-	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
6	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan layanan komprehensif									
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,09	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	DP3AP2KB
2	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persen	0	0	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	DP3AP2KB
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	0	0	75,34	76,81	78,29	79,77	81,25	DP3AP2KB
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	15,21	17,5	18,25	19,5	20	21	22	DP3AP2KB
5	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Persen	0	0	91,7	92,1	92,5	92,9	93,3	DP3AP2KB
6	Indeks Lansia Berdaya	Persen	0	0	60,3	61,1	61,8	62,6	63,3	DP3AP2KB
7	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern	Persen	0	51,8	51,9	52	52,1	52,2	52,3	DP3AP2KB

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Contraceptive (mCPR)									
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	0	8,5	8	7,5	7	6,5	6	DP3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase layanan adminduk yang dapat diakses secara online	Persen	79,17%		83,33%	87,50%	87,50%	91,67%	93,83%	Disdukcapil
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	0	30	30	30	32	35	35	Disdukcapil
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	0	62	62	65	65	68	70	Disdukcapil
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	0	78	78	81	86	91	97	Disdukcapil
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	0	78	78	80	85	90	95	Disdukcapil
6	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
	URUSAN TENAGA KERJA									

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73.10	73.5	74	75	76	77	78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Presentase Angkatan Kerja yang Mendapat pelatihan	%	27	29	31	33	34	35	38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	%	60.00	60.5	61%	62.00	62.00	62.00	62.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100.00	100	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Cakupan Tenaga kerja yang Memiliki Jaminan Sosial ketenaga Kerjaan	%	57.00	60	70%	75.00	80.00	85.00	90.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PANGAN										
1	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Angka	91,83	92,00	92,33	92,83	93,33	93,83	94,33	Dinas Ketahanan Pangan
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	30,00%	50,00%	42,50%	55,00%	67,50%	80,00%	92,50%	Dinas Ketahanan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Angka	90,02	87,00	90,05	90,10	90,20	90,30	90,40	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PERTANAHAN										
1	Presentase Jumlah Inventarisasi dan	%	57	60	63	66	70	73	76	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sertifikasi Aset Lahan Pemda									
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	72,1	72,5	73	74	75	76	77	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	49,47	67,24	67,44	67,64	67,84	68,04	68,24	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,11	86,6	87,1	87,6	88,1	88,6	89,1	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,26	84,77	84,97	85,17	85,37	85,57	85,77	Dinas Lingkungan Hidup
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,41	76,23	76,3	76,37	76,44	76,51	76,58	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
1	Persentase Desa Mandiri	%	26,67	56,67	56,67	56,67	60	60	65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel	%	75	78	80	85	90	95	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Peningkatan BUMDES yang aktif dan produktif	%	67	68	70	73	83	90	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PERHUBUNGAN										
1	Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai	81,30	82,62	83,97	85,33	86,72	88,13	89,57	Dinas Perhubungan
2	Indeks Pelayanan Publik Perhubungan	Nilai	72,00	74,15	76,37	78,65	81,00	83,42	85,91	Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	%	-	80	35	36	42	48	52	Dinas Perhubungan
4	Persentase pelabuhan dan dermaga dalam kondisi baik	%	84,68	55	66,67	69,33	72	74,67	77,33	Dinas Perhubungan
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI									
1	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah									
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	2	3	5	7	10	12	15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pertumbuhan Wirausaha	%	2	2	3	4	5	6	7	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Koperasi Aktif	%	30,4	32	35	40	45	50	55	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase Usaha Mikro Binaan yang meningkat omzetnya	%	50	50	55	60	65	70	75	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	%	50	50	55	60	65	70	75	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PENANAMAN MODAL										
1	Persentase Kenaikan Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	%	126,3	5	5	5	5	5	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	145	70	75	80	85	90	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	18	10	10	10	10	10	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN STATISTIK										
1	Indeks Pembangunan Statistik	%	2.7	2.7	3.15	3.15	3.3	3.3	3.4	Dinas Kominfo
URUSAN PERSANDIAN										
1	Indeks Keamanan Informasi	%	-	540	548	550	555	560	570	Dinas Kominfo
URUSAN KEBUDAYAAN										
1	Budaya daerah yang dikembangkan	Objek	3 Objek	3	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase Kesenian Daerah	%	21	25	28	35	42	49	56	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang dikembangkan									
3	Pesentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dikembangkan	%	N/A	2	2	4	5	6	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25	25	40	50	75	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Kunjungan wisatawan ke Taman Budaya	orang	N/A	100	600	1	1,4	1,6	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PERPUSTAKAAN										
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai		79.23	79.5	80	80.25	80.5	81	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai		66.41	67	68	69	70	72	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Persentase Peningkatan Literasi Masyarakat dan Minat Baca	Persentase		0	10	12	15	17	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Persentase Perpustakaan Binaan yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (%)	Persentase	-	-	10	12	15	17	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN KEARSIPAN										

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai		22.53	67	68	69	70	75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori minimal baik	Persentase		0	67	68	69	70	75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Dinamis dan Statis (%)	Persentase	0	0	55	65	70	70	75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	Persentase	0	0	70	75	80	80	85	Dinas Perpustakaan dan Arsip
5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	Persentase	0	0	70	70	70	70	70	Dinas Perpustakaan dan Arsip
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PERIKANAN									
1	Persentase Peningkatan	Persen (%)	1,4	2	2	2	2	2%	2%	Dinas Perikanan

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Produksi Perikanan Tangkap									
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	10%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Dinas Perikanan
3	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka (Kg/ Kapita/ Tahun)	40,69	41,50	42,69	42,7	42,8	43	45	Dinas Perikanan
URUSAN PARIWISATA										
1	Kunjungan Wisatawan	orang	497.438	507.386	517.535	527.885	538.443	549.212	560.195	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	12,5	18,75	18,75	18,75	20	20	25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase destinasi wisata yang berhasil dipasarkan	%	N/A	12,5	18,75	20	25	25	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	N/A	1	1,5	2	2,5	2,5	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	N/A	5	6	7	5	8	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	68,33	5,00	10,25	15,76	21,55	27,63	34,01	Dinas Pertanian
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	-25,40	5,00	10,25	15,76	21,55	27,63	34,01	Dinas Pertanian
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	18,21	41,93	48,27	54,72	57,72	59,52	62,05	Dinas Pertanian
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	25,64	0,25	0,50	0,75	1,00	1,26	1,51	Dinas Pertanian
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Hektar	0	50	100	150	200	250	250	Dinas Pertanian
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Ekor	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967	Dinas Pertanian
7	Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Unit	0	1	2	3	3	3	3	Dinas Pertanian
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian
10	Persentase Peningkatan kapasitas Kelompok Tani	%	0	30	30	30	30	30	30	Dinas Pertanian
11	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani	%	0	10	10	10	10	10	10	Dinas Pertanian
12	Persentase Petani Milenial	%	0	4	4	4	4	4	4	Dinas Pertanian
URUSAN PERDAGANGAN										
1	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkategori baik	%	24	30	35	40	45	50	55	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting	%	N/A	50	55	60	65	70	75	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PERINDUSTRIAN										
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	89	90	91	91	92	92	93	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase pelaku IKM yang	%	1	1	2,5	5	7,5	10	12.5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	memiliki sumber daya produksi yang memadai									
D.	URUSAN TRANSMIGRASI									
1	Presentasi Potensi Kawasan Transmigrasi Teridentifikasi	%	30.00	45	50%	55.00	60.00	63.00	65.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PENUNJANG URUSAN									
	URUSAN KEUANGAN									
1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	82	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Serapan Belanja Daerah/ Indeks Penyerapan Anggaran	%	84	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Nilai	-	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	88,14	98,73	14	12	13	13	15	Badan Pendapatan Daerah
6	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	589,6	11,73	29	10	10	10	10	Badan Pendapatan Daerah
7	Persentase peningkatan Wajib Pajak (WP)	%	30	32	34	36	40	44	48	Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase kepatuhan wajib pajak	%	75	77	78	80	83	84	87	Badan Pendapatan Daerah
	URUSAN PENGAWASAN									
1	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	AA (91)	AA(91)	AA(92)	AA(92)	AA(92)	AA(93)	AA(93)	Inspektorat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah	Nilai	B (76,89)	B (80)	B (80)	B (80)	B (80)	B (80)	B (80)	Inspektorat Daerah
3	Nilai Rata - rata AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,23	74	75	76	77	78	80	Inspektorat Daerah
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Persen	91.50	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Inspektorat Daerah
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	Persen	90.70	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Inspektorat Daerah
6	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Daerah
7	Predikat Kapabilitas APIP	Predikat	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Inspektorat Daerah
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
1	IRB Tematik	Indeks	9.61	9.76	9.85	9.88	9.91	10.01	10.07	Sekretariat Daerah
2	IRB General	Indeks	59.92	60.04	60.13	60.16	60.2	60.31	60.38	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	28,5 (Sedang)	29 (Sedang)	29,5 (Sedang)	30 (Sedang)	30,5 (Sedang)	Sekretariat Daerah
4	Nilai LPPD	Nilai	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.95	2.95	Sekretariat Daerah
5	Persentase Penerapan SPM	Persen	92.51	93	93	94	95	100	100	Sekretariat Daerah
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87.96	88	88	88	88	88	88	Sekretariat Daerah
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	-	-	50,00 (Cukup)	55,00 (Cukup)	65,00 (Baik)	67,00 (Baik)	69,00 (Baik)	Sekretariat Daerah
8	Nilai AKIP Kabupaten	Indeks	62.19 (B)	62,5 (B)	62.74 (B)	63.20 (B)	63.66 (B)	64.13 (B)	64.59 (B)	Sekretariat Daerah
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks	83,57 (Baik)	83,75 (Baik)	84 (Baik)	84,5 (Baik)	85 (Baik)	85,5 (Baik)	86 (Baik)	Sekretariat Daerah
URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	Kecamatan Babulu
2	Nilai AKIP	Indeks								Kecamatan Babulu
URUSAN KEWILAYAHAN										
1	Nilai AKIP	Nilai	57.25	68.50	70.50	75.00	80.50	85.00	90.50	Kecamatan Sepaku
2	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	83.68	85.00	87.50	88.50	90.00	92.50	95.00	Kecamatan Sepaku
URUSAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH										
1	Persentase tindak lanjut hasil penegakan Perda/Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									

No	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan (Perangkat Daerah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	BAKESBANGPOL
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	65	76.61	76.61	76.61	76.61	76.61	76.61	Sekretariat Dewan

Sumber: Olah data, 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Penajam Paser Utara.

Sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 ini juga mengidentifikasi permasalahan utama dan isu-isu strategis yang menjadi tantangan serta peluang dalam pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang mendesak, berdampak luas, serta memerlukan respons kebijakan yang tepat dan cepat agar dapat ditangani secara efektif. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, isu-isu tersebut tidak hanya dianalisis secara internal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, serta prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode tahun 2025-2029. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian sekaligus penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Pemerintah Kabupaten PPU, bersama DPRD, secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi program prioritas daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil penjaringan aspirasi pada tahap forum konsultasi publik, dan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan;
4. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya;
5. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029;

6. Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
7. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
9. RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
10. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
11. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
12. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, dan melakukan

sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Provinsi dan masyarakat sipil;

13. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pelaku usaha daerah yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;
15. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, meliputi antara lain :
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program, dan program unggulan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJMD secara periodik;
 - b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
16. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun;
17. Pada saat Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 ditetapkan, maka Peraturan Bupati Nomor 11

Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
(dinyatakan tidak berlaku).

Dengan adanya dokumen perencanaan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Selain itu, RPJMD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang solid bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara. Aamiin.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

